



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman (BP3KP) Sulawesi I

Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman



KATA PENGANTAR

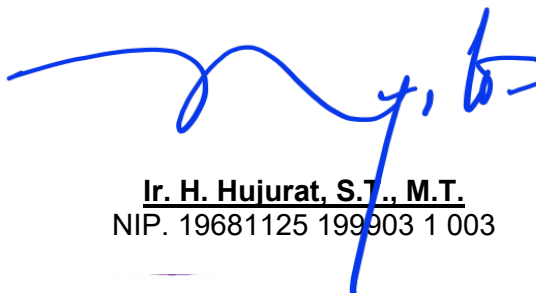
Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran entitas kinerja dalam pengelolaan sumber daya. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PKP RI No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 3 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 ini bukan sekadar untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri tersebut di atas, namun merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target Tahun Anggaran 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I 2025 - 2029.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan laporan ini. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu mohon kiranya dapat diberikan masukan guna penyempurnaannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Manado, 12 Januari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi I



Ir. H. Hujurat, S.T., M.T.
NIP. 19681125 199903 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode tahun 2025-2029, dimana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam rangka mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki tujuan secara umum, yaitu “terlaksananya penyediaan perumahan dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”. Sebagai upaya pencapaian tersebut, maka disusun sasaran sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan keterpaduan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
2. Melaksanakan pembangunan rumah khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus;
3. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya bagi MBR;
4. Melaksanakan pembangunan rumah susun; dan
5. Melaksanakan pembangunan fasilitasi PSU bagi MBR dan pembinaan pelaku pembangunan rumah umum dan komersial.

B. Isu Strategis

Dalam pelaksanaannya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tentu menghadapi berbagai dinamika dan beberapa tantangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Oleh karena itu, LAKIP ini juga menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, serta langkah-langkah perbaikan yang direncanakan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Secara keseluruhan seluruh DIPA yang diampu oleh BP3KP Sulawesi I sudah dilaksanakan secara optimal, namun ada sedikit kendala yang dihadapi dalam pencapaian

target kinerja, berikut adalah gambaran umum permasalahan serta tindak lanjut dari program yang diampu oleh Balai P3KP Sulawesi I:

1. DIPA Sekretariat Jenderal:

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Sekretariat Jenderal sudah berjalan dengan optimal didukung dengan adanya perencanaan penyerapan anggaran setelah SK Pejabat Perbendaharaan terbit.

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman:

- a. Pemahaman calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan maupun pelaksanaan.
- b. Proses pelaksanaan fisik kegiatan swakelola yang terdampak akibat keterbatasan waktu penggunaan anggaran yang baru dapat direalisasikan pada akhir tahun.

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan:

- a. Pemahaman calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan maupun pelaksanaan.
- b. Terdapat permasalahan pribadi dari penerima bantuan sehingga target tidak tercapai.

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan:

- a. Pemahaman calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan maupun pelaksanaan.
- b. Belum optimalnya penyerapan anggaran

5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko:

- a. Kurangnya kolaborasi dalam penentuan risiko kegiatan Balai dan Satker.
- b. Kurangnya pegawai yang mempunyai sertifikasi berbasis Manajemen Risiko.
- c. Banyaknya pegawai baru di lingkungan Balai dan Satker yang masih belum memahami konsep Manajemen Risiko.
- d. Terpisahnya Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP sehingga dasar penetapan aturan Manajemen Risiko masih belum maksimal.
- e. Dokumentasi untuk keperluan Lembar Kerja Evaluasi penyusunan Zona Integeritas masih belum terorganisir dengan baik.
- f. Belum efektifnya kinerja POKJA enam (6) area perubahan.

C. Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I melaksanakan kegiatan dengan output sebagai capaian terhadap sasaran kegiatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko. penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif. Selain itu, kementerian mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui peningkatan sistem data, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Upaya peningkatan ketahanan permukiman terhadap bencana juga menjadi prioritas melalui rehabilitasi rumah terdampak dan penerapan standar bangunan aman. Seluruh sasaran tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas SDM dan efektivitas pelaksanaan program guna memastikan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Pelaksanaan kegiatan mencakup 3 wilayah, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo.

Table 1 : Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat Jenderal				
Tingkat layanan dukungan manajemen	Tingkat layanan dukungan manajemen	4	4	100%
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	100%
Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100%

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1.079	1.078	99,90%
Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	497	501	100,8%
Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Ha	18,81	18,81	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	2	2	100%
Jumlah Unit Ruma Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	336	336	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4	100%
Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%
Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	Unit	343	342	99,70%
Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko				
Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi terhadap komitmen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu 97,08%. Terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai secara maksimal, yaitu pada pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1 Unit, dan Provinsi Maluku Utara 1 Unit. Tidak tercapainya kegiatan tersebut secara maksimal disebabkan beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan seperti pengunduran diri calon penerima bantuan, permasalahan tanah, masalah keluarga, tidak

memenuhi readiness criteria, data penerima yang telah terdata sebagai pengganti, konflik keluarga.

D. Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 216.095.162.000.000 dipergunakan dalam rangka merealisasikan komitmen Balai P3KP Sulawesi I untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman serta Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan.

Table 2 : Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

NO	SATUAN KERJA	PAGU Total (Rp)	PROGRAM DUKMAN			PROGRAM KP		
			PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
				Rp	%		Rp	%
1	BP3KP Sulawesi I	3,555,622,00	1,449,418,000	1,344,692,560	92.77	2,106,204,000	1,495,725,685	71,02
2	Satker PKP Prov. Sulut	158,826,868,000	1,190,091,000	1,075,407,623	90.36	157,636,777,000	157,172,297,544	99,71
3	Satker PKP Prov. Gorontalo	11,617,232,000	688,873,000	618,831,762	89.83	10,928,359,000	8,715,309,773	79,75
4	Sarker PKP Prov. Maluku	42,095,440,000	1,017,271,000	928,656,312	91.29	41,078,169,000	38,428,060,837	93,55
TOTAL		216,095,162,000	4,345,653,000	3,967,588,257	91.30	211,749,509,000	205,811,393,839	97,20

E. Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Menurut DIPA

Alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 216.095.162.000 dipergunakan dalam rangka merealisasikan komitmen Balai P3KP Sulawesi I untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman serta Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Pagu anggaran yang dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 209.778982.096.

Table 3 : Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Terhadap DIPA

NO	SATUAN KERJA	DIPA UNIT	PAGU	JUMLAH DIPA	REALISASI KEUANGAN	
					%	Rp
1	Satker Balai		3,555,622,000	5	79.89	2,840,418,245
	BP3KP Sulawesi I	Sekjen	1,145,952,000	1	91.02	1,043,026,101
	BP3KP Sulawesi I	TKPR	303,466,000	1	99.41	301,666,459
	BP3KP Sulawesi I	KP	610,426,000	1	84.20	514,005,086
	BP3KP Sulawesi I	Desa	314,556,000	1	90.26	283,912,194
	BP3KP Sulawesi I	Kota	1,181,222,000	1	59.08	697,808,405
2	Satker Sulut		158,826,868,000	4	99.64	158,247,705,167
	Satker PKP Prov. Sulut	Sekjen	1,190,091,000	1	90.36	1,075,407,623
	Satker PKP Prov. Sulut	KP	15,469,687,000	1	99.55	15,400,096,263
	Satker PKP Prov. Sulut	Desa	140,325,204,000	1	99.85	140,112,999,405
	Satker PKP Prov. Sulut	Kota	1,841,886,000	1	90.08	1,659,201,876
3	Satker Gorontalo		11,617,232,000	4	80.35	9,334,141,535
	Satker PKP Prov. Gorontalo	Sekjen	688,873,000	1	89.83	618,831,762
	Satker PKP Prov. Gorontalo	Kp	10,302,871,000	1	81.18	8,363,643,663
	Satker PKP Prov. Gorontalo	Desa	117,423,000	1	72.24	84,825,688
	Satker PKP Prov. Gorontalo	Kota	508,065,000	1	52.52	266,840,422
4	Satker Maluku		42,095,440,000	4	93.49	39,356,717,149
	Satker PKP Prov. Maluku	Sekjen	1,017,271,000	1	91.29	928,656,312
	Satker PKP Prov. Maluku	KP	16,420,364,000	1	99.99	16,419,079,208
	Satker PKP Prov. Maluku	Desa	16,069,470,000	1	84.35	13,554,446,699
	Satker PKP Prov. Maluku	Kota	8,588,335,000	1	98.44	8,454,534,930
TOTAL			216,095,162,000	17	97.08	209,778,982,096

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
1. Struktur Organisasi	5
2. Sumber Daya Manusia	7
3. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis	12
D. SARANA DAN PRASARANA	15
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi dan Misi Kementerian PKP	17
2. Arah Kebijakan dan Strategi	18
B. Perjanjian Kinerja	19
C. Metode Pengukuran Kinerja	26
BAB III	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	29
B. Capaian Kinerja BP3KP Sulawesi I	29
C. Analisis perbandingan kinerja	32
D. Analisis Realisasi Anggaran TA 2025	35
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
F. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja	35
G. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	36
1. Faktor Pendukung Keberhasilan	36
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38

DAFTAR TABEL

Table 1 : Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	iv
Table 2 : Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.....	vi
Table 3 : Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Terhadap DIPA	vii
Tabel 1.1 : Tugas dan Fungsi.....	3
Tabel 1.2 : Data Pegawai BP3KP Sulawesi I	7
Tabel 1.3 : Sarana Prasarana Balai P3KP Sulawesi I	15
Tabel 2.1 : Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja.....	18
Tabel 2.2 : Kronologi Perjanjian Kinerja (PK)	25
Tabel 2.3 : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Balai P3KP Sulawesi 1	5
Gambar 1. 2 : Bagan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 1. 3 : Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	13
Gambar 1. 4 : Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan	13
Gambar 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sulawesi I.....	19
Gambar 2. 2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Sekretariat Jenderal	20
Gambar 2. 3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen Kawasan Permukiman	21
Gambar 2. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan	22
Gambar 2. 5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen Perumahan Perkotaan	23
Gambar 2. 6 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen TKPR.....	24
Gambar 3. 1 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Sekretariat Jenderal.....	30
Gambar 3. 2 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen Kawasan Pemukiman	30
Gambar 3. 3 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan.....	30
Gambar 3. 4 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan.....	30
Gambar 3. 5 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen TKPR.....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIN, dan Surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 3 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I selaku perpanjangan tangan pusat di daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Kerja sebagai sub sistem dari sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupaya memenuhi pembangunan khususnya pembangunan bidang perumahan di Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi organisasi, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang langsung dicapai pada lingkup provinsi dan nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PKP RI No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dimana Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

1. Rencana Startegis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

LAKIN disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam LAKIN akan diuraikan mengenai *history* suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I berkewajiban menyusun LAKIN Tahun Anggaran 2025 dan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kawasan permukiman , sebagaimana telah diatur di dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja / Unit Organisasi / Kementerian Negara / Lembaga, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
- c. Peraturan Menteri PKP RI No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Laporan kinerja unit kerja / unit pelaksana teknis / satuan kerja disampaikan kepada Pimpinan entitas di atasnya paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berakhir.

LAKIN ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai Visi dan Misi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, Capaian Kinerja tahun ini, Capaian Kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya. Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I untuk melaksanakan tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I merupakan salah satu unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugasteknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 1. 1 : Tugas dan Fungsi

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.	a) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kapermukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; b) Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkakualitas perumahan; c) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

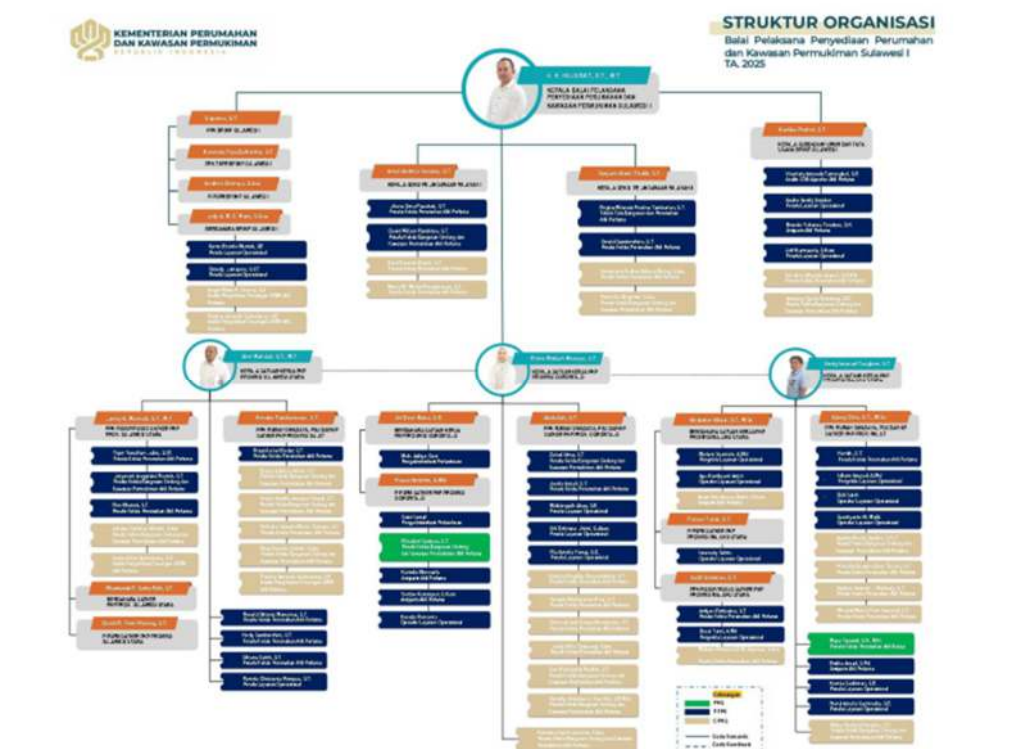
TUGAS	FUNGSI
	d) Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembankawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum,serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; e) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasapermukiman; f) Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman; g) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; h) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian; i) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan; j) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan; k) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman; l) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan; m) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; n) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; o) Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki kapasitas yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, Serta Anggaran dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam Rencana Strategis. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang bebannya semakin bertambah setiap tahunnya. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki strategi pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki agar seluruh proses dapat berjalan optimal.

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tanggal 16 Mei 2025, nomor 111 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tanggal 16 Mei 2025 nomor 113 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan sekretariat jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Balai P3KP Sulawesi 1

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan system pengendalian intern balai.

b) Seksi Pelaksana Wilayah

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I didukung oleh dua seksi pelaksanaan wilayah, yaitu wilayah I bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Permukiman serta wilayah II bertanggung jawab atas pelaksanaan Perumahan Perkotaan dan Perumahan Perdesaan. Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah I dan wilayah II.

c) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I didukung oleh 3 Satuan Kerja, yaitu:

- ✓ Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara
- ✓ Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara
- ✓ Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, terdapat 4 satuan kerja perumahan dan kawasan permukiman yang berada di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, yaitu Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku Utara, Satuan Kerja PKP Provinsi Gorontalo. Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan / Pengendalian Bertugas mendukung penyusunan rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus Bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Susun Dan Rumah Khusus.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Bertugas melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- d. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran pekerjaan.
- e. Bendahara Pengeluaran

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Perumahan Rakyat khususnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I perlu di dukung oleh SDM yang andal. Pasalnya, SDM Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki peranan penting dalam sejumlah keputusan strategis, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi pada berbagai sektor pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi SDM Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung kinerja instansi dan pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

Tabel 1. 2 : Data Pegawai BP3KP Sulawesi I

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	CPNS	TA
Satker Balai P3KP Sulawesi I							
1	Ir. H. Hujurat, S.T., M.T.	Kepala BP3KP Sulawesi I	√				
2	Kartika Pratiwi, S.T.	Kasubag Umum dan Tata Usaha	√				
3	Arnd Andrew Sondey S.T.	Kepala Seksi Wilayah I	√				
4	Suryani U. Thalib, S.T.	Kepala Seksi Wilayah II	√				
5	Suparno S.T.	PPK 1, Dipa Sekjen, KP, Perkotaan dan Perdesaan	√				
6	Kawinda Trya Estherlita, S.T.	PPK 2, Dipa Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	√				
7	Andrew Zefanya, S.Ars	PPSPM	√				
8	Lady Ruru, S.Sos	Bendahara Pengeluaran	√				
1	David Wiliam Rambitan, S.T.	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman		√			
2	Regina Miranda Paulina Tamburian S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama		√			
3	Lifiana Zena Pasuhuk, S.T.	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan		√			
4	Karen Beatrix Mumek, S.E.	Penata Layanan Operasional		√			

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	CPNS	TA
5	Brando Yohanes Tendean, S.H.	Arsiparis Ahli Pertama		√			
6	Vicaristy Amanda Tumengkol, S.E.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama		√			
7	Gerald Sambenthio, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		√			
8	Grandy Lumapow, SST	Penata Layanan Operasional		√			
9	Jeff Samuel Kurmasela, S.Kom	Penata Layanan Operasional		√			
10	Andre Stenly Sembor, S.E.	Penata Layanan Operasional		√			
11	Stence Marlien Kantohe	Pengadministrasi Perkantoran		√			
1	Christofel Roy Mabuka	Operator Layanan Operasional			√		
2	Frangky Pelentino Yaidule	Operator Layanan Operasional			√		
3	Maykhel Manuel Melki Kalensun	Operator Layanan Operasional			√		
4	Nova Agustina Rumengan	Operator Layanan Operasional			√		
5	Steven Bataha	Operator Layanan Operasional			√		
6	Yunike Helmi Ering, S.H	Operator Layanan Operasional			√		
1	Angel Ribka Kristyn Sitorus, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama				√	
2	Ezra Ronaldo Boyoh, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	
3	Geneviene Nadine Debora Biring, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	
4	Henricho Dirganeri, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama				√	
5	Mercy Magdalena Michel Pangemanan, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	
6	Paulina Amanda Sadondang, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama				√	
7	Siti Aviva Mustika Alamri, S.P.W.K	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	
8	Stefanny Cyntia Dotulung, SST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama				√	
1	Ir. Marcel Ervian Lawalata, S.T.,M.T., I.P.P	Operator Klinik PKP					√
Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara							
1	Alwi Mahdali, S.T., M.T	Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara	√				
2	Lanny Agustina Mamudi S.T, M.T	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus	√				

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	CPNS	TA
		Satker PKP Prov Sulut					
3	Hendra Tumilantouw, S.H., S.T.	PPK Rumah Swadaya, PSU, dan KP Satker PKP Prov. Sulut	√				
4	Rhamanda Putra Satria Palit S.T.	Bendahara Satker PKP Prov Sulut	√				
5	David Roley Tomi Putong, ST	PP-SPM Satker PKP Prov Sulut	√				
1	Ronald Oktavia Manuwus, ST	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		√			
2	Praycilia I Badar, ST	Penata Kelola Perumahan Ahli pertama		√			
3	Tigor Yunathan Lubis, SST	Penata Kelola Perumahan Ahli pertama		√			
4	Listyawati Anggraini Pontoh, ST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama		√			
5	Silvana Saleh, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		√			
6	Hedy Sambinhiro, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		√			
7	Rivo Mumek, ST	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		√			
8	Pamela Christania Rompas, SE	Penata Layanan Operasional		√			
1	Bagus Adimas Akbar, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama				√	
2	Greyni Amelia Jessyca Timpal, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama				√	
3	Johana Carolina Siliwire, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama				√	
4	Nathalia Samaria Marisi Siahaan, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	
5	Rogi Donvito Gabriel, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama				√	
6	Saskia Desi Queentania, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama				√	
7	Winda Niken Erica Samola, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan				√	
1	Marcello T.F.E. Lohonauman, S.T.	TA. Konstruksi BSPS					√
2	Donny Lasaru, S.E.	TA Pemberdayaan					√

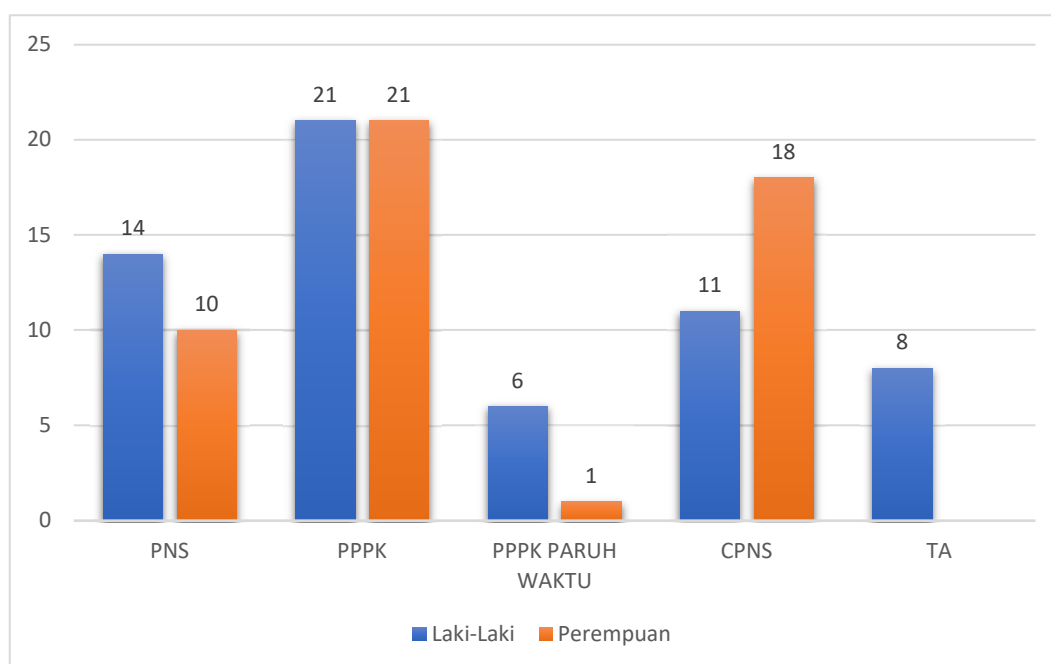
NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	CPNS	TA
Satker PKP Provinsi Maluku Utara							
1	Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / Kepala Satuan Kerja Satker PKP Provinsi Maluku Utara	√				
2	Maya Yapardi S.H., M.H	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	√				
3	Sadli Soleman, S.T	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker PKP Prov Maluku Utara	√				
4	Ajeng Citra Triyuniarhi, S.T., M.Sc.	PPK Rumah Swadaya, PSU, dan 5KP Satker PKP Prov Maluku Utara	√				
5	Abubakar Albaar S.T., M.Sc	Be7ndahara Pengeluaran Satker PKP Provinsi Maluku Utara	√				
6	Fianus Tulak, S.T.	PP-SPM Satker PKP Provinsi Maluku Utara	√				
7	Hardin, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		√			
1	Kurnia Sudirman, S.E	Penelaah Keuangan		√			
2	Nurul A. Syaharuddin, S.E	Penelaah Keuangan		√			
3	Ardyan Pattiasina, S.T	Pelaksana Teknik		√			
4	Idham Arsad, A.Md	Penata Keuangan		√			
5	Emilia Arsad, S.Pd	Penelaah Pengadaan Barang dan jasa		√			
6	Dessi Yanti, A.Md	Penata Keuangan		√			
7	Mariani Soamole A.Md	Penata BMN		√			
8	Ayu Hardiyanti Amid	Pramubakti		√			
9	Didi Saleh	Satpam		√			
10	Isnawaty Sabtu	Pramubakti		√			
11	Sastriyanto Hj Malik	Pengemudi		√			
1	Arfa Ahmad A Laundja	Operator Layanan Operasional			√		
1	Audrey Novita Sambo, S.Tr.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama				√	
2	Imam Hendrawan Bahri, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama				√	
3	Priscillia Engelin Ester Ticoalu, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	
4	Ribka Rovilya Plangiten, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama				√	
5	Septian Samuel Leonard Wakkary, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	
6	Williams Christian De Mellian Aipassa, S. Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	
7	Winardi Marco Fiore Sumardi, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama				√	

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	CPNS	TA
Satker PKP Provinsi Gorontalo							
1	Elvira Rizkiah Monayo S.T.	Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Gorontalo	√				
2	Abdullah, S.T	PPK Rumah Swadaya, PSU dan KP Satker PKP Provinsi Gorontalo	√				
3	Hasan Ibrahim A.Md.	PP-SPM Satker PKP Provinsi Gorontalo	√				
4	Sri Dewi Maku S.E.	Bendahara Pengeluaran Satker PKP Provinsi Gorontalo	√				
5	Rilo Alief Sadewa S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	√				
6	Juwita Ismail, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		√			
7	Zainal Idrus, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		√			
8	Ria Amelia Yunus, S.E	Penata Layanan Operasional		√			
9	Siti Delviana Lihimi, S.Akun	Penata Layanan Operasional		√			
10	Widiningsih Abas, SE	Penata Layanan Operasional		√			
11	Sukri Ismail	Pengadministrasian Perkantoran		√			
12	Karmila Monoarfa, S.M	Arsiparis Ahli Pertama		√			
13	Moh. Aditya Gani	Pengadministrasian Perkantoran		√			
14	Yordan Muhaimin Furqon Korompot, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama		√			
15	Hendra Pamonto	Operator Layanan Operasional		√			
16	Yusril	Pengadministrasi Perkantoran		√			
17	Enricho Rayditia Bround Imbar, ST	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			√		
18	Geraldo Niki Imanuel Paat, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			√		
19	Gloria Arianti Soraya Mangontan, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			√		
20	Karenina Sarah Jasmine, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			√		
21	Lovely Erlin Tampung, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			√		
22	Suci Ramayanti Muslim, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			√		
23	Timothy Christian Junior Van Gils, S.P.W.K	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan			√		

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	CPNS	TA
		Permukiman Ahli Pertama					
24	Rendy Rizky S. Monoarfa	Konsultan Supervisi di Perumahan Palma Residence					√
25	Zulman L. Yahya	Konsultan Supervisi di Perumahan Amanda Residence					√
26	Roki Monoarfa	Konsultan Supervisi di perumahan Rifka Lestari					√
TOTAL			24	42	7	29	8

3. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I didukung oleh SDM sebanyak 110 orang yang terdiri atas 24 orang PNS, 42 orang PPPK, 7 orang PPPPK Paruh Waktu 29 CPNS, 8 orang Tenaga Ahli.

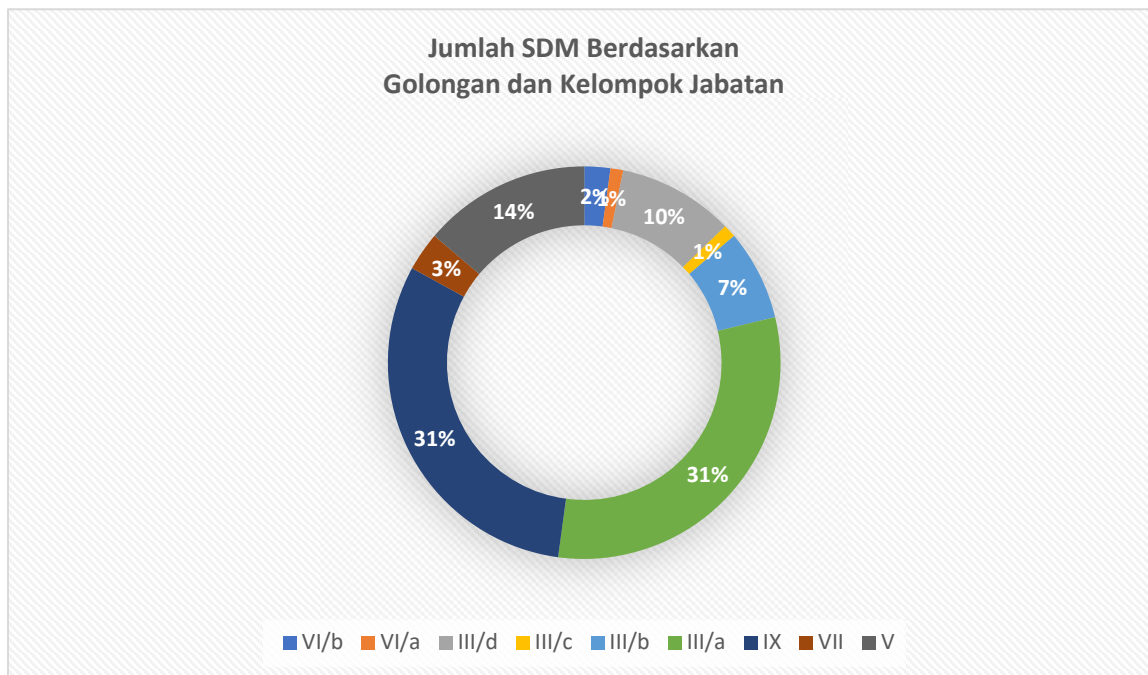


Gambar 1. 2 : Bagan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

4. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Berdasarkan golongan, PNS, PPPK, dan CPNS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I sebanyak 167 pegawai didominasi oleh golongan III sebanyak 46 orang. Sementara, golongan IV sebanyak 3 orang, golongan IX 29 orang. Perbandingan PNS, PPPK, dan CPNS di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan

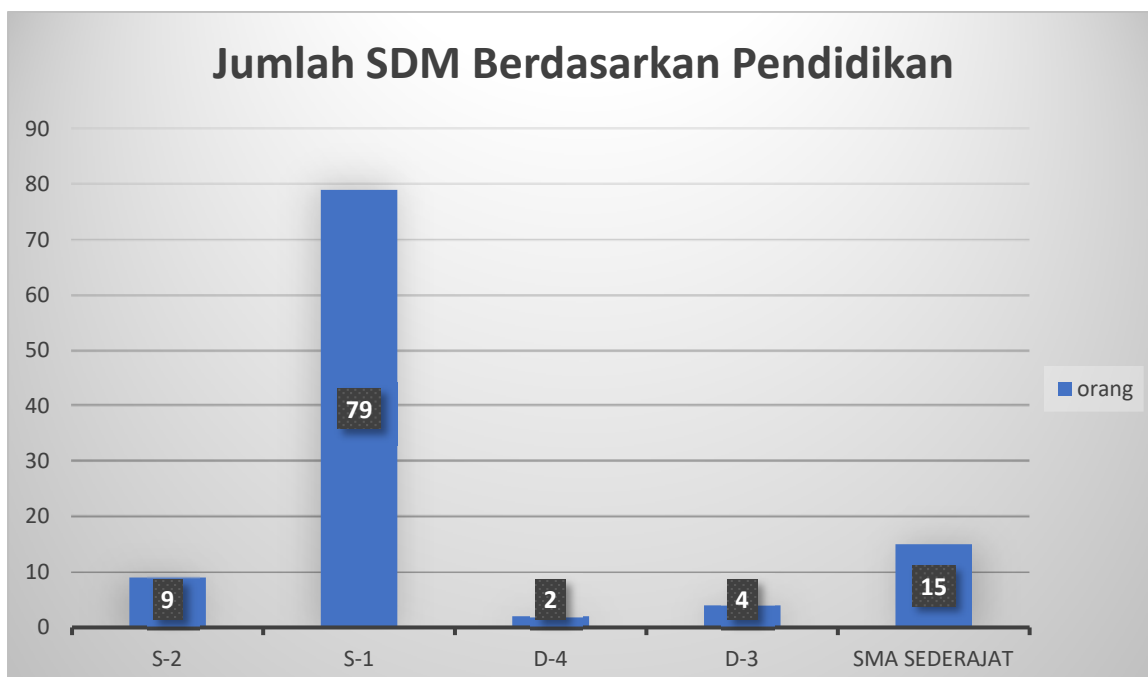
Kawasan Permukiman Sulawesi I secara menyeluruh berdasarkan golongan dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. 3 : Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

5. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat Pendidikan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, didukung oleh 79 orang dengan Tingkat pendidikan S-1, 9 orang dengan Tingkat pendidikan S-2, 2 orang dengan Tingkat pendidikan D-4, 4 orang dengan Tingkat Pendidikan D-3, 15 orang dengan Tingkat Pendidikan SMA sederajat.



Gambar 1. 4 : Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

6. Pengembangan Kopetensi SDM

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan sangat membutuhkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Oleh Karena itu, pegawai di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi utara mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan sebagaimana data berikut :

a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN selama 45 (empat puluh lima) jam pelajaran yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober 2024. Adapun standar kompetensi pada pelatihan ini yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara dan internalisasi nilai-nilai dasar ASN dan pelaksanaan tugas jabatannya. Sedangkan mata pelatihan dan kegiatannya diantaranya sikap perilaku bela negara (wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer serta kesiapsiagaan bela negara), nilai-nilai dasar ASN (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) serta kedudukan dan peran PPPK untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Manajemen ASN dan *Smart ASN*).

b. E-Learning Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI)

Kegiatan E-Learning Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI) diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK selama 25 (dua puluh lima) jam pelajaran pada bulan Maret dan September 2024. Adapun pelajaran yang diselenggarakan diantaranya mengapa korupsi harus diberantas, pahami dulu baru lawan, pilih strategi rancang aksi, aksi integritas untuk berantas korupsi dan bangun kompetensi dengan sertifikasi antikorupsi.

c. Klinik PA : Serba Serbi Penilaian IKPA TA. 2024

Kegiatan Klinik PA : Serba Serbi Penilaian IKPA TA. 2024 diselenggarakan oleh Direktorat Pelaksana Anggaran selama 3,9 (tiga koma Sembilan) jam pelajaran pada bulan Juli 2024. Adapun pelajaran yang diselenggarakan diantaranya evaluasi penilaian IKPA semester I 2024, pelaporan data capaian Output dan FAQ (*Frequently Asked Question*) penilaian IKPA tahun 2024.

d. Peningkatan Kemampuan Pengetahuan dan Keterampilan, Sikap dan Perilaku Pegawai (*Capacity Building*)

Sosialisasi dan progress pembangunan Zona Integritas (ZI), gratifikasi dan SMAP di lingkungan BP2P Sulawesi 1 serta paparan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman SULAWESI I dan Gorontalo.

- e. Bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diLingkungan Direktorat Jenderal Perumahan diselenggarakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan mulai tanggal 12-14 Desember 2024. Adapun kegiatan bimbingan teknis meliputi pembahasan tentang capaian RPJMN 2020-2024 bidang perumahan, rancangan RPJMN 2025-2029 bidang perumahan, tata cara penyusunan renstra, perjajian kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja,
- f. *Certificated Risk Officer In Publik Sector*

Merupakan pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko struktur publik yang diadakan kepada seluruh pejabat structural dan pejabat perbendaharaan dilingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. Agenda ini diadakan Direktorat Kepatuhan Intern setiap tahun, untuk memperkuat kemampuan para pejabat dalam mengidentifikasi potensi-potensi risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan perumahan, menetapkan profil risiko, melakukan analisis peta risiko, respon terhadap risiko, dampak risiko, melakukan analisis peta risiko, respon terhadap risiko, pelaksanaan pemantauan dan tinjauan serta penyusunan laporan manajemen risiko. Kegiatan sertifikasi ini dilaksanakan pada bulan Juli.

D. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan upaya pencapaian kinerja yang optimal. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun 2025, para pegawai didukung dengan penggunaan perangkat sarana dan prasarana kantor serta Barang Milik Negara (BMN).

Tabel 1. 3 : Sarana Prasarana Balai P3KP Sulawesi I

No	Jenis barang	Jumlah	Kondisi
Satker Balai P3KP Sulawesi I			
1	Camera Digital	2	Baik
2	Drone	2	Baik
3	Laptop	17	Baik
4	LCD Proyektor	1	Baik
5	Meja Kerja Kayu	5	Baik
6	Printer	21	Baik
7	Scanner	5	Baik
8	Sound Sistem	1	Baik
9	Televisi	1	Baik
Satker PKP Provinsi Gorontalo			
1	Camera Digital	1	Baik
2	Drone	2	Baik
3	Laptop	20	Baik

No	Jenis barang	Jumlah	Kondisi
4	LCD Proyektor	3	Baik
5	Meja Kerja Kayu		Baik
6	Printer	21	Baik
7	Scanner	1	Baik
8	Sound Sistem	1	Baik
9	Televisi	1	Baik
Satker PKP Provinsi Maluku Utara			
1	Camera Digital	4	Baik
2	Drone	3	Baik
3	Laptop	11	Baik
4	LCD Proyektor	3	Baik
5	Meja Kerja Kayu	55	Baik
6	Printer	25	Baik
7	Scanner	1	Baik
8	Sound Sistem	1	Baik

E. Isu Strategis

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan, distribusi, dan kompetensi SDM di lingkungan organisasi belum optimal sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan sasaran organisasi.
- Regulasi pembiayaan perumahan yang belum terinformasi dengan baik menyebabkan MBR dan pekerja sektor informal sulit mengakses pembiayaan perumahan, sehingga menghambat keterjangkauan kepemilikan rumah.
- Dinamika Perubahan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyediaan Perumahan dari Kementerian PUPR berubah ke Kementerian PKP.
- Kurang optimalnya Tata Kelola Pelayanan Publik;
- Penataan Arsip yang belum maksimal;
- Belum optimalnya Serah Terima dan Hibah atas aset-aset yang telah diselesaikan pembangunannya.
- Belum tersedianya Data dan Sistem Informasi yang Akurat, yang menyebabkan perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan perumahan masih lemah akibat keterbatasan data spasial dan sosial ekonomi yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi Kementerian PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, maka Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelaraskan visi kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang di hadapi lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan Pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Sebagai upaya perwujudan visi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan misi sesuai dengan asta cita, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan indsutri kreatif, dan melanjutkan pengembangan struktur. (Misi Asta Cita No. 3)
2. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. (Misi Asta Cita No. 6)
3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mecapai masyarakat yang adil dan Makmur. (Misi Asta Cita No. 8)
4. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyakarat desa dan rakyat yang membutuhkan. (Program Prioritas No. 13)
5. Menyediakan rumah murah layak huni, memiliki sanitasi dan fasilitas umum yang baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (Program Hasil Terbaik Cepat No. 7)

Pelaksanaan kelima misi di atas ditunjukkan untuk memastikan tercapainya:

1. Tujuan pertama adalah Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif. Tujuan pertama ii memiliki indikator tujuan sebagai berikut:
 - a) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru
 - b) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas
 - c) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
 - d) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu

- e) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan
 - f) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Hunian vertikal
 - g) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau
 - h) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
 - i) Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen
 - j) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni
 - k) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi
2. Tujuan kedua adalah Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Indikator Tujuan dari tujuan kedua ini yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2. 1 : Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi; b. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu; c. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan d. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni.
SS-2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merumuskan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, Khususnya bagi masyarakat, berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pemerataan Pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi Pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik. Kementerian PKP juga menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui

pengembangan rumah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh ini, program 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusi bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sulawesi I

Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Dalam rangka mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni berdasarkan tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki tujuan secara umum, yaitu “terlaksananya penyediaan perumahan dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”. Sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I disusun sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan keterpaduan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
2. Melaksanakan pembangunan rumah khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus;
3. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya bagi MBR;
4. Melaksanakan pembangunan rumah susun;
5. Melaksanakan pembangunan fasilitasi PSU bagi MBR dan pembinaan pelaku pembangunan rumah umum dan komersial.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan salah satu dokumen yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada

hasil yang dilaksanakan pada lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta transparansi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I II menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Sekretariat Jenderal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hujurat**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choeroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

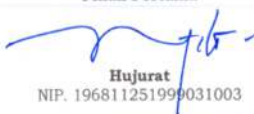
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Didyk Choeroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama


Hujurat
NIP. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN		
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	Rp	1,145,952,000	
2.	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	Rp	1,190,091,000	
3.	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara	Rp	1,017,271,000	
4.	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo	Rp	688,873,000	
		Rp	4,042,187,000	
SEKRETARIS JENDERAL		Jakarta, Desember 2025 KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I		
DIDYK CHOIROEL		 HUJURAT		

Gambar 2. 2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Sekretariat Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hujurat**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Hujurat
NIP. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pengograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Pengangan Kumuh	4 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.079 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyediaan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman Permukiman	1. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	497 Unit
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	1. Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,81 Hektar
KEGIATAN		PAGU APBN	
1. Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I		Rp	610,426,000
2. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara		Rp	15,569,687,000
3. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara		Rp	16,420,364,000
4. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo		Rp	10,302,871,000
		Rp	42,803,348,000
Jakarta, Desember 2025			
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I	
 FITRAH NUR		 HUJURAT	

Gambar 2. 3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **H. Hujurat**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Imran
NIP. 197310261993021001

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama



Hujurat
NIP. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemataan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemataan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru layak Huni di Perdesaan	1 Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	336 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	Rp 314,556,000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	Rp 140,324,572,000
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara	Rp 16,069,470,000
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo	Rp 117,423,000
	Rp 156,826,021,000

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

Jakarta, Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I



HUJURAT

Gambar 2. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan

4. Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hujurat**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama



Hujurat
NIP. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Dan Program, Prioritas, Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantuan dan Evaluasi Penyelenggaraan	4 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	343 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	Rp 1,181,222,000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Utara	Rp 1,841,886,000
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara	Rp 8,588,335,000
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Gorontalo	Rp 508,065,000
	Rp 12,119,508,000

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Jakarta, Desember 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I



SRI HARYATI



H. HUJURAT

Gambar 2. 5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen Perumahan Perkotaan

5. Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen TKPR



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hujurat**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

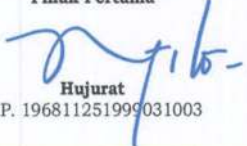
Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Pertama



Hujurat
NIP. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 303.466.000,00

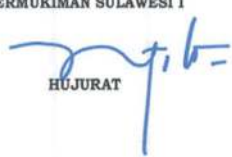
Jakarta, 24 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO



AZIS ANDRIANSYAH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI I



HUJURAT

Gambar 2. 6 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dan Dirjen TKPR

1. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Terdapat beberapa kali perubahan Perjanjian Kinerja pada BP3KP Sulawesi I dikarenakan adanya penyesuaian dalam dinamika operasional, perubahan target layanan, penyesuaian realisasi yang realistis dan lain lain, adapun kronologi perubahan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun Anggaran 2025 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Kronologi Perjanjian Kinerja (PK)

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target	
		PK Awal	PK Revisi
Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal			
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen			
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	4	4
Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Dirjen Kawawasan Permukiman			
SK. Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni			
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman			
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1.079	1.079
SK. Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman Permukiman			
Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	497	497
SK. Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu			
Luas Penanganan Permukiman Kumuh	Ha	18,81	18,81
Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan			
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggara, Pematuan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1
Jumlah Laporan Pematauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	2
SK. 'Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru layak Huni di Perdesaan			
Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	336	336
Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Dirjen Perumahan Perkotaan			
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Dan Program, Prioritas, Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Jumlah Laporan Pemantuan dan Evaluasi Penyelenggaraan	Laporan	4	4
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan			
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target	
		PK Awal	PK Revisi
SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan			
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	343	343
Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
SK, Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1
SK, Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1

C. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari target yang telah ditetapkan bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output), hasil (income), manfaat, dan dampak. Penilaian ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau suatu penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting serta berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Metode pengukuran yang digunakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dalam menyusun Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I adalah sebagai berikut:

- Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan dalam bentuk formulasi rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

D. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mengampu 5 DIPA Unit Eselon I yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Berikut adalah perubahan DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang telah dilakukan beberapa Revisi yang juga menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja Revisi dan Perjanjian Kinerja Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun 2025 dengan kronologi sebagai berikut:

Tabel 2. 3 : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

No.	Unit Eselon I	Pagu Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal		
1	DIPA Awal : SP DIPA-146.01.1.691417/2025 2 Desember 2024	84.318.000
2	Revisi 1: SP DIPA-146.01.1.691417/2025 30 April 2025	84.318.000
3	Revisi 2: SP DIPA-146.01.1.691417/2025 11 Juni 2025	775.170.000
4	Revisi 3: SP DIPA-146.01.1.691417/2025 2 Juli 2025	755.170.000
5	Revisi 4 : SP DIPA-146.01.1.691417/2025 14 Juli 2025	755.170.000
6	Revisi 5 : SP DIPA-146.01.1.691417/2025 13 Agustus 2025	755.170.000
7	Revisi 6 : SP DIPA-146.01.1.691417/2025 31 Oktober 2025	1.044.272.000
8	Revisi 7 : SP DIPA-146.01.1.691417/2025 13 November 2025	1.145.952.000
Dirjen Kawasan Permukiman		
1	DIPA Awal : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025 2 Desember 2024	50.000.000
2	Revisi 1: SP DIPA- 146.03.1.691471/2025 2 Mei 2025	50.000.000
3	Revisi 2 : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025 25 Juni 2025	245.286.000
4	Revisi 3: SP DIPA- 146.03.1.691471/2025	245.286.000

No.	Unit Eselon I	Pagu Anggaran (Rp)
	23 Juli 2025	
5	Revisi 4: SP DIPA- 146.03.1.691471/2025 15 Agustus 2025	610.426.000
6	Revisi 5: SP DIPA- 146.03.1.691471/2025 10 Oktober 2025	610.426.000
Dirjen Perumahan Perdesaan		
1	DIPA awal : SP DIPA-146.04.1.691525/2025 2 Desember 2024	109.644.000
2	Revisi 1: SP DIPA-146.04.1.691525/2025 3 Mei 2025	314.556.000
3	Revisi 2: SP DIPA-146.04.1.691525/2025 10 Oktober 2025	314.556.000
4	Revisi 3: SP DIPA-146.04.1.691525/2025 17 November 2025	314.556.000
Dirjen Perumahan Perkotaan		
1	DIPA Awal : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025 2 Desember 2024	120.000.000
2	Revisi 1 : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025 3 Juli 2025	280.211.000
3	Revisi 2: SP DIPA- 146.05.1.691579/2025 9 Agustus 2025	1.184.222.000
4	Revisi 3: SP DIPA- 146.05.1.691579/2025 10 Oktober 2025	1.184.222.000
5	Revisi 4: SP DIPA- 146.05.1.691579/2025 17 Oktober 2025	1.184.222.000
5	Revisi 5: SP DIPA- 146.05.1.691579/2025 17 November 2025	1.184.222.000
Dirjen TKPR		
1	DIPA Awal : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025 2 Desember 2024	45.000.000
2	Revisi 1: SP DIPA- 146.06.1.691608/2025 24 Juni 2025	303.466.000
3	Revisi 2: SP DIPA- 146.06.1.691608/2025 23 Juli 2025	303.466.000
4	Revisi 3: SP DIPA- 146.06.1.691608/2025 10 Oktober 2025	303.466.000
5	Revisi 4: SP DIPA- 146.06.1.691608/2025 17 Oktober 2025	303.466.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai P3KP Sulawesi I. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan Gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana Tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
- b. tingkat pencapaian sasaran Balai P3KP Sulawesi I yang merupakan Tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

B. Capaian Kinerja BP3KP Sulawesi I

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I merupakan output kegiatan yang mendukung tercapainya dua Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Indikator Kinerja dan Output Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja (PK) dapat dijelaskan realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun 2025 mencakup DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, yaitu sebagai berikut:

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keu (%)	Progres Fisik (%)
1	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal												
2	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
3	01.691417.WA.7665.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	740.008.000	740.008.000	653.891.090	88,36	100,00
4	01.691417.WA.7665.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	76.000.000	76.000.000	71.266.766	93,77	100,00
5	01.691417.WA.7665.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	191.402.000	191.402.000	191.326.245	99,96	100,00
6	01.691417.WA.7665.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satu Kerja	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	138.542.000	138.542.000	126.542.000	91,34	100,00
		TOTAL								1.145.952.000	1.145.952.000	1.043.026.101	91,02	100,00

Gambar 3. 1 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Sekretariat Jenderal

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keu (%)	Progres Fisik (%)
1	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman												
2	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
3	03.691471.IA.7659.FAE.001.100.A	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Sul I	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	195.286.000	195.286.000	168.524.652	86,30	100,00
4	03.691471.IA.7659.FAE.003.100.A	Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	365.140.000	365.140.000	296.158.814	81,11	100,00
5	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana												
6	03.691471.IA.7659.PBF.001.100.A	Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	50.000.000	50.000.000	49.321.620	98,64	100,00
		TOTAL								610.426.000	610.426.000	514.005.086	84,20	100,00

Gambar 3. 2 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen Kawasan Permukiman

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keu (%)	Progres Fisik (%)
1	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan												
2	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana												
3	05.691579.IA.7661.ABF.001.100.A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	394.618.000	394.618.000	293.483.348	74,37	100,00
4	05.691579.IA.7661.ABF.004.100.A	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	183.235.000	183.235.000	52.208.721	28,49	100,00
5	05.691579.IA.7661.ABF.005.100.A	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	300.470.000	300.470.000	95.840.246	31,90	100,00
6	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
7	05.691579.IA.7661.FAE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	302.899.000	302.899.000	256.276.090	84,61	100,00
		TOTAL								1.181.222.000	1.181.222.000	697.808.405	59,08	100,00

Gambar 3. 3 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keu (%)	Progres Fisik (%)
1	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan												
2	7660.AEA	Koordinasi												
3	04.691525.IA.7660.AEA.001.100.A	Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	314.556.000	314.556.000	283.912.194	90,26	100,00
		TOTAL								314.556.000	314.556.000	283.912.194	90,26	100,00

Gambar 3. 4 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keu (%)	Progres Fisik (%)
1	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman												
2	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana												
3	06.691608.IA.7662.ABF.004.100.D	Pembangunan Zona Integritas BP3KP Sulawesi I	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	129.233.000	129.233.000	128.934.532	99,77	100,00
4	06.691608.IA.7662.ABF.005.100.A	Penerapan Manajemen Risiko	SULAWESI UTARA	1 Paket	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02-01-2025	31-12-2025	174.233.000	174.233.000	172.731.927	99,14	100,00
		TOTAL								303.466.000	303.466.000	301.666.459	99,41	100,00

Gambar 3. 5 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen TKPR

C. Analisis perbandingan kinerja

Gambar 3. 1 : Analisis perbandingan target kinerja dengan restra

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000,00	175.000,00	184.450,00	194.410,30	204.506,46	808.768,76
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000,00	63.240,00	66.654,96	70.254,33	266.149,29
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	4	-	-	-	-	4	184.260,49	-	-	-	-	184.260,49
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32.631,68	34.363,68	36.210,54	38.208,40	141.414,70
	5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	312.003,00	-	-	-	-	312.003,00
	6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	1.302.750,00	1.373.096,50	1.447.345,82	1.525.397,09	5.648.491,41
	7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	408.396	430.449	453.694	478.193	1.770.732,14
	8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	3	2	2	2	2	11	603.155,00	942.447,00	993.339,14	1.046.979,45	1.103.516,34	4.689.436,93
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	190.000	200.260	211.074	222.472	823.806,00
	10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	4	4	4	4	16	-	370.000	389.980	411.039	433.235	1.604.253,94
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyajian Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan akses penyajian lahan, pertanian dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	329	313	313	313	313	1.577	23.075,000	4.587.620	4.770.394	4.989.722	5.282.160	42.704.896
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyajian lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900,00	93.791	98.760	281.361
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyajian lahan dan pertanian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	592.975	624.996	656.745	694.318	2.571.834
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	90.000	94.860	99.982	105.381	390.223
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyajian lahan, pertanian dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	105.000	110.670	116.648	122.945	455,261
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah Unit Rumah Swadaya	Unit	1.062	9.210	9.210	9.210	9.210	37.922	36.788,000	222.951,075	234.072.150	245.193.225	256.314.300	995.318,750
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	233	2.139	2.139	2.139	2.139	8.789	136.110.000	921.790.523	949.368.619	984.505.730	1.029.612.367	4.061.417,932

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	-	132	132	132	132	528	-	248.493.275	250.575.600	261.940.800	273.308.000	1.034.315.675	
	4	Jumlah Dokumen Teknik Penyajian Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	86.500,00	93.279	98.316	103.625	383.728,20	
	5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rumah, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	4	-	-	-	-	4	15.913,69	-	-	-	-	15.913,69	
	6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	394.455	405.216	427.097	450.160	1.696,92	
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	246.000	259.294	273.285	288.043	1.096,612	
	8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	237.190	249.956	263.454	975,560	
	9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520,299	
	11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	2.091.200	2.204.125	2.323.148	2.448.596	9.067,070	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368,545	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu															
SASARAN PROGRAM:																
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh																
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh																
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Ha	15	32	-	40	20	107	30.000,000	67.360,000	-	92.600,000	48.400,000	238.360,000	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung terdapatnya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan															
SASARAN PROGRAM:																
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
MR	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352,600	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integrasi	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	129.232	182.190	200.385	220.410	242.451	974.668
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	174.233	225.000	247.500	272.250	299.475	1.218.458
	2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penipuan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	225.000	247.500	272.250	299.475	1.044.225
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penguasaan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I																
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan		4	4	4	4	4	20	35.754.562,97	97.882.016,74	102.776.117,57	107.914.923,45	113.310.669,62	457.638.230,35
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan		4	4	4	4	4	20	58.423,92	191.100,00	200.655,00	210.687,75	221.222,14	882.688,81
	3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan		-	4	4	4	4	16	-	396.500,00	417.911,00	440.478,19	464.264,02	1.719.153,21
	4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	2	2	2	2	8	-	252.000,00	265.608,00	279.950,83	295.068,18	1.092.627,01
	5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	4	4	4	4	16	-	335.000,00	353.090,00	372.156,86	392.253,33	1.452.500,19
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan		4	4	4	4	4	20	84.100,49	891.485,68	936.040,96	982.862,94	1.032.006,11	3.926.614,26
	7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	14.500,00	15.283,00	16.106,00	16.978,00	62.869,00
	8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	14.131,00	14.894,00	15.696,00	16.546,00	61.269,00
	9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	85.000,00	89.590,00	94.426,00	99.527,00	368.545,00
	10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	22.500,00	23.715,00	24.596,00	26.345,00	97.556,00
	11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	85.000,00	89.590,00	94.426,00	99.527,00	368.545,00
	12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	4	4	4	4	16	-	400.000,00	421.600,00	444.366,40	468.362,19	1.734.528,59

D. Analisis Realisasi Anggaran TA 2025

Berdasarkan efektifitas kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I telah melaksanakan target kinerja yang telah diperjanjikan dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025/ Adapun Kronologi capaian tersebut disebabkan adanya:

1. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
2. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-401/AG/AG.3/2025 tanggal 24 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-3 pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP TA 2025;
3. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-200/PB.2/2025 tanggal 25 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran.

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I membutuhkan Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelaksanaan kerja, terutama di bidang Teknik. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dapat digambarkan sebagai berikut:

Dilihat dari latar belakang Pendidikan dan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang saat ini melaksanakan kegiatan dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, dinilai sudah cukup efektif didukung dengan adanya penambahan sebanyak 29 CPNS di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

F. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hasil pengawasan. Sehubungan hal tersebut diatas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I sebagai salah satu unit kerja yang membawahi Satuan Kerja PKP Provinsi Sulut, Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku, dan Satuan Kerja PKP Provinsi Gorontalo memandang perlu optimalisasi untuk sebagai Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan secara optimal, yang lebih terencana, menyeluruh, sistematis, dan efektif. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemanfaatan laporan kinerja. Terdapat berbagai aspek yang menjadi penekanan, yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.

G. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian ini dapat dilihat sebagai perwujudan sinergi dan komitmen yang nyata dari seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah daerah, serta mengembangkan teknik komunikasi yang baik dan efektif dalam memberikan penjelasan terkait pentingnya proses serah terima aset bagi pemerintah daerah;
- b. Menyusus program atau rapat rutin dengan pihak pemerintah daerah khususnya dengan pejabat penting di daerah dalam hal ini Kepala daerah atau Sekretaris daerah terkait rencana dan program pengembangan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Melaksanakan rapat konsolidasi internal dalam rangka evaluasi dan pembahasan progres seluruh kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
- d. Melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pengadaan pelatihan ataupun bimbingan teknis di tingkat internal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I atau melalui pelatihan eksternal yang ada di luar Balai P3KP Sulawesi I (Diklat/Kurusu/Pelatihan);
- e. Menyusunan Master Schedule pelaksanaan seluruh kegiatan BP3KP Sulawesi I dengan penetapan Person in Charge (PIC) pada setiap kegiatan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemerataan beban kerja, serta akuntabilitas kinerja.

2. Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2025, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan struktur organisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebabkan adanya perubahan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Balai dan Satuan Kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan menyebabkan tertundanya penyerapan anggaran di awal tahun dan baru berjalan efektif pada akhir tahun;
- b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Master Schedule yang telah ditetapkan, terutama pada aspek pengendalian waktu dan koordinasi internal;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal sehingga berdampak pada keterlambatan sebagian tahapan kegiatan;
- d. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya diantisipasi dalam perencanaan awal;
- e. Tertundanya pekerjaan fisik yang baru dimulai pada akhir tahun sehingga berdampak pada kurang optimalnya perencanaan dan kualitas pelaksanaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun 2025 ini merupakan wujud tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Laporan ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pada TA 2025 yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas public dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Laporan Hasil Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Metode pengukuran berdasarkan PK Awal Tahun 2025 yang ditetapkan setelah terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Balai dan Satuan Kerja, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pada akhir tahun anggaran (per 31 Desember 2025) sesuai dengan total nilai pagu Revisi terakhir Rp. 216.095.162.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 209.778.982.096 dengan tingkat capaian fisik sebesar 100% dan penyerapan keuangan sebesar 97,08%;

NO	SATUAN KERJA	PAGU Total (Rp)	PROGRAM DUKMAN			PROGRAM KP		
			PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
				Rp	%		Rp	%
1	BP3KP Sulawesi I	3,555,622,000	1,449,418,000	1,344,692,560	92.77	2,106,204,000	1,495,725,685	71,02
2	Satker PKP Prov. Sulut	158,826,868,000	1,190,091,000	1,075,407,623	90.36	157,636,777,000	157,172,297,544	99,71
3	Satker PKP Prov. Gorontalo	11,617,232,000	688,873,000	618,831,762	89.83	10,928,359,000	8,715,309,773	79,75
4	Sarker PKP Prov. Maluku	42,095,440,000	1,017,271,000	928,656,312	91.29	41,078,169,000	38,428,060,837	93,55
TOTAL		216,095,162,000	4,345,653,000	3,967,588,257	91.30	211,749,509,000	205,811,393,839	97,20

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;

2. Melaksanakan kegiatan rapat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi yang ada antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada, dengan waktu pelaksanaan satu kali dalam kurun waktu dua minggu atau pada pelaksanaan apel pagi dengan mengembangkan konsep pelaksanaan apel pagi.
3. Mempercepat proses penyesuaian pejabat KPA/PPK/Pejabat Perbendaharaan melalui koordinasi intensif dengan unit pembina.
4. Memperkuat fungsi Master Schedule sebagai alat pengendalian utama pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemutakhiran Master Schedule secara berkala dan menetapkan kewajiban pelaporan progres kegiatan oleh masing-masing PIC.
5. Menetapkan jadwal monitoring rutin dan mekanisme pelaporan progres kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak korektif.
6. Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih adaptif disertai buffer waktu dan skenario penyesuaian jadwal pada tahap awal perencanaan.

PROFIL KEGIATAN

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I**

Status Update: 23 Januari 2026

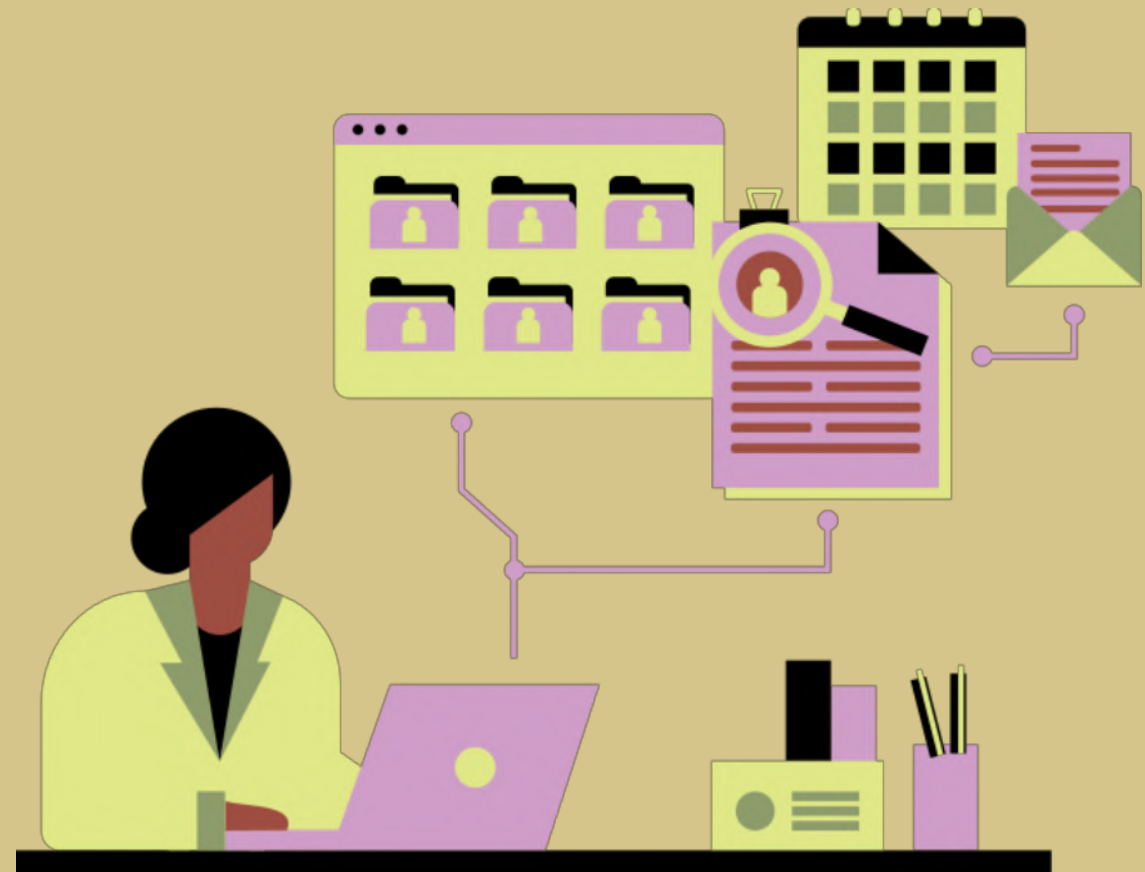


OUTLINE

- 1 **PROFIL** SUMBER DAYA MANUSIA
- 2 **PROGRES** KEUANGAN BP3PKP SULAWESI I
- 3 **REALISASI** FLPP
- 4 **PENDAMPINGAN** CSR
- 5 **PENDAMPINGAN** RKP3KP DAN RP2KPKPK
- 6 **LAPORAN** KLINIK PKP
- 7 **LAPORAN** PROGRES SATKER PKP SULUT
- 8 **LAPORAN** PROGRES SATKER PKP GORONTALO
- 9 **LAPORAN** PROGRES SATKER PKP MALUT



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA BP3KP SULAWESI I



SEBARAN SDM BP3KP SULAWESI I

BP3KP SULAWESI I

8

PNS

11

PPPK

3

PPPK
PARUH
WAKTU

8

CPNS

total
30

pegawai

SATKER SULUT

5

PNS

8

PPPK

3

PPPK
PARUH
WAKTU

7

CPNS

total
23

pegawai

SATKER GORONTALO

5

PNS

10

PPPK

1

PPPK
PARUH
WAKTU

7

CPNS

total
23

pegawai

SATKER MALUT

6

PNS

12

PPPK

1

PPPK
PARUH
WAKTU

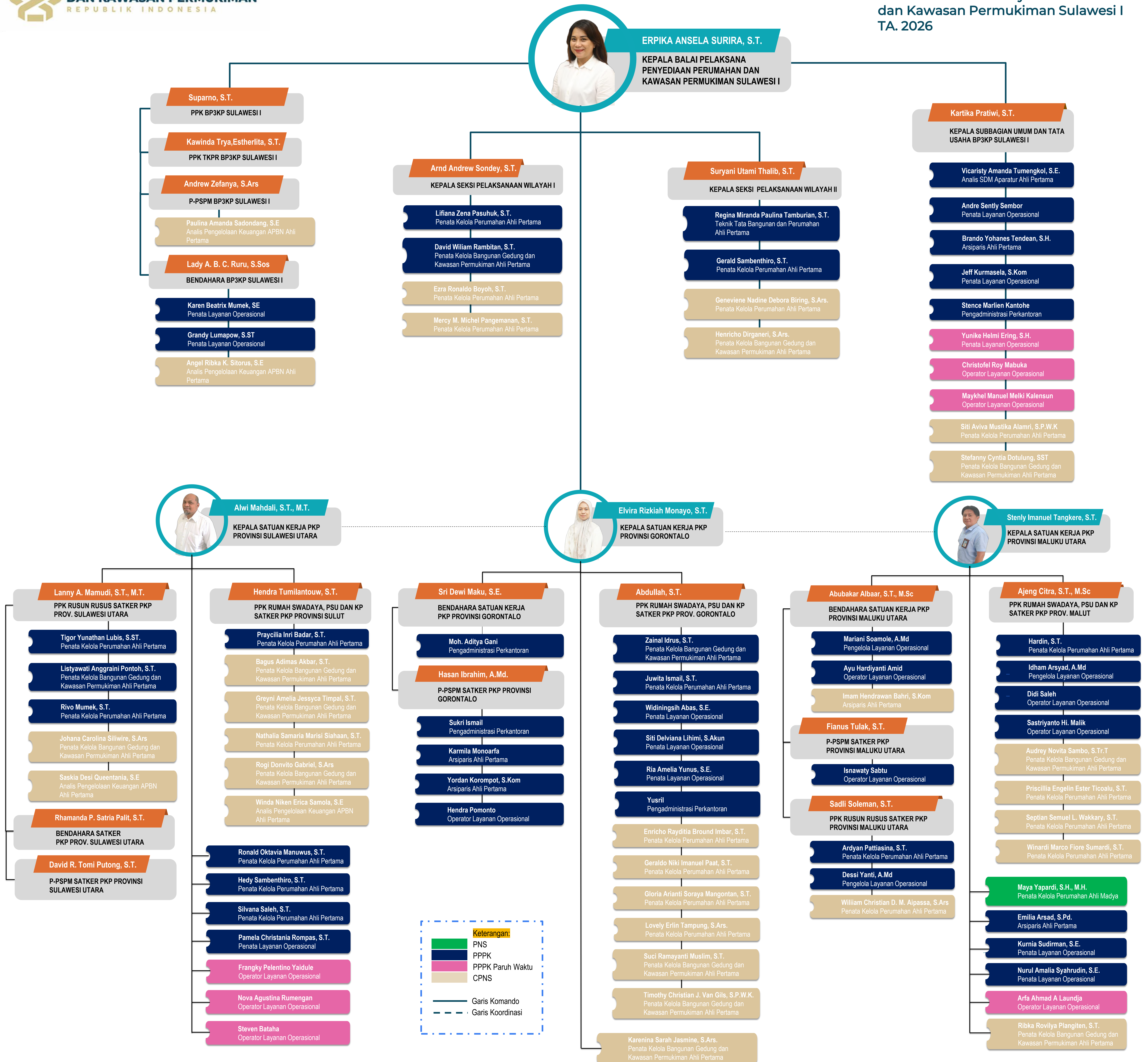
7

CPNS

total
26

pegawai

jumlah pegawai = 102 org



STATUS KANTOR BALAI DAN SATKER

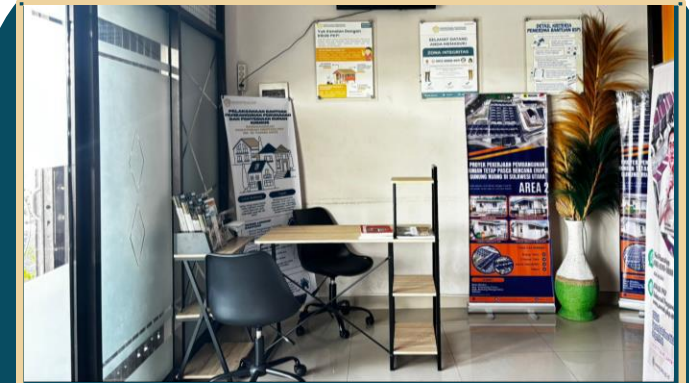
BALAI P3KP SULAWESI I



Lokasi: Ruko Business 8 Jl. Ring Road No.1,
Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129
Status : Sewa

Fasilitas

Lobby Balai	: 1 Unit
Ruang Kerja	: 10 ruangan
Ruang Rapat	: 1 ruangan
Kendaraan Operasional	: 1 unit
Kendaraan Jabatan	: 1 unit
Pantry	: 1 ruangan
Mushola	: 1 ruangan
Toilet	: 2 Unit



STATUS KANTOR BALAI DAN SATKER

Satker Sulawesi Utara



Lokasi :

Ruko Business 8 Jl. Ring Road
No.1, Paal IV, Kec. Tikala, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95129

Status :Sewa

Satker Gorontalo

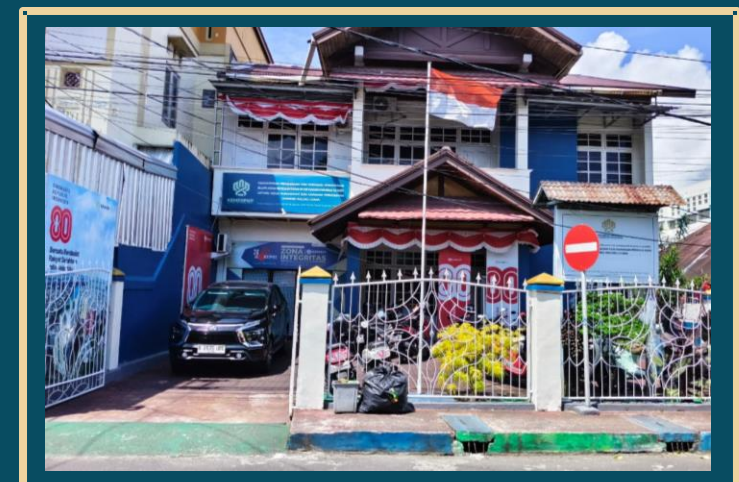


Lokasi :

Jl. KH. Adam Zakaria No.9, Dembe
Jaya, Kec. Kota Utara, Kota
Gorontalo, Gorontalo 96121

Status : Sewa

Satker Maluku Utara



Lokasi :

Jl. Salim Fanbayo, No. 105, Kelurahan
Tana Raja, Kecamatan Ternate Tengah,
Kota Ternate

Status : Sewa

OVERVIEW KEGIATAN BP3KP SULAWESI I

SATKER SULAWESI UTARA

Kegiatan Saat ini:

BSPS (748 unit)

- Delineasi Pesisir: 695 unit
- Delineasi Perkotaan: 53 unit

RUMAH KHUSUS (287 unit)

- Huntap Pasca Bencana Gunung Ruang, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara

SATKER GORONTALO

Kegiatan Saat ini:

PSU (501 unit)

- Palma Residence (83 unit)
- Perum Rifka Lestari (253 unit)
- Amanda Residence (103 unit)
- Alya Residence (62 unit)

PENANGANAN KAWASAN KUMUH (18,81 Ha)

- Lekobalo, Kota Gorontalo

PENANGANAN SANITASI (100 unit)

- Lekobalo, Kota Gorontalo

SATKER MALUKU UTARA

Kegiatan Saat ini:

BSPS (674 unit)

- Delineasi Pesisir: 384 unit
- Delineasi Perkotaan: 290 unit

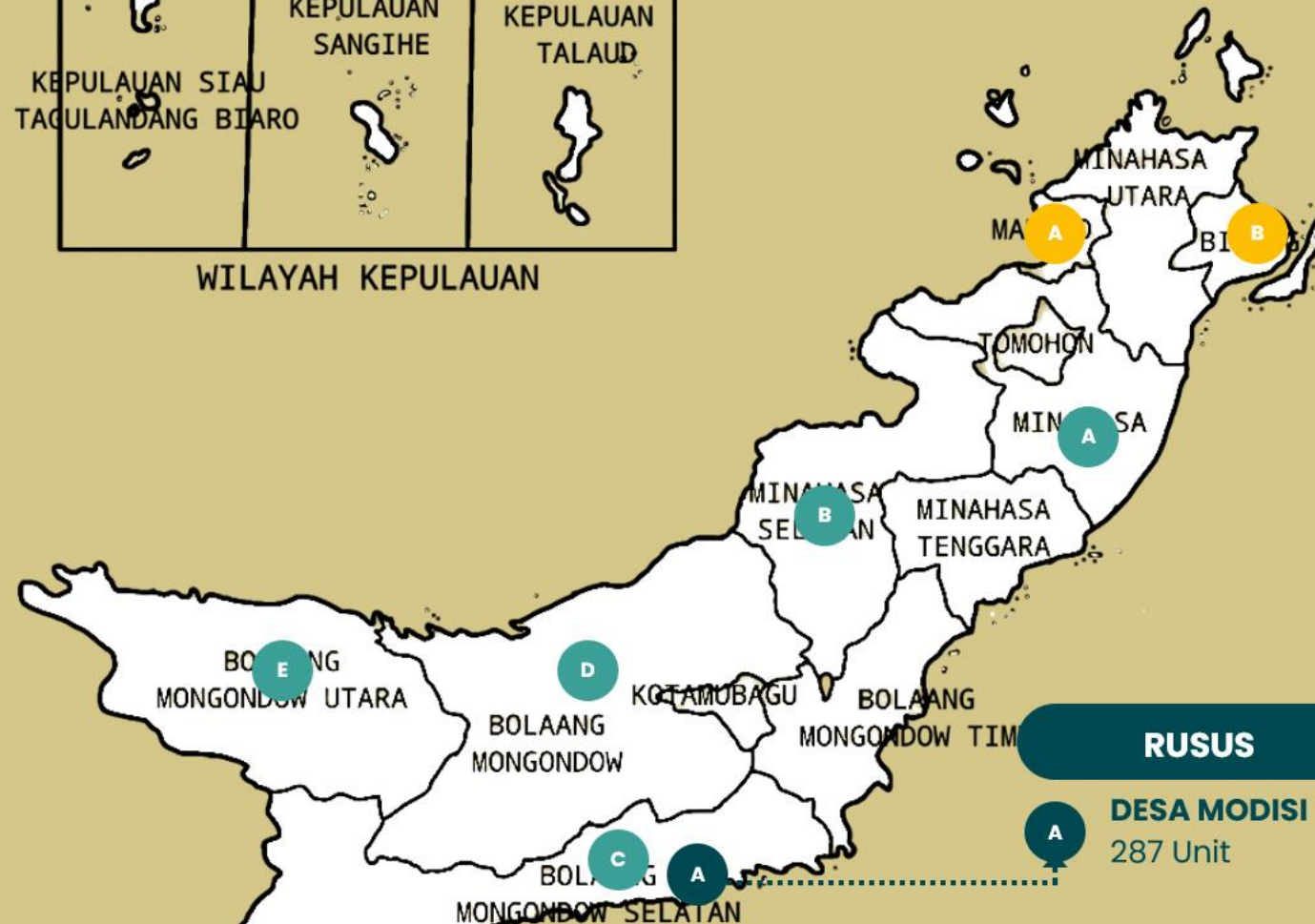
RUMAH KHUSUS (49 unit hunian, 1 Mushola dan PSU)

- Huntap Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

PETA SEBARAN KEGIATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

BSPS PERKOTAAN (53 Unit)

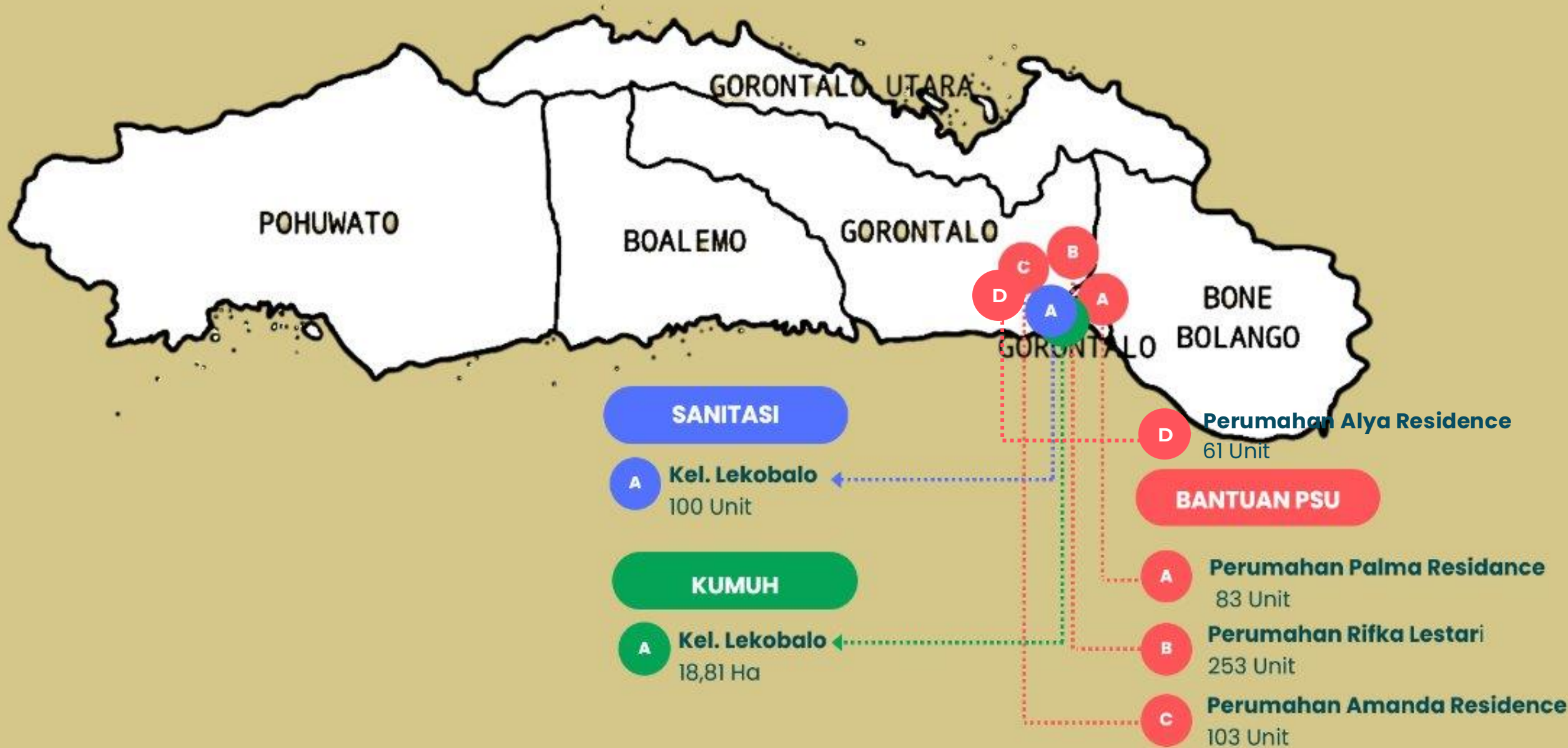
- A KOTA MANADO**
33 Unit
- B KOTA BITUNG**
20 Unit



BSPS PESISIR (695 UNIT)

- A KAB. MINAHASA**
38 Unit
- B KAB. MINAHASA SELATAN**
57 Unit
- C KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN**
100 Unit
- D KAB. BOLAANG MONGONDOW**
400 Unit
- E KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA**
100 Unit

PETA SEBARAN KEGIATAN DI PROVINSI GORONTALO



PETA SEBARAN KEGIATAN DI PROVINSI MALUKU UTARA

BSPS PESISIR (384 Unit)

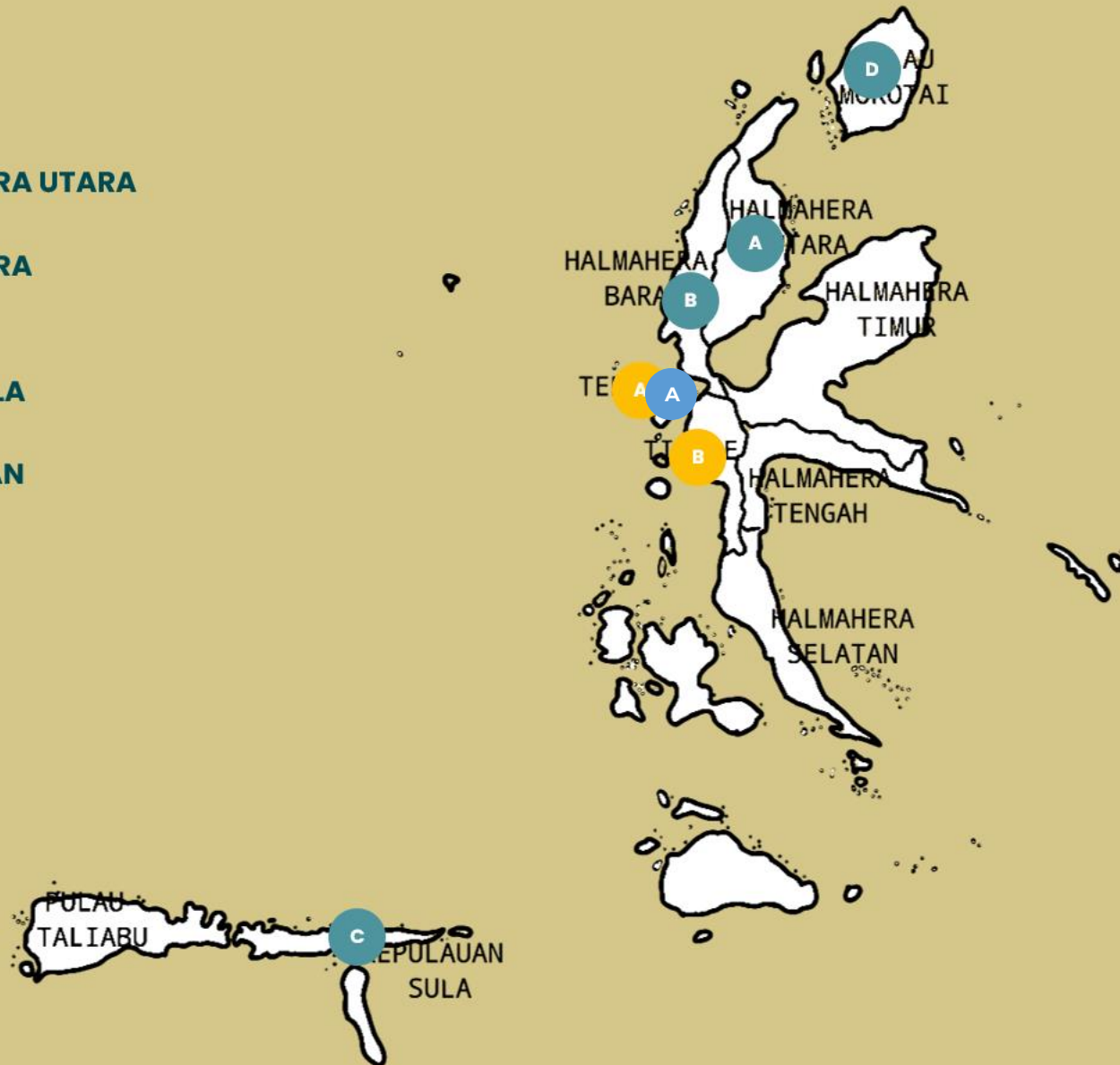
- A KABUPATEN HALMAHERA UTARA**
105 Unit
- B KABUPATEN HALMAHERA BARAT**
128 Unit
- C KABUPATEN PULAU SULA**
64 Unit
- D KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI**
87 Unit

BSPS PERKOTAAN (290 Unit)

- A KOTA TERNATE**
126 Unit
- B KOTA TIDORE KEPULAUAN**
164 Unit

RUSUS

- A KOTA TERNATE**
49 Unit Rumah, 1 Mushola, PSU



PROGRES ANGGARAN BALAI P3KP SULAWESI I TA.2025

Status : 16 Januari 2026



PROGRES ANGGARAN

Status : 23 Januari 2026

NO	SATUAN KERJA	DIPA UNIT	PAGU	JUMLAH DIPA	KEUANGAN	
					REALISASI (%)	REALISASI (Rp)
1	SATKER BALAI		3,555,622,000.00		79.89	2,840,418,245.00
	BP3KP SULAWESI I	SEKJEN	1,145,952,000.00	1	91.02	1,043,026,101.00
	BP3KP SULAWESI I	TKPR	303,466,000.00	1	99.41	301,666,459.00
	BP3KP SULAWESI I	KP	610,426,000.00	1	84.20	514,005,086.00
	BP3KP SULAWESI I	DESA	314,556,000.00	1	90.26	283,912,194.00
	BP3KP SULAWESI I	KOTA	1,181,222,000.00	1	59.08	697,808,405.00
2	SATKER SULUT		158,826,868,000.00		99.64	158,247,705,167.00
	SATKER PKP PROV. SULUT	SEKJEN	1,190,091,000.00	1	90.36	1,075,407,623.00
	SATKER PKP PROV. SULUT	KP	15,469,687,000.00	1	99.55	15,400,096,263.00
	SATKER PKP PROV. SULUT	DESA	140,325,204,000.00	1	99.85	140,112,999,405.00
	SATKER PKP PROV. SULUT	KOTA	1,841,886,000.00	1	90.08	1,659,201,876.00
3	SATKER GORONTALO		11,617,232,000.00		80.35	9,334,141,535.00
	SATKER PKP PROV. GORONTALO	SEKJEN	688,873,000.00	1	89.83	618,831,762.00
	SATKER PKP PROV. GORONTALO	KP	10,302,871,000.00	1	81.18	8,363,643,663.00
	SATKER PKP PROV. GORONTALO	DESA	117,423,000.00	1	72.24	84,825,688.00
	SATKER PKP PROV. GORONTALO	KOTA	508,065,000.00	1	52.52	266,840,422.00
4	SATKER MALUT		42,095,440,000.00		93.49	39,356,717,149.00
	SATKER PKP PROV. MALUT	SEKJEN	1,017,271,000.00	1	91.29	928,656,312.00
	SATKER PKP PROV. MALUT	KP	16,420,364,000.00	1	99.99	16,419,079,208.00
	SATKER PKP PROV. MALUT	DESA	16,069,470,000.00	1	84.35	13,554,446,699.00
	SATKER PKP PROV. MALUT	KOTA	8,588,335,000.00	1	98.44	8,454,534,930.00
	TOTAL		216,095,162,000.00		97.08	209,778,982,096.00

PROGRES ANGGARAN PER PROGRAM

NO	SATUAN KERJA	PAGU total (Rp)	PROGRAM DUKMAN			PROGRAM KP		
			PAGU (Rp)	KEUANGAN		PAGU (Rp)	KEUANGAN	
				REALISASI (Rp)	REALISASI %		REALISASI (Rp)	REALISASI %
1	BP3KP SULAWESI I	3,555,622,000.00	1,449,418,000.00	1,344,692,560.00	92.77	2,106,204,000.00	1,495,725,685.00	71.02
2	SATKER PKP PROV. SULUT	158,826,868,000.00	1,190,091,000.00	1,075,407,623.00	90.36	157,636,777,000.00	157,172,297,544.00	99.71
3	SATKER PKP PROV. GORONTALO	11,617,232,000.00	688,873,000.00	618,831,762.00	89.83	10,928,359,000.00	8,715,309,773.00	79.75
4	SATKER PKP PROV. MALUT	42,095,440,000.00	1,017,271,000.00	928,656,312.00	91.29	41,078,169,000.00	38,428,060,837.00	93.55
TOTAL		216,095,162,000.00	4,345,653,000.00	3,967,588,257.00	91.30	211,749,509,000.00	205,811,393,839.00	97.20

Status : 23 Januari 2026

PROGNOSIS BP3KP SULAWESI I

Satker	Pagu (RP)	Realisasi s/d 31 Desember 2025		Prognosis 31 Desember	
		Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Prognosis (Rp)	Persentase (%)
Balai P3KP Sulawesi 1	3,555,622,000.00	2,840,418,245.00	79.89%	3,200,059,800.00	90.00%
Satker PKP Prov Sulawesi Utara	158,826,868,000.00	158,247,705,167.00	99.64%	158,498,383,000.00	99.79%
Satker PKP Prov Gorontalo	11,617,232,000.00	9,334,141,535.00	80.35%	9,565,128,397.00	82.34%
Satker PKP Prov Maluku Utara	42,095,440,000.00	39,356,717,149.00	93.49%	39,503,989,897.00	93.84%
Total	216,095,162,000.00	209,778,982,096.00	97.08%	210,767,561,094.00	97.53%

Status : 23 Januari 2026

- Untuk Satuan Kerja BP3KP Sulawesi I tidak 100% Karena ada Dana Sisa Swakelola di DIPA Sekjen dan Ditjen Perkotaan
- Untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Gorontalo tidak 100% Karena ada Dana Sisa Lelang di DIPA KP (PSU, Sanitasi dan Kumuh)
- Untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara tidak 100% Karena ada Dana Sisa Swakelola di DIPA Sekjen
- Untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku Utara tidak 100% Karena ada sisa Dana Kontrak Pembayaran Tunggalan Huntap, di DIPA Perdesaan, dan Sisa Dana Operasional dan Honorarium Sekjen, KP dan Perkotaan

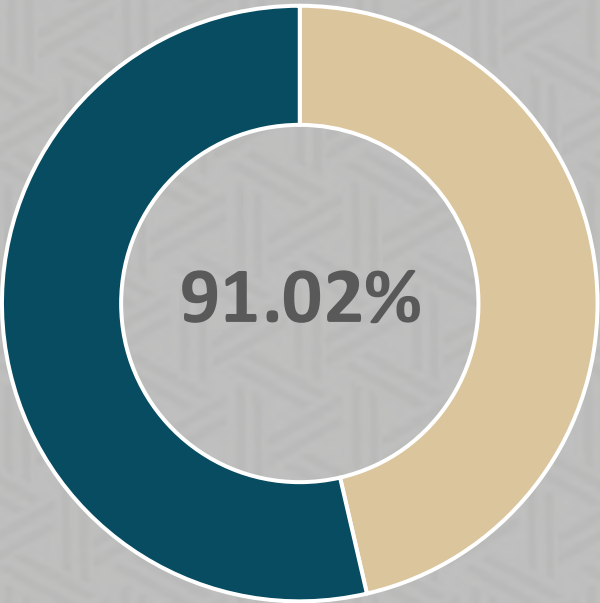
PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I SEKRETARIAT JENDERAL



SEKRETARIAT JENDERAL
691417

Pagu : Rp. 1.145.952.000
Realisasi : Rp. 1.043.026.101

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BP3KP Sulawesi I	Rp. 413.041.331	82.81%
EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 71.266.766	93.77%
EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 191.326.245	99.96%
EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 232.830.000	94.97%
EBA.994.002.E	Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Perumahan	Rp. 134.561.759	99,95%

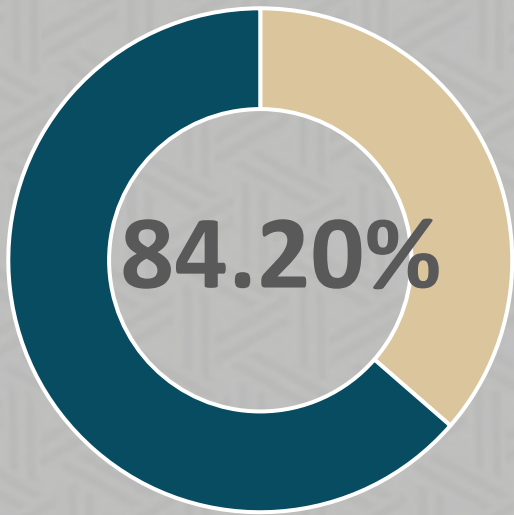
PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I KAWASAN PERMUKIMAN



DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691471

Pagu : Rp. 610.426.000
Realisasi : Rp. 514.005.086

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.A	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Sul I	Rp.168.524.652	86.30%
FAE.003.100.A	Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Rp. 296.158.814	81.11%
PBF.001.100.A	Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 49.321.620	89,64%

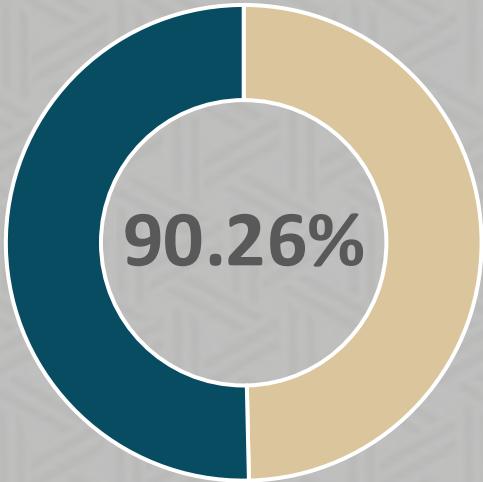
PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I PERDESAAN



DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN
691525

Pagu : Rp. 314.556.000
Realisasi : Rp. 283.912.194

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
AEA.001.100.A	Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.283.912.194	90.26%

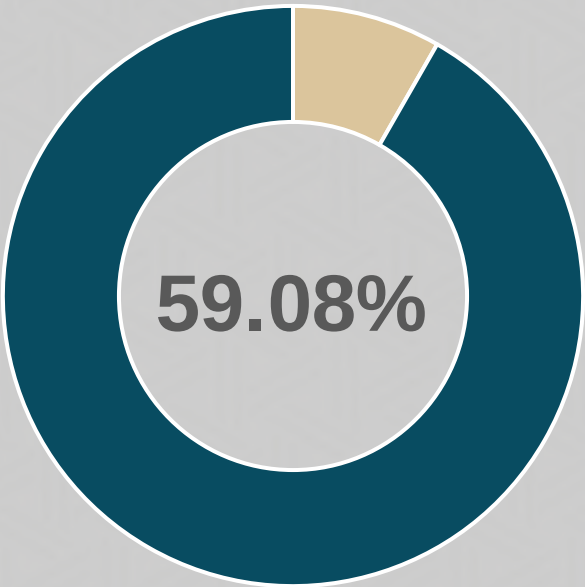
PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I PERKOTAAN



DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN
691579

Pagu : Rp. 1.181.222.000
Realisasi : Rp. 697.808.405

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
ABF.001.100.A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	Rp. 293.483.348	74.37%
ABF.004.100.A	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rp. 42.584.921	24,87%
ABF.005.100.A	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rp. 105.464.046	33.75%
FAE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp. 256.276.090	84.61%

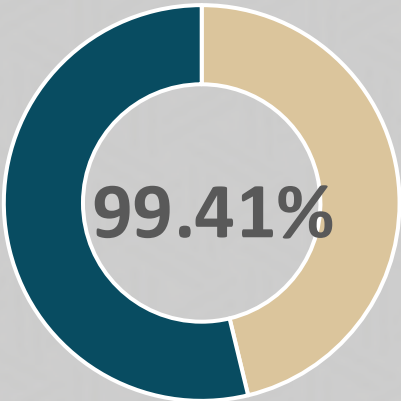
PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I

TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN RISIKO



DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN RISIKO
691608

Pagu : Rp. 303.466.000
Realisasi : Rp. 301.666.459



DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
ABF.004.100.D	Pembangunan Zona Integritas BP3KP Sulawesi I	Rp. 128.934.532	99.77%
ABF.005.100.A	Penerapan Manajemen Risiko	Rp. 172.731.927	99.14%

REALISASI FLPP

BP3KP SULAWESI I
DAN KUR
PERUMAHAN



REALISASI PENYALURAN FLPP PROVINSI SULAWESI UTARA

Sumber : BP Tapera 25 November 2025

2.406 ...
UNIT

295,7B
Nominal FLPP

5
Bank

6
Asosiasi

70
Pengembang

110
Perumahan

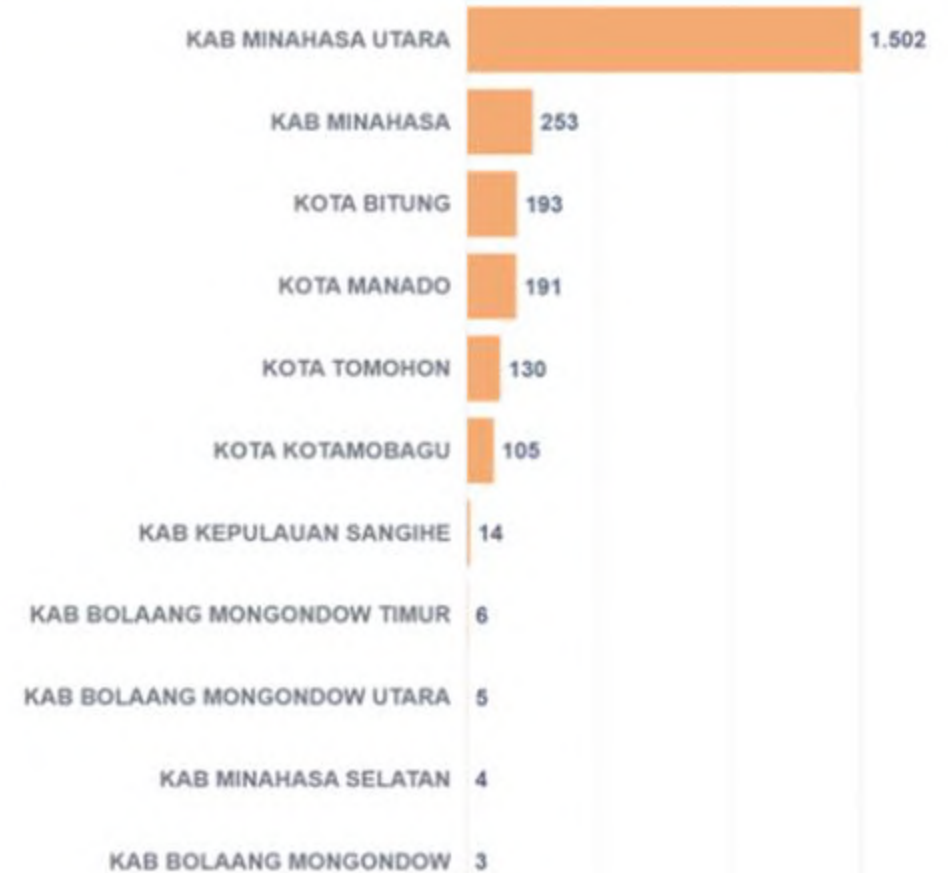
1
Provinsi

11
Kab/Kota

FLPP - Tahun Realisasi



Kab/Kota

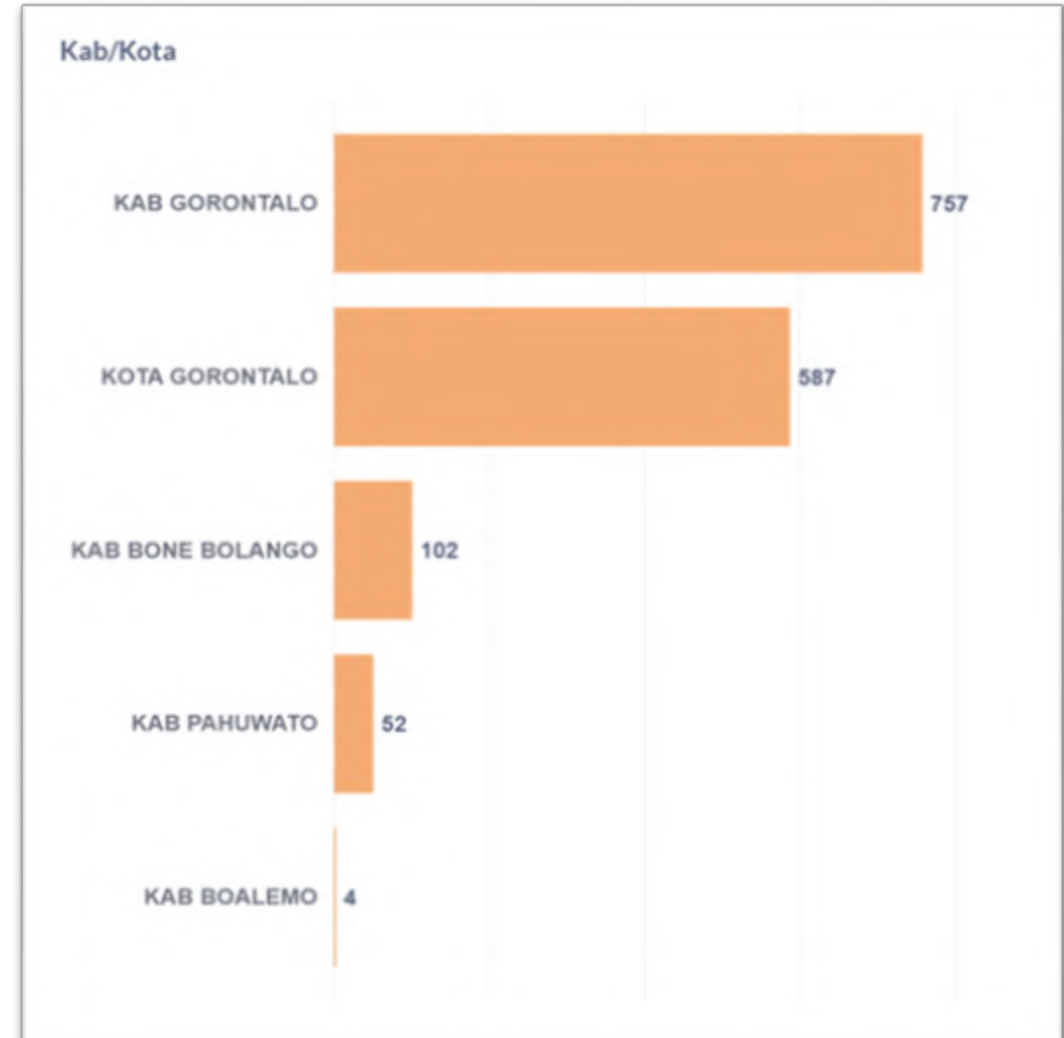


REALISASI PENYALURAN FLPP PROVINSI GORONTALO

Sumber : BP Tapera 25 November 2025

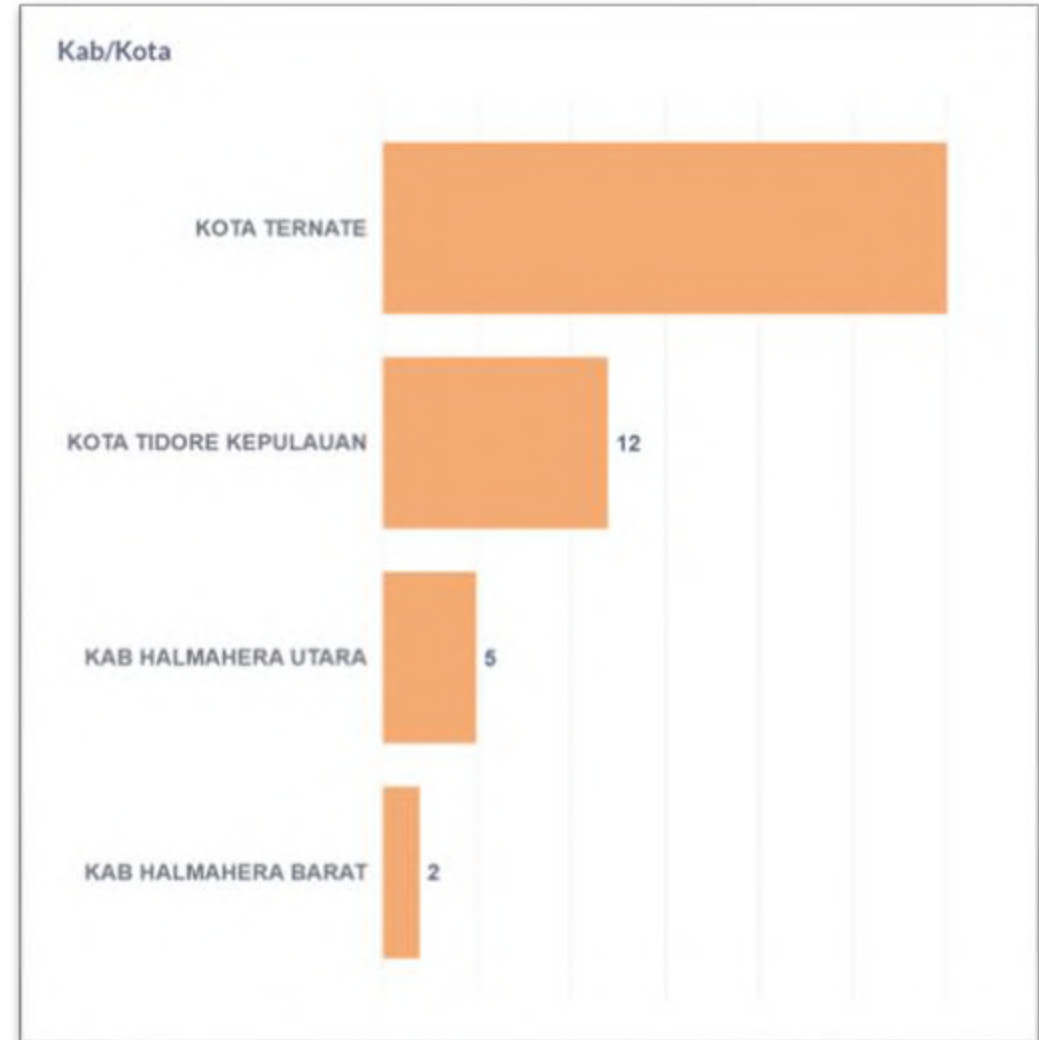
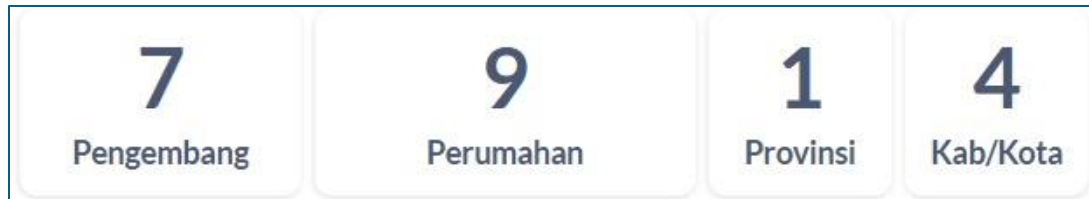
1.502 UNIT	187,9B Nominal FLPP	5 Bank	6 Asosiasi
----------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

61 Pengembang	103 Perumahan	1 Provinsi	5 Kab/Kota
-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------



REALISASI PENYALURAN FLPP PROVINSI MALUKU UTARA

Sumber : BP Tapera 25 November 2025



PENDATAAN BANTUAN *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*



PENDAMPINGAN CSR PERUMAHAN

PENDAMPINGAN CSR PERUMAHAN

TOTAL CSR (UNIT)	154
KOMITMEN (UNIT)	154
SELESAI (UNIT)	107

PEMBANGUNAN BARU		PENINGKATAN KUALITAS	
KOMITMEN (UNIT)	88	KOMITMEN (UNIT)	66
SELESAI (UNIT)	65	SELESAI (UNIT)	42

TOTAL CSR PERUSAHAAN BESAR		TOTAL CRS LAINNYA	
KOMITMEN (UNIT)	73	KOMITMEN (UNIT)	81
SELESAI (UNIT)	55	SELESAI (UNIT)	52
PEMBANGUNAN BARU		PEMBANGUNAN BARU	
KOMITMEN (UNIT)	58	KOMITMEN (UNIT)	33
SELESAI (UNIT)	55	SELESAI (UNIT)	10
PENINGKATAN KUALITAS		PENINGKATAN KUALITAS	
KOMITMEN (UNIT)	18	KOMITMEN (UNIT)	48
SELESAI (UNIT)	0	SELESAI (UNIT)	42

Status: 31 Desember 2025

Dokumentasi CSR PT Sarana Multigriya Finansial (persero)



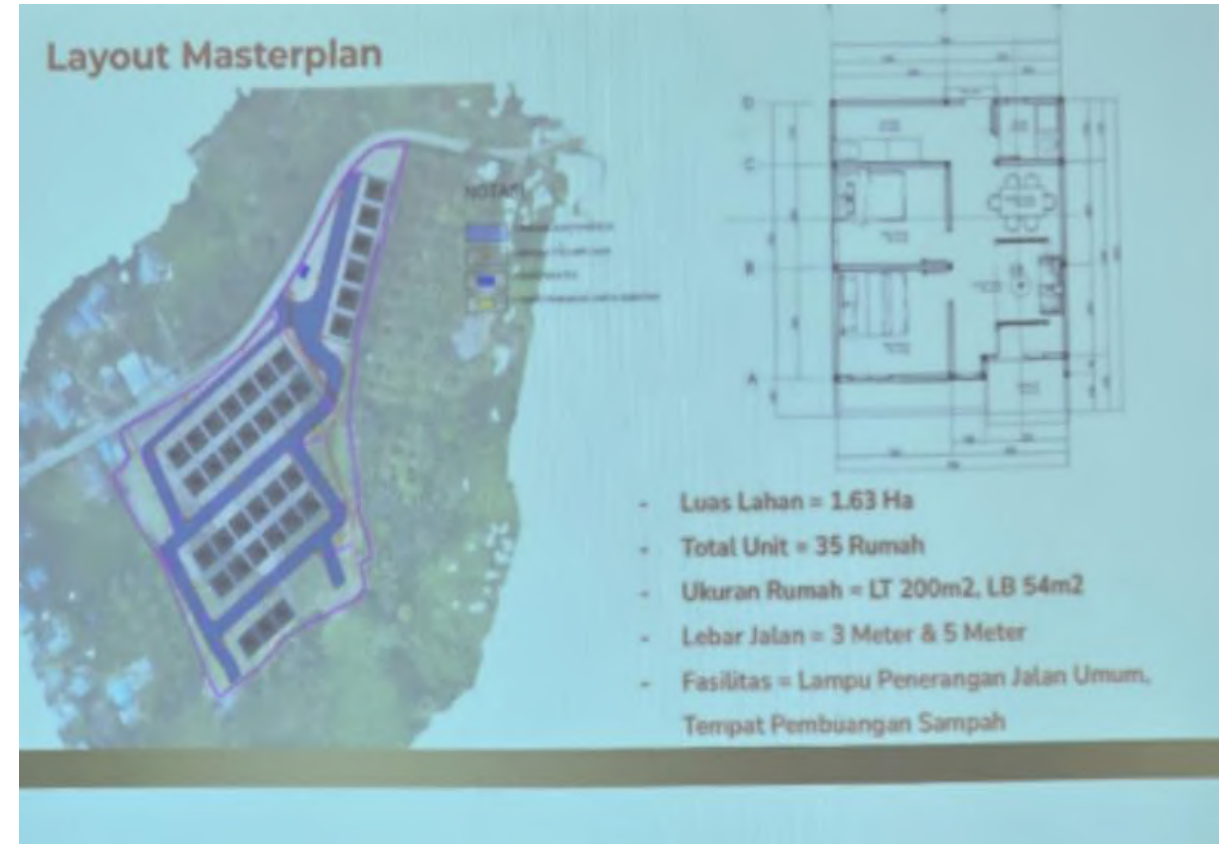
PROFIL PENERIMA MANFAAT

Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan
 Desa : Motandoi Selatan
 Nama : Karim Igrisa
 Jumlah Jiwa : L=3 - P=1 : 4 Jiwa
 Ukuran Rumah : 6 M x 6 M = 36 M²

REKAP CSR BALAI P3KP SULAWESI I

No.	Mitra	Kategori	Provinsi	Kota / Kab	Peningkatan Kualitas (PK)			Pembangunan Baru (PB)			Keterangan
					Rencana	Proses	Selesai	Rencana	Proses	Selesai	
1	BAZNAS	Lainnya	Gorontalo	Kab. Pohuwato					6		Proses konfirmasi
2	PT. Merdeka Gold	Perusahaan	Gorontalo	Kab. Pohuwato						35	selesai
3	BAZNAS	Lainnya	Gorontalo	Kab. Gorontalo						6	dari baznas 6 unit (5 unit baznas RI, 1 unit baznas kab)
4	BAZNAS	Lainnya	Gorontalo	Kota Gorontalo		5			12		Proses konfirmasi
5	BAZNAS	Lainnya	Gorontalo	Kab. Bone Bolango						1	selesai
6	PT. Bank SulutGo	Perusahaan	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara		10					Proses pelaksanaan
7	PT. SMF	Perusahaan	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan						20	selesai
8	PT. Meares Sopotan Mining	Perusahaan	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara		2					Proses pelaksanaan
9	PT. Pilar Andalan Lestari	Perusahaan	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara		1					Proses pelaksanaan
10	PT. Karya Putra Kawanua	Perusahaan	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara		1					Proses pelaksanaan
11	PT. Manado Maju Perkasa	Perusahaan	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara		1					Proses pelaksanaan
12	PT. Viola Putri Mandiri	Perusahaan	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara		1					Proses pelaksanaan
13	PT. Cherry Kasih Abadi	Perusahaan	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara		1					Proses pelaksanaan
14	PT. Kharisma	Perusahaan	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara		1					Proses pelaksanaan
15	Polres Kotamobagu	Lainnya	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu			1				selesai
16	BAZNAS	Lainnya	Maluku Utara	Kota Ternate	1			4			Perencanaan
17	PLN	Lainnya	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan				1			Perencanaan
18	BAZNAS	Lainnya	Sulawesi Utara	Kota Manado			12				Total Sulut ada 44 unit, konfirmasi lagi ke baznas sulut
19				Kab. Kepl. Sangihe					3	selesai	
20				Lainnya (belum diketahui)			29			Ada 29 unit lain yg belum diketahui dimana	
TOTAL					1	23	42	5	18	65	154

DOKUMENTASI CSR PT. MERDEKA GOLD



DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB



100%

NAMA MUSTAHIK	:	SUMIATI UMPEL
ALAMAT	:	Jl. Pumorow Banjeer, Tikala, Manado
PEKERJAAN	:	Pedagang
JUMLAH PENGHASILAN	:	Rp. 2.000.000
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	:	3 Jiwa
JUMLAH BANTUAN BAZNAS RI	:	Rp. 25.000.000
JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN (BAZNAS DAERAH, DLL)	:	Rp.
MITRA PELAKSANA	:	BAZNAS PROV SULAWESI UTARA
PIC PELAKSANA	:	Asrianti D.A Mokodompit



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



0%



30%



Konstruksi oleh Tukang

DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB



100%

NAMA MUSTAHIK	:	HENDRA TAHUPIA
ALAMAT	:	Lingkungan VII, Pandu, Bunaken
PEKERJAAN	:	Buruh
JUMLAH PENGHASILAN	:	Rp. 2.000.000
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	:	5 Jiwa
JUMLAH BANTUAN BAZNAS RI	:	Rp. 25.000.000
JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN (BAZNAS DAERAH, DLL)	:	Rp.
MITRA PELAKSANA	:	BAZNAS PROV SULAWESI UTARA
PIC PELAKSANA	:	Asriyanti D.A Mokodompit



0%



30%



Konstruksi oleh Tukang

DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB



100%

NAMA MUSTAHIK	:	RITA MOKOGINTA
ALAMAT	:	Lingk IV, Bumi Nyiur, Wanea, Manado
PEKERJAAN	:	Pedagang
JUMLAH PENGHASILAN	:	Rp 2.000.000
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	:	4 Jiwa
JUMLAH BANTUAN BAZNAS RI	:	Rp. 25.000.000
JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN (BAZNAS DAERAH, DLL)	:	Rp. 0
MITRA PELAKSANA	:	BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
PIC PELAKSANA	:	Asriyanti D.A Mokodompit



0%



30%



Konstruksi oleh Tukang

DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB



100%

NAMA MUSTAHIK	:	ARSAD HUSAIN
ALAMAT	:	Lingk IV, Bumi Nyiur,Mando
PEKERJAAN	:	Buruh
JUMLAH PENGHASILAN	:	Rp. 400.000
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	:	3 Jiwa
JUMLAH BANTUAN BAZNAS RI	:	Rp. 25.000.000
JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN (BAZNAS DAERAH, DLL)	:	Rp.
MITRA PELAKSANA	:	BAZNAS Prov. Sulawesi Utara
PIC PELAKSANA	:	Asriyanti D.A Mokodompit



0%



30%



Konstruksi oleh Tukang

DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB



100%

NAMA MUSTAHIK	:	AL YASIR MOKODOMPIT
ALAMAT	:	Desa Busisingo, Sangkub, Bolmut
PEKERJAAN	:	Petani
JUMLAH PENGHASILAN	:	Rp. 1.500.000
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	:	4 Jiwa
JUMLAH BANTUAN BAZNAS RI	:	Rp. 25.000.000
JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN (BAZNAS DAERAH, DLL)	:	Rp.
MITRA PELAKSANA	:	BAZNAS Prov. Sulawesi Utara
PIC PELAKSANA	:	Asriyanti D.A Mokodompit



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



0%



30%



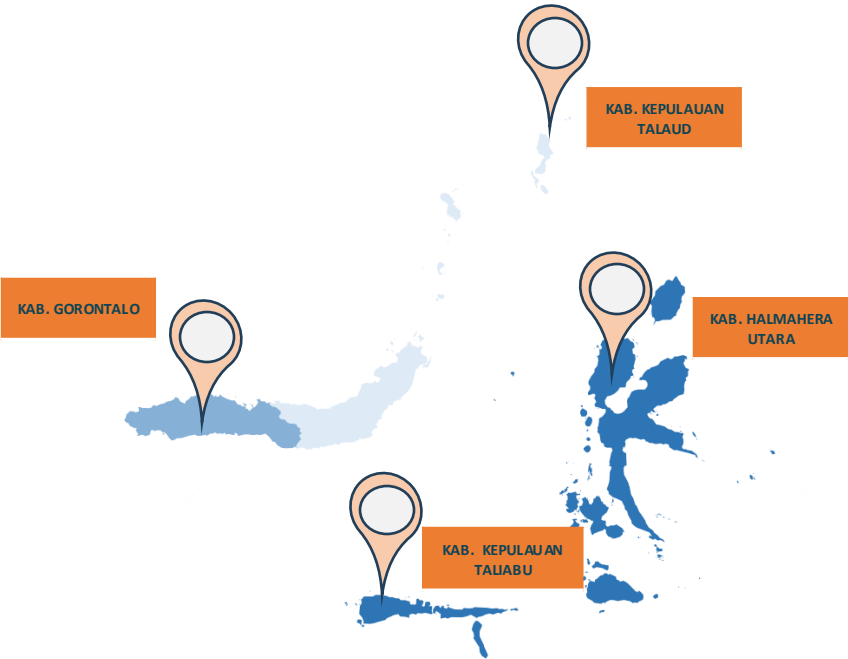
Konstruksi oleh Tukang

PENDAMPINGAN RP3KP DAN RP2KPKPK



PENDAMPINGAN RP3KP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

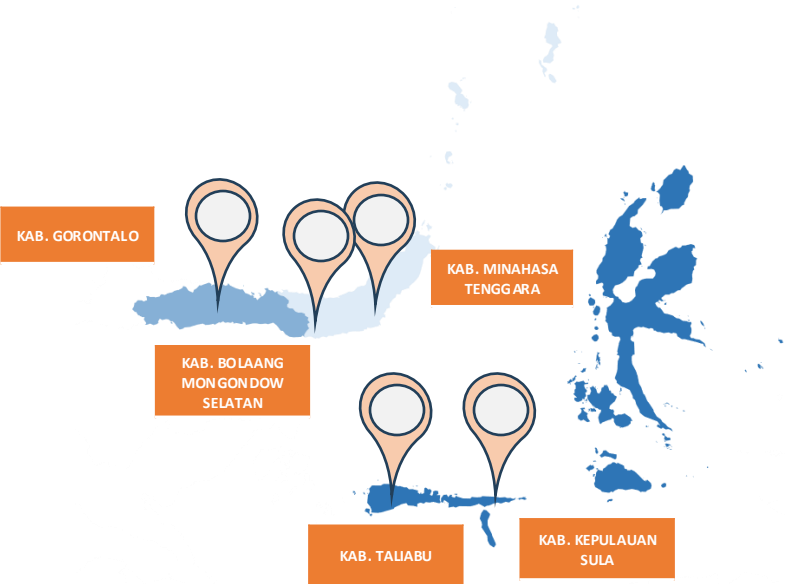
Peta Lingkup Administrasi Balai
BP3KP Sulawesi I



No	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Sampai Bulan November
Provinsi Sulawesi Utara		
1	Kabupaten Kepulauan Talaud	Penyusunan Profil
2	Kabupaten Minahasa	Laporan Akhir, memasuki proses legalisasi (prolegda)
Provinsi Gorontalo		
1	Kabupaten Gorontalo	Proses Legalisasi Perda
Provinsi Maluku Utara		
1	Provinsi Maluku Utara	Penyusunan Profil
2	Kabupaten Kepulauan Taliabu	Penyusunan Profil

PENDAMPINGAN RP2KPKPK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Peta Lingkup Administrasi Balai
BP3KP Sulawesi I



No	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Sampai Bulan November
Provinsi Sulawesi Utara		
1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Draf Laporan Akhir
2	Kabupaten Minahasa Tenggara	Penyusunan Data dan Fakta
Provinsi Gorontalo		
1	Kabupaten Gorontalo	Proses Legalisasi Perbup
Provinsi Maluku Utara		
1	Kabupaten Kepulauan Taliabu	Penyusunan Data dan Fakta
2	Kabupaten Kepulauan Sula	Penyusunan Data dan Fakta



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN PENERIMAAN CPNS DI BALAI P3KP SULAWESI I



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM DAN PENDATAAN 3 JUTA RUMAH



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM DAN PENDATAAN 3 JUTA RUMAH



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN MONITORING FLPP



KEGIATAN MONITORING CSR



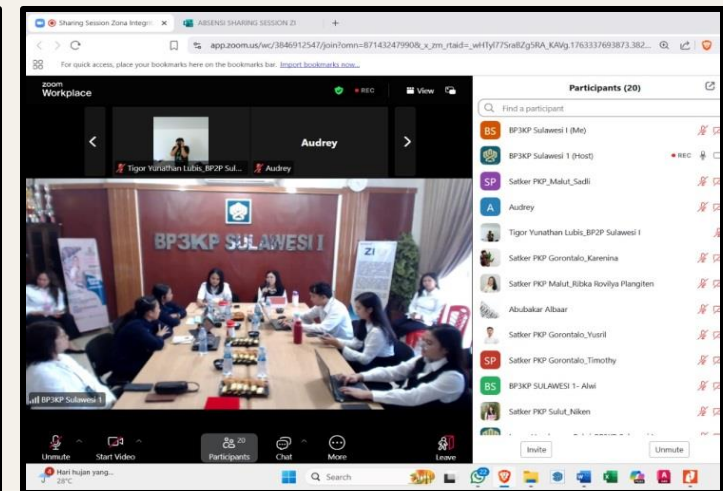
KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN ZI, SPIP DAN MANAJEMEN RISIKO



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN SHARING SESSION ZONA INTEGRITAS



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN BENCHMARKING ZONA INTEGRITAS



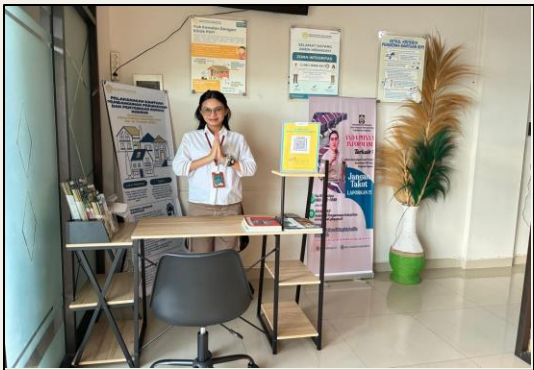
KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN KLINIK PKP



Sosialisasi Klinik PKP

No	Tanggal	Nama	Kontak Yang Bisa Di Hubungi	Alamat	Kegiatan	Uraian Keluhan	Peran TFL
1	30 Oktober 2025	Elis Kulati	08525655478	Nunuka	BSPS	Belum ada masalah yg dihadapi (karena masih proses penyaluran material)	Sangat bagus
2	30 Oktober 2025	Reki Nasiki	08154332682	Nunuka	BSPS	Belum ada masalah yg dihadapi (karena masih proses penyaluran material)	Bagus
3	30 Oktober 2025	Pardi Bouti	085757667161	Nunuka	BSPS	Belum ada masalah yg dihadapi (karena masih proses penyaluran material)	Koordinasi setiap hari
4	30 Oktober 2025	Waris Pasune	085143805004	Milangodaa	BSPS	Belum ada masalah yg dihadapi (karena masih proses penyaluran material)	Tidak ada kendala
5	30 Oktober 2025	Sucipto Daalawan	085240416505	Milangodaa	BSPS	Belum ada masalah yg dihadapi (karena masih proses penyaluran material)	Tidak ada kendala



Layanan Klinik PKP



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN KLINIK PKP



No	Tanggal	Nama	Kontak Yang Bisa Di Hubungi	Alamat	Kegiatan	Pengaduan
1	20 November 2025	Rusmina Abas	-	Desa Gubuk Kusuma	BSPS	Sejauh ini belum ada keluhan pembangun BSPS
2	20 November 2025	Asnawi Suleman	-	Desa Gubuk Kusuma	BSPS	'- masih terkendala dari segi pembiayaan - material masih mahal untuk swadaya bsps
3	20 November 2025	Adenan Johar	081340143813	Desa Gubuk Kusuma	BSPS	'-Material untuk swadaya bsps masih mahal di desa
4	20 November 2025	Maria Ridwan	082267764915	Malikrugi ternate tengah	BSPS	Kesulitan ketersediaan material khususnya pasir ayak
5	20 November 2025	Mato	'081352792033	Kelurahan pulaba	BSPS	Alhamdulillah proses pembangunan berjalan lancar tanpa ada pungutan



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN KLINIK PKP



Koordinasi penyusunan Berkas RP2KPKPK dan RP3KP



Sosialisasi Program 3 Juta Rumah di Balai
Kelurahan Batu Putih Atas

KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

KEGIATAN KLINIK PKP



SOSIALISASI PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN ASET HUNIAN TETAP PASCA BENCA ERUPSI GUNUNG RUANG

KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS PADA BP3KP SULAWESI I



PENANDATANGANAN PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN POKJA ZI BP3KP SULAWESI I

KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS PADA BP3KP SULAWESI I

Satker Balai

Dirga



Satker Sulut

Saskia



Satker Gorontalo

Enricho



Satker Maluku

Will



PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

INOVASI AGEN PERUBAHAN BP3KP SULAWESI I



**ZONA
INTEGRITAS
BP3KP SULAWESI 1**

PEGAWAI ANDALAN ANTI DELAY

Kriteria Panada

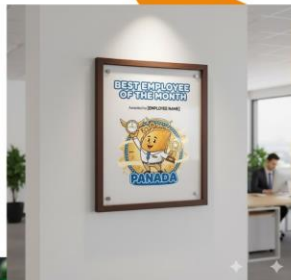
Kriteria Pegawai Andalan Anti Delay (PANADA)

Datang Tepat Waktu (Tidak Terlambat Melebihi 07.30)

Pegawai hadir di kantor sebelum atau tepat pukul 07.30, serta konsisten menjaga kedisiplinan waktu. Ketepatan hadir ini menunjukkan komitmen terhadap aturan jam kerja dan rasa tanggung jawab terhadap tugas.

Tidak Pernah Lupa Melakukan Absen

Pegawai selalu melakukan absen masuk dan pulang sesuai ketentuan tanpa kelalaian. Konsistensi ini mencerminkan sikap disiplin, kepedulian terhadap administrasi kehadiran, dan keteraturan dalam bekerja.



Rewards!

Reward Pegawai Andalan Anti Delay (PANADA)

Dipajang pada Wall of Fame "Best Employee of the Month"

Pegawai yang terpilih akan ditampilkan pada dinding penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi seluruh pegawai. Foto dan identitasnya akan terpampang selama satu bulan penuh sebagai simbol prestasi kedisiplinan waktu.

Mendapatkan Hadiah Kue Panada

Sebagai bentuk penghargaan yang khas dan berkesan, pegawai terpilih menerima kue panada spesial. Hadiah ini melambangkan semangat lokal serta menjadi simbol ketekunan dan konsistensi dalam hadir tepat waktu.



PEGAWAI ANDALAN ANTI DELAY

**Mari jo ba rajin
supaya dapa
Panada!!**

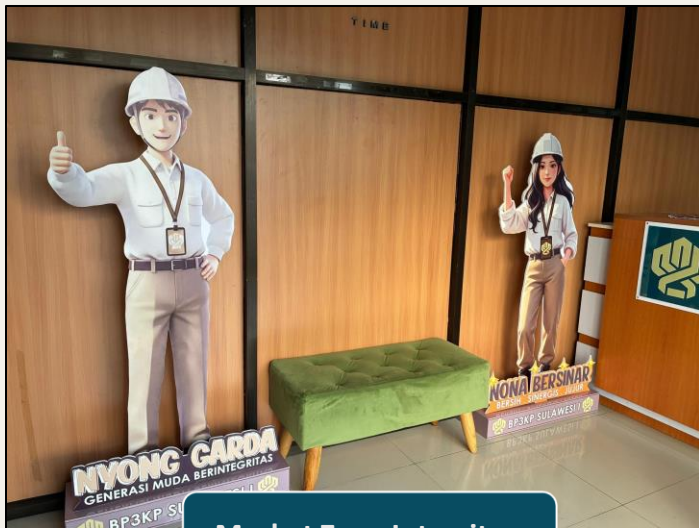
KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

INOVASI AGEN PERUBAHAN BP3KP SULAWESI I



KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

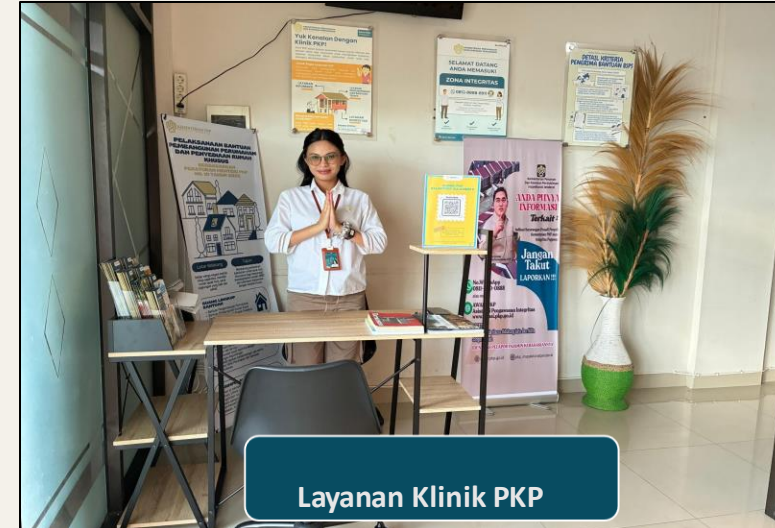
IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS BP3KP SULAWESI I



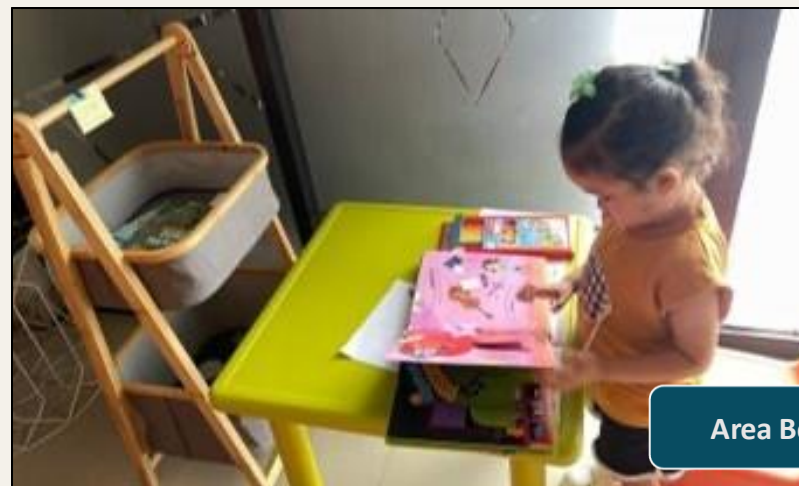
Maskot Zona Integritas



Banner ZI



Layanan Klinik PKP



Area Bermain Anak

KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI I

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS BP3KP SULAWESI I



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh penyelenggara pelayanan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Kami berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan secara profesional, transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Menyediakan informasi pelayanan yang akurat, mudah diakses serta dapat dipertanggungjawabkan melalui media elektronik dan non-elektronik.
3. Melaksanakan seluruh proses pelayanan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat dan berorientasi pada nilai BerAKHLAK.
4. Menjamin pelayanan teknis perumahan dan permukiman yang responsif, inklusif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran dan masukan masyarakat secara cepat serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Manado, 10 November 2025
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi I,



Ir. H. HUJURAT, S.T., M.T.
NIP. 19681125 199903 1 003

Nama Satker	Nama Barang	Tahun Perolehan	Penerima Alih Status	Total Nilai Perolehan
SATKER PP SULUT	FLAT RUMAH SUSUN PERMANEN/KODAM KALASEY	2022	Kementerian Pertahanan	IDR 21,730,007,100.
	PERLATAN DAN MESIN/MEUBELAIR	2022		
SATKER PP GORONTALO		2022	Kementerian Pertahanan	IDR 23,750,380,000
	FLAT RUMAH SUSUN PERMANEN/KOREM GORONTALO			
	PERALATAN DAN MESIN/MEUBELAIR			

STATUS LIKUIDASI BMN DI BP3KP SULAWESI I



Nama Satker	Jenis BMN	Daftar Barang	Status Likuidasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
Satker Sulut	Persediaan	Pembangunan huntap, revitalisasi, Landscape, dll	Proses di PKP	2023-2024	IDR 21,981,015,410.
	Selain Tanah Bangunan	Peralatan dan Mesin	Proses di PKP	2016-2020	IDR 978.683.342
Satker Gorontalo	Persediaan	Pembangunan xix rusun paramedis	Proses di PKP	2021	IDR 376,785.000
	Selain Tanah dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	Proses di PKP	2016-2022	IDR 881,745,750.
Satker Malut	Persediaan	Panel RISHA,MK,Pemeliharaan	Proses di PKP	2021-2024	IDR 9,873,669,566.
	Selain Tanah dan Bangunan	Aset Perkantoran (Rak, Lemari, Meja Kerja, Kamera, Lap top, Printer dll.)	Proses di PKP	2016-2021	IDR 1,001,092,880.

STATUS STA BMN BP2P JAWA I DI WILAYAH BP3KP SULAWESI I



NO	SATKER PENCATAT	NAMA BMN	ALAMAT LOKASI	KOTA / KABUPATE N	TAHUN PEROLE HAN	SASARAN PENERIMA MANFAAT	PENERIMA HIBAH / ALIH STATUS	TOTAL NILAI PEROLEHAN (RP) (FISIK & MEDEL)	PROSES SERAH TERIMA ASET	KETERANGAN
1	EKS. BANGRUM	Rusun Pekerja Bolaang Mongondow	Jl. Trans Sulawesi, Desa Lalow, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Bolaang Mongondow	2013	Pekerja	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp 17,526,468,306	PEMBERKASAN USULAN HIBAH DI SESDITJEN	Dalam proses balik nama sertifikat lahan milik Pemkab Bolmong
2	EKS. BANGRUM	Rusun MBR Kotamobagu 2016-2017	Kel. Pobundayan, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	2017	MBR	Pemerintah Kota Kotamobagu	Rp 24,243,608,232	PEMBERKASAN USULAN HIBAH DI SESDITJEN	Dok Eksternal telah diserahkan kepada Bangrum dan akan diproses hibah ke Sekjen PKP
3	EKS. BANGRUM	Rusun MBR Bolaang Mongondow Timur	Kel. Tutuyan III, Kec. Tutuyan, Kab. Bolaang Mongondow Timur	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2018	MBR	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Rp 12,715,416,739	PROSES TTD BAST DI PEMDA	Telah Terbit Persetujuan Hibah dari Presiden, menunggu proses terbit Persetujuan Hibah Kemenkeu
4	EKS. BANGRUM	Rusun Universitas Gorontalo, Kab Gorontalo	JL. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo	2013	Peserta Didik Perguruan Tinggi	Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lopoholaa Gorontalo	Rp 5,659,240,000	PEMBERKASAN USULAN HIBAH DI SESDITJEN	Dokumen Eksternal diserahkan kepada BP3KP Jawa I untuk dapat diproses
5	EKS. BANGRUM	Rusun Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK Banau)	Kampus STPK Banau, Jl. Trans Goal, Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera Barat	Kab. Halmahera Barat	2015	Peserta Didik LPKB	Yayasan STPK Banau	Rp 14,977,106,686	PROSES PERSETUJUAN HIBAH DI KEMENKEU	Sementara Dalam Proses Persetujuan Hibah di Kemenkeu
6	EKS. BANGRUM	Kota Manado	Kel. Pandu, Kec. Mapanget, Kota Manado	Kota Manado	2007	Rawan Bencana	Pemerintah Kota Manado	Rp 882,150,833	BELUM DIPROSES	Perlu di survey ulang lokasi untuk dilakukan inventarisasi kondisi aset
7	EKS. BANGRUM	Kab. Bolaang Mongondow	Desa Lolak, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Bolaang Mongondow	2007	Nelayan	Pemerintah Kab Bolaang Mongondow	Rp 877,301,833	BELUM DIPROSES	Perlu di survey ulang lokasi untuk dilakukan inventarisasi kondisi aset
8	EKS. BANGRUM	Kab. Bolaang Mongondow	Desa Ambang II, Kec. Bolaang Timur, Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Bolaang Mongondow	2010	Nelayan	Pemerintah Kab Bolaang Mongondow	Rp 1,172,025,806	BELUM DIPROSES	Perlu di survey ulang lokasi untuk dilakukan inventarisasi kondisi aset

STATUS STA BMN BP2P JAWA I DI WILAYAH BP3KP SULAWESI I

NO	SATKER PENCATAT	NAMA BMN	ALAMAT LOKASI	KOTA / KABUPATEN	TAHUN PEROLE- HAN	SASARAN PENERIMA MANFAAT	PENERIMA HIBAH / ALIH STATUS	NILAI PEROLEHAN (RP)	PROSES SERAH TERIMA ASET	KETERANGAN
9	EKS. BANGRUM	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Desa Tolandadu II, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolmong Selatan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2010	Nelayan	Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Selatan	Rp 1,222,315,200	BELUM DIPROSES	Perlu di survey ulang lokasi untuk dilakukan inventarisasi kondisi aset
10	EKS. BANGRUM	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Desa Paret, Kec. Kotabunan, Kab. Bolaang Mongondow Timur	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2011	Nelayan	Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Timur	Rp 1,066,366,125	BELUM DIPROSES	Perlu di survey ulang lokasi untuk dilakukan inventarisasi kondisi aset
11	EKS. BANGRUM	Rumah Khusus Petugas Medis Sangihe	Puskesmas Enemawira, Desa Petta, Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe	Kab. Kepulauan Sangihe	2019	Petugas Medis	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Rp 221,466,395	PEMBERKASAN USULAN HIBAH DI SESDITJEN	Dokumen Eksternal sudah diserahkan kepada BP2P Jawa I untuk dapat diusulkan ke Sesditjen
12	EKS. BANGRUM	Rumah Khusus Atlet Kota Bitung	Kel. Girian Indah, Kec. Girian, Kota Bitung	Kota Bitung	2020	Atlet	Atlet Berprestasi	Rp 177,897,000	PEMBERKASAN USULAN HIBAH DI SESDITJEN	Dokumen Eksternal sudah diserahkan kepada BP2P Jawa I untuk dapat diusulkan ke Sesditjen
13	EKS. BANGRUM	Kab. Bone Bolango	Desa Tihu, Kec. Bone Pantai, Kab. Bone Bolango	Kab. Bone Bolango	2008	Nelayan	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	Rp 493,486,000	BELUM DIPROSES	Perlu di survey ulang lokasi. Untuk dilakukan inventarisasi kondisi aset
14	EKS. BANGRUM	Kab. Gorontalo Utara	Desa Bulalo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Kab. Gorontalo Utara	2010	Nelayan	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	Rp 1,315,805,277	BELUM DIPROSES	Perlu di survey ulang lokasi. Untuk dilakukan inventarisasi kondisi aset
15	EKS. BANGRUM	Kab. Bone Bolango	Desa Tihu, Kec. Bone Pantai, Kab. Bone Bolango	Kab. Bone Bolango	2011	Nelayan	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	Rp 1,066,366,125	BELUM DIPROSES	Perlu di survey ulang lokasi. Untuk dilakukan inventarisasi kondisi aset
16	EKS. BANGRUM	Rumah Khusus Atlet Berprestasi Kota Gorontalo (RSSATLET 19-11)	Desa Dataho, Kec. Tibawa, Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	2019	Atlet	Atlet Berprestasi	Rp 188,513,730	PEMBERKASAN USULAN HIBAH DI SESDITJEN	Dokumen Eksternal sudah diserahkan kepada BP2P Jawa I untuk dapat diusulkan ke Sesditjen
17	EKS. BANGRUM	Rumah Khusus Atlet Berprestasi Kab. Gorontalo (RSSATLET 19-12)	Komplek Kampus Sultan Amal Gorontalo, Kel. Kayumerah, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo	2019	Atlet	Atlet Berprestasi	Rp 188,513,730	PEMBERKASAN USULAN HIBAH DI SESDITJEN	Dokumen Eksternal sudah diserahkan kepada BP2P Jawa I untuk dapat diusulkan ke Sesditjen

STATUS STA BMN BP2P JAWA I DI WILAYAH BP3KP SULAWESI I

NO	SATKER PENCATAT	NAMA BMN / NOMOR PAKET	ALAMAT LOKASI / LOKASI PEMBANGUNAN	KOTA / KABUPATEN	TAHUN PEROLEH AN	NILAI PEROLEHAN (RP)	PROSES SERAH TERIMA ASET	KETERANGAN
18	EKS BANGRUM	PKPSU11-202 - Kab. Minahasa Utara I	1. Perumahan Pemkab. Minut 2. Perumahan The Kalawat Residence 3. Perumahan Griya Bintang Mas I	Kab. Minahasa Utara	2011	Rp 2,899,610,008	PROSES SURAT KESEDIAAN HIBAH PEMDA	Dalam Proses Penandatanganan Surat Tidak Bersedia Menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten
19	EKS BANGRUM	PKPSU11-203 - Kab. Minahasa Utara II	1. Perumahan Pesona Lestari Watutumou 2. Perumahan Mapanget Griya Indah Korpri	Kab. Minahasa Utara	2011	Rp 4,143,324,288	PROSES SURAT KESEDIAAN HIBAH PEMDA	Dalam Proses Penandatanganan Kesediaan Menerima Hibah PSU
20	EKS BANGRUM	PKPSU11-204 - Kab. Minahasa Utara III	1. Perumahan Agape Griya 2. Perumahan CBA Gold Estate 3. Perumahan Griya Klabat Indah II	Kab. Minahasa Utara	2011	Rp 4,386,891,068	PROSES SURAT KESEDIAAN HIBAH PEMDA	Dalam Proses Penandatanganan Kesediaan Menerima Hibah PSU
21	EKS BANGRUM	PKPSU11-205 - Kab. Bolaang Mongondow Utara	Perumahan Griya MBC	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2011	Rp 443,145,815	ASET HILANG/RUSAK BERAT	dimintakan sk kawasan hutan lindung yang bersinggungan dengan lahan bantuan PSU
22	EKS BANGRUM	PKPSU11-209 - Kab. Gorontalo Utara	Perumahan PNS Villa Gorontalo Utara	Kab. Gorontalo Utara	2011	Rp 666,666,902	PERSETUJUAN HIBAH (PROSES PENGHAPUSAN)	NH & BAST dalam Proses Penandatanganan oleh Pemkab
23	EKS. KEMENPERA	BSPK Kab. Bone Bolango 2012	Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango 01	Kab. Bone Bolango	2012	Rp 132,818,517	PEMBERKASAN USULAN HIBAH DI SESDITJEN	dalam proses pengusulan hibah di Sesditjen oleh Dit. RUK

Ket : Berdasarkan Koordinasi dengan pihak BP3KP Jawa I, **BP3KP Sulawesi I hanya membantu untuk Koordinasi dengan Pemda setempat terkait dokumen eksternal saja, dan untuk dokumen internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP3KP Jawa I.**

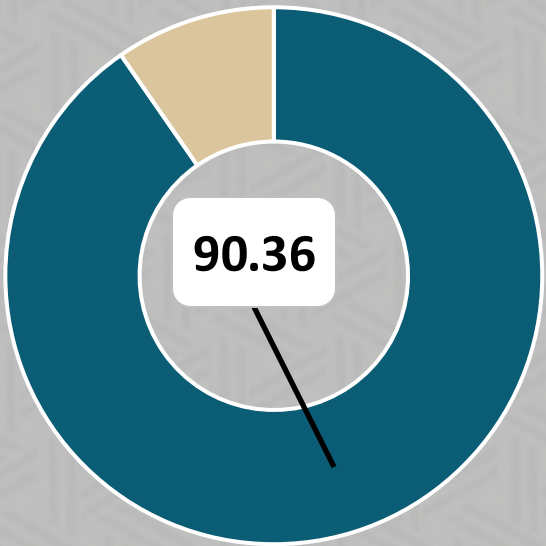
PROGRES KEUANGAN DAN FISIK SATKER PKP SULAWESI UTARA



PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA

SEKRETARIAT JENDERAL
691418

Pagu : Rp. 1.190.091.000
Realisasi : Rp. 1.075.407.623



DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BP3KP Sulawesi I	Rp. 441.044.528	92.90 %
EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 94.628.786	96.17 %
EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 109.677.037	96.83 %
EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 262.842.776	97.96 %
EBA.994.002.E	Operasional Satuan Kerja	Rp. 167.214.496	71.04 %

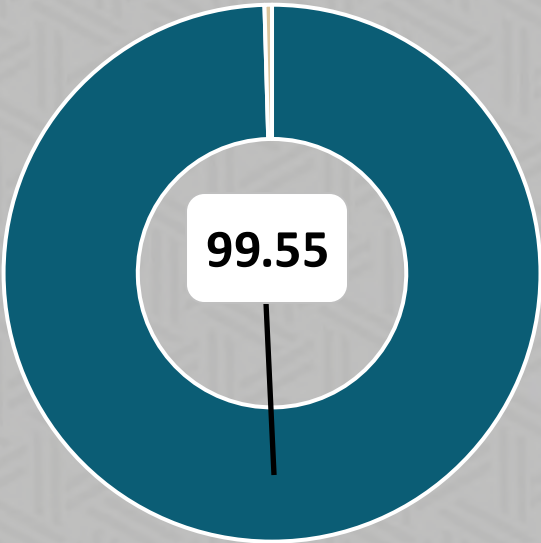
PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA



DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691472

Pagu : Rp. 15.469.687.000
Realisasi : Rp. 15.400.096.263

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.003.100.A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Rp. 84.013.813	81.06 %
RBB.003.101.A	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Rp. 13.900.000.000	100 %
RBB.003.102.A	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Rp. 1.416.082.450	96.59 %

PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA

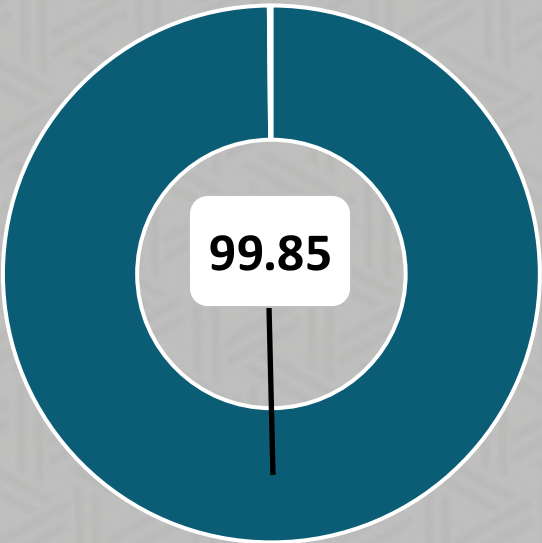


DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN
691526

Pagu : Rp. 140.325.574.000
Realisasi : Rp. 140.112.999.405

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.A	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp. 22.010.000	98,22 %
FAE.001.100.B	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan (Pergeseran)	Rp. 108.394.405	33.96 %
RBB.002.101.A	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	Rp. 136.041.030.000	100 %
RBB.002.102.A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	Rp. 3.841.951.000	100 %
RBB.002.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Khusus Perdesaan	Rp. 99.614.000	99.61 %



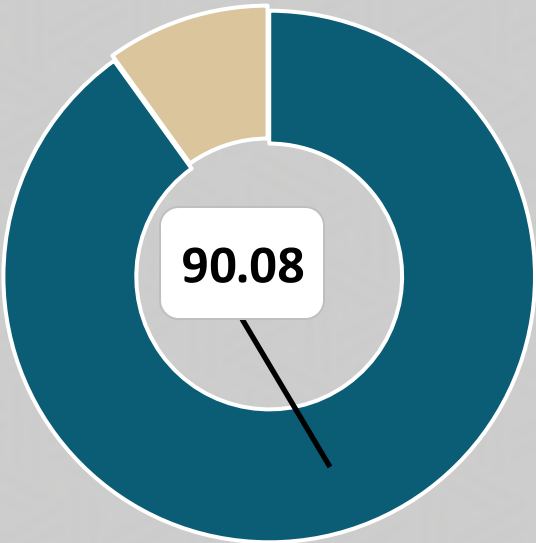
PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA



DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN
691580

Pagu : Rp. 1.841.886.000
Realisasi : Rp. 1.659.201.876

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
F AE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp. 370.879.481	71.06 %
RBB.008.100.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Rp. 1.060.000.000	100 %
RBB.008.100.A	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Perkotaan Sulawesi Utara	Rp. 228.322.395	87.84 %

RUMAH KHUSUS



PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG RUANG DI SULAWESI UTARA

DATA UMUM BANGUNAN	
Nama Rumah Khusus	Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara I
Alamat	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Anggaran	2024 – 2025 (MYC)
Penerima Manfaat	Masyarakat Terdampak Bencana Erupsi Gunung Ruang
Tipe Bangunan/Jumlah Unit	287 Unit
Nilai Kontrak	Rp. 136.041.030.000,00
DATA KONTRAK	
Konsultan MK/SPV	PT. INDAH KARYA
Kontraktor Pelaksana	PT. NINDYA KARYA
DATA PELAKSANAAN	
Progres Fisik	100 %
Waktu Pelaksanaan	533 HK
Waktu Berjalan	533 HK

MINGGU KE – 77 MYC (Kontrak)

Rencana 100 %	Realisasi 100%	Deviasi 0 %	Keuangan 100%
------------------	-------------------	----------------	------------------



Overview Area 2



Overview Area 2



Overview Area 1



Pek. Lapisan AC-WC (T=5 Cm)

PERMASALAHAN :

1. Proses Penghunian Huntap.
2. Proses Serah Terima Aset ke pemeintahDaerah Provinsi Sulawesi Utara, PemerintahDaerah Kab. Kepl. Sitaro, Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan.

TINDAK LANJUT:

1. Balai BP3KP akan melakukan berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Sulawesi Utara, Pemda Kab.Bolsel dan Kab. Kepl. Sitaro dalam Rangka Percepatan Penghunian dan Relokasi Korban Tedampak Bencana Erupsi Gunung Ruang dari Huntara yang berada di Kota Bitung Ke Hunta Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
2. Balai Melakukan Kordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait Serah Terima Aset dan Pembentukan Kelembagaan Unit Pengelola Huntap.

BSPS



PROGRES BSPS PROVINSI SULAWESI UTARA

PAGU TOTAL (FISIK + PENDAMPINGAN)	
Pagu BSPS Total	Rp. 17.311.613.000,00
Realisasi Keuangan Pagu Total	Rp. 16.372.700.303,00
Realisasi Keuangan Pagu Total (%)	94.58 %
PAGU TOTAL	
Pagu Fisik	Rp. 14.960.000.000,00
Realisasi Keuangan Pagu Fisik	Rp. 14.960.000.000,00
Realisasi Keuangan Pagu Fisik (%)	100.00 %
Realisasi Fisik	94.35 % (QS Prov. Sulut)
JUMLAH UNIT	
Delineasi Pesisir	695
Delineasi Perkotaan	53
Total	748

Delineasi Pesisir	
Pekerjaan Saat Ini	1. Pekerjaan Perbaikan Rumah Tahap II 2. Pekerjaan Penyaluran Bahan Bangunan Dari Toko Penyalur ke Penerima Bantuan 3. Pembayaran Toko Tahap I 4. Pembayaran Upah Tahap I 5. Pembayaran Toko Tahap II
Permasalahan	1. Adanya PB yang Belum Melaksanakan Pekerjaan dikarenakan Masih Menunggu Dana Swadaya 2. Terdapat PB yang mengundurkan Diri dikarenakan Keterbatasan Swadaya dan Memasuki Hari Raya NATARU
Tindak Lanjut	1. Sudah Di temui dan Akan segera melakukan Pembangunan 2. Sudah dilakukan Mediasi terhadap PB yang Mengajukan Pengunduran diri tetapi tetap akan mundur dikarenakan tidak cukup dana Untuk melakukan Swadaya

Delineasi Perkotaan	
Pekerjaan Saat Ini	1. Pekerjaan Perbaikan Rumah Tahap II 2. Pekerjaan Penyaluran Bahan Bangunan Dari Toko Penyalur ke Penerima Bantuan 3. Pekerjaan Persiapan penyaluran Tahap II 4. Pembayaran Toko Tahap I
Permasalahan	1. Terdapat Beberapa PB yang Progres dibawah 30% dikarenakan Akses Material yang sulit sehingga Progres Pelaksanaan Pembangunan terhambat. 2. Adanya PB yang hanya bisa mengerjakan Pembangunan sehari dalam seminggu dikarenakan bekerja
Tindak Lanjut	1. Sudah di bicarakan dengan Pemerintah Kelurahan Setempat untuk melakukan Gotong Royong angkut material ke Lokasi Pembangunan

DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN BSPS



Pembekalan TFL TA. 2025



Sosialisasi Kegiatan BSPS TA. 2025



Kegiatan Pemilihan Toko Terbuka



Monitoring PPK pada Kegiatan BSPS



Kunjungan Kepala BP3KP Sulawesi I



Kunjungan Kasatker PKP Sulut

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KOTA MANADO



0%



30%



100%

NAMA PB	:	JOHAN PONGAYOW
DESA/KELURAHAN	:	BUHA
KABUPATEN/ KOTA	:	MANADO
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KOTA MANADO



0%



30%



100%

NAMA PB	:	FIOLEN MAMARIMBING
DESA/KELURAHAN	:	BUHA
KABUPATEN/ KOTA	:	MANADO
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KOTA MANADO



NAMA PB	:	EVIE KAUNANG
DESA/KELURAHAN	:	BUHA
KABUPATEN/ KOTA	:	MANADO
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KOTA BITUNG



0%



30%



100%

NAMA PB	:	BEN GANSA
DESA/KELURAHAN	:	BATU PUTIH ATAS
KABUPATEN/ KOTA	:	BITUNG
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KOTA BITUNG



0%



30%



100%

NAMA PB	:	BETI MAKAPIA
DESA/KELURAHAN	:	BATU PUTIH ATAS
KABUPATEN/ KOTA	:	BITUNG
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPTS SULUT KOTA BITUNG



0%



30%



100%

NAMA PB	:	DJONI LOHONAUMAN
DESA/KELURAHAN	:	BATU PUTIH ATAS
KABUPATEN/ KOTA	:	BITUNG
JUMLAH BANTUAN BSPTS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW



0%



30%



100%

NAMA PB	:	DJONI LOHONAUMAN
DESA/KELURAHAN	:	BATU PUTIH ATAS
KABUPATEN/ KOTA	:	BITUNG
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW



0%



30%



100%

NAMA PB	:	PUJI SUKAMTO
DESA/KELURAHAN	:	MOPUYA UTARA
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW



0%



30%



100%

NAMA PB	:	WAYAN MARIYANTO
DESA/KELURAHAN	:	MOPUYA UTARA
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW



0%



30%



100%

NAMA PB	:	KIPLITOLINGGUHU
DESA/KELURAHAN	:	MOPUYA UTARA
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPTS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN



0%



30%



100%

NAMA PB	:	YUMAN PUNU
DESA/KELURAHAN	:	MAYEMBANGA TIMUR
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPTS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN



0%



30%



100%

NAMA PB	:	JUFRIN TUMBALI
DESA/KELURAHAN	:	MAYEMBANGA TIMUR
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN



0%



30%



100%

NAMA PB	:	ELIS KULATI
DESA/KELURAHAN	:	NUNUKA RAYA
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA



0%



30%



100%

NAMA PB	:	SALAM DJUKA
DESA/KELURAHAN	:	TOMBULAN PANTAI
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW UTARA
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA



0%



30%



100%

NAMA PB	:	LION GOBEL
DESA/KELURAHAN	:	TOMBULAN PANTAI
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW UTARA
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA



0%



30%



100%

NAMA PB	:	SAMSUL LUMOTO
DESA/KELURAHAN	:	PONTAK
KABUPATEN/ KOTA	:	BOLAANG MONGONDOW UTARA
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. MINAHASA



0%



30%



100%

NAMA PB	:	JERRY MUMEK
DESA/KELURAHAN	:	SINUIAN
KABUPATEN/ KOTA	:	MINAHASA
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. MINAHASA



0%



30%



100%

NAMA PB	:	STIVO GERUNGAN
DESA/KELURAHAN	:	SINUAN
KABUPATEN/ KOTA	:	MINAHASA
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. MINAHASA



0%



30%



100%

NAMA PB	:	REINE TAMBAHANI
DESA/KELURAHAN	:	TATAARAN I
KABUPATEN/ KOTA	:	MINAHASA
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. MINAHASA SELATAN



0%



30%



100%

NAMA PB	:	DENI TEESEN
DESA/KELURAHAN	:	RUMOONG BAWAH
KABUPATEN/ KOTA	:	MINAHASA SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. MINAHASA SELATAN



0%



30%



100%

NAMA PB	:	SARTJE RAINYAMA
DESA/KELURAHAN	:	RUMOONG BAWAH
KABUPATEN/ KOTA	:	MINAHASA SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT KAB. MINAHASA SELATAN



0%



30%



100%

NAMA PB	:	MAXI TICOALU
DESA/KELURAHAN	:	RUMOONG BAWAH
KABUPATEN/ KOTA	:	MINAHASA SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS	:	RP. 20.000.000

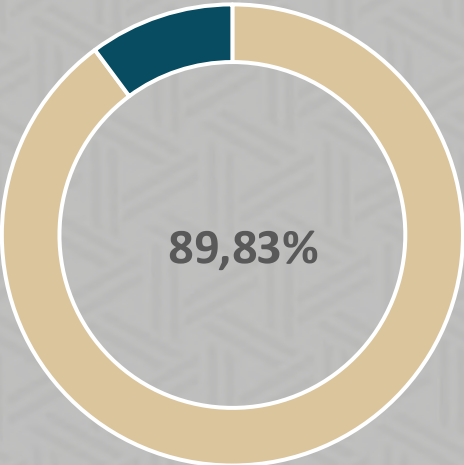
PROGRES KEUANGAN DAN FISIK SATKER PKP GORONTALO



PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT JENDERAL
691419

Pagu RKAKL : Rp. 688.873.000
Realisasi : Rp. 618.831.762



DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
EBA.994.002.A	Layanan Perkantoran	Rp. 527.551.762	88,28%
EBA.994.002.B	Honorarium PISK Kawasan Permukiman	Rp. 50.880.000	100,00%
EBA.994.002.C	Honorarium PISK Perdesaan	Rp. 16.240.000	100,00%
EBA.994.002.D	Honorarium PISK Perkotaan	Rp. 24.160.000	100,00%

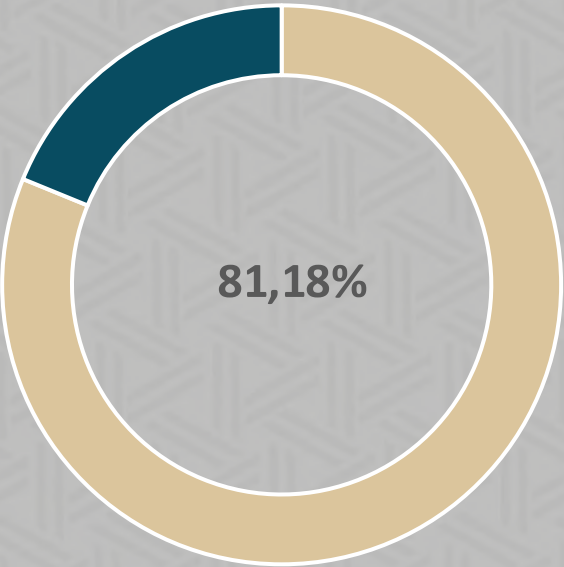
PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO



DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691473

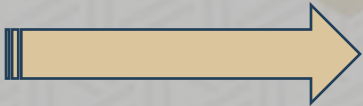
DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu RKAKL : Rp. 10.302.871.000
Realisasi : Rp. 8.363.643.663



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
RBB.005.102.A	Pembangunan Kawasan Kumuh	Rp. 3.998.048.000	100%
FAE.003.100.A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Rp. 66.318.538	73.24%
RBB.001.100.0A	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Prov. Gorontalo	Rp. 124.000.000	70.45%
RBB.001.108.A	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	Rp. 212.027.335	88,71%
RBB.005.100.A	Perencanaan Teknis Penanganan Kawasan Kumuh	Rp. 48.590.000	100%
RBB.005.100.B	Perencanaan Teknis Kawasan Sanitasi	Rp. 36.000.000	100%

SAMBUNGAN DETAIL



PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO



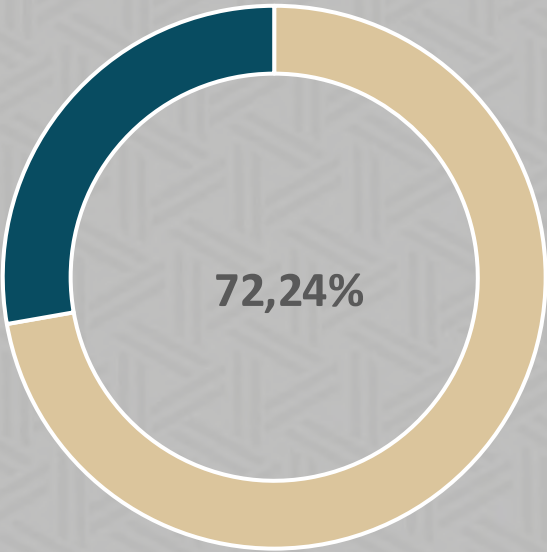
DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691473

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
RBB.005.102.B	Pembangunan Kawasan Sanitasi	Rp. 1.468.184.000	100%
RBB.005.103.A	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh	Rp. 136.767.167	57.69%
RBB.005.103.B	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Sanitasi	Rp. 99.260.623	58.56%
RBB.001.101.0A	Pembangunan PSU Perumahan (Palma Residence)	Rp. 341.055.000	100%
RBB.001.101.0B	Pembangunan PSU Perumahan (Rifka Lestari)	Rp. 1.099.810.000	100%
RBB.001.101.0C	Pembangunan PSU Perumahan (Amanda Residence)	Rp. 446.833.000	100%
RBB.001.101.D	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Alya Residence II	Rp. 286.750.000	100%

PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN
691527

Pagu : Rp. 117.423.000
Realisasi : Rp. 84.825.688

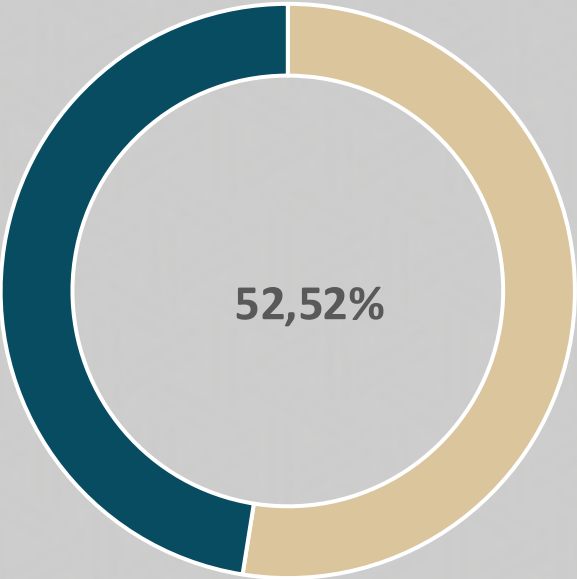


DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
FAE.001. 100.0A	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp. 84.825.688	72,24%

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN
691581

Pagu RKAKL : Rp. 508.065.000
Realisasi : Rp. 266.840.422



DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.0A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp. 266.840.422	52,52%

PSU



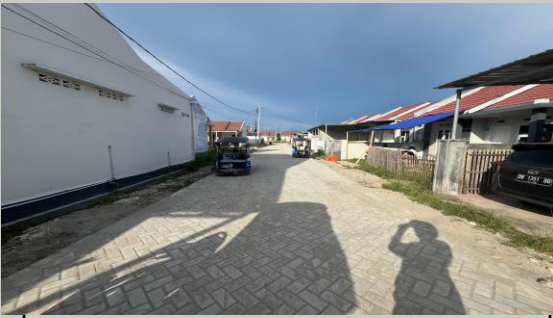
PAKET PSU

PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR PALMA RESIDENCE

DATA UMUM	
Nama Paket	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Palma Residence, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Alamat	Jl. Palma, Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo
Tahun Anggaran	2025
Penerima Manfaat	Perumahan Palma Residence
Tipe Perkerasan/Jumlah Unit	Paving Block/83 Unit
Kepemilikan Aset	PT. Falindo Karya Prima
Nilai Perolehan	Rp. 341.055.000
DATA KONTRAK	
Konsultan Supervisi	Rendy R.S. Monoarfa, S.T.,
Kontraktor Pelaksana	PT. Falindo Karya Prima
DATA PELAKSANAAN	
Waktu Pelaksanaan	85 HK
Sisa Waktu	8 HK

KEUANGAN (FISIK)	
Rencana	100%
Realisasi	100%
Deviasi	0%

PEMBANGUNAN	
Rencana	100%
Realisasi	100 %
Deviasi	0 %



Ruas 5



Ruas 8



Ruas 9



Ruas 6



Ruas 7

PAKET PSU

PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR RIFKA LESTARI



DATA UMUM			
Nama Paket		Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Rifka Lestari, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo (PSU25-GORONTALO-KABGORONTALO-02)	
Alamat		Jl. Abdul Gandhi Pajuhi, Desa Dumati, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo	
Tahun Anggaran		2025	
Penerima Manfaat		Perumahan Rifka Lerstari	
Tipe Perkerasan/Jumlah Unit		Paving Block/ 249 Unit	
Kepemilikan Aset		PT. Rifka Mutiara Indah	
Nilai Perolehan		Rp. 1.099.810.000	
DATA KONTRAK			
Konsultan Supervisi		Roki Monoarfa, S.T.	
Kontraktor Pelaksana		PT. Rifka Mutiara Indah	
DATA PELAKSANAAN			
Waktu Pelaksanaan		90 HK	
Sisa Waktu		8 HK	
KEUANGAN (FISIK)		PEMBANGUNAN	
Rencana	100%	Rencana	100%
Realisasi	100%	Realisasi	100 %
Deviasi	0%	Deviasi	0 %



Ruas 19



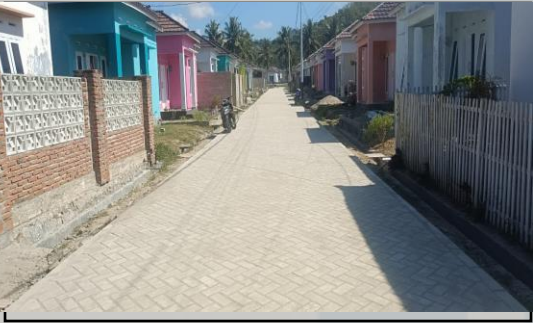
Ruas 23



Ruas 21



Ruas 22



Ruas 18

PAKET PSU

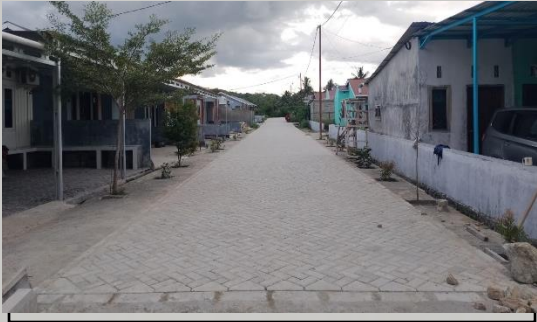
PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR AMANDA RESIDENCE

DATA UMUM BANGUNAN	
Nama Paket	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Amanda Residence, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Alamat	Jl. Runi S. Kabli Desa Talumelito Kec. Telaga Biru
Tahun Anggaran	2025
Penerima Manfaat	Perumahan Amanda Residence
Tipe Bangunan/Jumlah Unit	Paving Block/103 Unit
Kepemilikan Aset	PT.Irgi Elektrikal
Nilai Kontrak	Rp. 446.833.000
DATA KONTRAK	
Konsultan Supervisi	Zulman L. Yahya, S. Ars
Kontraktor Pelaksana	PT.Irgi Elektrikal
DATA PELAKSANAAN	
Waktu Pelaksanaan	85 HK
Sisa Waktu	8 HK

KEUANGAN (FISIK)		PEMBANGUNAN	
Rencana	100%	Rencana	100%
Realisasi	100%	Realisasi	100,0 %
Deviasi	0%	Deviasi	0 %



Ruas 9



Ruas 5



Ruas 6



Ruas 8



Ruas 9

PAKET PSU

PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR ALYA RESIDENCE 3

DATA UMUM BANGUNAN	
Nama Paket	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Alya Residence 3, Kota. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Alamat	Kelurahan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran	2025
Penerima Manfaat	Perumahan Alya Residence 3
Tipe Bangunan/Jumlah Unit	paving block/62
Kepemilikan Aset	PT Dwi Putri Utama Mandiri
Nilai Kontrak	Rp. 286.750.000
DATA KONTRAK	
Konsultan Supervisi	Abd. Mashuramadan S. Ars
Kontraktor Pelaksana	PT Dwi Putri Utama Mandiri
DATA PELAKSANAAN	
Waktu Pelaksanaan	55 HK
Sisa Waktu	8 HK

KEUANGAN (FISIK)		PEMBANGUNAN	
Rencana	100%	Rencana	100 %
Realisasi	100%	Realisasi	100 %
Deviasi	0 %	Deviasi	0.%



Ruas 1



Ruas 2



Ruas 2



Ruas 3



Ruas 3

KUMUH



DATA UMUM BANGUNAN	
Nama Paket	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
Alamat	Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo
Tahun Anggaran	2025
Penerima Manfaat	Masyarakat Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo
Tipe Bangunan/Jumlah Unit	Saluran Drainase dan Paving Blok
Kepemilikan Aset	Pemerintah Kota Gorontalo
Nilai Kontrak	Rp. 3.928.048.000
DATA KONTRAK	
Konsultan Supervisi	Ar. Muh. Syahrul Latif, S.T.
Kontraktor Pelaksana	CV. Liuntuhaseng Brothers
DATA PELAKSANAAN	
Waktu Pelaksanaan	63 HK
Sisa Waktu	0 HK

KEUANGAN (FISIK)		PEMBANGUNAN	
Rencana	100%	Rencana RPATA	90,76 %
Realisasi	50%	Realisasi RPATA	90.87 %
Deviasi	0%	Deviasi	+ 0.09 %



Ruas A



Ruas B



Ruas C

PEKERJAAN SAAT INI :

- Pekerjaan Pemasangan Kanstin ruas A
- Pekerjaan Pemasangan Paving ruas A
- Pekerjaan Pemasangan Kanstin ruas B
- Pekerjaan Pemasangan Paving ruas B
- Pekerjaan Cor plat ruas C
- Pekerjaan Pemasangan Kanstin ruas C

PERMASALAHAN :

- Tukang masih kurang untuk mengejar target progress yang harus dicapai.
- Cuaca hujan

TINDAK LANJUT :

- Sudah diadakan SCM1

SANITASI

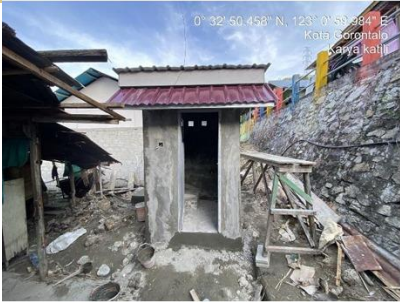


DATA UMUM BANGUNAN	
Nama Paket	Pembangunan Sanitasi Kawasan Kumuh
Alamat	Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo
Tahun Anggaran	2025
Penerima Manfaat	Masyarakat Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo
Tipe Bangunan/Jumlah Unit	100 Unit SPALD-S Individual
Kepemilikan Aset	Pemerintah Kota Gorontalo
Nilai Kontrak	Rp. 1.468.184.000
DATA KONTRAK	
Konsultan Supervisi	Riska Abukasi, S.Ars
Kontraktor Pelaksana	CV. Aries Karya
DATA PELAKSANAAN	
Waktu Pelaksanaan	63 HK
Sisa Waktu	0 HK

KEUANGAN (FISIK)		PEMBANGUNAN	
Rencana	100%	Rencana RPATA	97,60%
Realisasi	50%	Realisasi RPATA	95.91%
Deviasi	0%	Deviasi	-1,69%



Pek. Plesteran dan Aci



Pek.Atap



Pek. Pengecatan



Pek. Dinding



Pek. Pemasangan Bio Septic

PEKERJAAN SAAT INI :

- Pondasi dan Sloof 2 unit
- Dinding dan Kolom 93 unit
- Plesteran dan Aci 89 unit
- Atap 80 unit
- Lantai Keramik 87 unit
- Pemasangan Septic 73 unit
- Cor Penutup Septic 66 unit
- Galian Resapan & Pas. Dinding 36 unit
- Pengecatan 77 unit

PERMASALAHAN :

- Kurangnya material di Lokasi pekerjaan menyebabkan pekerjaan jadi terlambat
- Muka air tanah mulai naik di Lokasi pekerjaan menyebabkan pekerjaan jadi terlambat

TINDAK LANJUT:

- Memberikan instruksi kepada pelaksana untuk menyediakan kebutuhan material yang akan digunakan
- Memberikan instruksi kepada pelaksana untuk mempercepat pekerjaan yang belum selesai di Lokasi yang dekat dengan sungai

PROGRES KEUANGAN DAN FISIK SATKER PKP MALUKU UTARA



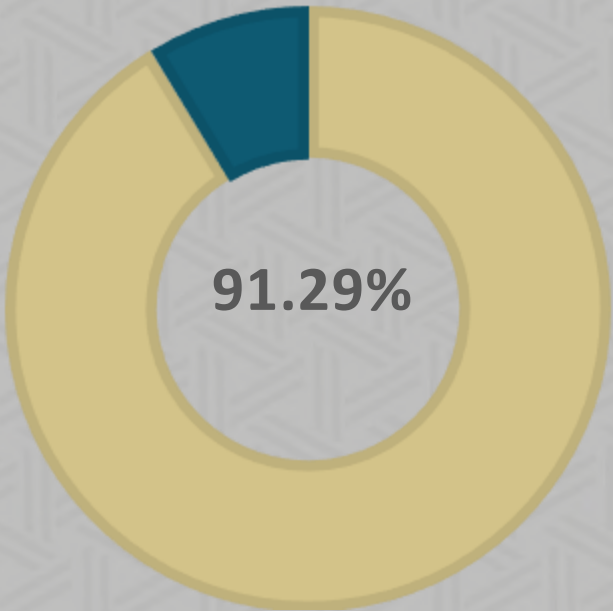
PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI MALUKU UTARA



SEKRETARIAT JENDERAL
691420

Pagu : Rp. 1,017,271,000
Realisasi : Rp. 928,656,312

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan Satker	Rp. 370,161,659	99.13%
EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 61,088,826	99.91%
EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 105,902,000	99.93%
EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 171,994,520	90.24%
EBA.994.002.E	Perjalanan Dinas dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi	Rp. 219,509,307	76.71%

PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI MALUKU UTARA

DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691474

Pagu : Rp. 16.420.364.000
Realisasi : Rp. 16,419,079,208

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI		PERSENTASE REALISASI
FAE.003.100.A	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	111.409.930	99.51%
RBB.003.101.A	Pelaksanaan bantuan Stimulan Rumah Swadaya diKawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara	Rp.	15,360,000,000	100.00%
RBB.003.101.B	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	Rp.	947,669,278	99.92%



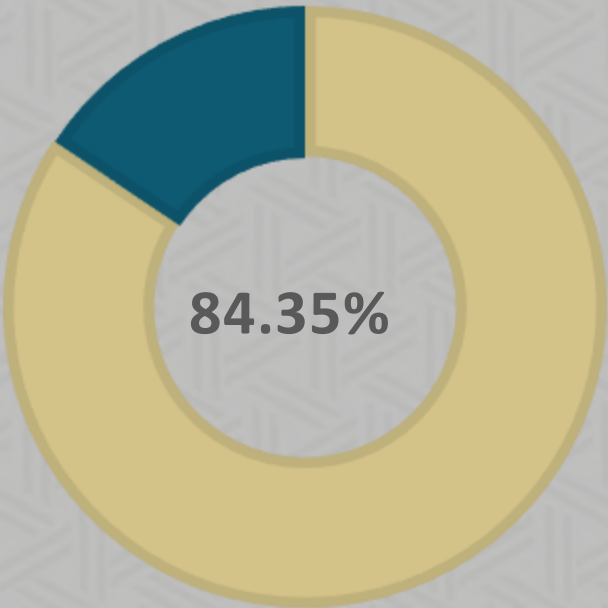
PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI MALUKU UTARA

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN
691528

Pagu : Rp. 16.069.470.000
Realisasi :Rp. 13,554,446,699

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI		PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.A	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bancana Banjir di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	Rp.	137,439,585	98.25%
RBB.002.101.A	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya		-	0.00%
RBB.002.101.B	Pembayaran Tunggal atas Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Provinsi Maluku Utara	Rp.	12,968,053,300	100.00%
RBB.002.102.A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan		-	0.00%
RBB.002.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	Rp.	99,297,437	99.30%
RBB.002.102.C	Pembayaran Tunggal atas Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Provinsi Maluku Utara	Rp.	349,656,377	100.00%



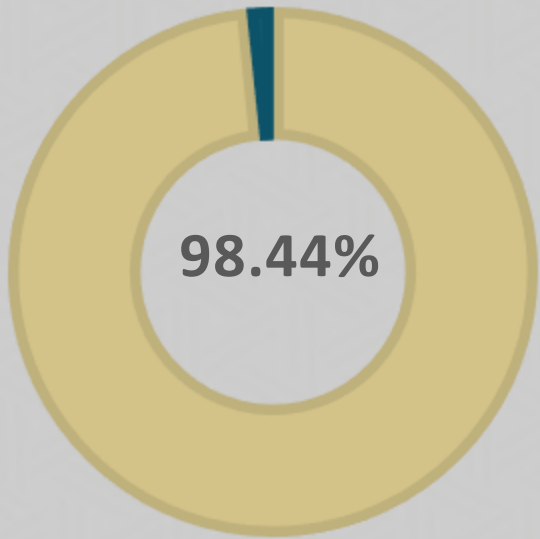
PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI MALUKU UTARA



DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN
691582

Pagu : Rp. 8,588,335,000
Realisasi : Rp. 8,454,534,930

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN



KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI		PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.A	Perencanaan , Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	282,294,666	93.76%
FAE.001.100.B	Perjalanan Dinas dalam Rangka Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi	Rp.	369,838,515	85.70%
RBB.008.100.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Rp.	7,250,000,000	100.00%
RBB.008.101.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Rp.	552,401,749	91.20%

RUMAH KHUSUS



NAMA PAKET RUMAH KHUSUS

Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Tahun Anggaran 2024



DATA UMUM BANGUNAN	
Nama Rumah Khusus	Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Alamat	Jl. Pertamina, Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate
Tahun Anggaran	2024
Penerima Manfaat	Korban Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate
Tipe Bangunan/Jumlah Unit	49 Unit Hunian, 1 Unit Musallah dan PSU
Kepemilikan Aset	Pemerintah Kota Ternate
Nilai Perolehan	18.204.191.227
DATA KONTRAK	
Konsultan MK/SPV	PT. Indah Karya (Persero)
Kontraktor Pelaksana	PT. Nindya Karya
Penyedia Jasa Meubelair	-
DATA PELAKSANAAN	
Progres Fisik	100%
Progres Meubelair	-
Serah Terima I	31 Desember 2024
Rencana Serah Terima II	31 desember 2025
Waktu Pelaksanaan	110 Hari
Sisa Waktu	-



Perspektif



Tampak Depan



Tampak Belakang



Samping Kanan



Mushola



Perspektif

Rencana 100

Realisasi 100%

Deviasi -

Keuangan 100%

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUSUS

KEGIATAN : Kunjungan Kerja Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP. Pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Huntap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate dan Kegiatan BSPS



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUSUS



KEGIATAN : Kunjungan Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP

Pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 telah dilakukan Kunjungan Kerja dan Audiensi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Walikota Ternate, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Maluku Utara



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUSUS

KEGIATAN : Kunjungan Lapangan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP
Pada hari Kamis tanggal 11 September telah dilaksanakan Kunjungan Lapangan Ke Lokasi Pembangunan Huntap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUSUS



KEGIATAN : **Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah Provinsi Maluku Utara.** Pada hari Jumat tanggal 12 September telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah Provinsi Maluku Utara



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUSUS

KEGIATAN : Rapat Entry Meeting Post Audit antara Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP bersama BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Tanggal 11 September 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUSUS



KEGIATAN : Kegiatan Post Audit Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate Provinsi Maluku Utara oleh BPKP Provinsi Maluku Utara bersama Tim Inspektorat III Kementerian PKP



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUSUS



KEGIATAN : Pendampingan Post Audit Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Oleh Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian PKP



17 Sep 2025 03:12:53 PM
N 0.760064°, E 127.318467°
Ternate
North Maluku
Indonesia

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUSUS



KEGIATAN : Rapat Penyampaian dan Pembahasan Hasil Audit atas Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Bencana Banjir Bandang di Provinsi Maluku Utara

Pada tanggal 1 Oktober 2025 dilaksanakan Penyampaian dan Hasil Audit oleh BPKP Provinsi Maluku Utara



BSPS



PROGRES BSPS PROVINSI MALUKU UTARA

PAGU TOTAL (FISIK + PENDAMPINGAN)	
Pagu BSPS Total	Rp 24,164,128,000
Realisasi Keuangan Pagu Total	Rp 24,110,071,027
Realisasi Keuangan Pagu Total	99.78%
PAGU TOTAL	
Pagu Fisik	Rp 22,610,000,000
Realisasi Keuangan Pagu Fisik	Rp 22,610,000,000
Realisasi Keuangan Pagu Fisik	100.00%
Realisasi Fisik	1. Pesisir: 85.99% 2. Perkotaan: 61.65%
JUMLAH UNIT	
Delineasi Pesisir	384
Delineasi Perkotaan	290
Delineasi Perdesaan	0
Total	674

Delineasi Pesisir	
Pekerjaan Saat Ini	Pembangunan Fisik
Permasalahan	1. Keterlambatan Distribusi Bahan akibat cuaca buruk 2. Toko Material tidak sanggup melakukan distribusi secara serentak karena kekurangan armada
Tindak Lanjut	Koordinasi dengan toko untuk menambah armada agar mempercepat pendistribusian bahan
Delineasi Perdesaan	
Pekerjaan Saat Ini	-
Permasalahan	-
Tindak Lanjut	-
Delineasi Perkotaan	
Pekerjaan Saat Ini	Pendistribusian Bahan Bangunan Tahap 1 dan Pembangunan Fisik
Permasalahan	Keterlambatan pendistribusian bahan akibat cuaca buruk
Tindak Lanjut	Koordinasi dengan toko untuk menambah armada agar mempercepat pendistribusian bahan

DOKUMENTASI PROGRES BSPS DELINEASI PESISIR

KEGIATAN : Pemilihan Toko Terbuka & Distribusi Material Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA. 2025



DOKUMENTASI PROGRES BSPS DELINEASI PESISIR

KEGIATAN : Distribusi Material Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA. 2025



DOKUMENTASI PROGRES BSPS DELINEASI PESISIR

KEGIATAN : Distribusi Material Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA. 2025



DOKUMENTASI PROGRES BSPS DELINEASI PESISIR

KEGIATAN : Pekerjaan Pembangunan Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA. 2025 dan Monitoring dan Evaluasi oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman



DOKUMENTASI PROGRES BSPS DELINEASI PESISIR

KEGIATAN : Monitoring dan Evaluasi kegiatan BSPS TA. 2025 Delineasi Pesisir



DOKUMENTASI PROGRES BSPTS DELINEASI PERKOTAAN

KEGIATAN : Survey Toko dan Pemilihan Toko Terbuka Program BSPTS Delineasi Perkotaan



DOKUMENTASI PROGRES BSPS DELINEASI PERKOTAAN

KEGIATAN : Distribusi Material kegiatan BSPS TA. 2025 Delineasi Perkotaan



DOKUMENTASI PROGRES BSPS DELINEASI PERKOTAAN

KEGIATAN : **Monitoring dan Evaluasi kegiatan BSPS TA. 2025 Delineasi Perkotaan**



DOKUMENTASI PROGRES BSPTS DELINEASI PERKOTAAN

KEGIATAN : Monitoring dan Evaluasi kegiatan BSPTS TA. 2025 Delineasi Perkotaan



DOKUMENTASI PROGRES BSPTS DELINEASI PERKOTAAN

KEGIATAN : Kunjungan Lokasi BSPTS dan Pemasangan Peneng oleh Kepala BP3KP Sulawesi I



Untuk memperkuat transparansi dan mencegah penyimpangan, berikut 3 (tiga) kanal pengaduan resmi yang dapat digunakan:

- 1 **BENAR-PKP**, melalui whatsapp di 0812-88888-911.
- 2 **AWASI-PKP**, melalui website: <https://awasi.pkp.go.id> dan whatsapp 0811-1010-0888.
- 3 **SP4N-LAPOR!**, melalui website: <https://spanlapor.go.id>, aplikasi SP4N-LAPOR (Android/iOS) dan SMS ke 1708.



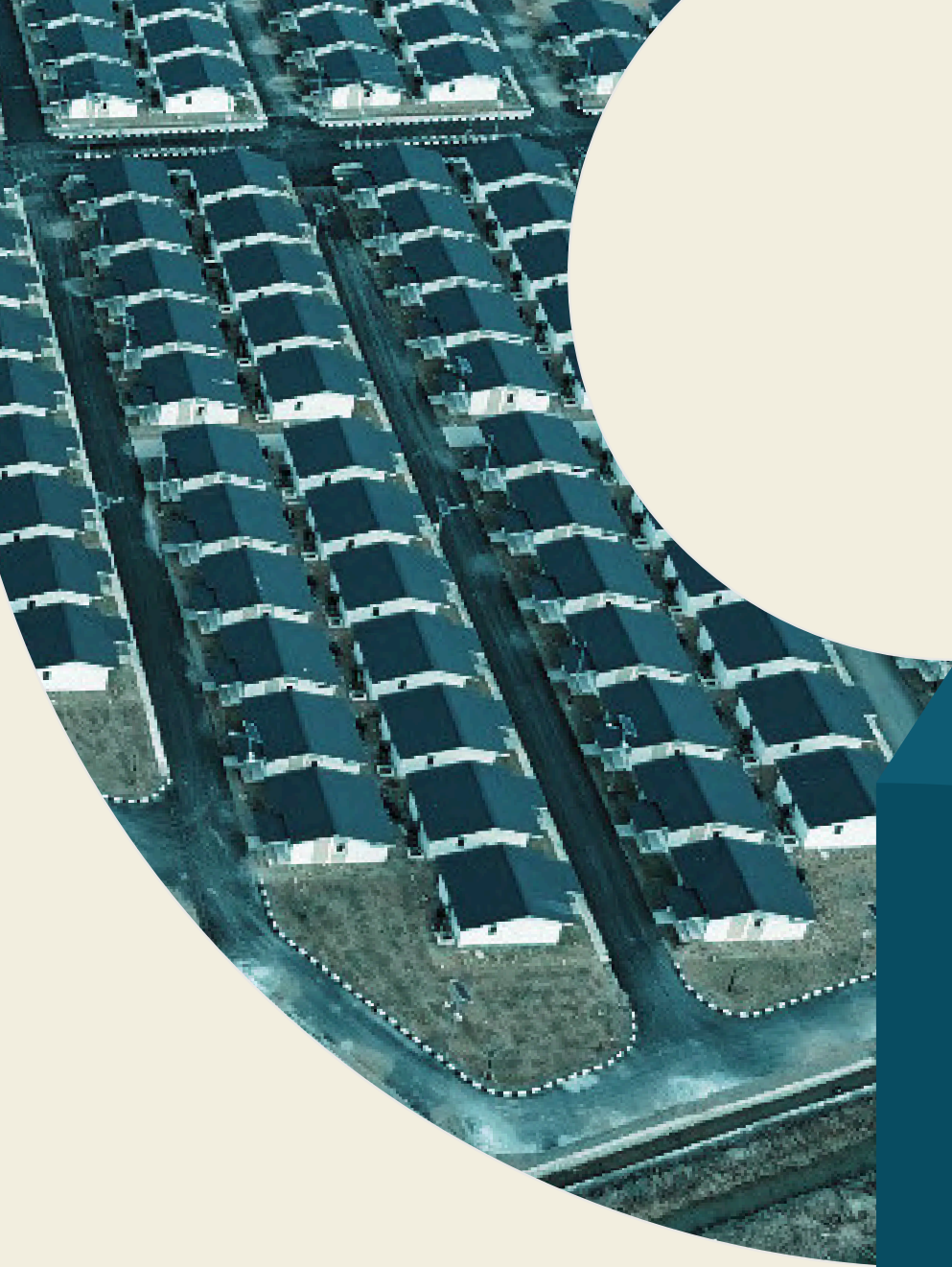


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gotong Royong
Membangun *Rumah*
untuk Rakyat

TERIMA KASIH





2025

LAPORAN KLINIK PKP

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I.

Laporan akhir ini berisi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Klinik PKP BP3KP Sulawesi I selama periode Januari sampai dengan bulan Desember 2025 dalam menjalankan rencana dan mencapai target kegiatan Klinik PKP Tahun 2025. Laporan ini terdiri dari pendahuluan, Gambaran Umum dan Rencana Kerja, Capaian, Permasalahan dan Kendala, Kesimpulan dan Saran. Adapun tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah melaporkan serta mengevaluasi kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami berharap saran dan masukan yang membangun untuk laporan akhir ini dapat menjadi sarana evaluasi agar memacu kinerja yang lebih produktif untuk kedepannya. Terima kasih.

Manado, Januari 2026

Kepala Balai,



Ir. H. HUJURAT S.T., M.T.
NIP. 196811251999031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Lingkup Pekerjaan	1
1.3 Metode Kerja.....	2
BAB II	4
GAMBARAN UMUM.....	4
2.1 Wilayah Kerja	4
2.2 Potensi Dukung Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).....	6
BAB III	8
REKAPITULASI CAPAIAN	8
3.1 Kegiatan Sosialisasi, Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis	8
3.2 Kegiatan Penunjang Klinik PKP.....	14
BAB IV.....	16
PERMASALAHAN DAN KENDALA	16
4.1 Permasalahan dan Kendala	16
4.2 Rekomendasi Kebijakan	17
BAB V.....	18
PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekapitulasi Kegiatan Klinik PKP Bulan Januari Hingga Desember 2025	8
Tabel 3.2 Dokumentasi Kegiatan Klinik PKP Bulan Januari Hingga Desember 2025.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Provinsi Sulawesi Utara.....	4
Gambar 2.2 Peta Provinsi Gorontalo.....	5
Gambar 2.3 Peta Provinsi Maluku Utara.....	5
Gambar 3. 1 Leaflet Klinik PKP.	14
Gambar 3.2 Ruang Layanan Klinik PKP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian target penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan kapasitas tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I. Klinik PKP berfungsi sebagai wadah konsultasi, asistensi, dan bimbingan teknis yang terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Melalui layanan Klinik PKP, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dan masyarakat seperti keterbatasan kapasitas teknis, penyusunan dokumen RP3KP, pengelolaan data perumahan, maupun pelaksanaan program bantuan dapat diatasi dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis solusi.

Selain itu, Klinik PKP juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam memastikan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program perumahan dan permukiman. Dengan demikian, kegiatan Klinik PKP berperan penting dalam memperkuat sinergi multipihak dan mempercepat pencapaian target penurunan backlog perumahan serta peningkatan kualitas permukiman di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara khususnya di wilayah kerja BP3KP Sulawesi I.

1.2 Lingkup Pekerjaan

1. Potensi

Lingkup pekerjaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencakup seluruh kegiatan layanan konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sulawesi I. Secara umum, kegiatan Klinik PKP meliputi:

1) Layanan Informasi

- 1) Program, kebijakan/regulasi, dan jenis bantuan perumahan dan kawasan permukiman dari Kementerian PKP.

- 2) Edukasi publik tentang rumah layak huni, rumah subsidi, dan pencegahan kawasan kumuh.
- 2) Layanan Konsultasi
 - 1) Konsultasi perencanaan rumah: desain, RAB, PBG, SLF, legalisasi lahan, konsep green building.
 - 2) Konsultasi pembiayaan: sumber pendanaan, pemilihan lembaga keuangan, analisis kemampuan angsur, dan skema KPR.
 - 3) Konsultasi pelaksanaan konstruksi: teknik membangun, pemilihan tukang, material, metode perbaikan rumah.
 - 4) Konsultasi pengawasan konstruksi: teknik pengawasan, kartu kendali konstruksi mandiri.
 - 5) Konsultasi pemanfaatan rumah/perumahan: pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan.
 - 6) Konsultasi pencegahan kawasan kumuh: RP2KPKP, pemberdayaan masyarakat, dan upaya pencegahan.
 - 7) Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat (terkait aplikasi BENAR-PKP).
- 3) Pendampingan dan Bantuan Teknis
 - 1) Pendampingan perancangan/pembangunan rumah sederhana.
 - 2) Penyusunan RAB pembangunan/perbaikan rumah.
 - 3) Advis teknis penggunaan bahan bangunan, metode konstruksi, dan pembiayaan.
 - 4) Pendampingan pengawasan konstruksi dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui lingkup pekerjaan tersebut, Klinik PKP diharapkan dapat berperan sebagai pusat layanan dan fasilitasi terpadu yang membantu mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di wilayah kerja BP3KP Sulawesi I.

1.3 Metode Kerja

Metode kerja Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disusun untuk memastikan pelaksanaan layanan berjalan efektif, terarah, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pelaksanaan kegiatan Klinik PKP dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

A. Perencanaan Pelaksanaan

- 1) Penunjukan Penanggung Jawab Klinik PKP di tingkat Balai (Eselon IV/Jabatan Fungsional). Penetapan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli/Jabatan Fungsional Teknis yang bertugas dalam pemberian layanan.
- 2) Penyusunan rencana kerja bulanan yang mencakup jenis layanan, target capaian, dan strategi pelaksanaan.

B. Pelaksanaan Layanan

Layanan Klinik PKP diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui metode utama yaitu Layanan Offline (Tatap Muka): Dilaksanakan di loket layanan Klinik PKP di kantor BP3KP Sulawesi I atau di lokasi kegiatan luar kantor, seperti sosialisasi, pendampingan, maupun kunjungan lapangan.

C. Koordinasi dan Kolaborasi Multipihak

Klinik PKP mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat efektivitas layanan. Kolaborasi dilakukan melalui kegiatan bersama seperti pelatihan, pendampingan teknis, atau kemitraan CSR dalam bidang perumahan.

D. Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan layanan Klinik PKP diawasi secara berjenjang mulai dari tingkat daerah yang diawasi oleh BP3KP Sulawesi I, hingga tingkat pusat oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
- 2) Evaluasi dilakukan melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun, dengan penilaian kinerja mengacu pada indikator capaian:
 - a) Jumlah masyarakat yang mengakses informasi;
 - b) Jumlah layanan konsultasi;
 - c) Jumlah bantuan teknis; dan
 - d) Kualitas layanan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.

Dengan metode kerja yang terstruktur dan terukur, Klinik PKP diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif dalam mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak huni serta penguatan kapasitas daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Wilayah Kerja

Wilayah kerja Klinik PKP BP3KP Sulawesi I mencakup beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, sesuai dengan pembagian wilayah kerja Balai. Klinik PKP beroperasi untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah tersebut.

Adapun wilayah kerja BP3KP Sulawesi I meliputi:

A. Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 2.1 Peta Provinsi Sulawesi Utara

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Kota Manado | 2. Kota Tomohon |
| 3. Kota Bitung | 4. Kota Kotamobagu |
| 5. Kabupaten Minahasa | 6. Kabupaten Minahasa Utara |
| 7. Kabupaten Minahasa Tenggara | 8. Kabupaten Minahasa Selatan |
| 9. Kabupaten Bolaang Mongondow | 10. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| 11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 12. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur |
| 13. Kabupaten Kepulauan Sangihe | 14. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |
| 15. Kabupaten Kepulauan Talaud | |

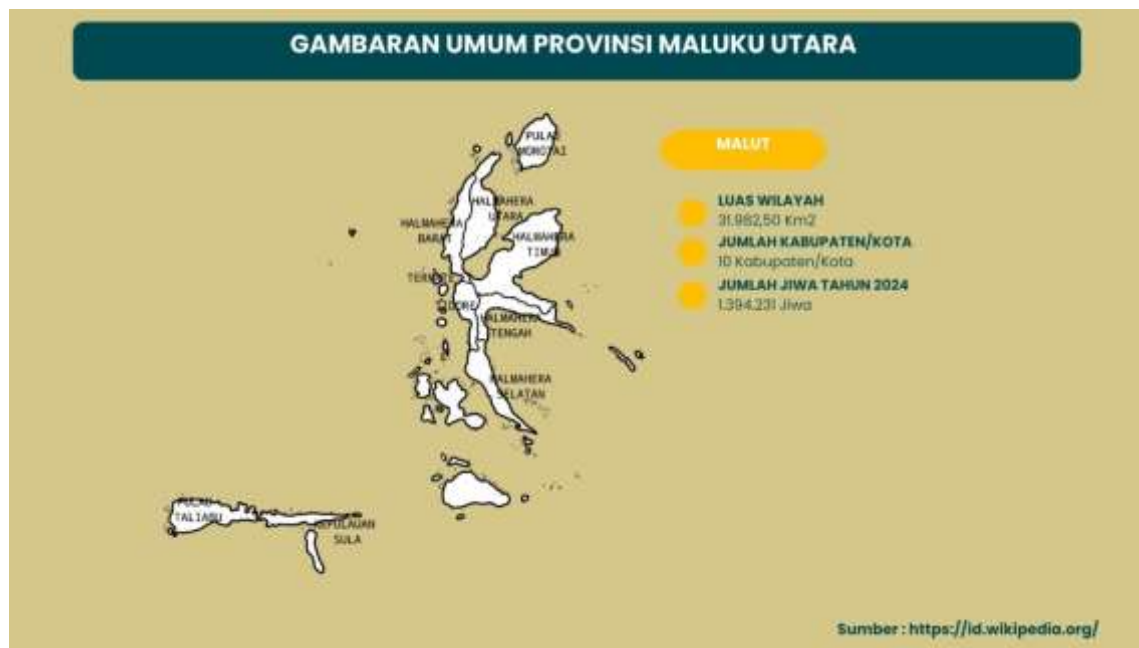
B. Provinsi Gorontalo



Gambar 2.2 Peta Provinsi Gorontalo

1. Kota Gorontalo
2. Kabupaten Gorontalo
3. Kabupaten Boalemo
4. Kabupaten Gorontalo Utara
5. Kabupaten Bone Bolango
6. Kabupaten Pohuwato

C. Provinsi Maluku Utara



Gambar 2.3 Peta Provinsi Maluku Utara

1. Kota Ternate
2. Kabupaten Halmahera Timur
3. Kota Tidore Kepulauan
4. Kabupaten Halmahera Utara
5. Kabupaten Halmahera Barat
6. Kabupaten Kepulauan Sula
7. Kabupaten Halmahera Selatan
8. Kabupaten Pulau Morotai
9. Kabupaten Halmahera Tenggara
10. Kabupaten Pulau Taliabu

Target lokasi layanan Klinik PKP BP3KP Sulawesi I Tahun 2025 difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap peningkatan kualitas hunian dan permukiman, serta daerah dengan tingkat partisipasi aktif dalam program perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, pelaksanaan layanan juga diarahkan untuk menjangkau:

- 1) Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan pendampingan dalam pembangunan atau perbaikan rumah secara swadaya;
- 2) Pemerintah daerah yang membutuhkan asistensi dan konsultasi teknis dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Pelaku usaha dan sektor swasta yang mendukung program perumahan melalui kegiatan kemitraan dan CSR.

Dengan cakupan wilayah yang luas, BP3KP Sulawesi I berkomitmen untuk memberikan pelayanan Klinik PKP yang merata, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Upaya ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mempercepat peningkatan akses terhadap hunian layak huni dan lingkungan permukiman yang sehat, aman, serta berkelanjutan di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

2.2 Potensi Dukung Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Wilayah kerja BP3KP Sulawesi I memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan dan pelaksanaan layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Potensi tersebut berasal dari keberagaman karakter wilayah, dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, serta kolaborasi multipihak yang telah terjalin di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Beberapa potensi dan peluang yang dapat mendukung layanan Klinik PKP antara lain sebagai berikut:

- 1) **Potensi Kelembagaan dan Dukungan Pemerintah Daerah**
Pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja BP3KP Sulawesi I memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas perumahan dan penanganan kawasan kumuh. Dukungan ini menjadi peluang besar bagi Klinik PKP dalam melaksanakan konsultasi dan asistensi teknis di tingkat daerah melalui sinergi program dan kegiatan.
- 2) **Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Keahlian Teknis**
BP3KP Sulawesi I didukung oleh pejabat fungsional dan tenaga ahli di bidang teknik sipil, arsitektur, perencanaan, serta tata bangunan yang berkompeten dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis.
- 3) **Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha**
Masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara khususnya kelompok swadaya dan pelaku usaha lokal, memiliki antusiasme tinggi terhadap pembangunan rumah layak huni. Hal ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan layanan bantuan teknis dan konsultasi swadaya melalui Klinik PKP.

Dengan berbagai potensi tersebut, Klinik PKP BP3KP Sulawesi I memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pendampingan teknis, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

BAB III REKAPITULASI CAPAIAN

3.1 Kegiatan Sosialisasi, Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis

Selama bulan Januari hingga bulan Desember 2025, Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) BP3KP Sulawesi I telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang mencakup sosialisasi, layanan konsultasi, serta bimbingan teknis kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah kerja. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan layanan informasi, pendampingan, dan solusi atas berbagai permasalahan teknis terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Berikut rekapitulasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan Januari hingga bulan Desember 2025:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Kegiatan Klinik PKP Bulan Januari Hingga Desember 2025

No	Kategori Layanan	Bentuk Layanan	Lokasi	Waktu	Media	Layanan	Capaian
1	Konsultasi	Bantuan Teknis	Balai P3KP Sulawesi I	3 Juli 2025	Tatap Muka	1	Layanan Konsultasi
2	Konsultasi	Bantuan Teknis	Balai P3KP Sulawesi I	18 Juli 2025	Tatap Muka	1	Layanan Konsultasi
3	Konsultasi	Bantuan Teknis	Balai P3KP Sulawesi I	19 Agustus 2025	Tatap Muka	1	Layanan Konsultasi
4	Sosialisasi	Sosialisasi Program	Desa Milangodaa Barat	30 Oktober 2025	Tatap Muka	1	Layanan Sosialisasi
5	Sosialisasi	Sosialisasi Program	Kota Tidore	28 November 2025	Tatap Muka	1	Layanan Sosialisasi
6	Sosialisasi	Sosialisasi Program	Kota Ternate	29 November 2025	Tatap Muka	1	Layanan Sosialisasi
8	Sosialisasi	Sosialisasi Program	Kelurahan Batu Putih Kota Bitung	11 Desember 2025	Tatap Muka	1	Layanan Sosialisasi
8	Sosialisasi	Sosialisasi Program	Kelurahan Buha dan Wonasa, Manado	16 Desember 2025	Tatap Muka	1	Layanan Sosialisasi
9	Konsultasi	Bantuan Teknis	Balai P3KP Sulawesi I	17 Desember 2025	Tatap Muka	1	Layanan Konsultasi
10	Sosialisasi	Sosialisasi Penggunaan dan Pemeliharaan Risha Ruspini	Hotel Fave Kota Bitung	22 Desember 2025	Tatap Muka	1	Layanan Sosialisasi

Tabel 3.2 Dokumentasi Rekapitulasi Kegiatan Klinik PKP Bulan Januari Hingga Desember 2025

Kegiatan Konsultasi penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh*Balai P3KP Sulawesi I, Manado, 3 Juli 2025***Konsultasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan DTSen***Balai P3KP Sulawesi I, Manado, 18 Juli 2025*

Konsultasi mengenai Inovasi Pembiayaan Stimulan Rumah Swadaya

Balai P3KP Sulawesi I, Manado, 19 Agustus 2025



Sosialisasi Program dan Kebijakan Perumahan

Desa Milangodaa dan Milangodaa Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 30 Oktober 2025



Sosialisasi Klinik PKP di Kota Tidore dan Kebijakan Perumahan

Kota Tidore, Maluku Utara, 28 November 2025



Sosialisasi Klinik PKP di Kota Ternate dan Kebijakan Perumahan

Kota Ternate, Maluku Utara, 29 November 2025



Sosialisasi Klinik PKP di kelurahan Batu Putih Atas dan Program Kementerian PKP

Desa Batu Putih Atas, Kota Bitung, 11 Desember 2025



Sosialisasi Klinik PKP di Kota Manado dan Program Kementerian PKP

Kelurahan Wonadan da Buha, Manado, 16 Desember 2025



Koordinasi penyusunan berkas RP2KPKPK dan RP3KP

Balai P3KP Sulawesi I, Kota Manado, 17 Desember 2025



Sosialisasi Pemeliharaan dan Penggunaan Risha dan Ruspín

Fave Hotel, Kota Bitung, 22 Desember 2025



3.2 Kegiatan Penunjang Klinik PKP

Berisi Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis, Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) BP3KP Sulawesi I juga melakukan berbagai kegiatan penunjang yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan layanan, memperluas jangkauan informasi, serta meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan penunjang tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan inovasi layanan Klinik PKP di wilayah kerja. Berikut rangkuman kegiatan penunjang yang dilaksanakan selama bulan Januari hingga bulan Desember 2025:

A. Pencetakan *Leaflet Barcode* Klinik PKP dan *Barcode* Survei Kepuasan Klinik PKP

Pencetakan leaflet Klinik PKP dilaksanakan sebagai media informasi dan promosi layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Leaflet ini memuat informasi mengenai jenis layanan yang tersedia, mekanisme pengajuan konsultasi, kontak layanan, serta kode QR yang terhubung dengan akses layanan digital.

Keberadaan leaflet ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat Klinik PKP, sekaligus memperluas jangkauan informasi secara lebih efektif dan praktis. Leaflet didistribusikan pada saat kegiatan sosialisasi, kunjungan lapangan, forum koordinasi, serta ditempatkan pada ruang pelayanan publik di lingkungan kantor dan instansi terkait.

Gambar 3.1 *Leaflet* Klinik PKP dan Survei Kepuasan Pelayanan Klinik PKP



B. Penyiapan Ruang Layanan Klinik PKP untuk Konsultasi Secara Offline

Penyiapan ruang layanan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan konsultasi teknis secara tatap muka (offline) bagi masyarakat maupun pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan langsung. Ruang layanan dilengkapi dengan meja konsultasi, materi informasi pendukung, media publikasi, serta sarana dokumentasi guna menunjang kelancaran pelayanan.

Penyediaan ruang khusus ini bertujuan untuk menciptakan suasana layanan yang nyaman, tertata, dan profesional, sehingga proses konsultasi dapat berlangsung secara lebih efektif dan terarah. Selain itu, ruang layanan ini juga menjadi sarana representatif dalam memperkuat citra dan eksistensi Klinik PKP sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja.

Gambar 3.2 Ruang Layanan Klinik PKP



BAB IV

PERMASALAHAN DAN KENDALA

4.1 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selama tahun anggaran 2025, masih terdapat sejumlah permasalahan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian target layanan yang direncanakan hingga bulan Desember tahun pelaksanaan. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan
Jumlah tenaga teknis dan pejabat fungsional yang terlibat dalam layanan Klinik PKP masih terbatas, sehingga kapasitas pelayanan, khususnya dalam menanggapi konsultasi daring maupun permintaan bantuan teknis di lapangan, belum optimal.
- 2) Minimnya Pemahaman Masyarakat terhadap Fungsi dan Layanan Klinik PKP
Sebagian masyarakat dan pemangku kepentingan daerah masih belum sepenuhnya memahami peran Klinik PKP sebagai sarana konsultasi dan pendampingan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini berdampak pada rendahnya angka permintaan layanan di beberapa wilayah.
- 3) Keterbatasan Anggaran Operasional Layanan
Dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi lapangan dan publikasi layanan masih terbatas, sehingga membatasi intensitas kegiatan tatap muka dan penyebaran informasi di daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan Balai.
- 4) Koordinasi Lintas Pihak yang Masih Perlu Ditingkatkan
Meskipun telah terjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra CSR, koordinasi teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan bersama masih menghadapi kendala waktu, kesesuaian jadwal, serta perbedaan prioritas program.
- 5) Tantangan dalam Pengumpulan Data dan Pelaporan Layanan
Proses rekapitulasi dan pelaporan data layanan dari berbagai sumber (offline dan online) masih membutuhkan waktu lebih lama, terutama karena keterbatasan sistem monitoring terintegrasi di tingkat Balai.

Permasalahan dan kendala tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan pencapaian target layanan Klinik PKP hingga akhir tahun 2025 dapat tercapai secara optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanan.

4.2 Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta memastikan tercapainya target layanan hingga bulan Desember 2025, telah dirumuskan beberapa langkah tindak lanjut dan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Peran dan Pembagian Tugas SDM Pelaksana
 - a. Melakukan penugasan yang lebih terfokus bagi pejabat fungsional dan tenaga teknis sesuai bidang keahliannya agar pelayanan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
 - b. Mendorong keterlibatan pegawai non-teknis dalam mendukung administrasi dan dokumentasi layanan Klinik PKP.
 - c. Mengoptimalkan kolaborasi lintas jabatan fungsional di lingkungan Balai untuk memperkuat tim pelaksana layanan.
- 2) Peningkatan Sosialisasi dan Publikasi Layanan Klinik PKP
 - a. Melaksanakan sosialisasi intensif ke masyarakat dan pemerintah daerah melalui berbagai kanal komunikasi, baik **offline** (tatap muka, brosur, spanduk, kegiatan bersama Pemda) maupun **online** (website dan media sosial).
 - b. Membuat materi promosi visual (video pendek, infografis, leaflet digital) untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap manfaat layanan Klinik PKP
- 3) Efisiensi dan Optimalisasi Penggunaan Anggaran
 - a. Menyusun prioritas kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan capaian layanan, seperti kegiatan konsultasi teknis, sosialisasi publik, dan bimbingan lapangan.
 - b. Mendorong pelaksanaan kegiatan kolaboratif dengan mitra seperti perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga sosial untuk mendukung efisiensi pendanaan melalui program kemitraan (CSR, magang, dan kerja sama teknis).
- 4) Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Pihak
 - a. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antara BP3KP Sulawesi I, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra swasta melalui forum koordinasi atau pertemuan rutin.
 - b. Membentuk kelompok kerja kecil (task force) untuk percepatan penyelesaian permasalahan teknis di lapangan dan pelaporan data layanan.
- 5) Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan
 - a. Mengembangkan sistem rekapitulasi data yang terintegrasi antara layanan online dan offline untuk mempercepat pelaporan capaian bulanan.
 - b. Melaksanakan evaluasi rutin setiap akhir bulan untuk menilai efektivitas layanan dan merumuskan tindak lanjut perbaikan menuju target akhir tahun.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) BP3KP Sulawesi I Tahun 2025 merupakan wujud komitmen dalam menghadirkan layanan konsultasi dan pendampingan teknis yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pemerintah daerah. Melalui pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan bantuan teknis secara luring maupun daring, Klinik PKP telah berperan sebagai ruang kolaboratif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan adanya penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan pemanfaatan layanan, serta terbangunnya sinergi multipihak dalam mendukung peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman. Klinik PKP tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen fasilitatif dalam menjembatani kebutuhan teknis di lapangan dengan kebijakan dan program pemerintah di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Keberlanjutan layanan Klinik PKP memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, penguatan koordinasi lintas sektor, serta inovasi dalam penyampaian layanan agar jangkauan dan dampaknya semakin luas. Dengan semangat kolaborasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, Klinik PKP BP3KP Sulawesi I diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung pencapaian target layanan nasional serta memperkuat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara

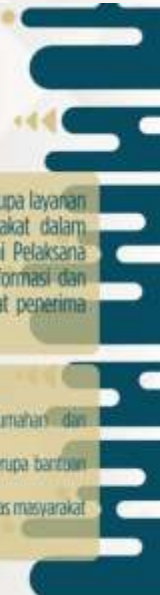
LAMPIRAN BAHAN PAPARAN LAPORAN KLINIK PKP TAHUN 2025



LAPORAN KEGIATAN KLINIK PKP

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI I**





GAMBARAN UMUM KEGIATAN KLINIK PKP

Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut **Klinik PKP** adalah bantuan pemerintah berupa layanan informasi, konsultasi dan bantuan teknis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Layanan Klinik PKP diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I untuk masyarakat yang memerlukan informasi dan pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan, serta masyarakat penerima bantuan pemerintah atau bantuan lembaga lainnya (CSR perusahaan, BAZNAS, dst.)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 01/SE/DK/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan:

1. Memberikan layanan informasi perumahan dan kawasan permukiman
2. Memberikan layanan pendampingan berupa bantuan teknis kepada masyarakat
3. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni

INDIKATOR RUMAH LAYAK HUNI

KETAHANAN BANGUNAN



Komponen struktur dan non struktur memenuhi kaidah konstruksi

Menggunakan bahan bangunan ber- SNI

LUAS BANGUNAN



Komponen struktur dan non struktur memenuhi kaidah konstruksi

Jika ada 5 penghuni, maka luas rumah: 5 x 7,2 = 36 m²

SANITASI



Tersedia di setiap rumah kloset dengan leher angsa

Tersambung ke SPAL/ Septic Tank yang disedot min. 5 tahun sekali

AIR MINUM



- Tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna
- Tersedia min. 12 jam sehari
- Jarak jangkauan maksimal 30 menit
- Tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat

PENCARAVAN



10% dari luas lantai

PENGHAWAAN



5% dari luas lantai


 KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

MENU LAYANAN



Layanan Informasi



Layanan Konsultasi



Pendampingan dan Bantuan Teknis


 KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

MENU LAYANAN KLINIK PKP

1. LAYANAN INFORMASI

Layanan Informasi di Klinik PKP merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan yang jelas dan lengkap terkait program, kebijakan, maupun kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Melalui layanan ini, masyarakat bisa meminta informasi langsung kepada petugas Klinik PKP mengenai hal-hal seperti:

- Program bantuan rumah swadaya atau peningkatan kualitas rumah;
- Panduan teknis pembangunan rumah yang aman dan layak huni;
- Informasi kebijakan atau regulasi terbaru di bidang perumahan dan permukiman; dan
- Jadwal kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Balai P3KP Sulawesi I.

Selain menjawab pertanyaan masyarakat, layanan informasi juga mencakup kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perumahan dan permukiman.




 KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

MENU LAYANAN KLINIK PKP

2. LAYANAN KONSULTASI

Layanan Konsultasi di Klinik PKP disediakan untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah, maupun pelaku pembangunan yang memerlukan pendampingan dan solusi teknis terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses konsultasi, petugas Klinik PKP akan memberikan penjelasan, saran teknis, dan referensi peraturan yang relevan agar masyarakat bisa memahami dan melaksanakan solusi yang tepat. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis juga merupakan bagian dari upaya Klinik PKP dalam memperluas akses konsultasi dan membantu penyelesaian masalah di lapangan.





MENU LAYANAN KLINIK PKP

3. PENDAMPINGAN TEKNIS

Layanan Pendampingan Teknis merupakan bentuk dukungan dari Klinik PKP Balai P3KP Sulawesi I kepada masyarakat, pemerintah daerah, atau kelompok pelaksana kegiatan dalam melaksanakan program perumahan dan kawasan permukiman agar berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Pendampingan ini dapat dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan maupun melalui komunikasi daring, tergantung kebutuhan dan kondisi lapangan.

SCAN ME





SUBSTANSI LAYANAN KLINIK PKP

Substansi layanan yang diberikan dalam pelaksanaan Klinik PKP kepada masyarakat pengguna meliputi:

INFORMASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN PKP Program, kebijakan/regulasi dan jenis bantuan/perumahan dan kawasan permukiman dari Kementerian PKP.		PANDUAN LEGALITAS - Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - Prosedur Sertifikat Layak Fungsi (SLF) - Prosedur Legalisasi Lahan	
DESAIN RUMAH SEDERHANA Type 36 - 60 m2		PEMILIHAN MATERIAL Konsultasi pemilihan material rumah	
PERENCANAAN RAB Perencanaan Estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rumah		PENDAMPINGAN TEKNIS Kegiatan survei dan pendampingan langsung ke lokasi pembangunan	
FASILITAS PENGADUAN Layanan penanganan pengaduan masyarakat		PEMBIAYAAN PERUMAHAN Fasilitas konsultasi pemilihan sumber pendanaan dan pembiayaan kredit rumah	

METODE PELAKSANAAN KLINIK PKP

Layanan Tatap Muka



Untuk layanan tatap muka, dapat langsung datang ke Balai P3KP Sulawesi I di Ruko Business 8 Jl. Ring Road No.1, Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129. Selain itu, dapat juga melalui sosialisasi, klinik keliling atau forum diskusi menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Layanan Online



Untuk layanan secara online/daring, dapat melalui google form dengan link: https://bit.ly/KlinikPKP_BP3KPSulI



PERSYARATAN AKSES LAYANAN

Untuk mengakses layanan **Klinik PKP**, masyarakat cukup:

- Mengisi formulir layanan (dapat secara *offline* maupun *online*)
- Menyebutkan jenis layanan yang dibutuhkan (informasi/konsultasi/pendampingan teknis)
- Melampirkan data dukung (jika ada)

Layanan Klinik PKP **tidak dipungut biaya** dan **terbuka** untuk seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman



MEKANISME/ALUR LAYANAN

- Pemohon mengisi formulir layanan Klinik PKP
- Petugas melakukan verifikasi data dan jenis layanan
- Permintaan diarahkan ke tim teknis sesuai bidang layanan
- Tim memberikan informasi, konsultasi, atau pendampingan sesuai kebutuhan
- Pemohon menerima hasil atau tindak lanjut dari Klinik PKP
- Pemohon mengisi Form Survei Kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan
- Petugas mencatat hasil layanan sebagai bahan evaluasi



CAPAIAN DAN PROGRAM BP3KP SULAWESI I



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau **BSPS** adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berasaskan gotong-royong.

Lokasi	Jumlah Penanganan BSPS
Provinsi Sulawesi Utara	748 Unit
Provinsi Maluku Utara	638 unit



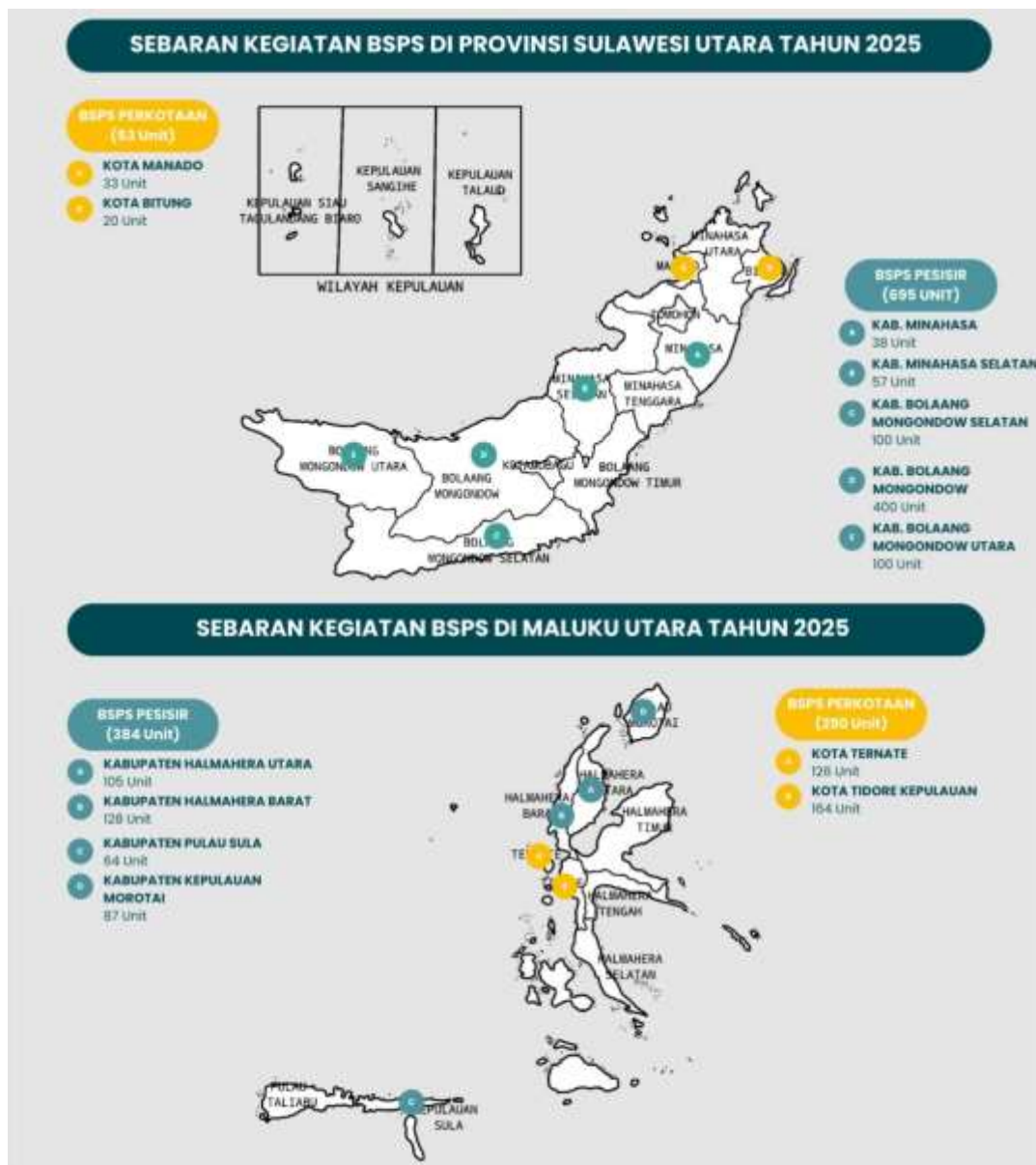
0%



30%



PROGRES SAAT INI 95 %



BANTUAN RUMAH SUSUN



Rumah Susun (Rusun) ASN Kejaksaa Tinggi Sulawesi Utara di Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara



Rumah Susun (Rusun) Lansia di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Lokasi	Jumlah Tower	Jumlah Unit
Provinsi Sulawesi Utara	37	1555
Provinsi Gorontalo	24	1169
Provinsi Maluku Utara	26	1287
Total	87	4011

BANTUAN RUMAH KHUSUS



Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Temate, Provinsi Maluku Utara



Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Lokasi	Jumlah Unit
Provinsi Sulawesi Utara	1007
Provinsi Gorontalo	1157
Provinsi Maluku Utara	1184
Total	3348

BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)



Pelaksanaan Konstruksi Penanganan Kawasan Kumuh dan Pembangunan Sanitasi di Kelurahan Lekabala, Kota Gorontalo



Lokasi	Jumlah Lokasi	Jumlah Unit
Provinsi Sulawesi Utara	164	14158
Provinsi Gorontalo	105	4721
Provinsi Maluku Utara	26	17
Total	295	18896



▶▶ BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN KPR FLPP

KPR Subsidi FLPP adalah program pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Penyaku untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah pertama. Melalui program ini, cicilan rumah menjadi lebih terjangkau karena bunga kredit ditetapkan hanya 5% dan tidak berubah hingga lunas. Selain itu, uang muka yang dibutuhkan relatif ringan, bahkan dimulai dari 1%. Dengan demikian, KPR Subsidi FLPP menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan biaya lebih ringan dan kepastian cicilan jangka panjang.

KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR SEJAHTERA

LTMin50m2Maks 100 m2, LUPPMin 21 m2Maks 36 m2

Uang Muka 1% (dari harga jual - 100%)	Suku Bunga Tetap 5% Sampai Lunas	Maksimal Tenor 20 Tahun
--	---	--

Angsuran Terjangkau Mulai Dari 1 Juta-an
*Hingga Lunas
Gratis Premi Asuransi dan PPH

KRITERIA BESARAN PENGHASILAN

Wilayah Kerja BP3KP Sulawesi I Zona 2

ZONA 2	Tidak Menikah Rp. 5.000.000,- / bulan	Menikah Rp. 11.000.000,- / bulan
-------------------------	--	---

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali

SYARAT PENGAJUAN


WNI


Tercatat sebagai penduduk di suatu daerah


Belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan


Orang Pensiwerangan Tidak Kawin/Kawin


Tidak Memiliki Rumah


Memiliki Penghasilan Tetap/Tidak Tetap

HUBUNGI KAMI




BP3KP Sulawesi I
Ruko Business 8 Jl. Ring Road No.1,
Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado,
Sulawesi Utara 95129
 [pkp_perumahan_sulawesi1](#)



SCAN HERE!



TERIMA KASIH

LAPORAN KEGIATAN KLINIK PKP
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI I



REPUBLIK INDONESIA



<https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i>

Jalan Ring Road No. 1, Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEHUMASAN TAHUN ANGGARAN 2025

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI I**



@pkp_perumahan_sulawesi1



<https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i>



Jalan Ring Road No. 1, Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karuniaNya sehingga Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kehumasan di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun anggaran 2025 dapat tersusun.

Laporan ini berisi Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Komunikasi Publik di Lingkungan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pembuatan laporan ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuan yang telah diberikan, sehingga laporan ini diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang direncanakan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami berharap saran dan masukan yang membangun untuk laporan akhir ini. Semoga laporan akhir ini dapat menjadi sarana evaluasi agar memacu kinerja yang lebih produktif untuk kedepannya. Terima kasih.

Manado, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi I,



H. M. Hujurat, S.T., M.T.

NIP. 19681125 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Sasaran Kegiatan	7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
2.1. Sumber Daya Manusia Bidang Kehumasan di BP3KP Sulawesi I	8
2.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.	11
2.3. Kendala dan Solusi.....	41
BAB III PENUTUP	43
3.1. Kesimpulan	43
3.2. Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informasi Penghubungan Kehumasan	10
Tabel 2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan BP3KP Sulawesi I Tahun 2025.....	11
Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga	37
Tabel 4 Kebutuhan Peralatan Kehumasan.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Kehumasan BP3KP Sulawesi I.....	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Era Informasi telah menemui zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses.

Dalam rangka menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I berupaya untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyebarluasan informasi. Melalui prinsip keterbukaan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat, diharapkan dapat mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mampu mewujudkan Badan Publik yang lebih transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Dalam dinamika pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang makin kompleks dan mendapat perhatian publik luas, komunikasi publik memegang peranan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I berupaya memastikan setiap kebijakan, arahan pimpinan, serta langkah konkret Kementerian PKP dapat dipahami dengan baik, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat citra institusi sebagai pelayan masyarakat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja komunikasi publik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I selama satu tahun berjalan, sekaligus menjadi refleksi atas peran strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dalam mendukung penyampaian kebijakan, program, dan capaian Kementerian PKP kepada masyarakat secara transparan, akurat, dan berimbang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kehumasan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kehumasan dan Komunikasi Publik di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.

Tujuan disusunnya Laporan ini:

1. Mendokumentasikan capaian pelaksanaan kegiatan kehumasan dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.
2. Mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kehumasan dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.
3. Memperkuat citra positif dan Kepercayaan Publik terhadap Kementerian PKP melalui penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.

1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan kegiatan Kehumasan dan Komunikasi Publik adalah seluruh Stakeholder dan Masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara yang membutuhkan informasi program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Sumber Daya Manusia Bidang Kehumasan di BP3KP Sulawesi I

A. Deskripsi Kegiatan Kehumasan.

Kegiatan Kehumasan yang dilaksanakan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I ada 5 (Lima) kegiatan, sebagai bagian dari publikasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian PKP. Kegiatan hehumasan tersebut diantaranya:

- a. Layanan Informasi Publik, kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi kegiatan Kementerian PKP dimana informasi kegiatan diberikan secara berkala sesuai dengan memperhatikan daftar informasi yang dikecualikan.
- b. Klinik PKP, berfungsi sebagai wadah konsultasi, asistensi, dan bimbingan teknis yang terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Benar PKP dan SPAN Lapor sebagai media pengaduan konsumen dan masyarakat terkait perumahan.
- d. Publikasi melalui media sosial yang dimiliki oleh BP3KP Sulawesi I yaitu Instagram @pkp_perumahan_sulawesi1.
- e. Publikasi melalui website yaitu dengan alamat : <https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i> .

B. Struktur Organisasi Kehumasan BP3KP Sulawesi I.

Untuk melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan kompeten. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I 1 (satu) pelaksana tugas media dan publikasi kehumasan dan komunikasi publik di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai P3KP Sulawesi I.



STRUKTUR KEHUMASAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
TA. 2025



Gambar 1 Struktur Kehumasan BP3KP Sulawesi I

DATA INFORMASI PENGHUBUNG KEHUMASAN :

Tabel 1 Data Informasi Penghubungan Kehumasan

NO	INFORMASI	KETERANGAN
1.	Unit Kerja dan Alamat	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Jalan Ring Road No. 1, Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado
2.	Nama Nomenklatur Unit Kerja Kehumasan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
3.	Email TU Persuratan	bp3kp.sulawesi1@pkp.go.id
4.	Narahubung TU Persuratan	Vicaristy tumengkol - 082192653250
5.	Nama dan Nomor Handphone Kepala Unit Kerja Kehumasan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Umum BP3KP Sulawesi I Kartika Pratiwi, S.T. - 081318182295
6.	Narahubung dan Nomor Handphone Pelaksana Teknis Kehumasan	Reza Poluan - 085256138619
7.	Narahubung dan Nomor Handphone Pengelola Media Sosial	Reza Poluan - 085256138619
8.	Data media publikasi yang dimiliki :	1. Instagram pkp_perumahan_sulawesi1 Follower : 1.677 Jumlah Post 485  2. Website https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i 

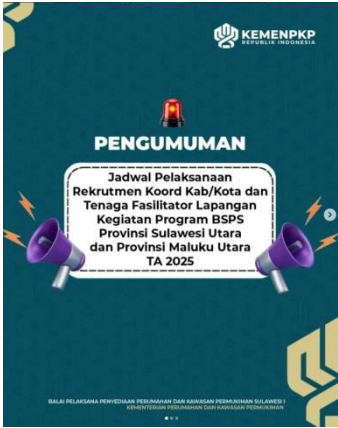
2.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

Adapun kegiatan BP3KP Sulawesi I periode bulan Januari – Desember 2025 yang diinformasikan melalui akun media sosial :

Tabel 2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan BP3KP Sulawesi I Januari-Desember 2025

No	Tanggal	Keterangan	Tangkapan Layar
1	16/6/25	Rapat perdana BP3KP Sulawesi I	pkp_perumahan_sulawesi Bala Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan Sulawesi I Kementerian PUPR pkp_perumahan_sulawesi Halo #rahulsiPKP selamat hari senin tetap semangat ya! Kali ini ingin akan memberikan informasi terkait Rapat Perdana dan Kajian Pemukiman Sulawesi I. Pada hari senin, 16 Juni 2025 dilaksanakan Rapat Perdana Koordinasi dan Kajian yang di pimpin langsung oleh Kepala Bala Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan Sulawesi I, H. Hujarat, S.T., M.T untuk Pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Bala Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan Sulawesi I. Dalam Rapat ini dihadiri juga oleh Kepala Sub Bagan Urutan dan Tata Usaha BP3KP Sulawesi I, Kepala Perekam S.T., Kepala Seko Wilayah I, Kepala Seko Wilayah II, Kepala Sulawesi Utara, Para PPK dan pejabat pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Bala PPK Sulawesi I, H. Hujarat, S.T., M.T menyampaikan dalam pertemuan untuk saling mengisi satu sama lain agar menjadi suatu tujuan yang di harapkan. Dan tak kalah pentingnya dalam rapat ini H. Hujarat, S.T., M.T menyampaikan para peserta harus melakukan koordinasi atau meeting-mooting yang bisa guna meningkatkan Program 3 juta rumah sesuai dengan arahan Kepala Mestran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. #KementerianPKP #Perumhandandkawasanpermukiman #GotongroyongPKP Edited : 30s Like by geratodni and 56 others June 18, 2025 Add a comment...
2	18/6/25	Rapat Koordinasi BP3KP Sulawesi I dan BPPW SULUT	pkp_perumahan_sulawesi Bala Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan Sulawesi I Kementerian PUPR pkp_perumahan_sulawesi Halo #rahulsiPKP Pada hari senin, 18 Juni 2025 dilaksanakan Rapat Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang dihadiri Kepala BP3KP Sulawesi I, Kepala BPPW Sulut, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Satuan Kerja BP3KP Prov. Sulawesi Utara, dan PPK membahas mengenai Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Adapun pembahasan mengenai penghitungan secara parsial, strategi yang tepat Pembangunan Hunian yang di koordinir oleh Komando PKK yang menyerahkan penghitungan secara keseluruhan dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan Listrik akan diserahkan dan dikalaho Pemerintah Daerah Kabupaten Bontang Mongondio Sulawesi. #KementerianPKP #Perumhandandkawasanpermukiman #GotongroyongPKP Edited : 30s Like by geratodni and 37 others June 18, 2025 Add a comment...
3	19/6/25	Audiensi BP3KP Sulawesi dan Korem Winangun Manado	pkp_perumahan_sulawesi Bala Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan Sulawesi I Kementerian PUPR pkp_perumahan_sulawesi Halo #rahulsiPKP Hari Rabu, 19 Juni 2025 BP3KP Sulawesi I mendapat kunjungan dari Komando Resor Militer (KOREM) Winangun Kota Manado. Adapun audiensi antara BP3KP Sulawesi I yang dipimpin langsung oleh bapak Kepala Bala PPK Sulawesi I, H. Hujarat, S.T., M.T dengan Waka Zidam Letkol Muhammad Indra mewakili Komando Resor Militer (KOREM) Winangun. Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Sub Bagan Urutan dan Tata Usaha BP3KP Sulawesi I, Kepala Seko Wilayah I, Kepala Seko Wilayah II dan PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus. Melalui audiensi ini diharapkan kedepannya kami dapat berkoordinasi lebih lanjut untuk mendukung program 3 juta rumah. #KementerianPKP #Perumhandandkawasanpermukiman #GotongroyongPKP Edited : 31s Like by lhyana and 19 others June 19, 2025 Add a comment...

4	20/6/25	Kunjungan Bupati Kabupaten Kepulauan SITARO Ke Balai P3KP Sulawesi I	 KUNJUNGAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO KE BALAI P3KP SULAWESI I Audiensi Program Kabupaten Kepulauan Sitaro Berkolaborasi Dengan BP3KP Sulawesi I
5	20/6/25	Silahturahmi BP3KP Sulawesi I di Kantor DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Utara	 SILATURAHMI BP3KP SULAWESI I DI KANTOR DPD REAL ESTATE INDONESIA (REI) SULAWESI UTARA Audiensi Dengan Pendapat Bersama Ketua dan Anggota DPD REI Sulawesi Utara untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah
6	1/7/25	Monitoring Pekerjaan Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	 MONITORING PEKERJAAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG RUANG DI KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Kunjungan Kerja Sekretaris Inspektori Jenderal Kementerian PKP bersama Bupati Kab. Kepulauan Sitaro
7	2/7/25	Monitoring Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Utara	 MONITORING RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA Kunjungan Kerja Sekretaris Inspektori Jenderal Kementerian PKP bersama BP3KP Sulawesi I

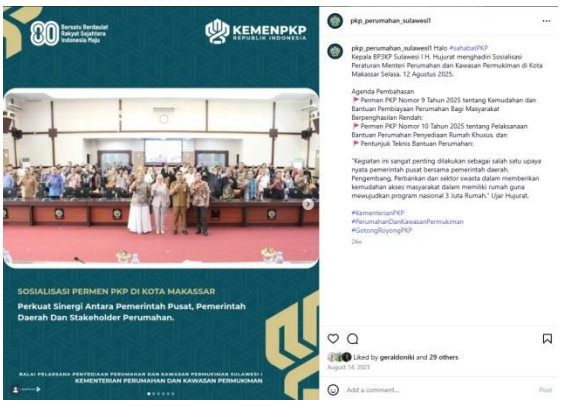
8	4/7/2025	Audiensi BP3KP Sulawesi I dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	 Audiensi BP3KP Sulawesi I dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bahasan Penanganan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh DAK Tematik PPKT T.A. 2024-2025 dan Kolaborasi
9	14/7/25	Reviu Inspektorat III Progres Pekerjaan Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Kab. Bolaang Mongondow Selatan	 PASTIKAN TEPAT GUNA Reviu Inspektorat III Progres Pekerjaan Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Kab. Bolaang Mongondow Selatan
10	15/7/25	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen Koordinator Kab/Kota dan TFL Program BSPS Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara	 PENGUMUMAN Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen Koord Kab/Kota dan Tenaga Fasilitas Lapangan Kegiatan Program BSPS Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara TA 2025
11	17/7/25	Rapat Koordinasi BP3KP Sulawesi I dengan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow.	 Rapat Koordinasi BP3KP Sulawesi I dengan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Usulan Program Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow

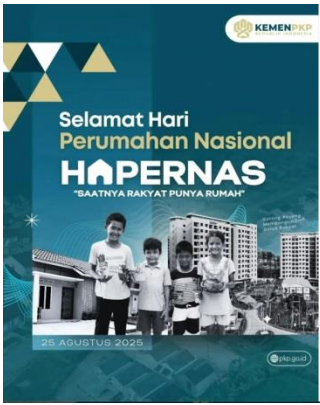
12	17/7/25	Pengumuman Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen Koordinator Kab/Kota dan TFL Program BSPS Provinsi Sulut dan Malut	 pkp.perumahan.sulawesi pkp.perumahan.sulawesi Balai Pelaksana Penyelenggaraan dan Kawasan Perumahan Sulawesi I memperpanjang waktu rekrutmen untuk Koordinator Kabupaten/Kota, Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2025 di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara sampai tanggal 21 Juli 2025. Apabila sudah terdapat di atas untuk melihat pengumuman atau lebih lanjut, silakan kunjungi link berikut ini. Mohon dibaca dengan teliti ya teman-teman, info yang sudah lengkap. Link BSPS Provinsi Sulawesi Utara : https://bit.ly/PengumumanPerpanjanganWaktuRekrutmenSulut Link BSPS Provinsi Maluku Utara : https://bit.ly/PengumumanPerpanjanganWaktuRekrutmenMalut 27w Like by geratodini and 71 others July 17, 2025 Add a comment... Post
13	18/7/25	BP3KP Sulawesi I Menerima Kunjungan dari Gubernur Maluku Utara.	 pkp.perumahan.sulawesi and hajarat.johy Balai Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumahan P3KP pkp.perumahan.sulawesi Jumat, 18 Juli 2025 — Balai Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumahan (BP3KP) Sulawesi I menerima kunjungan kerja dari Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherry Yandani Lani, S.E., M.M. beserta jajarannya. #Kotaponting907 menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Program 3 juta Rumah yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan. Kedatangan Ibu Gubernur disambut langsung oleh Kepala BP3KP Sulawesi I, H. Hajarat S.T., M.Si., didampingi jajaran struktural di lingkungan Balai serta perwakilan dari Satuan Kerja Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara teknis strategi percepatan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Maluku Utara dengan fokus utama pada pendirian Rumah Tani Layak Huni (RTLH) dan OTSH sebagai dasar dukungan pemenuhan. Ibu Gubernur menekankan urgensi pemutakhiran dan kelengkapan data RTLH pada 10 kabupaten/kota di wilayahnya. Beliau mengimbau agar pemerintah di daerah segera melakukan rapat dan verifikasi melalui aplikasi e-RTLH yang saat ini menjadi basis data dalam penetapan sasaran program bantuan perumahan. Data yang akurat akan menentukan bantuan tepat sasaran, serta mempengaruhi pemenuhan dan pelaksanaan program, khususnya bantuan stimulan berbasis swadaya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP3KP Sulawesi I menegaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu program berbasis pemberdayaan masyarakat yang memberikan dukungan stimulan serta pendampingan teknis bagi Masyarakat Like by geratodini and 128 others July 18, 2025 Add a comment... Post
14	22/7/2025	Kepala Balai P3KP Sulawesi I Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara	 pkp.perumahan.sulawesi pkp.perumahan.sulawesi Kepala Balai P3KP Sulawesi I, H. Hajarat S.T., M.Si. telah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Kantor DPRD Sulut, Manado, dalam rangka mendampingi perjalanan terkait kunjungan Visi MIS Gubernur dan Wakil Gubernur Menuju Sulawesi Utara Mapu Segitara dan Berkelanjutan. Selasa (22/7/2025) Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andri Silangen Spd. KES, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sulut, anggota DPRD, serta pejabat pemerintah provinsi lainnya. Kedatangan Kepala Balai P3KP Sulawesi I mendapat sambutan hangat dari jajaran DPRD dengan pemerintah daerah serta sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembangunan daerah. Partisipasi aktif dari Kementerian PKP dalam agenda strategis daerah seperti ini menunjukkan semangat kolaborasi dan komitmen bersama dalam mendukung kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPerumahan #Kotaponting907 Edited: 27w Like by geratodini and 37 others July 22, 2025 Add a comment... Post
15	24/7/25	Pengumuman Penundaan Tes Kompetensi Dasar Calon TFL Program BSPS Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara	 pkp.perumahan.sulawesi pkp.perumahan.sulawesi PENGUMUMAN Penundaan Tes Kompetensi Dasar Program BSPS TA. 2025 Selubungan dengan adanya beberapa kegiatan yang sedang berlangsung, Balai Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumahan Sulawesi I memunda pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar bagi Calon Koordinator Kabupaten/Kota, Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis, dan Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Mohon untuk terus memantau akun Instagram resmi Balai P3KP Sulawesi I terkait jadwal pelaksanaan tes dan penundaan lainnya. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPerumahan #Kotaponting907 27w diapoi htti ngga ada ya 20w Reply Like by geratodini and 57 others July 24, 2025 Add a comment... Post

16	25/7/25	Focus Group Discussion Percepatan Penyaluran KPR FLPP Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Utara, Manado	 pkp_perumahanperkotaan and pkp_perumahan_sulawesi Original audio pkp_perumahanperkotaan Halo #KahatufPKP Tadi diselenggarakan Focus Group Discussion Percepatan Penyaluran KPR FLPP Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Utara, Manado. 25 Juli 2025 25m 1 Like Liked by geradonki and 43 others July 25, 2025 Add a comment...
17	25/7/25	Kepala Balai P3KP Sulawesi I Melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja Presiden RI di Prov. Sulawesi Utara.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Kepala Balai P3KP Sulawesi I H. Hujarat ST.MT menghadiri rapat persiapan kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. Rapat ini dipimpin oleh SEKDA Provinsi SULUT dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait dari pemerintah daerah, instansi Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Sulut. Rabu (23/7/2025) Rapat ini bertujuan untuk memastikan segala persiapan berjalan dengan baik menjelang kunjungan Kerja Presiden RI yang dijadwalkan pada akhir bulan ini. Sebagai bagian dari persiapan, Kepala Balai P3KP Sulawesi I menyampaikan kegiatan bina Hunan Tetap Pasca Bencana Energi Gunung Ruang di Desa Model Kabupaten Bolang Mongondow Selatan yang direncanakan menjadi salah satu huan kunjungan Kerja Bapak Presiden Republik Indonesia. "Kita pastikan dalam kunjungan tersebut kegiatan hunan dan fasilitas pendukungnya dapat teralisasi dengan maksimal utamanya fasilitas air bersih, listrik dan pelayanan sudah dapat difungsikan oleh calon penghun". Ujar Hujarat #KementerianPKP #TerwujudnyaKawasanPerumahan #GotongRoyongPKP 25m 1 Like Liked by geradonki and 33 others July 25, 2025 Add a comment...
18	25/7/25	Focus Group Discussion Percepatan Penyaluran KPR FLPP Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Utara, Manado .	 pkp_perumahanperkotaan and 2 others pkp_perumahanperkotaan Halo #KahatufPKP Focus Group Discussion Percepatan Penyaluran KPR FLPP Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Utara Manado, 25 Juli 2025 — Kaulidat Perencanaan Teknik Pembinaan Perumahan yang pada kesempatan kali ini mewakili Direktur Jenderal Perumahan Percepatan menghadiri kegiatan FGD Percepatan Penyaluran KPR FLPP Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DPRD RI Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel's Hotel Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas PKP Provinsi Sulawesi Utara, Kepala DKS Subgubernur, Kepala Bank Indonesia Wilayah Sulut, dan para pemangku terkait serta perwakilan di wilayah Sulawesi Utara. Ratus Indriani selaku Kaulidat Perencanaan Teknik Pembinaan Perumahan menyampaikan "Terimakasih sebelumnya menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh daerah salah satunya melalui program KPR Subsidi FLPP yang pada tahun anggaran 2025 ini tersedia kuota 350.000 unit untuk disalurkan kepada MBR." Ratus Indriani menambahkan "dengan besarnya kuota KPR FLPP yang disediakan oleh pemerintah, diharapkan para ahli para stakeholder perumahan untuk mendukung KPR FLPP tersebut, hal ini tentunya untuk mendukung program 3 juta rumah yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto." Hasil FGD ini akan KPR RI dan akan disampaikan ke BPPK dan BPPK 1 Like Liked by geradonki and 57 others July 25, 2025 Add a comment...
19	26/7/25	Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi dan Jadwal Tes Koordinator Kab/Kota dan TFL Program BSPS Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Perumahan Sulawesi I Mengumumkan Hasil Verifikasi Administrasi dan Jadwal Tes untuk Seleksi Koordinator Kabupaten/Kota, Tenaga Fasilitas Lapangan Teknik dan Tenaga Fasilitas Lapangan Perumahan untuk Program Bantuan Simulasi Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2025 di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara. Selahkan kirim foto dan scan barcode yang tercantum sesuai Provinsi untuk matrik Hasil Verifikasi Administrasi dan Pengumuman Jadwal Tes. Mohon dibaca dengan teliti dan disimak untuk Jadwal Tes Seleksi bagi yg lolos verifikasi ya teman-teman. Terimakasih. 25m salahsederhana Untuk info lebih lanjut: Setelah mohon izin di share level WA yg tereng di dalam jampan tereng bagian 25m 1 like Reply 1 Like Liked by geradonki and 56 others July 26, 2025 Add a comment...

20	29/7/25	Penandatanganan BAST Serah Terima Aset BMN Bantuan PSU Bersama Walikota Bitung	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #JahatPKP, Pada hari Jumat, 25 Juli 2025, Kepala BP3KP Sulawesi I, Ir. H. Hujarat, S.T., M.T., I.P.M. bersama Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Wali Kota Bitung. Kunjungan ini memiliki arti penting dalam rangka Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Barang Milik Negara (BMN) berupa bantuan Piasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bersama Wali Kota Bitung, Bapak Hengky Honandar, S.E. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi program-program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Bala Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Bala Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I. Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melaksanakan program bantuan perumahan berdasarkan DTSEN dan pengajuan usulan melalui SBARU sebagai wujud energi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Melalui kunjungan dan sinergi ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan di Kota Bitung. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPermukiman #GotongJongjengPKP Silau - 26 144 Liked by geradonki and 18 others July 29, 2025 Add a comment... Post
21	31/7/25	Audiensi BP3KP Sulawesi I Bersama Walikota Manado.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #JahatPKP, Pada hari Jumat, 25 Juli 2025, Kepala BP3KP Sulawesi I, Ir. H. Hujarat, S.T., M.T., I.P.M. bersama Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Manado. Kunjungan ini disambut hangat oleh Wali Kota Manado, Bapak Andrian Angouw, dan bertujuan untuk memsocialisasikan program-program kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta membahas tindak lanjut proses Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Rumah Suku. Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan di Kota Manado. Man terus berproses menging diemi hunian yang layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPermukiman #GotongJongjengPKP 25w 144 Liked by geradonki and 19 others July 31, 2025 Add a comment... Post
22	1/8/25	Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #JahatPKP, Pada hari Jumat, 25 Juli 2025, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Noviza Remengging, S.T., M.T., mewakili Direktur Jenderal Perumahan, memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinergi Penanganan Permasalahan Perumahan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh: - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, - Wali Kota Kotamadya, - Ketua DPD RI Sulawesi Utara, - Perwakilan wakil kota, - dan Perwakilan perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan menyampaikan bahwa target 3 juta rumah merupakan tantangan besar yang perlu disingkirkan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program tersebut, melalui: - Koordinasi dengan semua pemangku, - Pendataan lahan-lahan potensial yang bisa dikembangkan untuk pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat. Upaya ini merupakan wujud nyata gotong royong dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPermukiman #GotongJongjengPKP 144 Liked by geradonki and 17 others August 1, 2025 Add a comment... Post
23	1/8/25	Audiensi BP3KP Sulawesi I Bersama Sekda Kabupaten Minahasa.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #JahatPKP, Pada hari Selasa, 29 Juli 2025, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Kepala Sekda Kota BP3KP Sulawesi Utara, bersama tim melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa. Kunjungan ini disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Witarana, MM, M.Si. Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi program-program kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Bala Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I serta audiensi terkait proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset untuk aset PSU dan aset Rusun Pekarya yang telah terbangun di Kab. Minahasa. Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penyediaan perumahan serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa serta mendukung program 3 juta rumah. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPermukiman #GotongJongjengPKP 25w 144 Liked by geradonki and 17 others August 1, 2025 Add a comment... Post

24	1/8/25	Pengumuman Hasil Tes Kompetensi Dasar dan Jadwal Wawancara calon Koordinator Kab/Kota dan TFL Program BSPS Provinsi Sulut dan Malut	
25	2/8/25	Sosialisasi Program dan Kebijakan di Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan	
26	8/8/25	Kementerian PKP Mengajak BWS Sulawesi II Berkolaborasi Tangani Kawasan Kumuh di Lekobalo Kota Gorontalo	
27	8/8/25	Peninjauan Lapangan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Lekobalo Kota Gorontalo	

28	12/8/25	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan HUNTAP Gunung Ruang Bersama dengan Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	
29	14/8/25	Kepala BP3KP Sulawesi I H. Hujurat menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Makassar	
30	16/8/25	Pengumuman Finalisasi Hasil Penilaian Calon Koordinator Kab/Kota dan TFL Program BSPS Provinsi Sulawesi Sulut dan Malut	
31	17/8/25	Postingan Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	

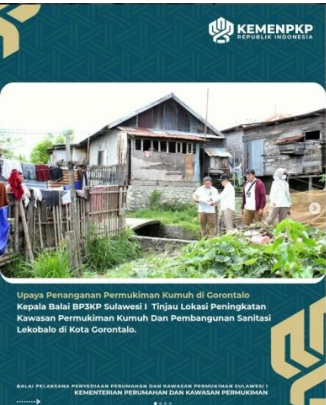
32	17/8/25	Balai P3KP Sulawesi I Gelar Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	 pkp_perumahan_sulawesi Balai P3KP Sulawesi I Gelar Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Upacara beresah dipimpin oleh Inspektur upacara, Kepala Balai I. H. Nugent, ST, MT, dihadiri oleh seluruh pejabat serta pegawai di lingkungan Balai P3KP Sulawesi I dan Satuan Kerja P3P Sulawesi Utara. Adapun pelaksanaan upacara HUT RI ke-80 ini juga dilaksanakan di Satuan Kerja P3P Provinsi Gorontalo dan Satuan Kerja P3P Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja. Upacara berlangsung khidmat dan lancar mulai pukul 07:30 WITA, diayunkan dengan acara ramah tamah dan lomba tombak. #KEMENPKP #PerumahanDanKawasanPerumahan 22x Liked by gerabonki and 46 others August 17, 2025 Add a comment...
33	19/8/25	Video Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	 pkp_perumahan_sulawesi and andi_andrew Upacara beresah Balai P3KP Sulawesi I Gelar Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80, pada hari Minggu, 17 Agustus 2025. Pada kesempatan ini, Kepala Balai P3KP Sulawesi I, H. Nugent, ST, MT, memimpin upacara di lingkungan Balai P3KP Sulawesi I dan Satuan Kerja P3P Sulawesi Utara. Adapun pelaksanaan upacara HUT RI ke-80 ini juga dilaksanakan di Satuan Kerja P3P Provinsi Gorontalo dan Satuan Kerja P3P Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja. Upacara berlangsung khidmat dan lancar mulai pukul 07:30 WITA, diayunkan dengan acara ramah tamah dan lomba tombak. #KEMENPKP #PerumahanDanKawasanPerumahan 22x Liked by gerabonki and 35 others August 19, 2025 Add a comment...
34	20/8/25	Kepala BP3KP Sulawesi I Menerima Audiensi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	 pkp_perumahan_sulawesi Balai P3KP Sulawesi I Menerima Audiensi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dalam pertemuan ini membahas mengenai pelaksanaan beberapa program Kementerian P3P kaitan dengan program perumahan di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun hal yang dibahas pada rapat ini terkait program perumahan salah satunya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berencana membuat inovasi pemukiman stimulus rumah swadaya dan ingin Kementerian P3P memberi dukungan atas inovasi tersebut. Bagi Kepala Balai, "Program-program Nasional ini peran Pemda sangat besar dalam mendukung terwujudnya Program perumahan bermutu, inovatif, dan terjangkau untuk pemukiman program perumahan dari Bapak Presiden Prabowo". "Untuk itu kami mendukung atas inovasi yang disampaikan dari Pemda Kab. Minut dan semoga inovasi ini menjadi pilot project bagi Kabupaten Kota di Sulawesi Utara". Tambahnya. Hadir dalam audiensi dan pembahasan ini Kepala Dinas PERUM Kab. Minut Bpk. Donat Tontingon, STP, Kabid Perumahan dan Pertanahan Bpk. Romy Sulendra, ST, Asid Kawasan Perumahan Bpk. Christian Kolay, ST, Bpk. Rinaldy Kangsan, ST. #KEMENPKP #PerumahanDanKawasanPerumahan 22x Liked by gerabonki and 37 others August 20, 2025 Add a comment...
35	25/8/25	Ucapan Selamat Hari Perumahan Nasional	 pkp_perumahan_sulawesi Selamat Hari Perumahan Nasional 2025. #HariPerumahanNasional Diperingati setiap tanggal 25 Agustus, Hari Perumahan Nasional bermula dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dibuka oleh Wakil Presiden Pertama RI, Mohammad Hatta, pada 25-30 Agustus 1950. Tahun ini, Kementerian P3P mengusung tema "Berencana Menjadikan Rumah Layak untuk Kemudahan Rakyat" yang menekankan pentingnya hunian layak, aman, dan terjangkau, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk suksesnya Program 3 juta Rumah. Mari jadikan langkah bergandengan tangan untuk menghadirkan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi semua. #KEMENPKP #HariPerumahanNasional #KampanyeUntukSemua 22x Liked by alika.j and 12 others August 25, 2025 Add a comment...

36	26/8/25	Balai P3KP Sulawesi I Kunjungi Kantor Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	 Tingkatkan Sinergitas Dan Kolaborasi Balai P3KP Sulawesi I Kunjungi Kantor Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
37	26/8/25	Kepala P3KP Sulawesi I Melakukan Kunjungan Kerja di Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku Utara	 Kunjungan Kerja di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Kepala Balai P3KP Sulawesi I Ucapkan Peningkatan Layanan di Satker PKP Maluku Utara
38	27/8/25	Balai P3KP Sulawesi I Melaksanakan Penanaman Pohon Dalam Rangka Memperingati Hari Perumahan Nasional Tahun 2025	 Balai P3KP SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
39	27/8/25	Kepala BP3KP Sulawesi Itinjau Huntap Pasca Bencana Banjir Bandang di Ternate	 Kepala Balai P3KP Sulawesi I Tinjau Huntan Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Ternate "Terima Kasih Atas Perhatian Pemerintah Pusat Melalui Kementerian PKP Yang Telah Memberikan Huntan Yang Layak Dan Berkualitas"

40	28/8/25	Kepala BP3KP Sulawesi I Melakukan Peninjauan Rumah Susun di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.	pkp.perumahan.sulawesi pkp.perumahan.sulawesi Halo #PulauHaloPKP Kepala Bala P3KP Sulawesi I H. Hujarat melakukan peninjauan di Balai Rumah Susun Duta Stage 1, Ternate Kota Ternate pada Jumat, 22 Agustus 2025. Dalam kunjungannya Hujarat menyampaikan apresiasi kepada pihak pengelola rumah susun atas kemampuannya dalam melaksanakan pemertan dan pengelolan rumah susun yang berkualitas dengan target baik. "Saya ucapkan terima kasih karena sudah membuat rumah susun ini dengan sangat optimal, harapan saya rumah susun ini dapat menjadi salah satu tempat tinggal masyarakat yang layak dan inovatif berkeadilan bagi siswa dan siswa SMK Negeri 2 Ternate dalam menyongsong generasi Indonesia Emas Tahun 2045" Ungkap Hujarat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala TU, Kepala Sastor PKP Provinsi Maluku Utara, PPK Rumah Susun dan Rumah Duta, PPK Rumah Susun, RUK dan Kawasan Permukiman PPSMA, dan Bendahara Pengeluaran serta staf pengelola rumah susun. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPerumahan #GedungHijauPKP Like by geradeniski and 21 others August 28, 2025 Add a comment...
41	23/8/25	Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku Utara Melakukan Audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	pkp.perumahan.sulawesi pkp.perumahan.sulawesi Halo #PulauHaloPKP Satuan Kerja Pemertan Dan Kawasan Perumahan Provinsi Maluku Utara melakukan audiensi dengan Kepala Tinggi Maluku Utara dan langsung ditemani oleh Kepala Kerja 1 Hery Almasri Prihaty, SH, MH di ruang rapat Kepala Kerja Maluku Utara, Kamis, 22/08/2025. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Sastor PKP Provinsi Maluku Utara, Sherry Tangkris, PPK Rumah Susun dan Rumah Duta, Sastor, PPK Rumah Susun, RUK dan Kawasan Permukiman Ajiy Cita Triyumnah, PPSMA Fransis Tulak, dan Bendahara Pengeluaran Abubakar Akbar. Kunjungan audiensi ini digelar dalam rangka memonitor pelaksanaan kegiatan pemertan yang merupakan salah satu program pembangunan sebagai bagian dari upaya integrasi antar instansi dalam memertan pembangunan kegiatan pemertan, ketertarikan hukum, tepat waktu, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan, sejalan dengan tugas Kepala sebagai instansi pemertan hukum yang juga bertanggung jawab dalam pengendalian pembangunan strategis. Pada kesempatan tersebut Kepala Sastor PKP memberikan informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pemertan dan kegiatan Tinggi Maluku Utara, Kepala Pengelolan Rumah Duta, Kepala Hery (RUK) media program bertuan Simulasi Pemertan Sastor (BPS) sebagai BPS unit yang berdasar 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. "Saya berharap dengan dilakukannya pemertan dan pengelolan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maka akan semakin program BPS dapat berjalan dengan terluas, agar terluas akan semakin banyak di Kabupaten/Kota lainnya" Ungkap Hujarat. Like by geradeniski and 36 others August 23, 2025 Add a comment...
42	1/9/25	Audiensi Balai P3KP Sulawesi I dengan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan.	pkp.perumahan.sulawesi pkp.perumahan.sulawesi Halo #PulauHaloPKP Bupati Minahasa Selatan Franky Denny Winkler melakukan pemertan dengan BAST dan Naskah Hutan sebagai aset BAST berupa rumah khusus hunian tempat pasia bencana abrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam acara Agenda Citronom Expo di Nusantara Hall ICC Convention Center BSD Tangerang yang di hadiri oleh Kepala Balai P3KP Sulawesi I H. Hujarat, Kepala TU dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi I. Salah satu informasi aset hunian tempat ini diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana abrasi pantai amaran yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 114 unit dengan bangunan RUMAH Tipe 36 M2 dengan nilai pencetakan sebesar Rp 21 Miliar. Bupati Franky dalam kesempatan menyampaikan harapan terhadap Balai P3KP Sulawesi I agar bersama-sama Pemerintah Minahasa Selatan berkolaborasi untuk mengonversi rumah rumah tidak layak huni di wilayahnya yang saat ini. "Saya berharap Pak Kabala bisa support dan bantu program-program kami di daerah untuk saya instruksikan OPD yang bertanggung jawab secepat mengkonversi ke pak Hujarat" ujarnya. "Tapi pak Bupati, saya pastikan akan dibantu dan kami sudah siapkan program pemertan Minahasa Selatan", Tutup Hujarat. Acara ditutup dengan sesi foto bersama Bupati Minahasa Selatan bersama jajaranmuhi di stand Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Like by geradeniski and 27 others September 1, 2025 Add a comment...
43	4/9/25	Balai P3KP Sulawesi I Menghadiri Penyerahan Bantuan Perbaikan RTLH di Kabupaten Minahasa Utara	pkp.perumahan.sulawesi pkp.perumahan.sulawesi Halo #PulauHaloPKP Tata Naskah Perbaikan Perumahan dan Kawasan Perumahan Sulawesi I yang diwakili oleh Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha menghadiri kegiatan penyerahan bantuan perbaikan RTLH dan rehabilitasi rumah korban bencana melalui skema APBD Minahasa Utara, CSR dan tanggap jawab sosial lingkungan perusahaan (TSLSP) oleh Bupati Minahasa Utara Suher Ganda kepada 45 Pemertan BAST di Aula Kantor Bupati Minahasa Utara pada Rabu, 3 September 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah Bersama pihak swasta di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung pengelolan bantuan sebanyak 45 unit rumah tidak layak huni yang terdiri dari 30 unit perumahan Corporate social Responsibility (CSR), 15 Unit Pemertan APBD Tahun 2025 dan 2 Unit Rehabilitasi Rumah Korban Bencana. Bupati Joene dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang turut berpartisipasi dalam upaya pengelolan rumah tidak layak huni di wilayahnya dan berharap kedepannya, akan ada perubahan positif lain yang masyarakat CSR tidak hanya dalam bentuk perbaikan rumah tapi juga perbaikan sanitasi agar kualitas hidup masyarakat bisa meningkat. Kepala Balai, Hujarat, ST, MT, ditemper terpujah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara beserta pihak-pihak swasta yang telah menjadi bagian dari aksi kita Presiden Prabowo Subianto dalam misi meryedkan hunian yang layak bagi masyarakat. Acara ditutup dengan melakukan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Minahasa Utara Suher Ganda kepada Kepala Balai P3KP Sulawesi I H. Hujarat. Like by geradeniski and 42 others September 4, 2025 Add a comment...

44	5/9/25	Ucapan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H. Mari tetapkan akhlak mulia Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan kita. Semoga semangat Rasulullah menjadi inspirasi untuk terus memertebatkan kebajikan dan integritas. 2h Liked by gerabonki and 29 others September 5, 2023 Add a comment...
45	8/9/25	Satker PKP Maluku Utara Melakukan Pembekalan Tenaga Pendamping Kegiatan BSPS	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #KabulufPKP Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan Pembekalan Tenaga Pendamping Kegiatan BSPS Provinsi Maluku Utara TA. 2025. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari (1-2 September 2023). Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Saku Pelaksana Wilayah I, Anis Sondery, ST, Kepala Saku Pelaksana Wilayah II, Suryani Thabli, ST, Kasatker PKP Prov. Maluku, Sandy Senguloh, ST, PPK Rumea, Apang Topyanah, S.T., M.Si, PPK Rumea Rumea, Sidi Solomah, S.T., M.T., Bendahara Sekeloa, Abdulbasit Alah, S.T., M.Si, PPKPM Saker, Fanus Tuak, S.T., serta perwakilan dari Kabupaten Tengg. Maluku Utara Kepala Seka Pengendalian Citra dan Binar, Triad Pitaru Khosru, Sofyan Saleh, SH dan Kasatker Perumahan, Adi Basoon, SH yang turut memberikan materi dalam pembekalan ini. Program BSPS adalah salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan gotong royong dan swadaya masyarakat. Tahun ini Provinsi Maluku Utara mendapat kuota sebanyak 674 unit yang dibagi berdasarkan delapan jatah delapan kabupaten, sebanyak 290 unit yang terdiri dari dua kota yaitu Kota Ternate dan Kota Tobo Kebayuan, sedangkan delapan Rumea sebanyak 384 unit yang terdiri dari empat Kabupaten yaitu Kaiti, Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan pembekalan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak, baik fasilitator maupun pelaksana di lapangan, memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip, mekanisme, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan program ini. Memberikan Pemahaman Mendalam Tentang Kebijakan BSPS 2025, Termasuk Mekanisme, Tugas, Dan Fungsi Fasilitator, Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku Utara Melakukan Pembekalan Tenaga Pendamping Kegiatan BSPS Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025. BALAI PELAKSANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Liked by gerabonki and 51 others September 5, 2023 Add a comment...
46	10/9/25	Kepala P3KP Sulawesi I Menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat Bersama Unit Organisasi Eselon 1 Kemen PKP	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #KabulufPKP Kepala Balai Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, Haryud mengahuti undangan Rapat Dengar Pendapat Bersama Unit Organisasi Eselon I Kementerian PUP dengan Komisi V DPR RI di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Gedung Nusantara Senayan Kota DKI Jakarta pada Selasa, 9 September 2023. Pertemuan ini menggodokkan pendirian pembahasan alokasi program dan anggaran pada RKA-K/L dalam Rancangan APBN Tahun 2026 dengan pagu maksat anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 sebesar Rp. 10.895 Triliun untuk target capaian pembangunan di peningkatan hunian sebanyak 450.457 Unit dengan program terprioritas pada prioritas bantuan yang berbasis masyarakat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sebesar 8,9 Triliun atau 400.000 unit atau 81,29% dari total anggaran Kementerian PUP Tahun 2026. Ketika Komisi V DPR RI Lulus menggodokkan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan capaian target program nasional 3 juta rumah. "Terlu menjadi perhatian, bahwa dengan anggaran di tahun 2026 sebesar 10.895 Triliun di Kementerian PUP, saya berharap target 3 juta rumah bisa dikecil dan terus dengan pendekatan PUP yang lebih sasaran serta pengujian audit, karena Pagu Pertumbuhan Nilai sudah ditanggung Pemerintah dan sudah ada Kredit Program Perumahan", Kata Latus. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekjen KemenPUP Didy, Kasatker Saku Wilayah I Digen Kawasan Permukiman, Muhammad Feras Handy, ST. Kepala Balai P3KP Sulawesi I Menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat Bersama Unit Organisasi Eselon I Kementerian PKP dengan Komisi V DPR RI di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Gedung Nusantara Senayan Kota DKI Jakarta BALAI PELAKSANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Liked by gerabonki and 37 others September 10, 2023 Add a comment...
47	10/9/25	Satuan Kerja PKP Sulawesi Utara Melakukan Pembekalan Tenaga Pendamping Kegiatan BSPS	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #KabulufPKP Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Pembekalan Tenaga Pendamping Kegiatan BSPS Provinsi Sulawesi Utara TA. 2025. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari (3-4 September 2023). Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kasatker PKP Sulut, Alwi Mahidin, ST MT, Kepala Saku Pelaksana Wilayah I, Anis Sondery, ST, Kepala Saku Pelaksana Wilayah II, Suryani Thabli, ST, PPK Rumea, Hendra Tumbantoro, SH, ST, perwakilan Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Willy Almagkuroto, ST, MK, perwakilan Direktorat Kawasan Permukiman Wilayah II Digen Kawasan Permukiman, Muhammad Feras Handy, ST. Program BSPS adalah salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan gotong royong dan swadaya masyarakat. Tahun ini Provinsi Sulawesi Utara mendapat kuota sebanyak 748 unit yang dibagi 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bolang Mongondow 400 unit, Kabupaten Bolang Mongondow Selatan 100 unit, Kabupaten Bolang Mongondow Utara 100 unit, Kabupaten Minahasa 38 unit, Kabupaten Minahasa Selatan 57, Kota Manado 33 unit, dan Kota Bontol 20 unit. Kegiatan pembekalan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak, baik fasilitator maupun pelaksana di lapangan, memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip, mekanisme, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan program ini. Memberikan Pemahaman Mendalam Tentang Kebijakan BSPS 2025, Termasuk Mekanisme, Tugas, Dan Fungsi Fasilitator, Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara Melakukan Pembekalan Tenaga Pendamping Kegiatan BSPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025. BALAI PELAKSANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Liked by rpl_angel and 56 others September 10, 2023 Add a comment...

48	11/9/25	Kepala Balai P3KP H. Hujurat menandatangani i Komitmen Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #KawasanPKP Bali, 11/09/2025 Kepala Balai P3KP H. Hujurat menandatangani Komitmen Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas bersama 16 Kepala Balai P3KP Seluruh Indonesia di Auditorium Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian PKP berkomitmen bahwa organisasi dan unit kerja akan berperan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, keadilan dan kepastian melalui sikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel. Dalam sambutannya Direktur Jenderal Kawasan Perumahan Ir. Nur Fitrah menyampaikan "Tolong para Kepala Balai bekerja sungguh-sungguh, jangan buat baik-baik dalam bekerja, benar-benar untuk rakyat". Acara ditutup dengan pesan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sedang mengalami kinerja pemerintah di mana rekan-rekan perlu saya ingatkan untuk berhati-hati dalam bekerja. Beresap, jangan anggap sehatnya awal dari red, 3 juta rumah jangan jadikan beban tapi jadikan itu sebagai amanah untuk masyarakat mendapatkan hidup yang lebih baik, tubuhnya. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPerumahan #GotongRoyongPKP Like by geradonki and 24 others September 11, 2025 Add a comment... Post
49	12/9/25	Rapat Evaluasi Program Pembangunan Perumahan Prov. Maluku Utara.	 pkp_dijepenerumdes and 3 others pkp_dijepenerumdes Halo #KawasanPKP Rapat Koordinasi Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah di Maluku Utara dilaksanakan pada Jumat, 12 September 2025, bertempat di Balla Convention, Ternate & Tidore. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Diogen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, para kepala daerah, serta seluruh jajaran teknis kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggalang komitmen mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun 2025 ditargetkan pembangunan 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas, dan pembangunan dapur sehat. Berdasarkan data e-RTLH, terdapat 50.758 unit RTLH di Maluku Utara, di mana 42.381 unit belum terdaftar dalam DTSEN. Selain itu, luas kawasan kumuh mencapai 3.023,47 hektar, termasuk topologi kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga tepi air, yang membutuhkan strategi penanganan sesuai karakteristik wilayah. Dari sisi kebijakan daerah, Kota Ternate telah mengimplementasikan Pembinaan RSC "Si Rapihan" untuk MBR, sementara 9 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses. Kabupaten Kepulauan Sula terdapat sebagai daerah terbelak dalam penganggaran bidang perumahan di APBD 2025. Melalui rapat ini, KemhanPKP mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi, mengklarifikasi anggaran RTLH di APBD maupun APBDes, serta menyampaikan data pembangunan/renovasi rumah agar perumahan layak di Maluku Utara. Like by geradonki and 56 others September 12, 2025 Add a comment... Post
50	15/9/25	Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku Utara Mendampingi Agenda Kunjungan Kerja Dirjen Perumahan Perdesaan.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #KawasanPKP Kamis, 11 September 2025 Satuan PKP Provinsi Maluku Utara mendampingi agenda kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Oka Iwan, MGS, MCCA di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Dalam kunjungan ini Kementerian PKP berkerjasama Post Audit Hunian Ternate dapat dilaksanakan oleh BPKP secara etasid, efisien, dan akuntabel untuk memastikan hasil pembangunan agenda strategis masyarakat. BPKP menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kementerian PKP ke Maluku Utara, yang menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga integritas, khususnya di bidang perumahan. Meskipun dengan keterbatasan SDM, BPKP Maluku Utara telah memulai proses post audit dengan menggalang 7 auditor, meskipun saat ini belum selesai pada minggu kedua September. Target penyelesaian post audit adalah akhir September, dengan harapan komunikasi dan energi antara Kementerian PKP dan BPKP tetap terjaga sesuai arahan. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPerumahan #GotongRoyongPKP Like by geradonki and 41 others September 15, 2025 Add a comment... Post
51	16/9/25	Satker PKP Provinsi Maluku Utara menghadiri acara Rapat Koordinasi Program Strategis Nasional 3 Juta	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #KawasanPKP Satker PKP Provinsi Maluku Utara menghadiri acara Rapat Koordinasi Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah di Maluku Utara dilaksanakan pada 15 September 2025 di Ternate & Tidore yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara bersama jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Diogen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, dan jajaran terkait. Terdapat 50.758 unit RTLH di Maluku Utara dengan 42.381 unit belum terdaftar dalam DTSEN, serta 3.023,47 hektar kawasan kumuh yang membutuhkan strategi penanganan khusus. Kementerian PKP mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi, mengklarifikasi anggaran RTLH, dan menyampaikan data pembangunan/renovasi rumah untuk perumahan layak yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan. "Pembangunan perumahan dipandang bukan hanya penyediaan fisik, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas hidup, ketahanan keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat". Ungkap Diogen Perumahan Perdesaan. Like by geradonki and 27 others September 16, 2025 Add a comment... Post

52	17/9/25	Kunjungan Kerja Kepala BP3KP Sulawesi I di Satker PKP Provinsi Gorontalo.	 Kunjungan Kerja di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Kepala Balai BP3KP Sulawesi I Tingkatkan Layanan di Satker PKP Gorontalo
53	19/9/25	Video Kementerian PKP Melakukan Audiensi dengan BPKP Sulawesi Utara.	 Audiensi BPKP Sulawesi Utara
54	19/9/25	Kepala BP3KP Sulawesi I Tinjau Lokasi Bantuan PSU Perumahan MBR di Gorontalo..	 Mastikan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Provinsi Gorontalo Terus Sempurna Kepala Balai BP3KP Sulawesi I Tinjau Lokasi Bantuan PSU Perumahan MBR di Gorontalo
55	20/9/25	Kepala BP3KP Sulawesi I Tinjau Lokasi Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dan Pembangunan Sanitasi di Kota Gorontalo.	 Upaya Peningkatan Permukiman Kumuh di Gorontalo Kepala Balai BP3KP Sulawesi I Tinjau Lokasi Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dan Pembangunan Sanitasi Lekobalo di Kota Gorontalo

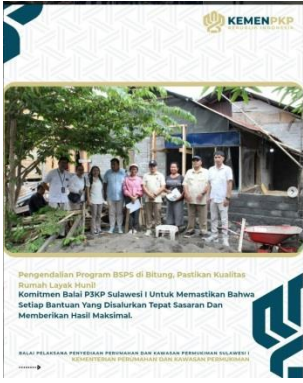
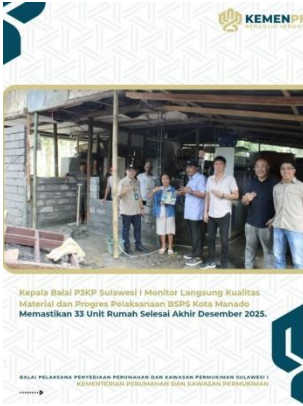
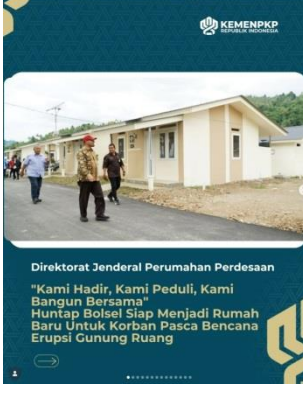
56	12/9/25	Video Tinjauan Lapangan Kementerian PKP bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.	 pkp_digepundes and 3 others Original audio pkp_digepundes Hata #KataKataPKP Kementerian PKP bersama pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pengamatan lapangan hunian tetap di Kabupaten Bontang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan pembangunan hunian untuk masyarakat terdampak. Kegiatan dilandasi langsung oleh Diklat Pemukiman PKP (Bupati Kota Utara, perwakilan BPAD BP3KP) serta sejumlah kepala bako dari FK, Adhokas (tata kota) yang ikut memantau dan mengawasi pembangunan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Dalam pengamatan, ditemukan beberapa kendala teknis di lapangan, mulai dari akses jalan, drainase, hingga kondisi sanitasi yang perlu segera ditangani. Menakutkan, setiap bangunan menjadi sangat penting untuk perbaikan ke depan, agar hunian tetap layak huni dan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung operasional hunian, termasuk dalam pengumpulan informasi SPAM serta pemetaan kawasan sekitar. Sinergi positif dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan hunian ini bermanfaat jangka panjang. Kementerian PKP berkomitmen untuk terus hadir, mendengarkan, dan memberikan solusi terbaik. Bersama, mari kita wujudkan hunian yang layak, kokoh, dan penuh harapan bagi masyarakat Sulawesi Utara. Liked by geradonki and 77 others September 20, 2025 Add a comment... Post
57	16/9/25	BP3KP Sulawesi I dan BNI Tandatangani Penyaluran Dana BPS untuk penerima Bantuan.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi #KataKataPKP Kepala Balai Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I (H. Hujarat) melaksanakan serah terima kekeluargaan kawasan kumuh Provinsi Sulawesi Utara dari Kepala Balai Perencanaan, Pengembangan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Utara (Rizka Pratama) di Ruang Rapat BP3KP Sulawesi Utara di Kota Manado, Kamis, 18 September 2025. Serah terima kelola ini merupakan peralihan dalam nomenklatur Peraturan Presiden No. 79/ Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat peralihan tugas dan fungsi terkait pengembangan kawasan permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pendampingan pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai informasi sebagian kawasan kumuh di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sesuai data rekapitulasi kumuh berdasarkan hasil verifikasi BP3KP sampai dengan Desember 2024 telah terhitung tuntas sebesar 445,08 Ha dan total luas kawasan kumuh 2.335,35 Ha sehingga menjadi catatan untuk penyelesaian di Balai PKP Sulawesi I sebesar 1.890,24 Ha. Kabala Hujarat menyampaikan akan melanjutkan tingkat efektif penanganan kawasan kumuh yang telah diselesaikan sampai dengan saat ini dan berharap kepada Kepala BP3KP Sulawesi Utara dapat memberikan pendampingan yang masif dan intensif untuk penyelesaian kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Utara. Liked by geradonki and 45 others September 20, 2025 Add a comment... Post
58	23/9/25	Ucapan Dirgahayu Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Dirgahayu Provinsi Sulawesi Utara ke-61. Selamat, dan Berkat Tuhan. #BalaiPKPSulawesiI #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPermukiman #Kotapangkajene Liked by geradonki and 20 others September 23, 2025 Add a comment... Post
59	1/10/25	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menegaskan Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi #KataKataPKP Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menegaskan Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen menyediakan hunian layak sebagai implementasi nilai gotong royong dan kesaktian sosial. #KementerianPKP #PerumahanDanKawasanPermukiman #Kotapangkajene Liked by geradonki and 9 others October 1, 2025 Add a comment... Post

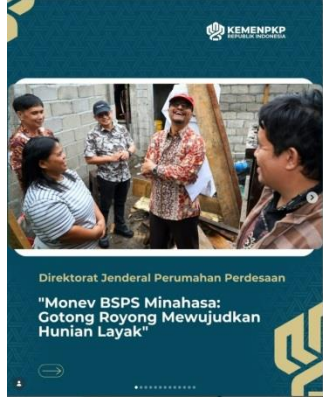
60	2/10/25	Ekspos Hasil Audit Pembangunan Huntap Maluku Utara oleh BP3KP Perwakilan Maluku Utara.	 KEMENPKP REPUBLIK INDONESIA Memastikan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Bantuan Pascabencana, Ekspos Hasil Audit Pembangunan Huntap Maluku Utara oleh BP3KP Perwakilan Maluku Utara. SAKSI PELAKSANA PENGENDALAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN SULAWESI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN
61	2/10/25	Postingan Hari Batik Nasional.	 KEMEN Selamat Hari Batik Nasional 62 OKTOBER 2025 A. H. Mujarat, ST, MT KEMENTERIAN PERUMAHAN
62	4/10/25	Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Di Gorontalo	 KEMENPKP REPUBLIK INDONESIA Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP di Gorontalo. Bahas Rencana Sosialisasi Program Kredit Program Perumahan (KPP) Bersama Gubernur Provinsi Gorontalo. SAKSI PELAKSANA PENGENDALAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN SULAWESI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN
63	7/10/25	Re-Post Postingan Dirjen Kawasan Permukiman Peninjauan Lapangan Kawasan Kumuh Lekobalo.	 BerAKHLAK KEMEN Perbaikan kawasan kumuh akan kurang efektif jika persoalan banjir dari Sungai Tapodu tidak ditangani secara menyeluruh. Penanganan kawasan yang telah dicatat dengan baik berpotensi kembali terdampak banjir tanpa adanya perlindungan infrastruktur pengendali. Direktur Jenderal Kawasan Perumahan, Ir. Fitrah Nur, M.Si. Peninjauan kawasan kumuh Lekobalo Kota Gorontalo pkp_kawasanpermukiman and pkp_perumahan_sulawesi pkp_kawasanpermukiman Halo #KorupsiPKP Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ir. Fitrah Nur, M.Si melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo dengan tiga agenda utama yang meliputi: 1. Pertemuan dengan Gubernur Gorontalo, Gunder Lomali, membahas rencana sosialisasi program baru Kredit Program Perumahan (KPP) yang diujikan bagi pelaku UMM untuk mendukung program perumahan nasional. 2. Peninjauan kawasan kumuh Lekobalo, Kota Gorontalo, bersama jajaran Saker PKP dan BWS Sulawesi II. Dalam kesempatan ini, Dirjen menekankan pentingnya penanganan banjir Sungai Tapodu agar program perbaikan kawasan permukiman berjalan optimal. 3. Kunjungan ke empat lokasi PKP perumahan subsidi, untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan manfaat nyata bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk evaluasi keterpaduan dengan skema DPDP-KPP. Kunjungan ini menjadi bentuk komitmen nyata bahwa kebijakan pusat terus diawasi hingga ke tingkat implementasi di daerah, dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada masyarakat. #KunjunganKerja #Gorontalo #KawasanPermukiman #perumahanayakt #PKP #Pau #PenganganKumuh #KementerianPKP

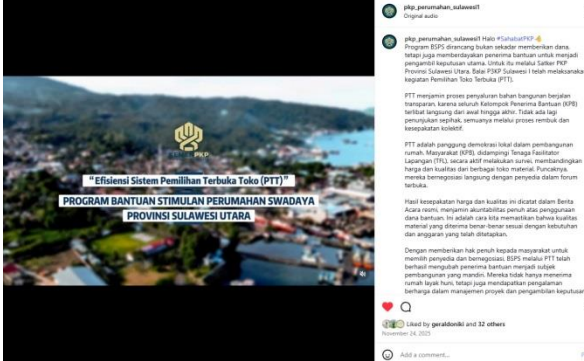
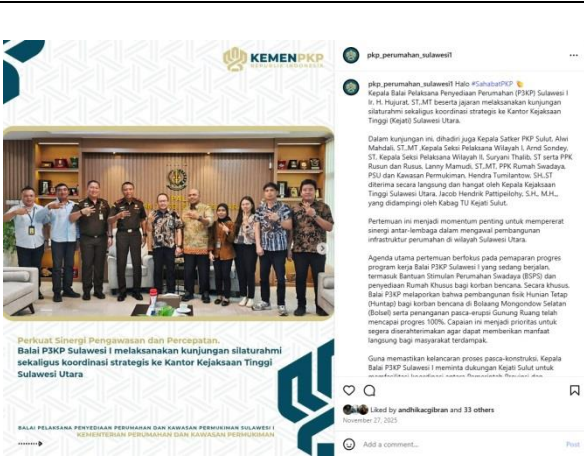
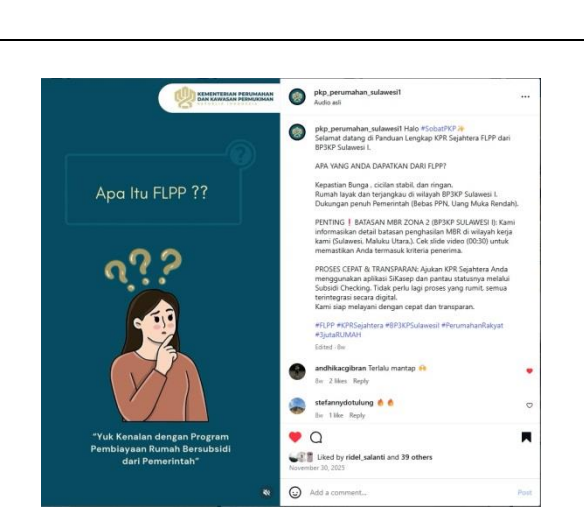
64	8/10/25	Dirjen Kawasan Permukiman Peninjauan Lapangan Kawasan Kumuh Lekobalo.	
65	8/10/25	Evaluasi Pelaksanaan Program Perumahan Subsidi dalam Bantuan PSU.	
66	10/10/25	Pendampingan Kunjungan dari Direktorat Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perkotaan Kemen PKP	
67	28/10/25	Postingan Ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda.	

68	17/10/25	BP3KP Sulawesi I Melakukan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun.	Balai P3KP Sulawesi I Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025. Memastikan Setiap Langkah Penerapan Anggaran Berjalan Efektif, Efisien, Dan Akuntabel Menjelang Penutupan T.A 2025. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
69	4/11/25	Sosialisasi KUR Perumahan. Proyek Huntap bencana erupsi Gunung Ruang, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro telah mencapai progres 100%.	Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Korban Erupsi Gunung Ruang di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Tuntas 100%. 287 Unit Rumah Siap Menjadi Tempat Tinggal Baru Bagi Warga Terdampak Dan Siap Dihuni Akhir Tahun. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
70	5/11/25	BP3KP Sulawesi I mengadakan Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di wilayah kerjanya	Sinergi Mewujudkan Data Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Akurat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Melaksanakan Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah Balai P3KP Sulawesi I. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
71	5/11/25	Postingan tentang Whistleblowing System (WBA)	punya keluhan soal integritas pegawai atau dugaan korupsi? BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN

72	7/11/25	BP3KP Sulawesi I menyelenggara kan Rapat Sinkronisasi Program Dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah Balai P3KP Sulawesi I.	pkp_perumahan_sulawesi1 pkp_perumahan_sulawesi1 Halo #balaiP3KP 🙏 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi Program Dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah Balai P3KP Sulawesi I, Manado, Kamis (6/11/2025). Rapat ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan penyelesaian basis data antara Balai P3KP dengan seluruh Dinas PPK Kab/Kota di wilayah kerja yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Output data yang terintegrasi digunakan untuk menyajikan pengusulan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 75 peserta baik secara luring maupun daring. Peserta mencakup Kepala Dinas PPK Provinsi dan Kab/Kota di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kepala Sektur PPK dan PPK di wilayah Balai P3KP Sulawesi I, Asosiasi Pengembang REI dan APDES, serta Pejabat Fungsional dan staf teknis Balai. Acara diisi dengan paparan dan diskusi panel bersama narasumber penting, yaitu perwakilan dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Ibu Anindya Budiali, perwakilan Kepala BPS, Ibu Purnama Cahya San Silalahi, dan Ketua Asosiasi REI, Bapak Sony Mandagi. Kegiatan ini mencakup paparan dukungan tiga provinsi terhadap Program Tiga Juta Rumah, penyusunan berita acara hasil sinkronisasi data, serta sesi Desk Capaian Program 3 Juta Rumah dan Pengusulan SIBATU Tahun Anggaran 2025. "Sinkronisasi data dan kolaborasi Balai dan Pemerintah Daerah yang kuat ini merupakan kunci dalam mendukung kelancaran pembangunan berkelanjutan. Bersama-sama, kita akan mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik." - Kepala Balai P3KP Sulawesi I. Like by ridel_sulanti and 26 others November 7, 2025 Add a comment...
73	10/11/25	Ucapan Selamat Hari Pahlawan	pkp_perumahan_sulawesi1 pkp_perumahan_sulawesi1 Perjuangan tidak berhenti di medan perang. Kita terus bergerak, berinovasi dalam pembangunan dan infrastruktur. Setiap pembangunan adalah penghormatan. Selamat Hari Pahlawan 2025. #TerusBergerakMelanjutkanPerjuangan #Pahlawan2025 #KampusPKP Like by geradonki and 16 others November 10, 2025 Add a comment...
74	10/11/25	Upacara Hari Pahlawan 2025 di BP3KP Sulawesi I	pkp_perumahan_sulawesi1 pkp_perumahan_sulawesi1 Upacara Bendera dalam rangka Memperingati Hari Pahlawan 2025, Senin (10/11/2025). Semangat para pahlawan adalah energi kami, insan Balai P3KP Sulawesi I siap melangkah dengan bergairah nyata, menyediakan rumah layak huni dan mengembangkan kawasan permukiman yang berkeadilan. Setiap pembangunan adalah wujud perjuangan hari ini. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis SK PPKK perwak dan PPKK perwak Tahun 2025 di lingkungan Balai P3KP Sulawesi I. #HariPahlawan2025 #KampusPKP #BP3KPSulawesi1 #PahlawanTeladankuTerusBergerak #PerumahanRakyat Like by geradonki and 42 others November 10, 2025 Add a comment...
75	26/10/25	Balai P3KP Sulawesi I berupaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Alat Pelindung Diri dalam setiap aktivitas kerja.	pkp_perumahan_sulawesi1 pkp_perumahan_sulawesi1 Halo #balaiP3KP 🙏 Keselamatan bukan sekedar konsep, tetapi budaya yang harus kita jaga bersama. Melalui Kepributan K3 Balai P3KP Sulawesi I berupaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap aktivitas kerja. Setiap langkah kecil menuju keselamatan adalah bentuk nyata komitmen kita dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selamat bekerja, tetap jaga keselamatan! #KeselamatanK3 #BP3KPSulawesi1 #PerumahanKawasanPermukiman #KampungRakyat Like by tiakhana and 18 others November 11, 2025 Add a comment...

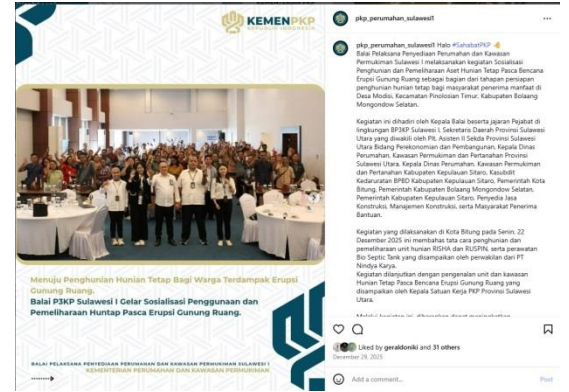
76	13/11/25	Pengendalian Program BSPS di Bitung	 Pengendalian Program BSPS di Bitung, Pastikan Kualitas Rumah Layak Huni! Komitmen Balai PK3KP Sulawesi I Untuk Memastikan Bahwa Setiap Bantuan Yang Disalurkan Tepat Sasaran Dan Memberikan Hasil Maksimal. BALAI PELAKSANA PERDESAAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
77	14/11/25	Kepala BP3KP Sulawesi I Monitor Langsung Kualitas Material dan Progres Pelaksanaan BSPS di Kota Manado	 Kepala Balai PK3KP Sulawesi I Monitor Langsung Kualitas Material dan Progres Pelaksanaan BSPS Kota Manado Memastikan 33 Unit Rumah Selesai Akhir Desember 2025. BALAI PELAKSANA PERDESAAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
78	17/11/25	Kasatker PKP Provinsi Maluku Utara Monev BSPS di Tidore	 Pastikan Kualitas, Tepat Sasaran dan Bebas Pungli, Monitor & Evaluasi BSPS di Tidore: Kasatker PKP Maluku Utara Monev BSPS di Tidore BALAI PELAKSANA PERDESAAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
79	21/11/25	Kunjungan Lapangan Dirjen Perumahan Perdesaan di Huntap Pasca Bencana Erupsi Gn. Ruang di Bolaang Mongondow Selatan.	 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan "Kami Hadir, Kami Peduli, Kami Bangun Bersama" Huntap Bolse! Siap Menjadi Rumah Baru Untuk Korban Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang BALAI PELAKSANA PERDESAAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN

80	22/11/25	Re-post instagram Dirjen Perumahan Perdesaan.	 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan "Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang Sitaro: Bukti Nyata Kolaborasi Pemerintah untuk Rakyat" Langkah nyata Pascabencana Hadir kunjungan lapangan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan di Hunian Tetap (Hututal) Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang Sitaro pada 20 November 2025, pertemuan langsung dengan Kepala Desa Gunung Sitaro pada 21 November 2025. Pemerintah pusat dan daerah beratu untuk memastikan hunian tetap bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang benar-benar siap dihuni, bukan sekadar janji. Sinergi Lintas Lembaga Hadir berbagai pemangku kepentingan dari Dirjen Perumahan Perdesaan, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara, hingga dewan tenaga dan mitra pembangunan. Semua pihak berkomitmen menyediakan isu-isu krusial agar masyarakat segera merasakan kehidupan baru yang lebih layak. Rumah Layak, Hidup Aman dan Sehat Bangunan Hunian tetap mencapai 100%. Kini fokus diarahkan pada sarana penunjang seperti saluran air, drainase, fasilitas sekolah, rumah ibadah, hingga pengkondisian tempat. Semua ini demi memastikan hunian bukan sekadar tempat tinggal, melainkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Harapan Baru untuk Nelayan Selanjutnya 147 kapal bantuan dari Kementerian Kelautan menjadi simbol kebangkitan ekonomi. Pelabuhan yang luas dimanfaatkan bersama membuka peluang baru bagi masyarakat Bolal dan Sitaro untuk tumbuh bersama, dengan tetap menjaga kelestarian alam. Liked by genadonki and 49 others November 22, 2025
81	22/11/25	Dirjen Perumahan Perdesaan Melakukan Monev BPS di Minahasa.	 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan "Monev BPS Minahasa: Gotong Royong Mewujudkan Hunian Layak" Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali hadir di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Melalui kunjungan lapangan 21 November 2025 di Sandano Selatan, Kementerian PUP bersama masyarakat memastikan bahwa hunian layak bukan hanya wacana, tetapi benar-benar hadir untuk warga yang membutuhkan. Bantuan sebesar 22 juta rupiah diberikan kepada penerima manfaat seperti Jenny Manuaya, Hendri Sembu, dan Mario Tampi. Bantuan ini menjadi dorongan awal, namun semangat masyarakat dan gotong royong warga sekitar adalah kekuatan utama yang membuat rumah layak huni dapat terwujud. BSPS adalah bukti nyata kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga fasilitator, dan masyarakat berdaya dalam satu tujuan: menghadirkan hunian yang aman, dan sehat dalam mewujudkan program 3 R (Rumah, Sinergi, dan lingkungan) yang berkelanjutan. Di balik setiap rumah penerima bantuan, ada kisah perjuangan seorang office boy yang membangun demi masa depan, seorang petani yang mengabdikan tenaga gotong royong, hingga seorang kuli belah online yang mengabdikan tabungannya untuk hunian layak. Kisah-kisah ini adalah contoh nyata harapan yang tumbuh di Minahasa. BSPS di Minahasa bukan sekadar program pembangunan, melainkan gerakan hati. Hunian layak adalah pondasi kehidupan tetap selangkah bertumbuh dengan penuh harapan. Bersama masyarakat, pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak huni. Liked by pjp.perumahan.sulawesi and 78 others November 22, 2025
82	22/11/25	Dirjen Perumahan Perdesaan diskusi bersama BP3KP Sulawesi I.	 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan "Arahan dan Diskusi 'Government is a Living Organism: Pemerintahan yang Terus Bertumbuh untuk Rakyat'" 21 November 2025, diskusi bersama Balai dan Satker BP3KP Sulawesi menghadirkan kita bahwa kupa pemerintah lokal, berinteraksi pada pembangunan fisik. Seperti huni di Bolal, rumah yang lebih layak huni akan terwujud, yang lebih penting adalah keberlanjutan hidup masyarakat, bagaimana mereka bisa tumbuh, belajar, dan merasa aman dalam lingkungannya. Dua bulan lalu, target besar telah tercapai. Namun perjalanan belum selesai. Hunian bukan sekadar bangunan, melainkan rumah baru yang akan menjadi tempat lahirnya harapan. Saat pintu-pintu mulai terbuka untuk dihuni, tanggung jawab kita jatuh semakin besar memastikan kehidupan di dalamnya benar-benar layak dan bermartabat. Pemerintah adalah organisme hidup. Ia harus terus bertumbuh, menyesuaikan diri, dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Kualitas menjadi aset utama, agar setiap kebijakan menghadirkan dampak positif yang setara, menyentuh hati, berpikir cang, dan memberikan kepercayaan masyarakat. Tantangan memang ada, seperti pemenuhan harga material yang sulit diendahkan. Namun komitmen pemerintah akan memastikan anggaran tidak mungkin terpaat menganggu mekanisme pasar, menjaga integritas, dan memastikan masyarakat tetap percaya bahwa setiap langkah diambil demi mereka. Penanganan kawasan kumuh bukan sekadar menghapus label "kumuh", melainkan membangun kehidupan baru. Sinergi pemerintah, masyarakat, dan daerah menjadi kunci. Liked by amandacaristya and 68 others November 22, 2025
83	24/11/25	Kepala BP3KP Sulawesi I Tinjau Proyek Kawasan Kumuh dan Sanitasi di Gorontalo.	 Kepala BP3KP Sulawesi I "Urahan Kawasan Kumuh Jadi Layak Huni di Lelakabalo: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I Tinjau Proyek Kawasan Kumuh & Sanitasi di Gorontalo." Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur strategis dapat dilaksanakan tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai standar kualitas yang ditetapkan. Tujuan dan Fokus Utama kegiatan Monev ini berfokus pada dua proyek utama: Penanganan Kawasan Kumuh dan Pembangunan Sanitasi. Dua kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan hidup bagi masyarakat Lelakabalo, serta memastikan terdapatnya fasilitas sanitasi yang layak dan memadai, yang merupakan kunci untuk kesehatan warga dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Monev dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan berbagai pihak, termasuk Pejabat Pelaksana Kemitraan (PPK), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan perwakilan dari pemerintah daerah. Manfaat Penanganan Monitoring dan Evaluasi memberikan beberapa manfaat pertama: mendeteksi dini masalah terhadap potensi kendala, seperti keterlambatan pasokan material, masalah teknis di lapangan, atau penyimpangan dari desain awal; kedua, kemampuan dan transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan memberikan transparansi kepada publik mengenai progres dan kualitas pekerjaan konstruksi serta. Liked by genadonki and 28 others November 24, 2025

84	24/11/25	BP3KP Sulawesi I Melakukan Langkah Strategis Penguatan Zona Integritas Melalui Koordinasi Dengan BBPOM.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #SulawesiPKP 🙌 MANADO - Dalam rangka mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang nyata dan berdampak, Balai Perkotaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I melaksanakan kegiatan strategi penguatan Zona Integritas (ZI). Melalui kolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Manado, BP3KP Sulawesi I menggelar rangkaian kegiatan Sharing Session dan Kunjungan Benchmarking. (17.11/11/2025) Kegiatan ini merupakan wujud komitmen penuh BP3KP Sulawesi I dalam upaya meraih produktivitas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN). Kepala Balai P3KP Sulawesi I, Ir. H. Hujurat, ST, MT menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan sebuah upaya kolektif untuk menyerap ilmu dan praktik terbaik (best practices) dari instansi yang telah berhasil menerapkan ZI dengan baik. Kami menyadari bahwa pembangunan Zona Integritas membutuhkan energi dan pemertahanan berkelanjutan. Melalui benchmarking ke BBPOM Manado, kami ingin melihat langsung implementasi sistem yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat kami adaptasi untuk efisiensi kinerja di lingkungan Balai P3KP Sulawesi I," ujar Hujurat. Dalam agenda Sharing Session, kedua instansi berdiskusi mengenai tantangan dan strategi dalam menjaga integritas pegawai serta standar pelayanan. Sementara itu, kegiatan Kunjungan Benchmarking berlangsung dengan ramah. Perkuat Zona Integritas Menuju WBK, Balai P3KP Sulawesi I Gelar Sharing Session dan Benchmarking ke BBPOM Manado Untuk Wujudkan Birokrasi Bersih. SAKSI PELAKSANA PEMBERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN Like by geratonski and 31 others November 24, 2025 Add a comment...
85	24/11/25	Postingan Video Pemilihan Toko Terbuka Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara.	 pkp_perumahan_sulawesi Original audio pkp_perumahan_sulawesi Halo #SulawesiPKP 🙌 Program PPT dirancang bukan sekadar memberikan dana, tetapi juga memberdayakan penerima bantuan untuk menjadi pengontrol kualitas dan harga di pasar lokal. Melalui kegiatan Pemilihan Toko Terbuka (PTT), PTT merupakan proses pemilihan bahan bangunan/belanjaan, karena seluruh Kabupaten/Kota/Kota (BKK) terlibat langsung dari awal hingga akhir. Tidak ada lagi penyalahgunaan, semua melalui proses terbuka dan kesempatan kompetisi. PTT adalah panggung demokrasi lokal dalam pembangunan rumah. Masyarakat (BKK) didampingi Tenaga Fasilitas Lapangan (TFL) secara aktif melakukan survei, membandingkan harga dan kualitas dari berbagai toko material. Penilaian mereka terintegrasi langsung dengan penyedia dalam forum terbuka. Hasil kesepakatan harga dan kualitas ini dicatat dalam Berita Acara resmi, menjamin akuntabilitas penuh atas penggunaan dana bantuan. Ini adalah cara kita memastikan bahwa kualitas material yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memilih penyedia dan barangnya, BP3KP melalui PTT telah berhasil mengubah persepsi bantuan menjadi solusi pembangunan yang mandiri. Semua tidak hanya menerima rumah layak huni, tetapi juga mendapatkan pengalaman berharga dalam manajemen proyek dan pengendalian keuangan. Like by geratonski and 32 others November 24, 2025 Add a comment...
86	27/11/25	Kepala BP3KP Sulawesi I beserta jajaran melaksanakan koordinasi strategis ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara.	 pkp_perumahan_sulawesi pkp_perumahan_sulawesi Halo #SulawesiPKP 🙌 Kepala Balai Perkotaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I, Ir. H. Hujurat, ST, MT beserta jajarannya melaksanakan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara. Dalam kunjungan ini, dihadiri juga Kepala Seksi PPK Sulut, Aiel Mahalia, ST, MT. Kepala Seksi Perkotaan Wilayah I, Arnel Sireney, ST. Kepala Seksi Perkotaan Wilayah II, Suran Thalia, ST serta PPK Rusun dan Rusak, Lanny Marnus, ST, PPK Rumah Sederajat, P3U dan Kawasan Permukiman, Honda Sembada, SA, ST diterima secara langsung dan hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pangelihy, S.H., M.H., yang didampingi oleh Kabag TI, Kasi Sulut. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mengawal pembangunan infrastruktur perumahan di wilayah Sulawesi Utara. Agenda utama pertemuan berfokus pada pemajangan program program kerja Balai P3KP Sulawesi I yang sedang berjalan, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penyediaan Rumah Khusus bagi korban bencana. Secara khusus, Balai P3KP melaporkan bahwa pembangunan Blok Hunian Tetap (Hunian) bagi korban bencana di Bolang Mongondow Selatan (Bolsa) serta penanganan pasca-gempu Gunung Ruang telah mencapai progres 100%. Capaian ini menjadi prioritas untuk segera diarahkan agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak. Guna memastikan kelancaran proses pasca-kontribusi, Kepala Balai P3KP Sulawesi I meminta dukungan Kepala Sulut untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan. Pertemuan ditutup dengan ramah. Perkuat Sinergi Pengawasan dan Penguatan, Balai P3KP Sulawesi I melaksanakan Kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara. SAKSI PELAKSANA PEMBERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN Like by andhikagibran and 33 others November 27, 2025 Add a comment...
87	30/11/25	Video Edukasi Program FLPP.	 pkp_perumahan_sulawesi Original audio pkp_perumahan_sulawesi Halo #SulawesiPKP 🙌 Selamat datang di Panduan Lengkap KPR Segitara FLPP dari BP3KP Sulawesi I. APA YANG ANDA DAPATKAN DARI FLPP? Kepastian Bunga - cicilan stabil dan ringan. Rumah layak dan terjangkau di wilayah BP3KP Sulawesi I. Dukungan penuh Pemerintah (Bebas PPN, Uang Muka Rendah). PENTING! BATASAN MBR ZONA 2 (BP3KP SULAWESI) & Kami informasikan detail batasan penghasilan MBR di wilayah kerja kami (Sulawesi, Maluku Utara). Cek slide video (00:30) untuk memastikan Anda termasuk kriteria penerima. PROSES CEPAT & TRANSPARAN: Ajaran KPR Segitara Anda menggunakan aplikasi SIKAP dan panduan statusnya melalui Subsidi Checking. Tidak perlu lagi proses yang rumit, semua terintegrasi secara digital. Kami siap melayani dengan cepat dan transparan. #FLPP #KPRSegitara #BP3KPSulawesi #PerumahanRakyat #JutaRUMAH Edited by andhikagibran Terlalu mantap 🙌 2 likes · Reply stefanydohung 🙌 1 like · Reply Like by riki_santi and 39 others November 30, 2025 Add a comment...

88	1/12/25	Kepala BP3KP Sulawesi I Mendampingi Ijen Kementerian PKP di Manado dan Bolaang Mongondow Selatan.	Perkuat Sinergi Pengawasan, Ijen Kementerian PKP Tinjau Progres Hutan & BSPP di SULUT. Kepala Balai P3KP Sulawesi I Mendampingi Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal (Ijen) Kementerian PKP di Manado dan Bolaang Mongondow Selatan.
89	2/12/25	Balai P3KP Sulawesi I Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Satuan Kerja.	Mantapkan Komitmen Zona Integritas dan Capaian Program di Akhir Tahun 2025. Balai P3KP Sulawesi I Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Satuan Kerja.
90	3/12/25	Kepala Balai P3KP Sulawesi, meninjau langsung pelaksanaan Program BSPP di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.	Jamin Transparansi & Bebas Pungli Dalam Kegiatan BSPP Kepala Balai P3KP Sulawesi I Pastikan Program BSPP di Maluku Utara Tepat Sasaran dan Tepat Waktu.
91	3/12/25	Kepala . menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Progres Pemanfaatan Tanah Aset.	Mengatasi Tantangan Lahan Perumahan Melalui Kolaborasi Uraian Instansi. Kepala Balai P3KP Sulawesi I Hadiri Rapat Koordinasi Strategis Pemanfaatan Tanah Aset Untuk Percepatan Program 3 Juta Rumah.

96	23/12/25	Postingan Selamat Hari Ibu.	 pkp_perumahan_sulawesi1 pkp_perumahan_sulawesi1 "Sebuah bangunan dikatakan Rumah Layak Huni jika memiliki struktur yang kokoh, atap yang melindungi, dan ventilasi yang memadai. Namun bagi kami, definisi 'layak huni' yang sejati adalah di mana ada sosok Ibu di dalamnya. Ibuah pondasi yang menopang saat kami rapuh, dan atap yang melindungi saat badai datang. Terima kasih Ibu, telah membangun 'rumah' di dalam hati kami dengan material cinta yang tak terhingga. Selamat Hari Ibu." #KemenPUP #BalaiP3KPSulawesi1 #GotongRoyong #TataRumahan #HariIbu2025 5w lctbgtgctuh, Ush lewatt yang update min 5w Reply Liked by amandacarity and 13 others December 23, 2025 Add a comment... Post
97	24/12/25	Balai P3KP Sulawesi I melalui Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Akhir Kegiatan (BSPS) Provinsi Sulawesi Utara.	 pkp_perumahan_sulawesi1 pkp_perumahan_sulawesi1 Halo #KuliahP3P! 🏡 Balai P3KP Sulawesi I melalui Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Akhir Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025, yang bertempat di Hotel Ibis Manado pada 15-16 Desember 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Tata Uluha, Karika Pratist, S.T., mewakili Kepala Balai P3KP Sulawesi I, dan dihadiri oleh jajaran Kasatker, Tenaga Koordinator Fasilitas (Korfas), Tenaga Fasilitas Lapangan (TFL) serta perwakilan Bank BNI. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja seluruh pelaku BSPS, khususnya pendampingan oleh Koordinator Kabupaten/Kota dan TFL, yang menjadi ujung tombak keberhasilan program dalam menjaga kualitas bangunan fisik. Melalui evaluasi ini, seluruh kendala dan permasalahan teknis di lapangan diidentifikasi secara mendalam untuk merumuskan solusi serta langkah perbaikan yang konkret. Output atau keluaran strategi yang dihasilkan dari pertemuan dua hari ini meliputi laporan progres pencapaian fisik Kabupaten/Kota, rekapitulasi penangan masalah, serta rumusan strategi peregrasiat pelaksanaan BSPS untuk tahun berikutnya yang lebih akurat dan berorientasi pada ketepatan sasaran serta kualitas konstruksi yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Dapi Sulut, Dra. Iati Soepredjo Mokogawo, turut memberikan arahan strategis dan kritik konstruktif. Beliau memotivasi perbaikan kualitas anggaran tahunan dari Rp20 juta menjadi minimal Rp30 juta per unit guna meningkatkan infirfa langka tahun bangunan, serta mengoptimalkan di Kaskas/Balai Perumahan agar dapat Kaskas/Balai Perumahan. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN Liked by geradoniki and 40 others December 24, 2025 Add a comment... Post
98	24/12/25	BP3KP Sulawesi I Menggelar Rapat Finalisasi Usulan Program Tahun Anggaran 2026.	 pkp_perumahan_sulawesi1 pkp_perumahan_sulawesi1 Halo #KuliahP3P! 🏡 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Perumahan Sulawesi I menggelar Rapat Finalisasi Usulan Program Tahun Anggaran (TA) 2026 di Quality Hotel Manado, Rabu (17/12/2025). Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPK) dan Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo, dan Maluku Utara ini bertujuan untuk mendukung Program Strategi Nasional Tiga Juta Rumah. Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kelengkapan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memendefinisikan hasil sinkronisasi sebelumnya guna menetapkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran di wilayah Sulawesi I. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berfokus pada verifikasi teknis dan kelengkapan dokumen sebagai input utama, yakni pemenuhan Readiness Criteria (RC) dari pemerintah daerah. Proses desk verifikasi mencakup pemeriksaan usulan program, Pemeringkatan Kawasan Kumuh, Pembangunan Sanitasi, Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), Rumah Susun, Rumah Khusus, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kepala Tata Uluha Balai P3KP Sulawesi I, Karika Pratist, ST, yang mewakili Kepala Balai, menegaskan bahwa forum ini berfungsi menyelaraskan usulan bottom-up dari daerah dengan kebijakan top-down nasional, sehingga duplikasi program dapat dihindari dan pembangunan berjalan sesuai kondisi lapangan Kementerian PKP. Selanjutnya dalam rapat ini menghasilkan Daftar Usulan Final Kabupaten/Kota TA 2026 yang telah disetujui dan akan diserahkan kepada Menteri, Menteri Koordinator Perumahan dan Kawasan Perumahan. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN Liked by geradoniki and 29 others December 24, 2025 Add a comment... Post
99	24/12/25	BP3KP Sulawesi I Melaksanakan Rapat Konsolidasi Akhir Pendataan Perumahan Delineasi Perkotaan.	 pkp_perumahan_sulawesi1 pkp_perumahan_sulawesi1 Halo #KuliahP3P! 🏡 Balai P3KP Sulawesi I melaksanakan Rapat Konsolidasi Akhir Pendataan Perumahan Delineasi Perkotaan dan Penajaman Usulan Program Perumahan dan Kawasan Perumahan TA 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Kementerian PUP dan Balai P3KP Sulawesi I, Perwakilan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara serta Lembaga maupun Instansi terkait CBR di Wilayah Kerja (PKP) Sulawesi I. Dalam kegiatan ini juga dipaparkan mengenai arah kebijakan serta target Program 3 Juta Rumah di Delinesa Perkotaan yang dihasilkan oleh Tim Studi Perumahan dan Kawasan Perumahan Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan serta penjabaran mengenai Delinesa CBR dalam Program 3 Juta Rumah yang diawasi oleh Kaubud Wilayah II Direktorat Pengembangan Kualitas Perumahan Perkotaan. Selanjutnya dalam rapat ini dilakukan konsolidasi akhir pendataan perumahan tahun 2025, pengamatan nilai kegiatan TA 2025, serta penajaman land use plan, penajaman penjabaran realita CBR oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Balai Provinsi Sulawesi Utara. Hasil rapat diharapkan menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan perumahan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penyempurnaan Perencanaan Program Perumahan yang Lebih Terintegrasi, Tepat Sasaran, dan Berkelanjutan. Balai P3KP Sulawesi I Melaksanakan Rapat Konsolidasi Akhir Pendataan Perumahan Delineasi Perkotaan dan Penajaman Usulan Program Perumahan dan Kawasan Perumahan TA 2026. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SULAWESI I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN Liked by amandacarity and 28 others December 24, 2025 Add a comment... Post

100	24/12/25	Sambut Natal BP3KP Sulawesi I Gelar Bakti Sosial dan Ibadah Syukur.	 Wujud Syukur Atas Pemertaan Tuhan dan Kepedulian Sosial Terhadap Masyarakat. Sambut Natal, Balai PK3P Sulawesi I Gelar Bakti Sosial dan Ibadah Syukur.
101	24/12/25	Ucapan Selamat Hari Natal	 SELAMAT MERAYAKAN <i>Hari Natal</i> 25 DESEMBER 2025 DAN SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2026 01 JANUARI 2026 Kepala Balai PK3P Sulawesi I Irs.M. Mujurat, S.T., M.P.
102	29/12/25	BP3KP Sulawesi I Melaksanakan Sosialisasi Penggunaan dan Pemeliharaan Huntap Pasca Bencana Erupsi Gn. Ruang	 Meningkatkan Pemahaman dan Keterampilan Masyarakat dalam Pemeliharaan Huntap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang. Balai PK3P Sulawesi I Gelar Sosialisasi Penggunaan dan Pemeliharaan Huntap Pasca Erupsi Gunung Ruang.
103	29/12/25	Postingan Waspada Gratifikasi	 WASPADA GRATIFIKASI Gratifikasi dapat mengganggu integritas dan berisiko sanksi pidana. Penerimaan publik harus diberikan dengan sepenuh hati, tanpa suap dan tanpa gratifikasi. Apabila melihat atau mengetahui Pejabat/Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melakukan atau menerima gratifikasi, SEGERA LAPORKAN! Website: www.pkp.go.id Hotline: 081-1010-0888 (Jawa PKP) Instagram: @pkp_perumahan_sulawesi1 Tolak Gratifikasi. Jaga Integritas! HUBUNGI PA TORANG #TolakGratifikasi #GantiIntegritas #PelayananPublik #AntiKorupsi #AntiSuap #RasaPKP

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

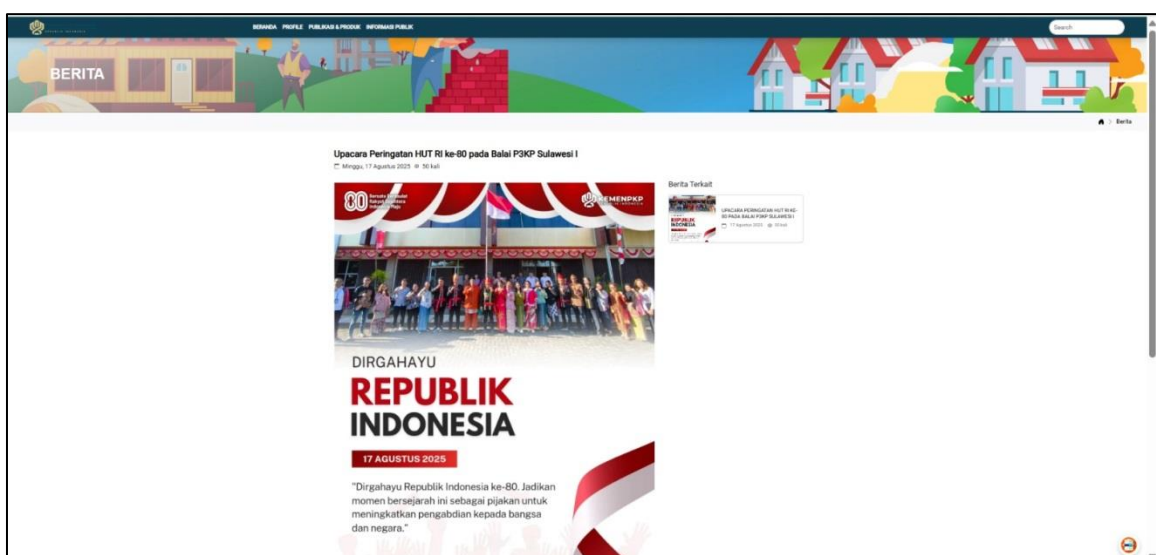
(Laporan Konsultasi, Advokasi, dan Hubungan Antar Lembaga)

Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Jan - Des2025

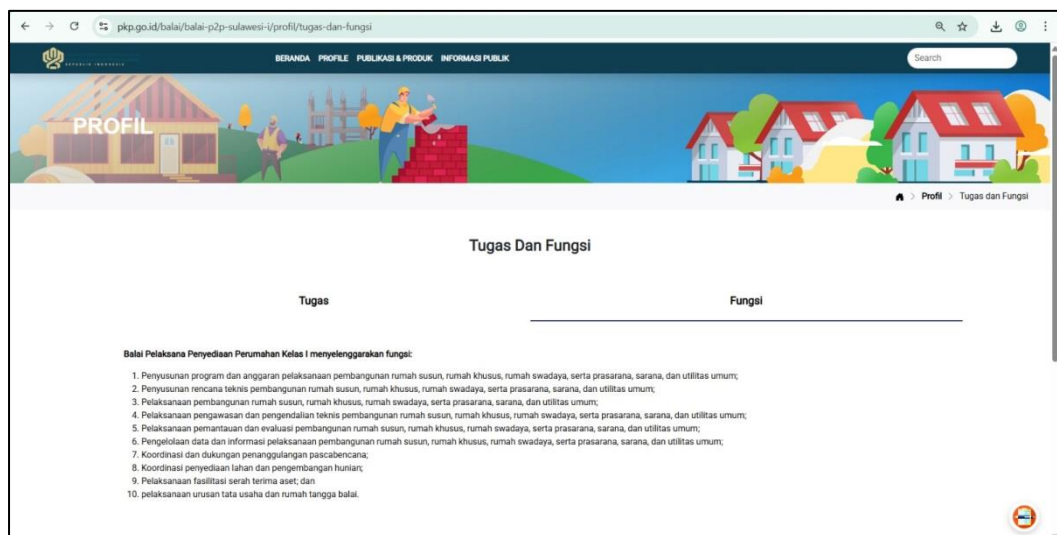
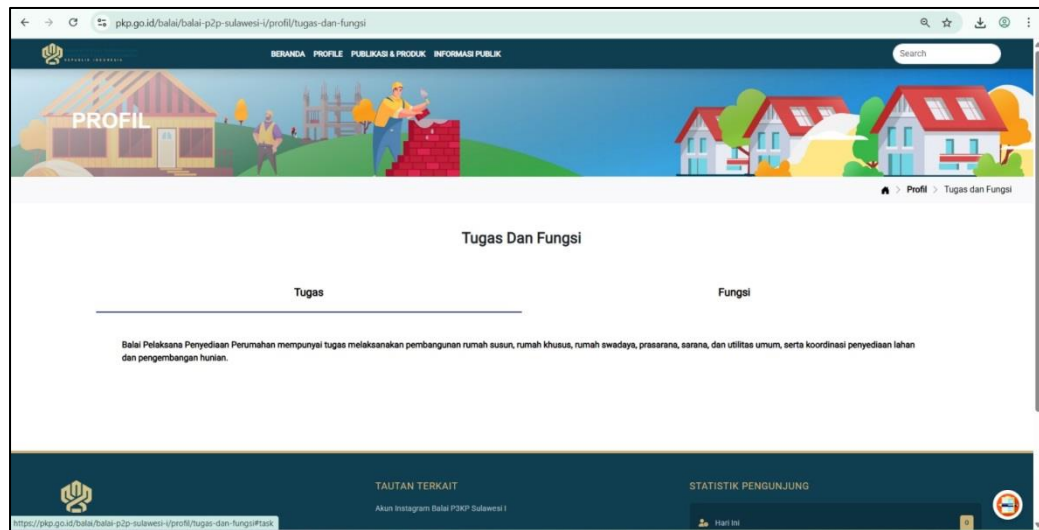
NO	TANGGAL	KETERANGAN PEMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN SINGKAT PERMOHONAN INFORMASI	DOKUMENTASI FOTO
1	3/7/25	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Jumlah Peserta: 5)	Konsultasi penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh	
2	18/7/25	Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Jumlah Peserta: 15)	Konsultasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan DTSen	
3	19/08/25	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Jumlah Peserta 3)	Konsultasi mengenai Inovasi Pembiayaan Stimulan Rumah Swadaya	
4	30/10/25	Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Jumlah Peserta 20)	Sosialisasi Klinik PKP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kebijakan Perumahan	
5	28/11/25	Masyarakat kota Ternate (Jumlah Peserta 15)	Sosialisasi Klinik PKP di Kota Ternate dan Kebijakan Perumahan	
6	29/11/25	Masyarakat kota Ternate (Jumlah Peserta 15)	Sosialisasi Klinik PKP di Kota Tidore dan Kebijakan Perumahan	
7	17/12/25	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Jumlah Peserta 6)	Koordinasi penyusunan berkas RP2KPKPK dan RP3KP	

7	26/09/25	Masyarakat kota Bitung (Jumlah Peserta 15)	Sosialisasi Klinik PKP di kelurahan Batu Putih Atas dan Program Kementerian PKP	
8	22/12/25	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Kep. SITARO dan Masyarakat Terdampak Bencana Erupsi Gn. Ruang (Jumlah Peserta: 300)	Sosialisasi Penggunaan dan Pemeliharaan Huntap Pasca Bencana Erupsi Gn. Ruang	
9	08/09/25	Masyarakat kota Manado (Jumlah Peserta 20)	Sosialisasi Klinik PKP di Kota Manado dan Program Kementerian PKP	

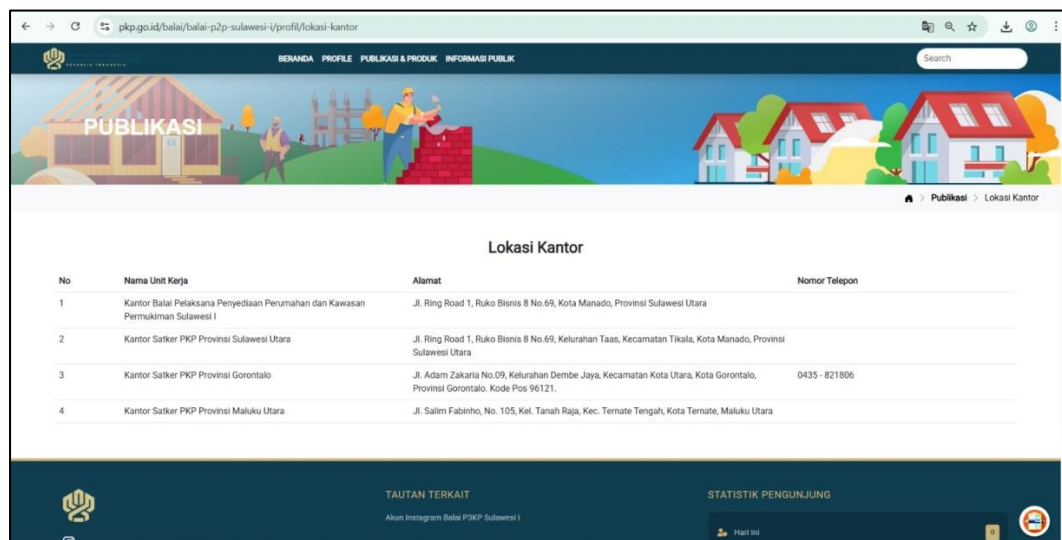
Pada tahun 2025 berbagai kegiatan strategis di lingkungan BP3KP Sulawesi I telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang diinformasikan melalui website BP3KP Sulawesi I memiliki website yang terintegrasi dengan website Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alamat <https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i/> Melalui website ini disampaikan informasi terkait tugas dan fungsi, struktur organisasi, produk dan kegiatan yang dilaksanakan.



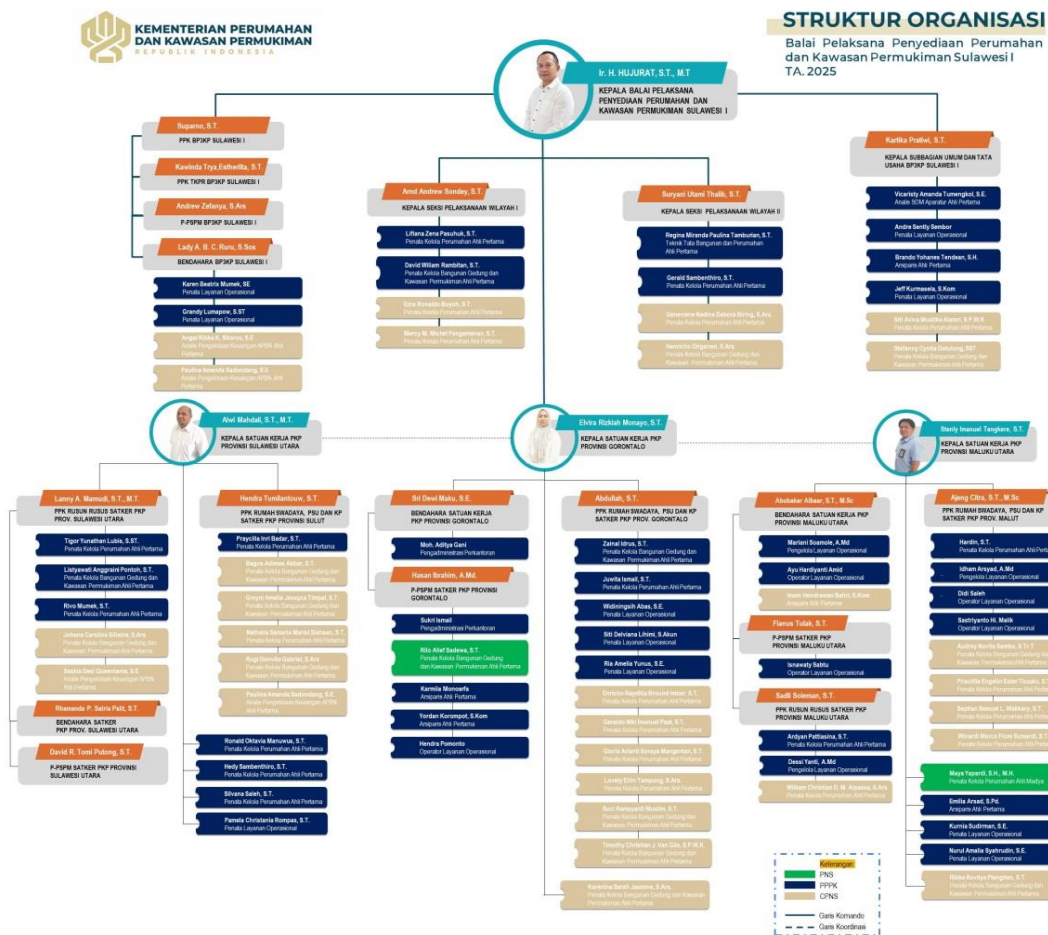
Updating Tugas dan Fungsi BP3KP Sulawesi I



Lokasi Kantor BP3KP Sulawesi I



Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi I



Updating Tautan pada footer website



2.3. Kendala dan Solusi.

A. Kendala.

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan komunikasi publik di lingkungan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Kementerian PKP pada tahun 2025 masih membutuhkan beberapa perbaikan dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- Tidak adanya Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pranata Humas;
- Kolaborasi antar bagian yang masih terkendala disebabkan BP3KP Sulawesi I terdiri atas 3 Provinsi sehingga dibutuhkan SDM Kehumasan untuk menunjang Komunikasi Publik disetiap Satker;
- Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang masuk di dalam kegiatan kehumasan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I ;
- Belum adanya Diklat berjenjang/terstruktur untuk pranata humas;
- Kekurangan alat penunjang dan Software untuk mendukung videografi dan fotografi kegiatan balai seperti :

Tabel 4 Kebutuhan Peralatan Kehumasan

No	Nama Alat	Qty
1	Sony Alpha Mark IV	1
2	Lensa Fix Sony 50 mm F. 1/8	1
3	Lensa Sony Wide 16 - 35 mm F.2.8	1
4	Lensa Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II	1
5	Laptop Lenovo Legion Pro 5 16	1
6	Flash Kamera	1
7	Drone DJI mini 4 Pro DJI RC2	1
8	Hardisk Ekternal SSD 2 TB	2
9	Server Storage (NAS) 10 TB	1
10	Capcut Team Premium 1 tahun	1

B. Solusi.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, berikut ini merupakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan Kehumasan dan Komunikasi Publik di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, antara lain:

- Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pranata Humas;
- Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pelayanan kehumasan seluruh pegawai di Balai termasuk di Satker Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara;
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik akan terus dilakukan dan akan lebih ditekankan tidak hanya untuk petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi tapi juga hingga tingkat kesatkeran dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi Publik kepada masyarakat;
- Mengikuti Diklat berjenjang yang diselenggarakan oleh Kementerian pusat atau lembaga lainnya;
- Pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang layanan informasi publik.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Kehumasan dan Komunikasi Publik di lingkungan BP3KP Sulawesi I selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup sosialisasi, publikasi, layanan konsultasi dan secara tatap muka (offline).

Pelaksanaan Kehumasan dan Komunikasi Publik di lingkungan BP3KP Sulawesi I sepanjang tahun pelaporan telah berkontribusi nyata dalam mendukung keterbukaan informasi publik, penguatan citra kelembagaan, serta penyampaian kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kepada masyarakat secara luas. Melalui sinergi tim, koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, pesan-pesan strategis kementerian dapat tersampaikan secara lebih cepat, konsisten, dan akuntabel. Beberapa capaian utama selama periode pelaporan antara lain:

- a. Layanan Informasi Publik, kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi kegiatan Kementerian PKP dimana informasi kegiatan diberikan secara berkala sesuai dengan memperhatikan daftar informasi yang dikecualikan.
- b. Klinik PKP, berfungsi sebagai wadah konsultasi, asistensi, dan bimbingan teknis yang terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Benar PKP dan SPAN Lapor sebagai media pengaduan konsumen dan masyarakat terkait perumahan.
- d. Publikasi melalui media sosial yang dimiliki oleh BP3KP Sulawesi I yaitu Instagram @pkp_perumahan_sulawesi1.
- e. Publikasi melalui website yaitu dengan alamat : <https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i> .

3.2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian kegiatan Kehumasan dan Komunikasi Publik selama Tahun 2025, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan layanan ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah SDM

Diperlukan penambahan serta pelatihan Pranata Humas di lingkungan BP3KP Sulawesi I agar pelayanan Kehumasan dan Komunikasi Publik dapat lebih baik, tepat waktu dan berkualitas.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital

Kanal-kanal media sosial harus dimanfaatkan lebih baik lagi secara optimal dengan konten-konten yang informatif, edukatif dan menarik.

3. Perluasan Jangkauan Sosialisasi Layanan

Disarankan untuk memperluas kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah yang belum terjangkau, terutama wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi terhadap bantuan perumahan dan permukiman, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

LAMPIRAN

NOTULA RAPAT INTERNAL POKJA ZONA INTEGRITAS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

Waktu		Selasa, 7 Oktober 2025, Pukul 10.00 WITA - Selesai
Tempat		Ruang Rapat BP3KP Sulawesi I dan <i>Online Zoom Meeting</i>
Peserta		1. KTU BP3KP Sulawesi I 2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 3. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 4. PPK TKPR BP3KP Sulawesi I 5. Seluruh Pokja Zona Integritas
No	Topik	Uraian Singkat dan Arahan
1	Manajemen Perubahan Kartika Pratiwi, S.T.	a. Penyusunan Tim Kerja Contoh nyata seperti penyusunan tim Pokja. Apakah penyusunan melalui prosedur yang tepat? Bagaimana caranya? Apa dasarnya memilih koordinator dan tim? Semua ada pertanggungjawaban tatanan dan tata caranya. Semua kegiatan ada tatanan dan tata caranya sehingga harapannya bisa merubah pola pikir maupun cara kerja di balai dan satker. Karena output balai dan satker adalah administratif. b. Rencana Pembangunan ZI Ada dokumen terkait timeline apa saja yang akan dilakukan dalam 1 tahun oleh tim Pokja. Contohnya rencana kerja, timeline, outputnya apa, timeframennya bulan apa dst. Diuraikan lengkap dari undangan rapat, notulensi, dokumentasi dll. c. Pemantauan dan Evaluasi Setelah menyusun rencana kerja dengan timeframennya, dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) apakah rencana sudah dilakukan atau belum? Bisa dilakukan secara berkala apakah 1 bulan sekali dst. Hasilnya adalah tindak lanjut. Akan dilakukan rapat rutin dengan tujuan agar progres masih dalam jalur. d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Harapannya mulai saat ini, kedepannya kita bisa lebih baik, lebih cepat merubah pola pikir dan budaya kerja. Dilakukan secara bertahap tidak instan. ZI adalah program yang butuh komitmen bersama, bukan hanya staff dan bawahan, tetapi juga butuh dukungan pimpinan sebagai role model. Ada contoh BPOM Bali yang bercerita bahwa mereka memulai ZI di tahun 2019 dan baru mendapat keterangan WBK di tahun 2025. Kesimpulannya bahwa ZI adalah proses panjang yang tidak instan. Selanjutnya akan ditetapkan agen perubahan. Tetapi ini masih dalam proses sehingga selanjutnya akan dibahas oleh koordinator dan kabalai.
2	Penataan Tata Laksana	a. Prosedur Operasional telah Ditetapkan Kaitannya dengan SOP. Dimana di BP3KP sudah ada Proses Bisnis, dari situlah akan dibuat SOP. SOP

LAMPIRAN

	Kartika Pratiwi, S.T.	utama dan SOP pendukung. SOP utama diambil dari Probis utama, biasanya lebih ke proses besar di balai yang menopang jalannya Satker dan Balai. dan SOP pendukung diambil dari Probis pendukung, yang sifatnya lebih ke penunjang. Probis pendukung ada di tiap PPK, seperti bendahara, pencairan, termin dll. b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemanfaatan SPBE seperti absensi dan SKP yang akan disosialisasikan minggu depan. Persuratan dan kesatkeran. Di mana semua sudah kita gunakan jadi tinggal monev terkait pemanfaatan c. Keterbukaan Informasi Publik Inputnya adalah laporan monev berisi kebijakan terkait keterbukaan apakah diterapkan atau belum. Hasil monitoring dan evaluasi dari sosial media dikendalikan oleh tim Pokja Tata Laksana.
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Kartika Pratiwi, S.T.	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Membuat perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Kemarin sudah di tahap peta jabatan dan pemetaan. Penempatan sudah dijalankan, lalu selanjutnya dari rencana yang sudah disusun akan ada monev. Apakah pegawai cocok dengan penempatan? b. Pola Mutasi Internal Dari evaluasi akan ditempatkan kembali atau perlu analisa ulang. Bisa dilakukan mutasi internal, mutasi antar jabatan. c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Dibuat Training Need Analysis untuk melihat diklat apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Pegawai di unit kerja memiliki hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lain seperti in-house training, coaching atau mentoring. d. Penetapan Kinerja Individu Akan disosialisasikan minggu depan dalam bentuk SKP e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Aturan disiplin seperti seragam yang dipakai per hari f. Sistem Informasi Kepegawaian
4	Penguatan Akuntabilitas Kartika Pratiwi, S.T.	a. Keterlibatan Pimpinan Unit kerja melibatkan pimpinan secara langsung. Jangan sampai ada pimpinan yang tidak terinfo. Aktifkan dokumentasi, notulensi, dan absensi. b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Ada rencana strategis, RKKL. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
5	Penguatan Pengawasan Kartika Pratiwi, S.T.	a. Pengendalian Gratifikasi Public campaign seperti kaos, poster. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bisa dibentuk

LAMPIRAN

		b. 6Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penilaian risiko dan mitigasi risiko. Tujuannya dibangunnya lingkungan pengendalian. Akan ada laporan per triwulan. c. Pengaduan Masyarakat Pengaduan bisa lewat Klinik PKP, Laporspan, dll. Semua didokumentasikan dari pengaduan, hasil laporan, tindak lanjut dll. d. Whistle Blowing System Dibuat laporan, Nota Dinas, Penanganan dan tindak lanjut
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kartika Pratiwi, S.T.	a. Standar Pelayanan Membuat standar pelayanan yang selanjutnya disetujui kabalai. Kedepannya bisa dibuat infografis alur pelayanan, jam pelayanan dll. b. Budaya Pelayanan Prima Peningkatan layanan. Akan dibuat pojok diskusi untuk menerima aduan dan tamu. Diakomodir dengan DIPA TKPR. Bisa dilengkapi dengan X Banner dan poster. c. Pengelolaan Pengaduan Menampung masukan dari sosial media untuk diselesaikan. Selanjutnya bisa dilakukan survey kepuasan masyarakat.
7	Tindak Lanjut Kawinda Trya Estherlita, S.T.	Per Pokja mengupload dokumen masing masing ke akun MyPKP balai sebagai laporan Pembangunan Zona Integritas

Mengetahui

KTU BP3KP Sulawesi I



Kartika Pratiwi, S.T.
NIP. 199411052019032013

Notulis



Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007

Dokumentasi



Dokumentasi



LAMPIRAN

NOTULA RAPAT INTERNAL POKJA ZONA INTEGRITAS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

Waktu		Selasa, 14 Oktober 2025, Pukul 15:00 WITA - Selesai
Tempat		Ruang Rapat BP3KP Sulawesi I dan <i>Online Zoom Meeting</i>
Peserta		1. KTU BP3KP Sulawesi I 2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 3. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 4. PPK TKPR BP3KP Sulawesi I 5. Seluruh Pokja Zona Integritas
No	Topik	Uraian Singkat dan Arahan
1	Pengantar Kartika Pratiwi, S.T.	Diharapkan masing-masing pokja dapat merinci dan menjelaskan rencana kerjanya. Meskipun pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada bulan Oktober tahun ini, rencana kerja tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk tahun berikutnya. Dengan demikian, hal-hal yang masih perlu disesuaikan dapat kita bahas bersama di forum ini.
2	Pokja Penguatan Tatalaksana Lifiana Zena Pasuhuk, S.T.	1. Pelaksanaan apel 2. Peliputan kegiatan 3. Pelayanan informasi, akan dibuat barcode, misal di klinik PKP, poster untuk penyampaian 4. Pengisian konten media sosial 5. Administrasi perjalanan dinas, yang terencana dan khusus, misal ada dispo dari ppk, lalu ttd satker atau kabalai, berapa lama hari dan jamnya, itu akan dibuat SOP. Khusus itu artinya tiba tiba misal sudah pergi deluan tapi belum ada SPTnya. 6. Pengajuan UP 7. Pengajuan GUPnya 8. Pengajuan LS 9. Pelaksanaan verifikasi teknis pengusulan, akan dibuat SOP 10. Penanganan benturan kepentingan 11. Penempatan pegawai dengan kehadiran terbaik dan keterlambatan terbanyak. Akan direkap mingguan. Misal disetujui akan ada SOPnya
3	Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Vicaristy Amanda Tumengkol, S.E.	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 2. Pola mutasi internal 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 4. Penetapan kinerja individu 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai 6. Sistem informasi pegawai
4	Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja Maya Yapardi, S.H., M.H.	1. Pimpinan terlibat langsung dalam perencanaan dan penetapan kinerja, termasuk penyusunan program dan anggaran (RKKAL). 2. Rapat progres bulanan dipimpin oleh Balai dengan undangan resmi sebagai bentuk monitoring rutin.

LAMPIRAN

		- Monitoring kinerja dan keuangan dilakukan melalui rapat mingguan/bulanan dengan output berupa laporan e-monitoring dan keuangan yang ditandatangani pimpinan. - Menyusun indikator kinerja (IKU) melalui SK/draft yang disahkan oleh Kepala Balai untuk memastikan kesesuaian dengan tugas dan fungsi. - Indikator kinerja disusun menggunakan metode SMART dan dikoordinasikan secara berkala dengan PPK. - Mengadakan rapat koordinasi (online/zoom) antar satker untuk menyusun dan memantau progres laporan kinerja (LAKIP). - Meningkatkan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas melalui koordinasi dengan TU agar operator mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi terkait Renstra, LAKIP, dan SAKIP.
5	Pokja Penguatan Pengawasan Williams Christian De Mellian Aipassa, S.Ars.	- Pengendalian gratifikasi - Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah - Pengaduan masyarakat - Whistle-Blowing System - Penanganan benturan kepentingan
6	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Suryani U. Thalib, S.T.	Usulan & Rencana Pengembangan - Perlu dibuat rencana kerja yang memuat kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk kegiatan yang menonjol seperti penguatan layanan informasi publik di Balai dan Satker (terutama di Maluku Utara). - Disarankan menyiapkan: - Standar Pelayanan dan alur permohonan informasi publik. - Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen keterbukaan dan transparansi layanan. - Media informasi publik seperti X-banner/poster terkait alur layanan. - Kotak saran atau survei kepuasan masyarakat, bisa berbentuk barcode atau form digital. - Integrasi & Koordinasi. Koordinasi diperlukan dengan: - Pokja Pengawasan, terkait sistem pengaduan masyarakat (SPAN Lapor atau kanal PKP). - Tim Komunikasi Publik (Kompu), untuk menyusun jadwal dan intensitas publikasi di media sosial balai. - Tim TU, dalam penyusunan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta tim pelayanan publik. - Klinik PKP, agar kegiatan pelayanan publik dapat berjalan paralel dengan pendampingan teknis di lapangan (BSP/BSPS). - Tindak Lanjut - Target minggu ini: penyusunan rencana kegiatan dan identifikasi ulang kegiatan pelayanan publik tahun berjalan.

LAMPIRAN

		b. Perlu dukungan dan bahan dari pusat/Balai, seperti juknis Klinik PKP, draft SK PPID, dan contoh materi publikasi. c. Perlu penganggaran untuk media publikasi (X-banner, poster, leaflet, dll.) agar dapat diakomodasi dalam penyerapan kegiatan Balai. 5. Catatan Tambahan a. SK Tim Pengelola Informasi Publik perlu segera disiapkan, sejalan dengan SK Renstra, SAKIP, dan LAKIP. b. Klinik PKP akan diaktifkan kembali dengan pola kolaboratif antara Balai dan Satker. c. Output utama yang diusulkan: Maklumat Pelayanan, Standar dan Alur Pelayanan Publik., Kotak Saran & Survei Kepuasan, Media Publikasi & Sosialisasi (Poster/X-banner/Media Sosial).
7	Pokja Manajemen Perubahan – Pemilihan Agen Perubahan Kartika Pratiwi, S.T.	Pemilihan dilakukan secara voting dengan argumentasi dari masing masing pemilih sesuai dengan kesepakatan awal yang dihasilkan dari rapat Pembahasan Pemilihan Agen Perubahan ZI. 1. Balai P3KP Sulawesi I : Henricho Dirganeri, S.Ars. 2. Satker Sulawesi Utara : Saskia Desi Queentania, S.E. 3. Satker Gorontalo : Enricho Rayditia Bround Imbar, S.T. 4. Satker Maluku Utara : Williams Christian De Mellian Aipassa, S.Ars. Prinsip Pelaksanaan kegiatan tidak perlu rumit, yang penting sederhana namun berdampak dan terlihat di lingkungan kantor. Setiap kegiatan wajib disertai laporan realisasi dan rencana aksi dalam bentuk matriks. Ditekankan agar setiap agen membuat kegiatan berbeda agar tidak terjadi duplikasi antar individu. Contoh Kegiatan Agen Perubahan, Berpakaian rapi dan menjadi teladan disiplin di kantor, Sosialisasi budaya kerja seperti “senyum, sapa, salam.”, Pembuatan video pendek atau konten positif di media sosial, Kegiatan olahraga atau senam sehat untuk membangun semangat kerja, Sosialisasi penggunaan atribut kerja seperti name tag (nempel). Dokumentasi & Bukti Dukung. Seluruh kegiatan harus terdokumentasi (foto, video, laporan) dan diunggah sebagai bukti dukung pembangunan Zona Integritas. Bukti kegiatan dapat diunggah ke media sosial atau diserahkan melalui dokumentasi internal (emon/rekap kegiatan). Disarankan membuat video pendek kegiatan agen perubahan untuk publikasi di akun media sosial Balai (IG). Kolaborasi & Koordinasi Agen Perubahan dapat berkoordinasi dengan: 1. Pokja Pelayanan Publik, untuk kolaborasi kegiatan positif (misalnya video pelayanan prima).

LAMPIRAN

		2. Tim Komunikasi Publik (Kompu), untuk publikasi kegiatan di media sosial. 3. Balai membuka ruang komunikasi melalui grup dan WA untuk memudahkan koordinasi kegiatan. Tindak Lanjut 1. Menyusun rencana aksi Agen Perubahan dalam bentuk matriks. 2. Melaksanakan minimal satu kegiatan nyata yang berdampak dan terdokumentasi. 3. Membuat video atau konten singkat terkait program unggulan Balai (misalnya Klinik PKP atau BSPS).
--	--	--

Mengetahui

KTU BP3KP Sulawesi I



Kartika Pratiwi, S.T.
NIP. 199411052019032013

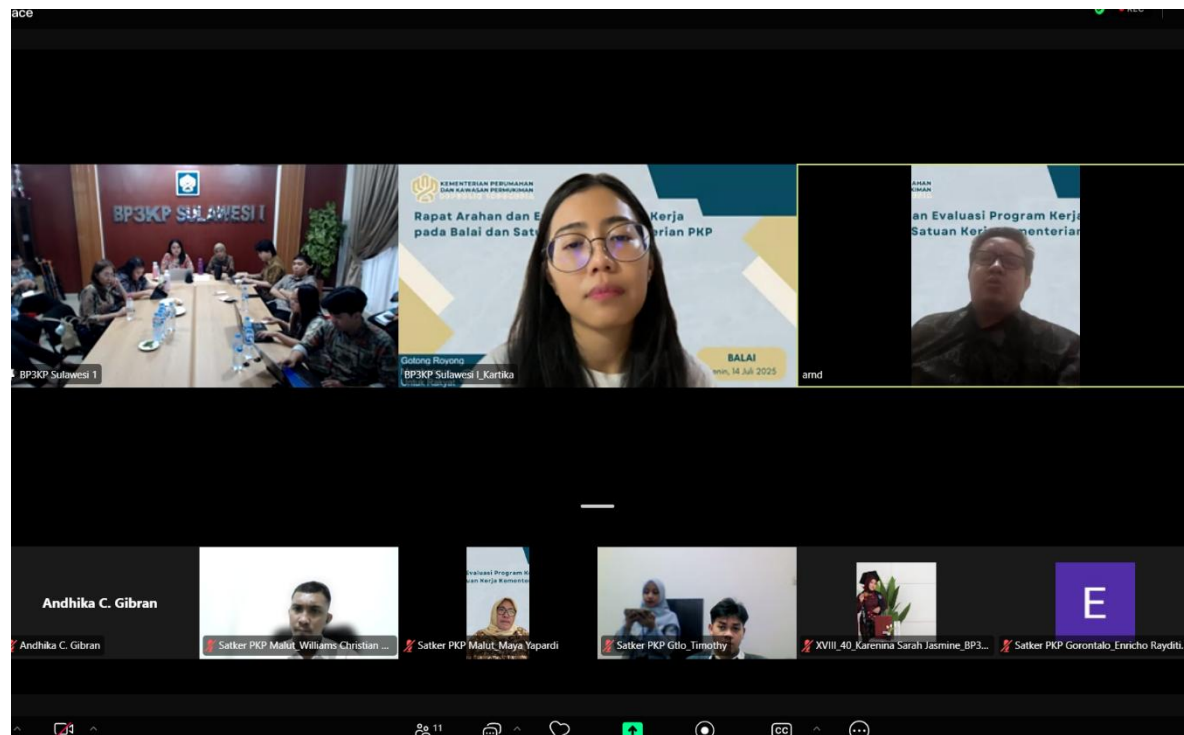
Notulis



Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007

LAMPIRAN

Dokumentasi

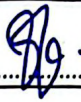
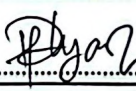
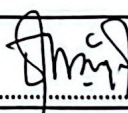


LAMPIRAN

Dokumentasi



DAFTAR HADIR
RAPAT RENCANA KERJA POKJA ZONA INTEGRITAS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I
SenIn, 14 Oktober 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
1			1.....		
2				2.....	
3	TRYA KAWINDA	PPK TKPR	3..... 		
4	Suryani Utami Thalib	Kasi RW 2		4..... 	
5	Andrew Zefanya	BK TK-BKPR	5..... 		
6	KEBINA T	STAF		6..... 	
7	LIFANS PASUTUK	STAF	7..... 		
8	NIKEN SAMOLA	STAF		8..... 	
9	PAULINA A. SADOUDATIG	STAF	9..... 		
10	Angel Sitoris	Staf		10..... 	
11	Greyni Timpai	Staf	11..... 		
12	S.A. Muchlis Alamir	Staf		12..... 	
13	Bagus Adimas A	Staf	13..... 		
14	AMONIKA C. CIMPAM	MAKPP		14..... 	
15	Kristhy Tumengkol	Staf	15..... 		
16	Heuricho Dirganeri	Staf		16..... 	
17	Mercy M.M. Pangemahan	Staf	17..... 		
18				18.....	
19			19.....		

Absensi Online

Rapat Rencana Kerja Pokja ZI

No	Nama Peserta	Jabatan	Unit Kerja
1	Timothy Van Gils	PKBGKP Ahli Pertama	Satker PKP Gorontalo
2	Karenina Sarah Jasmine	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Satker PKP Sulawesi I
3	Angel Ribka Kristyn Sitorus	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	BP3KP Sulawesi I
4	Karenina Sarah Jasmine	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Satker PKP Prov. Gorontalo
5	Kartika Pratiwi	KTU	BP3KP Sulawesi I
6	Siti Aviva Mustika Alamri	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	BP3KP Sulawesi I
7	Saskia Desi Queentania	APK APBN Ahli Pertama	Satker Sulut
8	Geneviene Nadine Debora Biring	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	BP3KP Sulawesi I
9	Maya Yapardi	JF PKP Ahli Madya	Satker PKP Maluku Utara
10	Audrey Novita Sambo	PKBGKP Ahli Pertama	Satker Maluku Utara
11	Stefanny Dotulung	PKBGKP	BP3KP Sulawesi I
12	Williams Christian De Mellian Aipassa, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	BP3KP Sulawesi I

LAMPIRAN

NOTULA RAPAT CAPAIAN POKJA ZI & AGEN PERUBAHAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

Waktu		Selasa, 21 Oktober 2025, Pukul 15.00 WITA - Selesai
Tempat		Ruang Rapat BP3KP Sulawesi I dan <i>Online Zoom Meeting</i>
Peserta		1. KTU BP3KP Sulawesi I 2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 3. PPK TKPR BP3KP Sulawesi I 4. Seluruh Pokja Zona Integritas
No	Topik	Uraian Singkat dan Arahan
1	Kartika Pratiwi, S.T. & Kawinda Trya Estherlita, S.T.	Minggu depan akan diselenggarakan Acara Sosialisasi Zona Integritas (ZI) dengan menghadirkan narasumber dari BBPOM. Sebelumnya, telah dilakukan studi banding ke BBPOM untuk mempelajari penerapan ZI di instansi tersebut. Dalam kunjungan tersebut, peserta disambut dengan baik mulai dari petugas keamanan hingga resepsionis di gedung pelayanan publik yang representatif. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, seperti buku tamu digital, kopi dan teh di meja pelayanan, serta berbagai SOP layanan yang ditampilkan dalam akrilik. Selain itu, terdapat ruang laktasi, daycare, dan ruang konsultasi privat, serta jalur khusus difabel lengkap dengan kursi roda dan tongkat. Dari hasil pengamatan, Pokja 6 merencanakan pembuatan x-banner bertema antikorupsi dan gratifikasi sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan ZI. Harapannya, berbagai praktik baik yang diperoleh dari kunjungan ini dapat diterapkan di lingkungan kerja kita ke depan.
2	Henricho Dirganeri, S.Ars (Agen Perubahan)	Program 1. Berpakaian sesuai aturan 2. Senyum salam sapa 3. Dirga (Disiplin, Inovatif, Ramah, Gotong Royong, & Adaptif)
3	Saskia Desi Queentania, S.E. (Agen Perubahan)	Program 1. Kalender kerja keuangan 2. Datang tepat waktu 3. Berpakaian rapi sesuai jadwal
4	Williams Christian De Mellian Aipassa, S. Ars. (Agen Perubahan)	Program 1. Datang tepat waktu 10-30 menit sebelum jam masuk kantor 2. Berpakaian rapi sesuai ketentuan 3. Pemasangan poster/mading bertema integritas 4. 5 menit membersihkan meja 5 menit 5. Kotak saran
5	Kawinda Trya Estherlita, S.T.	Capaian dan program kerja (proker) dari masing-masing pokja akan dikumpulkan pada hari Jumat sebagai bagian dari upaya untuk menyatukan dan mematangkan hasil kerja setiap tim. Pengumpulan ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi bersama, di mana setiap pokja dapat meninjau kembali progres yang telah dicapai,

LAMPIRAN

		kendala yang dihadapi, serta strategi yang perlu diperkuat dalam rangka Pembangunan Zona Integrutas di BP3KP Sulawesi I.
--	--	--

Mengetahui

KTU BP3KP Sulawesi I



Kartika Pratiwi, S.T.
NIP. 199411052019032013

Notulis



Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007

Dokumentasi



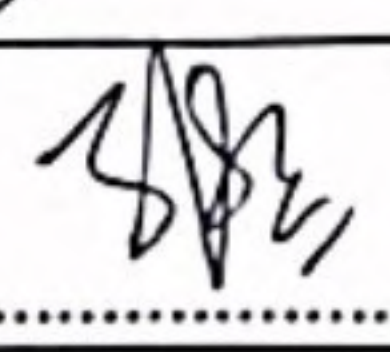
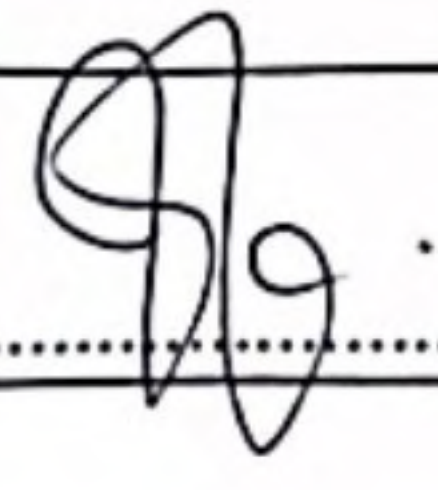
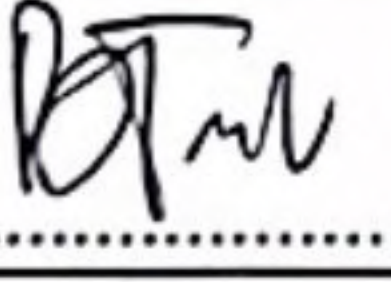
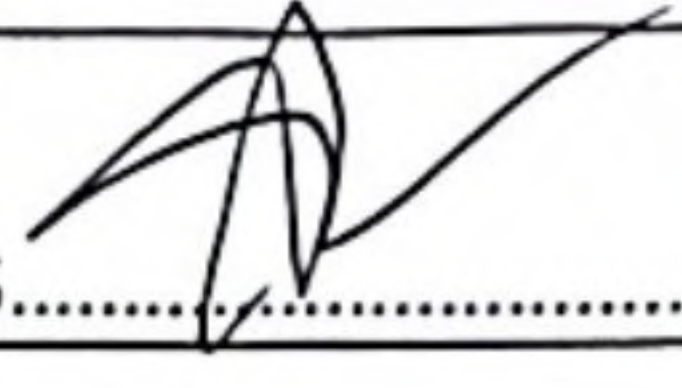
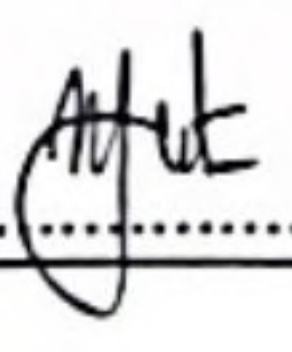
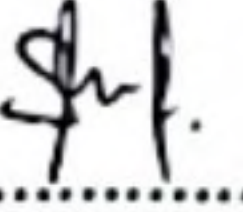
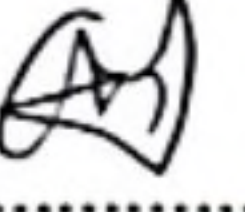
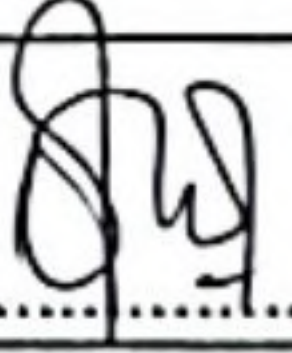
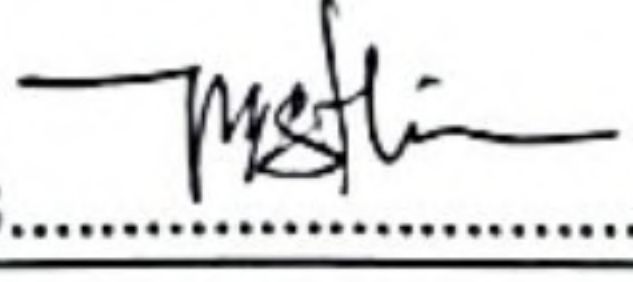
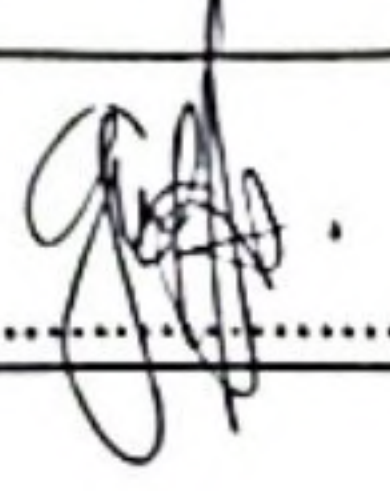
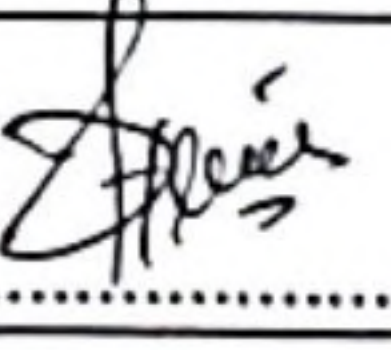
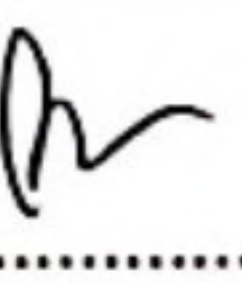
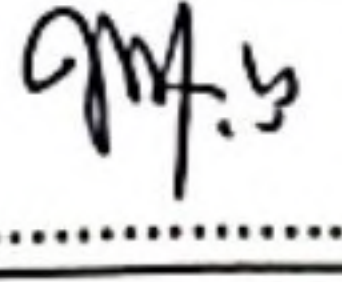
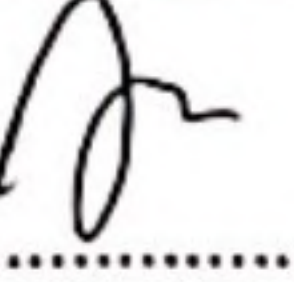
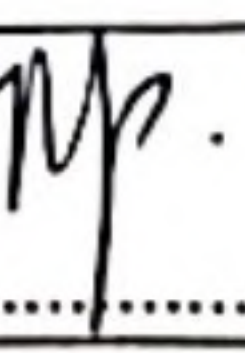
LAMPIRAN

Dokumentasi



DAFTAR HADIR

RAPAT PROGRESS CAPAIAN POKJA ZONA INTEGRITAS DAN RENCANA KEGIATAN AGEN PERUBAHAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I SELASA, 21 OKTOBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1			1.....	
2	Kartika Pratiwi	KTU	2..... 	
3	TRYA KAWINDA	PPIC	3..... 	
4	Brando .T	Asiparis Ahli pertama	4..... 	
5	ANDHARA MAULI CIBRAN	PKBGP	5..... 	
6	Siti Anisa Musthuc Alami	Anggota Bid. Penguatan Tata Lahan	6..... 	
7	Saskra Desi Queentouren	APK APBN	7..... 	
8	Henricho Dirgawati	PKBGP	8..... 	
9	JOHANA D. SILLWIRE	PKBGP	9..... 	
10	Angel Ribka Kristyn Sitons	APK APBN	10..... 	
11	Paulina A. Sadondang	APK APBN	11..... 	
12	Stepanny C. Dotubng	PKBGP	12..... 	
13	REGINA TAMBURIAN	TBP Ahli Pertama	13..... 	
14	Geneviene N. D. Biring	PKP Ahli Pertama	14..... 	
15	Stence.M. Kantotie	Staf TU	15..... 	
16	Ucaristy .T	Analis SDM	16..... 	
17	JEFF. Kurniasety	P. L. O	17..... 	
18	YUNIKE ERING	PLO	18..... 	
19	Mercy Pangemanan	PKP Ahli Pertama	19..... 	

Absensi Online
Rapat Internal Pokja Zona Integritas

No	Nama Peserta	NIP/NRP	Jabatan	Unit Kerja
1	Karenina Sarah Jasmine	200201242025062000	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Satuan Kerja PKP Gorontalo
2	Rogi Donvito Gabriel	199508252025061000	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara
3	Winda Niken Erica Samola	199801102025062000	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Satuan Kerja P2KP Sulawesi Utara
4	Andrew Zefanya	199811182020121000	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	BP3KP Sulawesi I
5	Maya Yapardi	197405132003122000	JF PKP Ahli Madya	Satker PKP Provinsi Maluku Utara
6	Stefanny Cyntia Dotulung, SST	199503092025062000	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	BP3KP Sulawesi I
7	Enricho Rayditia Bround Imbar, S.T.	199804222025061000	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Satker PKP Gorontalo
8	Williams Christian De Mellian Aipassa	199711232025061000	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Satker PKP Maluku Utara
9	Arnd Andrew Sondey, S.T.	198207012010011000	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I	BP3KP Sulawesi I

LAMPIRAN

NOTULA RAPAT INTERNAL POKJA ZONA INTEGRITAS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

Waktu		Rabu, 29 Oktober 2025, Pukul 10.00 WITA - Selesai
Tempat		Ruang Rapat BP3KP Sulawesi I dan <i>Online Zoom Meeting</i>
Peserta		1. KTU BP3KP Sulawesi I 2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 3. PPK TKPR BP3KP Sulawesi I 4. Seluruh Pokja Zona Integritas
No	Topik	Uraian Singkat dan Arahan
1	Kawinda Trya Estherlita, S.T.	1. Review dan pemantapan rencana kerja tiap Pokja ZI BP3KP Sulawesi I. 2. Kegiatan ZI akan melibatkan seluruh pegawai, tidak hanya anggota Pokja. 3. Pelaksanaan acara besar menyesuaikan agenda pusat (karena padat di akhir tahun). 4. Persiapan pelaksanaan benchmarking/studi tiru ke instansi berpredikat WBK ke BPOM Manado dengan tujuan agar Pokja dapat melihat langsung penerapan ZI dan membandingkan praktik nyata di lapangan
2	Pokja Penguatan Pengawasan Arnd Andrew Sondey, S.T. & Mercy Magdalena Michel Pangemanan, S.T.	Program utama dan rencana kerja tahun 2026 1. Pengendalian Gratifikasi a. Penyusunan materi sosialisasi dan bimbingan teknis. b. Sosialisasi dan kampanye publik anti gratifikasi. c. Pemasangan banner/poster di lingkungan kerja (sudah berjalan). 2. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) a. Pembentukan Tim SPIP dan penyusunan SK. b. Identifikasi tujuan, risiko, dan mitigasi kegiatan. c. Penguatan komunikasi dan dokumentasi SPIP secara digital. d. Output: Laporan SPIP Balai. 3. Pengaduan Masyarakat a. Implementasi mekanisme pengaduan, monitoring, dan tindak lanjut. 4. Whistle Blowing System (WBS) a. Internalisasi, evaluasi, dan tindak lanjut penerapan WBS. 5. Penanganan Benturan Kepentingan a. Sosialisasi, implementasi, dan evaluasi atas kasus yang mungkin terjadi.
3	Pokja Penguatan Tata Laksana Lifiana Zena Pasuhuk, S.T. & Siti Aviva Mustika Alamri, S.P.W.K.	1. Pembuatan SOP utama (Swadaya, Rusus, PSU). 2. Penetapan ketentuan pegawai terbaik dan terlambat berdasarkan absensi. 3. Pelaksanaan apel serentak di seluruh Satker, terdapat tantangan zona waktu namun diharapkan jadwal bisa disesuaikan

LAMPIRAN

4	Pokja Manajemen Perubahan Kawinda Trya Estherlita, S.T. & Henricho Dirganeri, S.Ars.	1. Diminta berkolaborasi dengan Pokja Komunikasi Publik untuk membuat video internal tentang: a. Profil seragam ASN Kementerian PKP (Senin-Jumat). b. Konten edukatif untuk ditayangkan di TV lobby Balai (format landscape menyesuaikan TV) 2. Diperbolehkan meminjam seragam antar pegawai untuk keperluan produksi. 3. Penugasan video menjadi bagian dari kegiatan aktualisasi CPNS.
5	Kesimpulan & penutup Maya Yapardi, S.H., M.H. & Kawinda Trya Estherlita, S.T.	1. Setiap rapat lintas wilayah wajib direkam (Zoom Recording) dan disertai notulensi tertulis. 2. Beberapa Pokja diminta segera melakukan rapat internal lanjutan. 3. Studi tiru minggu depan disesuaikan dengan lokasi WBK terdekat di masing-masing Satker. 4. Dua minggu ke depan akan dilaksanakan acara Sosialisasi Zona Integritas di Manado. 5. Agen Perubahan menjadi PIC rekap absensi bulanan dalam rangka pengelolaan reward pegawai terbaik.

Mengetahui

KTU BP3KP Sulawesi I

Kartika Pratiwi, S.T.
NIP. 199411052019032013

Notulis

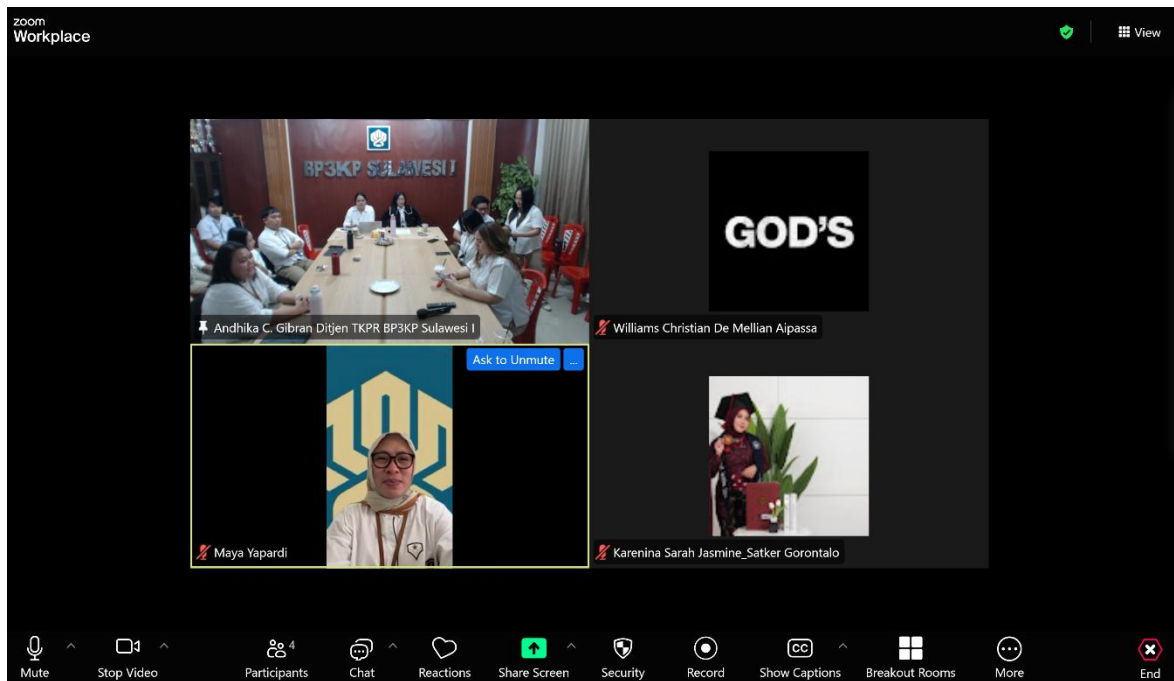
Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007

Dokumentasi

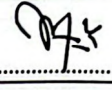
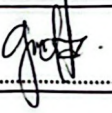
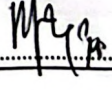


LAMPIRAN

Dokumentasi



DAFTAR HADIR
RAPA SOSIALISASI, RENCANA POKJA, DAN RENCANA AGEN PERUBAHAN ZI
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I
Rabu, 29 Oktober 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Ir. H. HUJURAT, ST., MT	KEPALA BALAI P3KP SULAWESI 1	DINAS LUAR CDJ 1.....	
2	Kartika P.	KTU	2..... 	
3	TRYA KAWINDA	PPK TKPR	3..... 	
4	ARNY SODEY	Kasi I	4..... 	
5	STPF Kimmekuh	Stbtt:	5..... 	
6	JOHANA E. SILWIRE	STAFF PKOG	6..... 	
7	Sasha D. Queenfanta	APK APBN	7..... 	
8	Greyni A. J. Timpal	PKBGKP	8..... 	
9	Geneviene N. D. Biring	Staff PKP	9..... 	
10	Angel R. K. Sitons	APK APBN	10..... 	
11	WINDA N. E. SAMOLA	STAFF APK APBN	11..... 	
12	Rogi D. Gabriel	Staff PKBG	12..... 	
13	Bagus Adimas Akbar	Staf PKBGKP	13..... 	
14	Mercy M. M. Pangemanan	Staf PKP	14..... 	
15	ELRA R. BOYOH	Staff PKP	15..... 	
16	Siti Ania Muskhla Alamsi	PKP	16..... 	
17	Henricho Dirgawati	Staff	17..... 	
18	Stence. M. Kantohe	Staff	18..... 	
19	ANDRIKA C. GIBAH	—	19..... 	
20	LIFIANO PASUTTUK		20..... 	
21	Vicarsy. Tumengkol	stat	21..... 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
22	Grandi Iumapaw	Staf		22. 	
23	Andre. Sanbar	Staf	23. 		
24	YUNIKE ERING	Staf		24. 	
25	BRANDU BENDUAN	Arsiparis Ahli Baku	25. 		
26				26.....	
27				27.....	
28				28.....	
29				29.....	
30				30.....	
31				31.....	
32				32.....	
33				33.....	
34				34.....	
35				35.....	
36				36.....	
37				37.....	
38				38.....	
39				39.....	
40				40.....	
41				41.....	
42				42.....	
43				43.....	
44				44.....	
45				45.....	
46				46.....	
47				47.....	
48				48.....	
49				49.....	

Absensi Online
Rapat Internal Pokja Zona Integritas

No	Nama Peserta	NIP/NRP	Jabatan	Unit Kerja
1	Karenina Sarah Jasmine	200201242025062012	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Satker PKP Prov. Gorontalo
2	Maya Yapardi	197405132003122008	JF PKP Ahli Madya	Satker PKP Provinsi Maluku Utara
3	Williams Christian De Mellian Aipassa, S. Ars.	199711232025061007□	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Satker PKP Provinsi Maluku Utara

LAMPIRAN

NOTULA
RAPAT PEMBAHASAN PROGRES LKE & PERSIAPAN RENCANA SOSIALISASI ZI
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI I

Waktu		Jumat, 14 November 2025, Pukul 10:00 WITA - Selesai
Tempat		Ruang Rapat BP3KP Sulawesi I
Peserta		1. KTU BP3KP Sulawesi I 2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 3. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 4. PPK TKPR BP3KP Sulawesi I 5. Seluruh Pokja Zona Integritas
No	Topik	Uraian Singkat dan Arahan
1	Ir. Kawinda Trya Estherlita, S.T.	Secara keseluruhan, enam Pokja dalam LKE Zona Integritas masih berada pada tahap melengkapi dan menyempurnakan eviden, mulai dari dokumen komitmen, SOP, pengelolaan SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, hingga pelayanan publik. Seluruh Pokja terus menyesuaikan bukti pendukung sesuai format LKE dan memperbaiki kekurangan agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu.
2	Ir. Kawinda Trya Estherlita, S.T.	Persiapan Acara Sharing Session Zona Integritas dengan Balai Besar POM Manado • Penyusunan rundown acara • Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) • Penyusunan Undangan Acara • Permohonan Narasumber dari tim Pokja ZI Balai Besar POM Manado • Pembahasan konsumsi peserta • Penunjukan MC dan pembaca doa • Pembahasan transportasi • Pengaturan teknis kegiatan • Dokumentasi kegiatan

Mengetahui

KTU BP3KP Sulawesi I



Kartika Pratiwi, S.T.
NIP. 199411052019032013

Notulis



Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007

Dokumentasi



Dokumentasi



LAMPIRAN

NOTULA RAPAT PEMBAHASAN PROGRES LKE & PERSIAPAN RENCANA SOSIALISASI ZI BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

Waktu		Kamis, 13 November 2025, Pukul 13:30 WITA - Selesai
Tempat		Ruang Rapat BP3KP Sulawesi I dan <i>Online Zoom Meeting</i>
Peserta		1. Kabalai BP3KP Sulawesi I 2. KTU BP3KP Sulawesi I 3. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 4. PPK TKPR BP3KP Sulawesi I 5. Seluruh Pokja Zona Integritas
No	Topik	Uraian Singkat dan Arahan
1	Ir. Kawinda Trya Estherlita, S.T.	Rencana Kegiatan dengan BPOM • Akan dilaksanakan kegiatan bersama BPOM pada minggu depan dengan fokus pada <i>sharing session</i> terkait Agen Perubahan dan Zona Integritas (ZI). • Narasumber dari BPOM berjumlah 3 orang, masing-masing menyampaikan materi selama 1 jam. • BPOM akan hadir pada hari Senin untuk sesi materi di kantor.
2	Ir. Kawinda Trya Estherlita, S.T.	Benchmarking / Studi Tiru • Kegiatan benchmarking direncanakan pada hari Selasa ke kantor BPOM. • Agenda difokuskan untuk studi tiru penerapan ZI dan inovasi yang dapat diadopsi. • Tanggal kegiatan menyesuaikan konfirmasi dari Itjen, rentang sekitar 17–21 (perkiraan).
3	Ir. Kawinda Trya Estherlita, S.T. & Kartika Pratiwi, S.T.	Penyusunan Dokumen KAK • Disusun KAK 2 yang mencakup: ◦ Benchmarking & Zona Integritas ◦ Undangan narasumber ◦ Notulen kegiatan • Lokasi kegiatan utama menggunakan Aula BPOM. • Peserta terdiri dari seluruh Pokja ZI beserta staf. • Disiapkan sewa mobil untuk mendukung mobilisasi kegiatan.
4	Ir. Kawinda Trya Estherlita, S.T. & Kartika Pratiwi, S.T.	Sosialisasi Penyusunan SKP • Akan dilakukan sosialisasi pembuatan SKP. • Direncanakan mengundang narasumber dari Pusat untuk membantu pengisian dan penyusunan.
5	Ir. H. Hujurat, S.T., M.T.	Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilakukan secara paralel dengan berbagai tugas rutin unit kerja, termasuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan yang

LAMPIRAN

	Kabalai BP3KP Sulawesi I	membutuhkan penjadwalan bergiliran agar operasional tetap berjalan optimal. Penyesuaian jadwal kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan agenda wajib lainnya, khususnya kegiatan Latsar, sehingga seluruh rangkaian program ZI-WBK tetap dapat terlaksana tanpa mengganggu tugas kedinasan. Koordinasi berkala diperlukan agar setiap pokja dapat mengatur prioritas
6	Kartika Pratiwi, S.T.	Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat diperbolehkan melalui dokumentasi foto langsung di lapangan saat menerima laporan.
7	Kartika Pratiwi, S.T.	Whistle Blowing System (WBS) - SOP WBS akan disusun dan diberlakukan. - Laporan WBS akan diselesaikan dan dikumpulkan setiap triwulan.
8	Kartika Pratiwi, S.T.	LKE Pembahasan LKE Zona Integritas menekankan bahwa Lembar Kerja Evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai kemajuan pembangunan ZI melalui komponen pengungkit dan hasil, yang mencakup manajemen perubahan, tatalaksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, serta kualitas pelayanan publik. Pentingnya kelengkapan data dukung pada setiap indikator agar proses penilaian dapat berjalan lancar. Beberapa kendala yang ditemui antara lain bukti yang belum lengkap, dokumentasi kegiatan yang belum tertata, dan perlunya penyelarasan antara kegiatan dengan indikator LKE. Tim kemudian sepakat untuk melakukan perbaikan, melengkapi dokumen, serta menugaskan tiap penanggung jawab komponen untuk melakukan pengecekan ulang sebelum batas penilaian. Penekanan akhir mengingatkan bahwa penyusunan LKE bukan hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai upaya membangun budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Mengetahui

KTU BP3KP Sulawesi I



Kartika Pratiwi, S.T.
NIP. 199411052019032013

Notulis



Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007

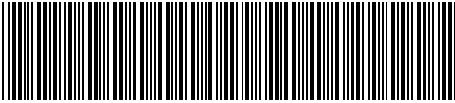
Dokumentasi



LAMPIRAN



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

								Halaman : I A. 1	
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen					84.318.000	
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal					84.318.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		84.318.000	
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan		84.318.000	

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I B. SUMBER DANA

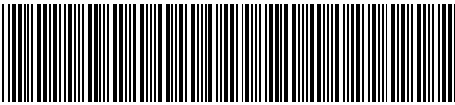


Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	84.318.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	84.318.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
(dalam ribuan rupiah)								

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

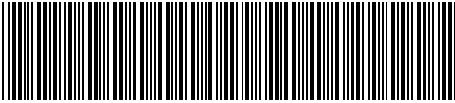
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	84.318	-	-	-	84.318	17 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	84.318	-	-	-	84.318		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	84.318	-	-	-	84.318		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	84.318	-	-	-	84.318		
01	RM	-	84.318	-	-	-	84.318	049	
JUMLAH		-	84.318	-	-	-	84.318		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

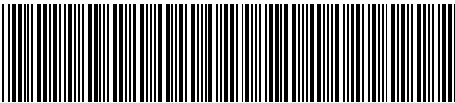
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	84.318
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	84.318
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	84.318
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	84.318

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV A. B L O K I R



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

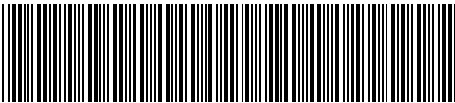
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 30 April 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (17)	SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker	: (691417)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Sebesar	: Rp.	84.318.000 (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Jumlah Uang
Rp.	84.318.000
Rp.	84.318.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	84.318.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 84.318.000

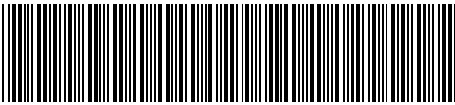
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0800-6652-8766-2840

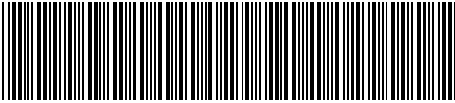
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

								Halaman : I A. 1
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen					84.318.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal					84.318.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			84.318.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan			84.318.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0800-6652-8766-2840

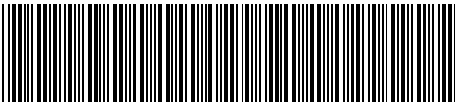
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	84.318.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	84.318.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

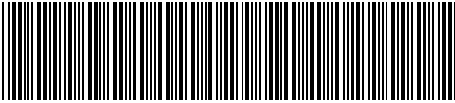
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	84.318	-	-	-	84.318	17 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	84.318	-	-	-	84.318		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	84.318	-	-	-	84.318		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	84.318	-	-	-	84.318		
01	RM	-	84.318	-	-	-	84.318	049	
JUMLAH		-	84.318	-	-	-	84.318		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

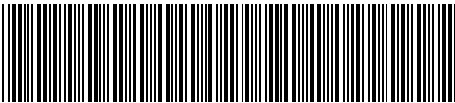
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	84.318
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	84.318
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	84.318
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	84.318

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV A. B L O K I R



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

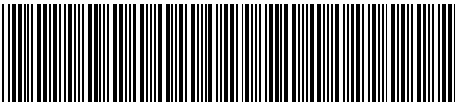
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 11 Juni 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(17)	SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker	:	(691417)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Sebesar	:	Rp. 755.170.000	(TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	755.170.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	755.170.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	755.170.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 755.170.000

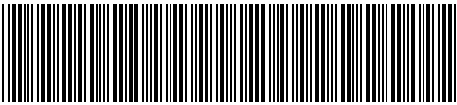
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7050-3118-4310-0002

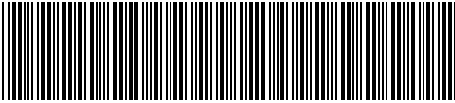
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Halaman : I A. 1
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			755.170.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			755.170.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	755.170.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	755.170.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7050-3118-4310-0002

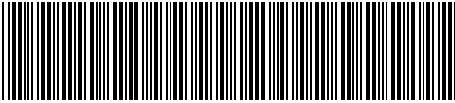
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	755.170.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	755.170.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

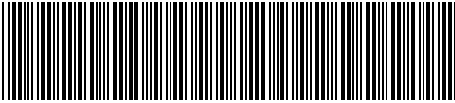
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	755.170	-	-	-	755.170	17 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	755.170	-	-	-	755.170		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	755.170	-	-	-	755.170		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	755.170	-	-	-	755.170		
01	RM	-	755.170	-	-	-	755.170	049	
JUMLAH		-	755.170	-	-	-	755.170		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

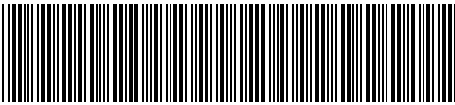
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	755.170
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	755.170
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	755.170
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	107.881	755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV A. B L O K I R



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

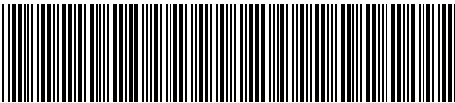
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7050-3118-4310-0002

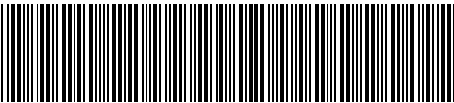
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 03
Tanggal : 02 Juli 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 755.170.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 755.170.000
Rp. 755.170.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 755.170.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 755.170.000

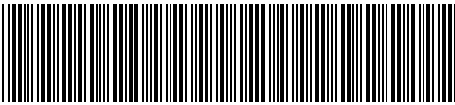
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7050-3118-4310-0002

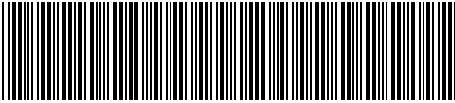
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Halaman : I A. 1
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			755.170.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			755.170.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	755.170.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	755.170.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7050-3118-4310-0002

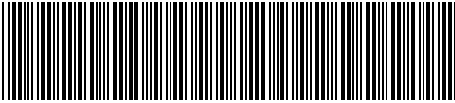
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	755.170.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	755.170.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

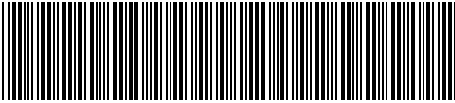
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	755.170	-	-	-	755.170	17 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	755.170	-	-	-	755.170		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	755.170	-	-	-	755.170		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	755.170	-	-	-	755.170		
01	RM	-	755.170	-	-	-	755.170	049	
JUMLAH		-	755.170	-	-	-	755.170		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

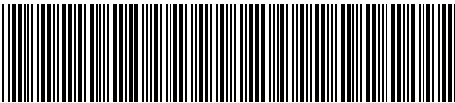
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	102.085	102.085	102.085	102.085	102.085	102.085	142.658	755.170
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	102.085	102.085	102.085	102.085	102.085	102.085	142.658	755.170
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	102.085	102.085	102.085	102.085	102.085	102.085	142.658	755.170
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	102.085	102.085	102.085	102.085	102.085	102.085	142.658	755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV A. B L O K I R



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

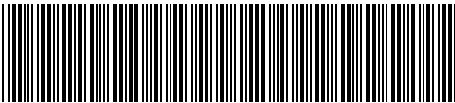
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:	
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	

Revisi ke 04
Tanggal : 14 Juli 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga

: (146)

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi

: (01)

SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi

: (17)

SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker

: (691417)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar

: Rp.

755.170.000

(TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WAProgram Dukungan Manajemen
- 146.01.WA.Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :					Jumlah Uang
1. Rupiah Murni	Rp.	755.170.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A N A D O
- (049) Rp.
- 755.170.000

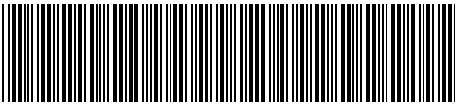
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7050-3118-4310-0002

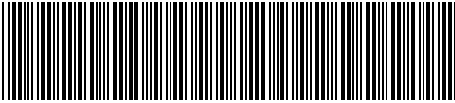
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Halaman : I A. 1
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			755.170.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			755.170.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	755.170.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	755.170.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7050-3118-4310-0002

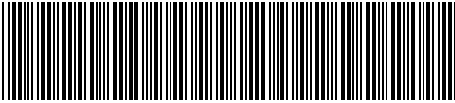
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	755.170.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	755.170.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

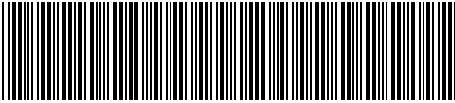
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	755.170	-	-	-	755.170	17 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	755.170	-	-	-	755.170		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	755.170	-	-	-	755.170		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	755.170	-	-	-	755.170		
01	RM	-	755.170	-	-	-	755.170	049	
JUMLAH		-	755.170	-	-	-	755.170		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

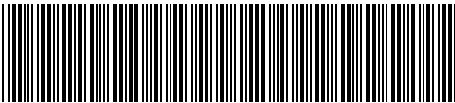
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	90.620	135.931	71.871	755.170
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	90.620	135.931	71.871	755.170
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	90.620	135.931	71.871	755.170
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	90.620	135.931	71.871	755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV A. B L O K I R



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

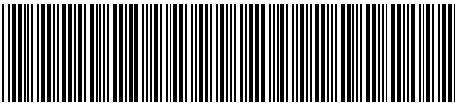
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7050-3118-4310-0002

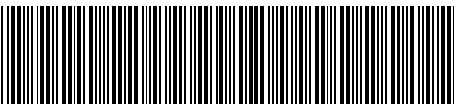
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05
Tanggal : 13 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 755.170.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 755.170.000
Rp. 755.170.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 755.170.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 755.170.000

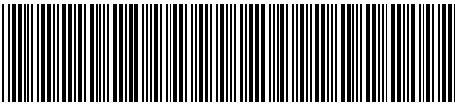
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen						755.170.000	
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal						755.170.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	755.170.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran				1.00	Layanan	755.170.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I B. SUMBER DANA



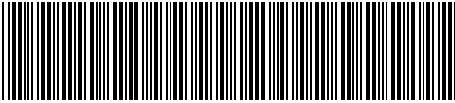
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	755.170.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	755.170.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

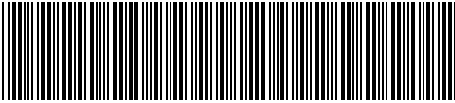
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	755.170	-	-	-	755.170	17 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	755.170	-	-	-	755.170		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	755.170	-	-	-	755.170		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	755.170	-	-	-	755.170		
01	RM	-	755.170	-	-	-	755.170	049	
JUMLAH		-	755.170	-	-	-	755.170		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

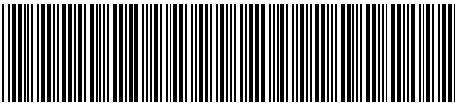
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	90.620	135.931	71.871	755.170
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	90.620	135.931	71.871	755.170
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	90.620	135.931	71.871	755.170
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	90.620	135.931	71.871	755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV A. B L O K I R



DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

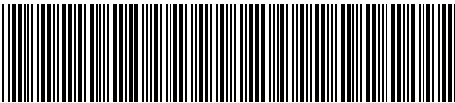
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7050-3118-4310-0002

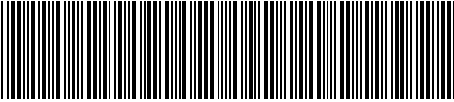
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 06
Tanggal : 31 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 1.044.272.000 (SATU MILIAR EMPAT PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 1.044.272.000
Rp. 1.044.272.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.044.272.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 1.044.272.000

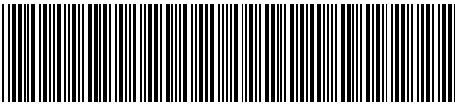
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9208-2523-2046-0477

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

							Halaman : I A. 1	
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen				1.044.272.000	
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				1.044.272.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.044.272.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	1.044.272.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I B. SUMBER DANA



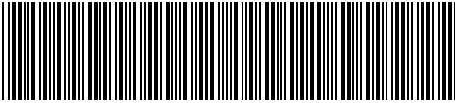
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.044.272.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.044.272.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9208-2523-2046-0477

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

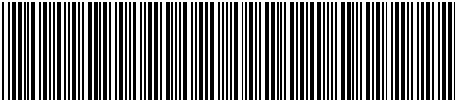
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	1.044.272	-	-	-	1.044.272	17 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	1.044.272	-	-	-	1.044.272		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	1.044.272	-	-	-	1.044.272		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	1.044.272	-	-	-	1.044.272		
01	RM	-	1.044.272	-	-	-	1.044.272	049	
JUMLAH		-	1.044.272	-	-	-	1.044.272		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9208-2523-2046-0477

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

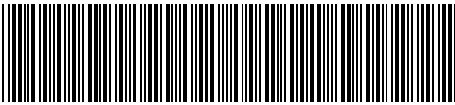
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	50.000	125.000	412.524	1.044.272
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	50.000	125.000	412.524	1.044.272
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	50.000	125.000	412.524	1.044.272
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	139.577	90.620	226.551	50.000	125.000	412.524	1.044.272

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV A. B L O K I R



DS:9208-2523-2046-0477

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

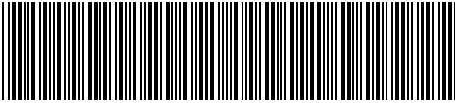
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9208-2523-2046-0477

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 07
Tanggal : 13 November 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 1.145.952.000 (SATU MILIAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 1.145.952.000
Rp. 1.145.952.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.145.952.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 1.145.952.000

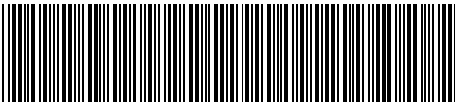
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9004-2700-8524-5133

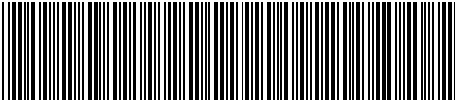
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

							Halaman : I A. 1
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen				1.145.952.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				1.145.952.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.145.952.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	1.145.952.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9004-2700-8524-5133

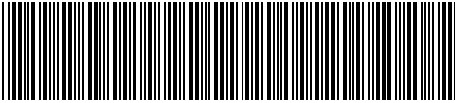
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.145.952.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	1.145.952.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9004-2700-8524-5133

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

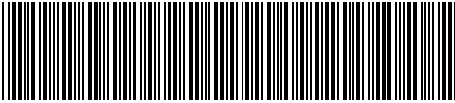
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	1.145.952	-	-	-	1.145.952	17 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	1.145.952	-	-	-	1.145.952		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	1.145.952	-	-	-	1.145.952		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	1.145.952	-	-	-	1.145.952		
01	RM	-	1.145.952	-	-	-	1.145.952	049	
JUMLAH		-	1.145.952	-	-	-	1.145.952		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9004-2700-8524-5133

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

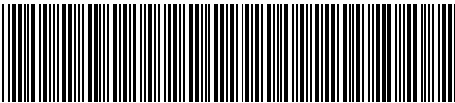
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691417	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	139.239	90.401	226.003	49.879	124.697	515.733	1.145.952
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	139.239	90.401	226.003	49.879	124.697	515.733	1.145.952
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	0	139.239	90.401	226.003	49.879	124.697	515.733	1.145.952
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	139.239	90.401	226.003	49.879	124.697	515.733	1.145.952

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV A. B L O K I R



DS:9004-2700-8524-5133

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

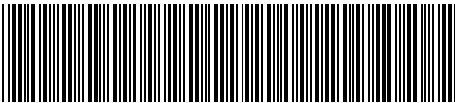
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9004-2700-8524-5133

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

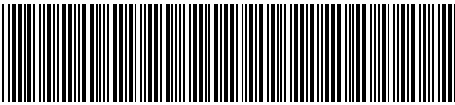
Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

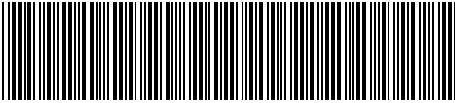


DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							50.000.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman							50.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)							
		2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)							
		3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen							
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian					50.000.000
Rincian Output	:	01 PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan					50.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I B. SUMBER DANA



DS:1060-1574-1972-3319

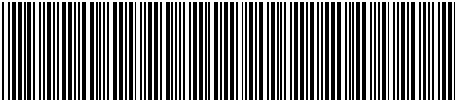
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	50.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	50.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

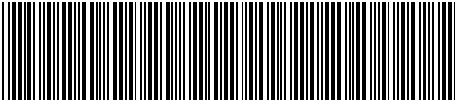
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691471 146.03.IA 7659 7659.PBF 01	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	50.000	-	-	-	50.000	17 . 51	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	50.000	-	-	-	50.000		
	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	50.000	-	-	-	50.000		
	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	50.000	-	-	-	50.000		
	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	049	
JUMLAH		-	50.000	-	-	-	50.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

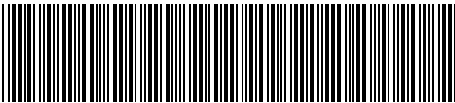
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000
146.03.IA.7659		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV A. B L O K I R



DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

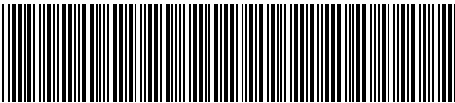
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV B. C A T A T A N



DS:1060-1574-1972-3319

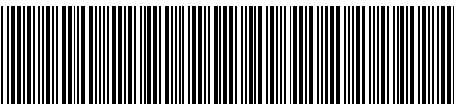
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 02 Mei 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 50.000.000
Rp. 50.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 50.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 50.000.000

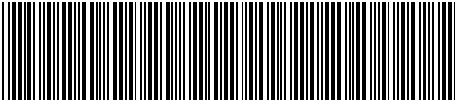
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

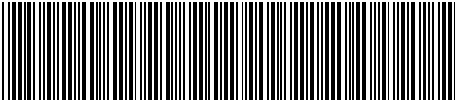


DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : I A. 1									
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						50.000.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman						50.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)						
		2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)						
		3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian			50.000.000
Rincian Output	:	01 PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.00	Rekomendasi Kebijakan			50.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I B. SUMBER DANA



DS:1060-1574-1972-3319

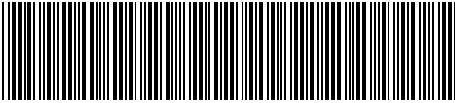
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	50.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	50.000.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

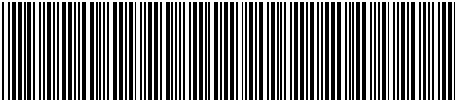
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	50.000	-	-	-	50.000	17 . 51	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	50.000	-	-	-	50.000		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	50.000	-	-	-	50.000		
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	50.000	-	-	-	50.000		
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	049	
JUMLAH		-	50.000	-	-	-	50.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

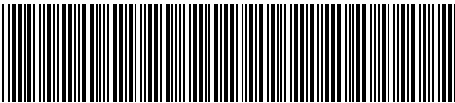
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000
146.03.IA.7659		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV A. B L O K I R



DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

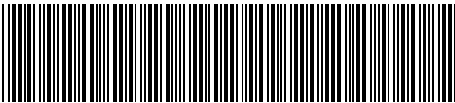
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV B. C A T A T A N



DS:1060-1574-1972-3319

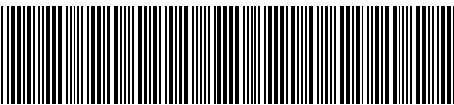
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 25 Juni 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 245.286.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 245.286.000
Rp. 245.286.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 245.286.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 245.286.000

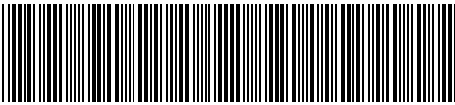
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

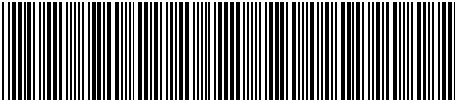


DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : I A. 1									
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						245.286.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman						245.286.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)						
		2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)						
		3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan			195.286.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1.00	Laporan			195.286.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian			50.000.000
Rincian Output	:	01	PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan			50.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I B. SUMBER DANA



DS:1376-0837-3752-0160

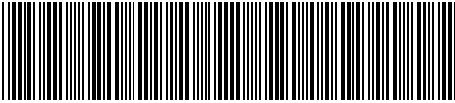
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	245.286.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	245.286.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

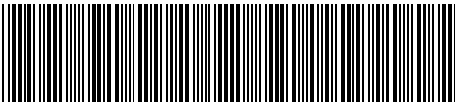
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	245.286	-	-	-	245.286	17 . 51	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	245.286	-	-	-	245.286		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	245.286	-	-	-	245.286		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	195.286	-	-	-	195.286		
01	RM	-	195.286	-	-	-	195.286	049	
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	50.000	-	-	-	50.000	17 . 51	
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	049	
JUMLAH		-	245.286	-	-	-	245.286		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

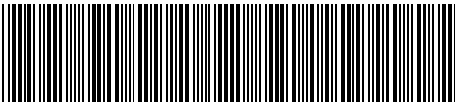
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	6.250	21.536	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	245.286
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	6.250	21.536	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	245.286
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	6.250	21.536	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	245.286
	146.03.IA.7659	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	6.250	21.536	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	245.286

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV A. B L O K I R



DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

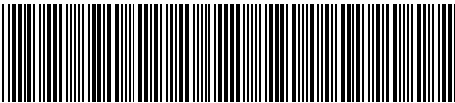
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV B. C A T A T A N



DS:1376-0837-3752-0160

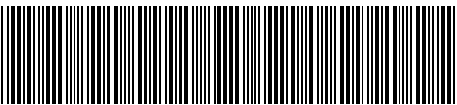
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025**

Revisi ke 03
Tanggal : 23 Juli 2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (03) | DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. Provinsi | : | (17) | SULAWESI UTARA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (691471) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I |
| Sebesar | : | Rp. 245.286.000 | (DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Uang
Rp. 245.286.000
Rp. 245.286.000

- C. Sumber Dana Berasal Dari :
- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 245.286.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

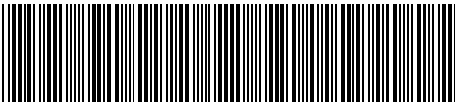
- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- | | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN M A N A D O | (049) Rp. | 245.286.000 |
|---------------------|-----------|-------------|

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

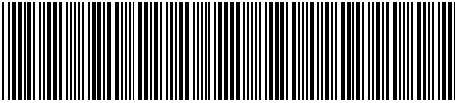


DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : I A. 1									
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						245.286.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman						245.286.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)						
		2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)						
		3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan			195.286.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1.00	Laporan			195.286.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian			50.000.000
Rincian Output	:	01	PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan			50.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I B. SUMBER DANA



DS:1376-0837-3752-0160

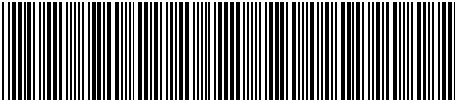
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	245.286.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	245.286.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

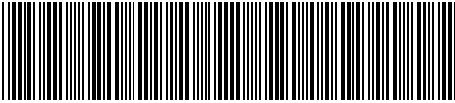
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	245.286	-	-	-	245.286	17 . 51	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	245.286	-	-	-	245.286		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	245.286	-	-	-	245.286		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	195.286	-	-	-	195.286		
01	RM	-	195.286	-	-	-	195.286		
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	50.000	-	-	-	50.000		
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	049	
JUMLAH		-	245.286	-	-	-	245.286		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

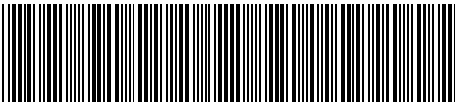
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	36.250	36.250	41.250	47.250	47.250	37.036	245.286
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	36.250	36.250	41.250	47.250	47.250	37.036	245.286
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	36.250	36.250	41.250	47.250	47.250	37.036	245.286
146.03.IA.7659		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	36.250	36.250	41.250	47.250	47.250	37.036	245.286

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV A. B L O K I R



DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

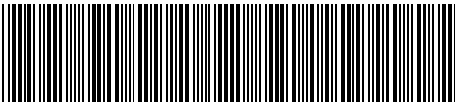
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV B. C A T A T A N



DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04
Tanggal : 15 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (17)	SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker	: (691471)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Sebesar	: Rp. 610.426.000	(ENAM RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	610.426.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	610.426.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	610.426.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 610.426.000

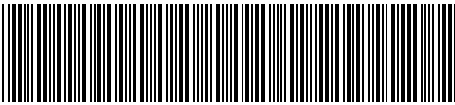
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

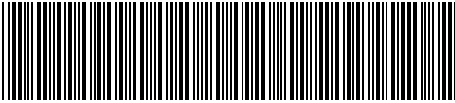


DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							610.426.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman							610.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		2,00	Laporan, Layanan			560.426.000
Rincian Output		:	01	FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1,00	Laporan			195.286.000
		:	02	FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00	Laporan			365.140.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian			50.000.000
Rincian Output	:	01	PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman		1,00	Rekomendasi Kebijakan			50.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0929-6935-9347-9143

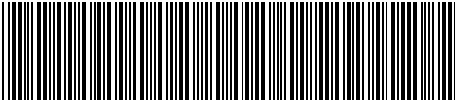
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	610.426.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	610.426.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

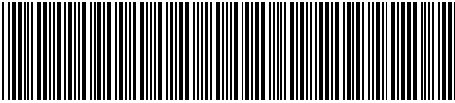
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	610.426	-	-	-	610.426	17 . 51	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	610.426	-	-	-	610.426		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	610.426	-	-	-	610.426		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	560.426	-	-	-	560.426		
01	RM	-	560.426	-	-	-	560.426		
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	50.000	-	-	-	50.000		
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	049	
JUMLAH		-	610.426	-	-	-	610.426		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

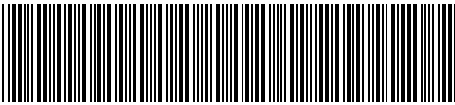
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	25.140	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	70.000	76.000	81.000	81.000	81.000	76.286	610.426
		BELANJA BARANG	25.140	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	70.000	76.000	81.000	81.000	81.000	76.286	610.426
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	25.140	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	70.000	76.000	81.000	81.000	81.000	76.286	610.426
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	25.140	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	70.000	76.000	81.000	81.000	81.000	76.286	610.426
	146.03.IA.7659														

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV A. B L O K I R



DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

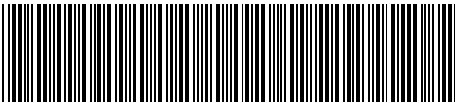
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0929-6935-9347-9143

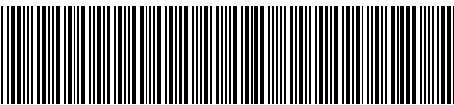
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05
Tanggal : 10 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 610.426.000 (ENAM RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 610.426.000
Rp. 610.426.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 610.426.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 610.426.000

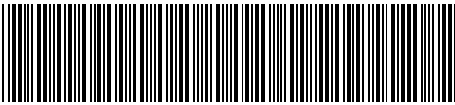
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

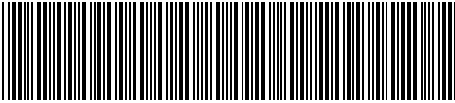


DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							610.426.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman							610.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		2,00	Laporan, Layanan			560.426.000
Rincian Output		:	01	FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1,00	Laporan			195.286.000
		:	02	FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00	Laporan			365.140.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian			50.000.000
Rincian Output	:	01	PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman		1,00	Rekomendasi Kebijakan			50.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0929-6935-9347-9143

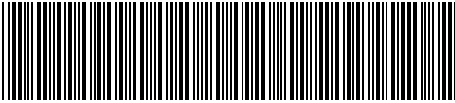
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	610.426.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	610.426.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

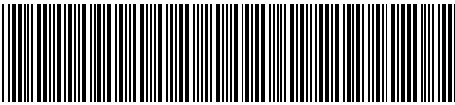
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	610.426	-	-	-	610.426	17 . 51	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	610.426	-	-	-	610.426		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	610.426	-	-	-	610.426		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	560.426	-	-	-	560.426		
01	RM	-	560.426	-	-	-	560.426		
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	50.000	-	-	-	50.000		
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	049	
JUMLAH		-	610.426	-	-	-	610.426		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

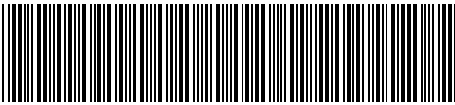
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691471	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	24.417	36.626	30.521	68.150	129.000	321.712	610.426
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	24.417	36.626	30.521	68.150	129.000	321.712	610.426
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	24.417	36.626	30.521	68.150	129.000	321.712	610.426
146.03.IA.7659		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	24.417	36.626	30.521	68.150	129.000	321.712	610.426

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV A. B L O K I R



DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

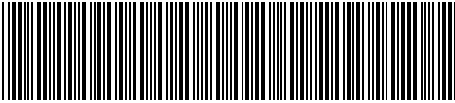
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0929-6935-9347-9143

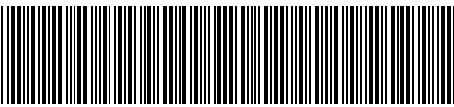
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 120.000.000 (SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 120.000.000
Rp. 120.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 120.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 120.000.000

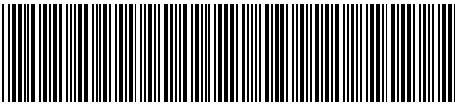
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

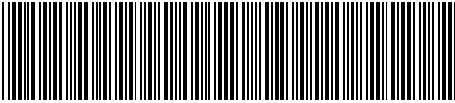


DS:9338-1097-5414-2748

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			120.000.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			120.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan			
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan			
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan			
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
		5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan	60.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
	:	02 ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	60.000.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.00	Laporan	60.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9338-1097-5414-2748

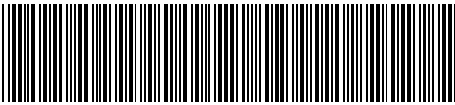
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	120.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	120.000.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9338-1097-5414-2748

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

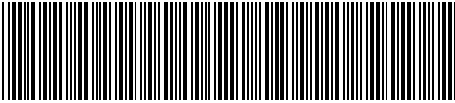
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	120.000	-	-	-	120.000	17 . 51	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	120.000	-	-	-	120.000		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	120.000	-	-	-	120.000		
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	60.000	-	-	-	60.000		
01	RM	-	60.000	-	-	-	60.000		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	60.000	-	-	-	60.000		
01	RM	-	60.000	-	-	-	60.000		
JUMLAH		-	120.000	-	-	-	120.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9338-1097-5414-2748

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

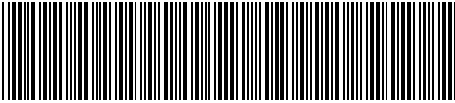
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
146.05.IA.7661		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV A. B L O K I R



DS:9338-1097-5414-2748

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

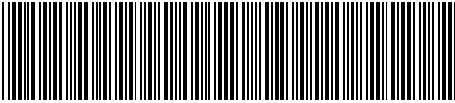
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9338-1097-5414-2748

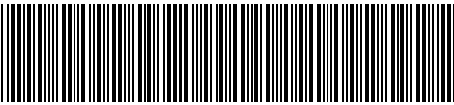
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 03 Juli 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 280.211.000 (DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 280.211.000
Rp. 280.211.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 280.211.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 280.211.000

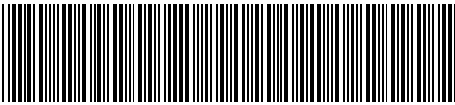
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

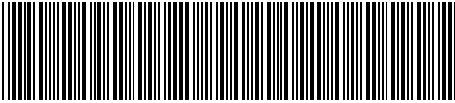


DS:5020-4738-6526-2040

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			280.211.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			280.211.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan			
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan			
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan			
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
		5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	172.148.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	112.148.000
		02	ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
		03	ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	108.063.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	108.063.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5020-4738-6526-2040

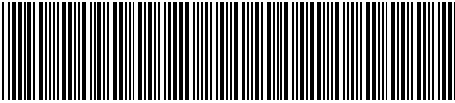
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	280.211.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	280.211.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5020-4738-6526-2040

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

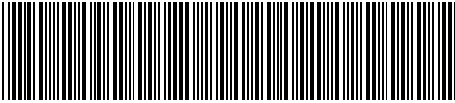
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	280.211	-	-	-	280.211	17 . 51	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	280.211	-	-	-	280.211		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	280.211	-	-	-	280.211		
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	172.148	-	-	-	172.148		
01	RM	-	172.148	-	-	-	172.148	049	
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	108.063	-	-	-	108.063	17 . 51	
01	RM	-	108.063	-	-	-	108.063	049	
JUMLAH		-	280.211	-	-	-	280.211		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5020-4738-6526-2040

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

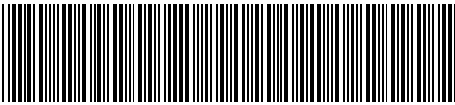
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	7.500	27.711	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	47.500	280.211
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	7.500	27.711	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	47.500	280.211
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	7.500	27.711	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	47.500	280.211
146.05.IA.7661		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	7.500	27.711	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	47.500	280.211

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV A. B L O K I R



DS:5020-4738-6526-2040

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

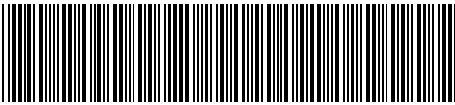
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV B. C A T A T A N



DS:5020-4738-6526-2040

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 09 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (17)	SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker	: (691579)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Sebesar	: Rp.	1.181.222.000 (SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	1.181.222.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	1.181.222.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.181.222.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 1.181.222.000

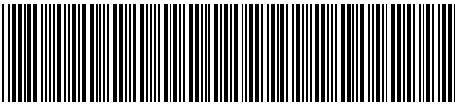
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1	
Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						1.181.222.000		
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						1.181.222.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:										
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				3,00	Rekomendasi Kebijakan	878.323.000	
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				1.00	Rekomendasi Kebijakan	394.618.000	
			02	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan				1.00	Rekomendasi Kebijakan	171.235.000
			03	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan				1.00	Rekomendasi Kebijakan	312.470.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	302.899.000	
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				1.00	Laporan	302.899.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I B. SUMBER DANA



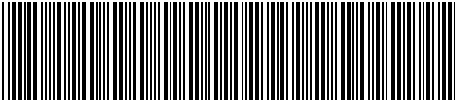
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

			Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.181.222.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	1.181.222.000	(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

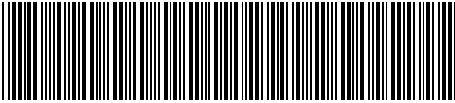
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222	17 . 51	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	878.323	-	-	-	878.323		
01	RM	-	878.323	-	-	-	878.323		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	302.899	-	-	-	302.899		
01	RM	-	302.899	-	-	-	302.899	049	
JUMLAH		-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

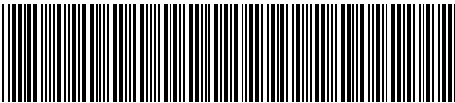
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	50.970	133.618	185.000	185.000	235.000	391.634	1.181.222
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	50.970	133.618	185.000	185.000	235.000	391.634	1.181.222
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	0	50.970	133.618	185.000	185.000	235.000	391.634	1.181.222
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	50.970	133.618	185.000	185.000	235.000	391.634	1.181.222

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV A. B L O K I R



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

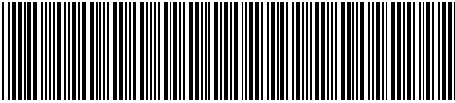
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:	
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	

Revisi ke 03

Tanggal : 10 Oktober 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode>Nama Satker

Sebesar

: (146)

: (05)

: (17)

: (691579)

: Rp.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SULAWESI UTARA

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

1.181.222.000 (SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IAProgram Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.05.IA.7661Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp.1.181.222.000

Rp.1.181.222.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	1.181.222.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A N A D O

(049) Rp.

1.181.222.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN

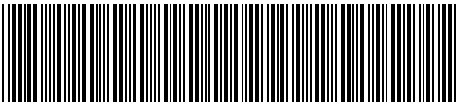
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

LUKY ALFIRMAN

NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							1.181.222.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							1.181.222.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		3,00	Rekomendasi Kebijakan			878.323.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1.00	Rekomendasi Kebijakan			394.618.000
		02	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan		1.00	Rekomendasi Kebijakan			171.235.000
		03	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan		1.00	Rekomendasi Kebijakan			312.470.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan			302.899.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1.00	Laporan			302.899.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I B. SUMBER DANA



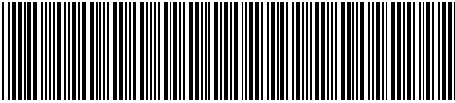
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.181.222.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	1.181.222.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

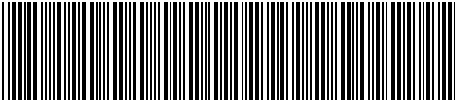
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222	17 . 51	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	878.323	-	-	-	878.323		
01	RM	-	878.323	-	-	-	878.323		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	302.899	-	-	-	302.899		
01	RM	-	302.899	-	-	-	302.899	049	
JUMLAH		-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

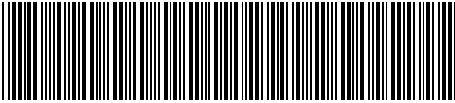
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
146.05.IA.7661		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV A. B L O K I R



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

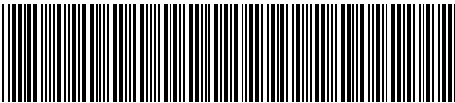
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3260-6404-2880-0201

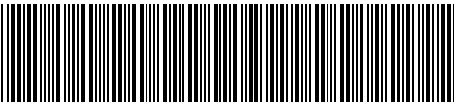
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04
Tanggal : 17 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 1.181.222.000 (SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 1.181.222.000
Rp. 1.181.222.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.181.222.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 1.181.222.000

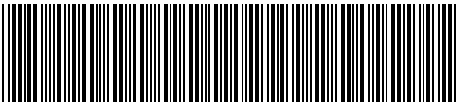
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

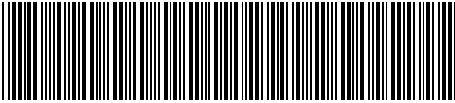


DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							1.181.222.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							1.181.222.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		3,00	Rekomendasi Kebijakan			878.323.000
Rincian Output		:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan			394.618.000
		:	02	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan			171.235.000
		:	03	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan			312.470.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan			302.899.000
Rincian Output		:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan			302.899.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I B. SUMBER DANA



DS:3260-6404-2880-0201

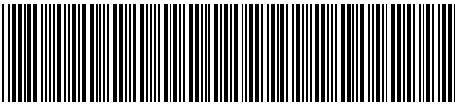
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.181.222.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.181.222.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

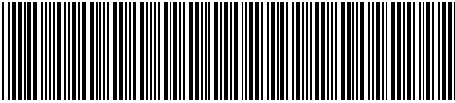
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222	17 . 51	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	878.323	-	-	-	878.323		
01	RM	-	878.323	-	-	-	878.323		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	302.899	-	-	-	302.899		
01	RM	-	302.899	-	-	-	302.899	049	
JUMLAH		-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

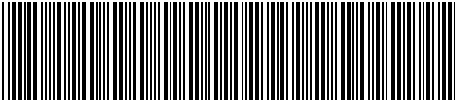
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
146.05.IA.7661		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV A. B L O K I R



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

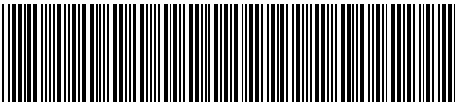
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3260-6404-2880-0201

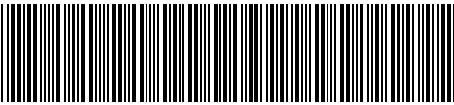
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05
Tanggal : 17 November 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 1.181.222.000 (SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 1.181.222.000
Rp. 1.181.222.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.181.222.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 1.181.222.000

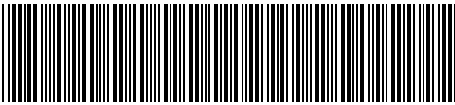
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							1.181.222.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							1.181.222.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		3,00	Rekomendasi Kebijakan			878.323.000
Rincian Output		:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan			394.618.000
		:	02	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan			171.235.000
		:	03	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan			312.470.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan			302.899.000
Rincian Output		:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan			302.899.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I B. SUMBER DANA



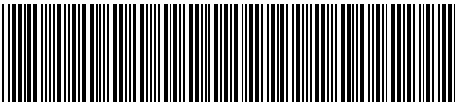
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.181.222.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.181.222.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

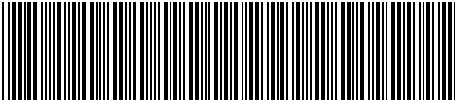
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222	17 . 51	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	878.323	-	-	-	878.323		
01	RM	-	878.323	-	-	-	878.323		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	302.899	-	-	-	302.899		
01	RM	-	302.899	-	-	-	302.899	049	
JUMLAH		-	1.181.222	-	-	-	1.181.222		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

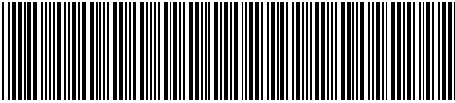
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691579	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222
146.05.IA.7661		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	23.624	11.812	70.873	86.150	105.600	883.162	1.181.222

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV A. B L O K I R



DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

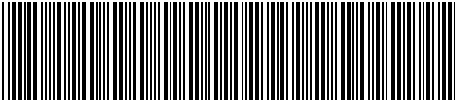
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3260-6404-2880-0201

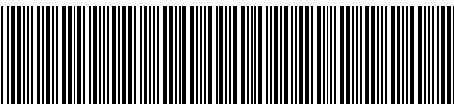
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



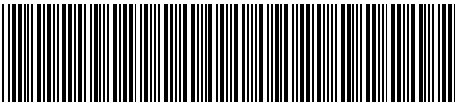
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025**

</

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I A. INFORMASI KINERJA

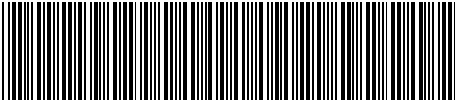


DS:4084-8069-6225-0006

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

										Halaman : I A. 1		
Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							45.000.000		
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman							45.000.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau									
		2. 02	Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau									
		3. 03	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)									
		4. 04	Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%)									
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				1,00	Rekomendasi Kebijakan		45.000.000		
Rincian Output	:	01	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi				1.00	Rekomendasi Kebijakan		45.000.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I B. SUMBER DANA



DS:4084-8069-6225-0006

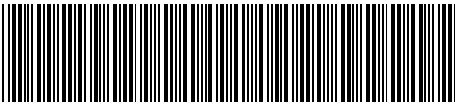
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	45.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	45.000.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4084-8069-6225-0006

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

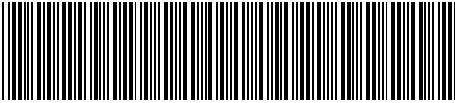
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	45.000	-	-	-	45.000	17 . 51	
146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	45.000	-	-	-	45.000		
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	45.000	-	-	-	45.000		
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	45.000	-	-	-	45.000		
01	RM	-	45.000	-	-	-	45.000	049	
JUMLAH		-	45.000	-	-	-	45.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4084-8069-6225-0006

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

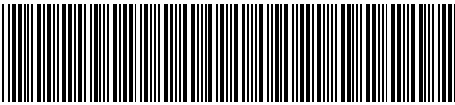
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000
		Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000
146.06.IA.7662		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV A. B L O K I R



DS:4084-8069-6225-0006

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

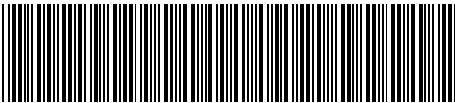
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV B. C A T A T A N



DS:4084-8069-6225-0006

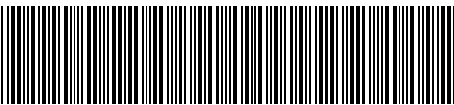
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 24 Juni 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 303.466.000
Rp. 303.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 303.466.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 303.466.000

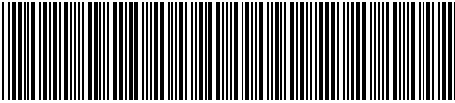
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I A. INFORMASI KINERJA

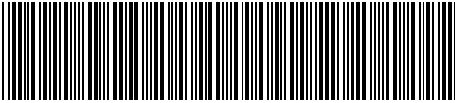


DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Halaman : I A. 1	
Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			303.466.000	
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			303.466.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau				
		2. 02	Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau				
		3. 03	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)				
		4. 04	Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%)				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		2,00	Rekomendasi Kebijakan	303.466.000
Rincian Output	:	01 ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		1.00	Rekomendasi Kebijakan	129.233.000
		02 ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi		1.00	Rekomendasi Kebijakan	174.233.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9500-3316-9247-1362

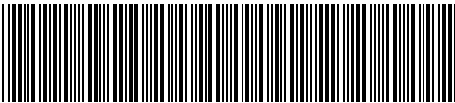
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	303.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	303.466.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

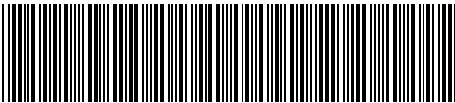
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	303.466	-	-	-	303.466	17 . 51	
146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	303.466	-	-	-	303.466		
01	RM	-	303.466	-	-	-	303.466	049	
JUMLAH		-	303.466	-	-	-	303.466		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

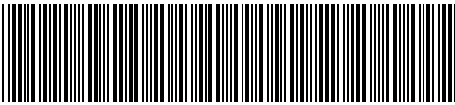
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	29.382	37.826	65.354	37.826	47.826	47.826	37.428	303.466
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	29.382	37.826	65.354	37.826	47.826	47.826	37.428	303.466
		Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	29.382	37.826	65.354	37.826	47.826	47.826	37.428	303.466
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	29.382	37.826	65.354	37.826	47.826	47.826	37.428	303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV A. B L O K I R



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

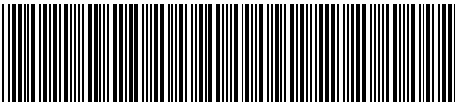
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

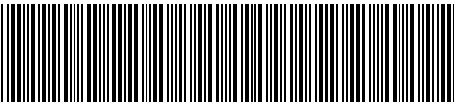
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025



DS:9500-3316-9247-1362

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 23 Juli 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 303.466.000
Rp. 303.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 303.466.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 303.466.000

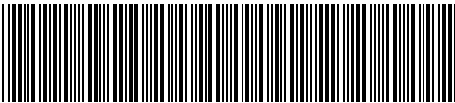
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I A. INFORMASI KINERJA

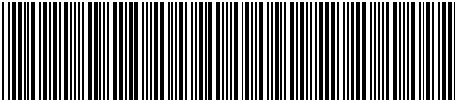


DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			303.466.000
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			303.466.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau			
	:	2. 02	Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau			
	:	3. 03	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)			
	:	4. 04	Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%)			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan	303.466.000
Rincian Output	:	01 ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.00	Rekomendasi Kebijakan	129.233.000
	:	02 ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.00	Rekomendasi Kebijakan	174.233.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9500-3316-9247-1362

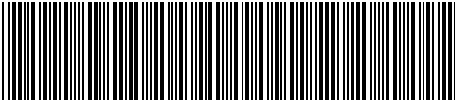
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	303.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	303.466.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

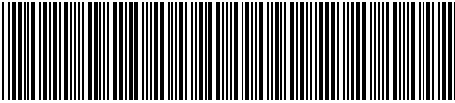
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	303.466	-	-	-	303.466	17 . 51	
146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	303.466	-	-	-	303.466		
01	RM	-	303.466	-	-	-	303.466	049	
JUMLAH		-	303.466	-	-	-	303.466		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

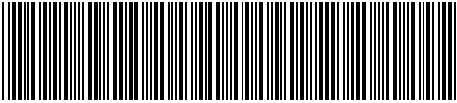
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	47.974	65.354	37.826	47.826	47.826	56.661	303.466
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	47.974	65.354	37.826	47.826	47.826	56.661	303.466
		Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	47.974	65.354	37.826	47.826	47.826	56.661	303.466
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	47.974	65.354	37.826	47.826	47.826	56.661	303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV A. B L O K I R



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

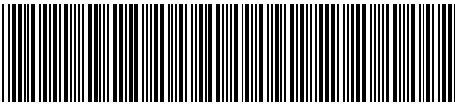
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9500-3316-9247-1362

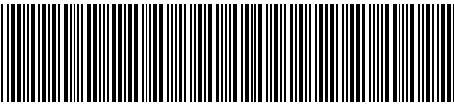
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 03
Tanggal : 10 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 303.466.000
Rp. 303.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 303.466.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 303.466.000

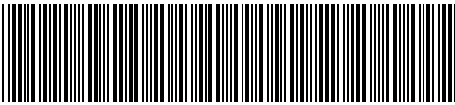
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I A. INFORMASI KINERJA

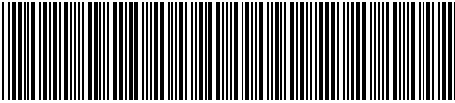


DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				303.466.000
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				303.466.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan	303.466.000
Rincian Output	:	01	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.00	Rekomendasi Kebijakan	129.233.000
		02	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.00	Rekomendasi Kebijakan	174.233.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025



DS:9500-3316-9247-1362

I B. SUMBER DANA

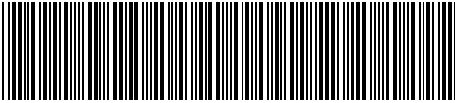
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	303.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	303.466.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

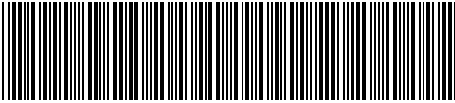
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	303.466	-	-	-	303.466	17 . 51	
146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	303.466	-	-	-	303.466		
01	RM	-	303.466	-	-	-	303.466	049	
JUMLAH		-	303.466	-	-	-	303.466		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

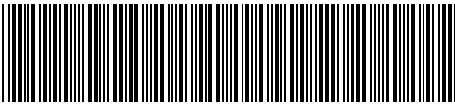
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	7.799	40.664	18.845	35.150	86.600	114.407	303.466
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	7.799	40.664	18.845	35.150	86.600	114.407	303.466
		Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	7.799	40.664	18.845	35.150	86.600	114.407	303.466
	146.06.IA.7662	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	7.799	40.664	18.845	35.150	86.600	114.407	303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV A. B L O K I R



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

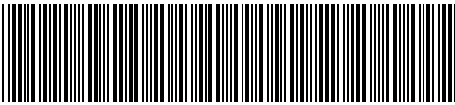
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9500-3316-9247-1362

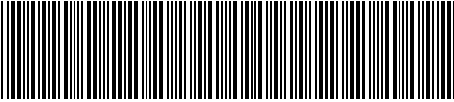
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04
Tanggal : 17 November 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
- 3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- 4. Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Sebesar : Rp. 303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 303.466.000
Rp. 303.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 303.466.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 303.466.000

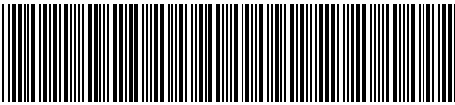
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I A. INFORMASI KINERJA

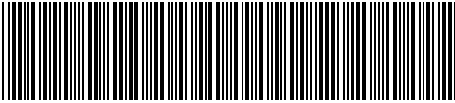


DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				303.466.000
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				303.466.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan	303.466.000
Rincian Output	:	01	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.00	Rekomendasi Kebijakan	129.233.000
		02	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.00	Rekomendasi Kebijakan	174.233.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9500-3316-9247-1362

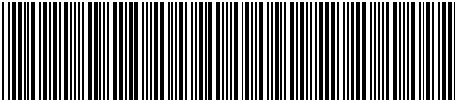
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	303.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	303.466.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
Kewenangan : (KP)

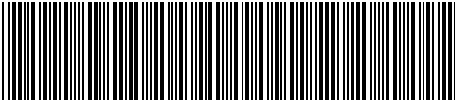
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	-	303.466	-	-	-	303.466	17 . 51	
146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	303.466	-	-	-	303.466		
01	RM	-	303.466	-	-	-	303.466	049	
JUMLAH		-	303.466	-	-	-	303.466		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

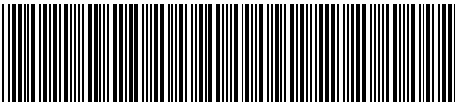
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691608	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	7.005	37.106	17.213	32.288	78.893	130.961	303.466
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	7.005	37.106	17.213	32.288	78.893	130.961	303.466
		Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	7.005	37.106	17.213	32.288	78.893	130.961	303.466
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	7.005	37.106	17.213	32.288	78.893	130.961	303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV A. B L O K I R



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

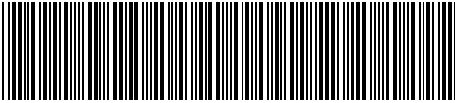
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait